BANK INDONESIA

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN NUSANTARA

AGUSTUS 2020

VOLUME 15 NOMOR 3 | ISSN: 2527 - 435X

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN NUSANTARA

AGUSTUS 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR iii

BAGIAN I 1
RINGKASAN PERKEMBANGAN TERKINI DAN PROSPEK EKONOMI DAERAH

BAGIAN II 7
PEREKONOMIAN SUMATERA

BOKS 1 20
POTENSI INDUSTRI PULP DAN KERTAS DI SUMATERA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

BAGIAN III 23
PEREKONOMIAN JAWA

BOKS 2 32
RELOKASI INDUSTRI SERTA KESIAPAN DAERAH DAN KAWASAN INDUSTRI DI JAWA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN INVESTASI

BAGIAN IV 35
PEREKONOMIAN KALIMANTAN

BOKS 3 44
OVERVIEW, TANTANGAN, DAN POTENSI INDUSTRI PETROKIMIA DI KALIMANTAN TIMUR

BAGIAN V 47
PEREKONOMIAN BALINUSRA

BOKS 4 57
TANTANGAN DAN POTENSI HILIRISASI TEMBAGA SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BALINUSRA

BAGIAN VI 61
PEREKONOMIAN SULAMPUA

BOKS 5 71
HILIRISASI PERTAMBANGAN NIKEL (INDUSTRI BATERAI) DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI TERDAMPAK COVID-19

BAGIAN VII 73
ISU STRATEGIS: MEMPERCEPAT PEMULIHAN INDUSTRI MANUFAKTUR TERDAMPAK COVID-19 MELALUI PENINGKATAN IKLIM USAHA UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERBAIKAN TRANSAKSI BERJALAN

LAMPIRAN 81

BANK INDONESIA

Kata Pengantar

Berbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting di dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi ini dibagi menjadi lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Secara umum, dinamika perekonomian Indonesia pada triwulan II 2020 diwarnai dengan semakin meluasnya dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan pada kinerja perekonomian Indonesia selama periode laporan. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy) dibandingkan capaian triwulan I 2020 yang sebesar 2,97%. Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi di berbagai daerah. Sementara itu, kinerja ekspor yang masih tumbuh positif di sebagian besar wilayah, didorong permintaan khususnya dari Tiongkok terhadap beberapa komoditas ekspor seperti besi dan baja, bijh logam, serta pulp dan waste paper. Pertumbuhan ekonomi berbagai daerah diperkirakan membaik pada paruh kedua 2020, didorong kenaikan permintaan domestik sejalan relaksasi PSBB dan peningkatan realisasi fiskal sebagai stimulus. Perkembangan pada awal triwulan III 2020 memperkuat indikasi pemulihan permintaan domestik tersebut antara lain tercermin dari kenaikan indikator mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan online, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Perekonomian global yang diperkirakan membaik juga mendorong perbaikan prospek kinerja sektor eksternal dan pemulihan ekonomi di berbagai daerah.

Di sisi harga, realiasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di berbagai daerah pada triwulan II 2020 tetap rendah yang terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang lemah. Secara nasional, inflasi IHK pada akhir triwulan II 2020 tercatat rendah yakni 1,96% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi periode akhir triwulan sebelumnya sebesar 2,96% (yoy). Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi volatile food (VF) dan inflasi inti di sebagian besar wilayah menurun didukung pasokan yang memadai dari panen raya, distribusi yang terjaga, dan pengaruh harga komoditas pangan global yang rendah. Sementara itu, inflasi kelompok administered price juga tetap rendah meski sedikit meningkat karena kenaikan harga jual aneka rokok dan tarif angkutan. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dalam sasarannya sebesar 3,0% ± 1% pada 2020 dan 2021.

Publikasi Laporan Nusantara edisi Agustus 2020 kali ini juga mengangkat isu khusus bertema "Mempercepat Pemulihan Industri Manufaktur terdampak Covid-19 melalui Peningkatan Iklim Usaha untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Transaksi Berjalan". Di tengah perlambatan kinerja industri manufaktur akibat dampak trade war serta meluasnya pandemi Covid-19, beberapa komoditas ekspor manufaktur tetap memiliki daya tahan. Selain itu, terdapat peluang penguatan industri manufaktur, baik dari sisi penguatan ekspor maupun penguatan local value chain yang secara gradual dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih tinggi. Strategi pengembangan dan penguatan manufaktur untuk mempercepat pemulihan sektor manufaktur akan diulas lebih mendalam pada Laporan Nusantara edisi ini.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberi manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, serta menjadi salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

Jakarta, 2 September 2020
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Aida S. Budiman
Asisten Gubernur

BAGIAN 1
RINGKASAN PERKEMBANGAN TERKINI DAN PROSPEK EKONOMI DAERAH

Perkembangan Terkini Perekonomian Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan II 2020

COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan II 2020, terutama pada permintaan domestik. Perkembangan ini dipengaruhi oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, sehingga kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi, serta pelemahan sektor tenaga kerja. COVID-19 juga mengubah perilaku konsumsi swasta pada periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) yang tidak setinggi pola historis. Demikian pula dari sisi investasi, yang terkendala akibat mobilitas tenaga ahli dan logistik. Sementara itu, peran fiskal daerah dalam perekonomian diprakirakan terbatas akibat sumber penerimaan yang menurun serta proses *refocusing* dan realokasi untuk COVID-19. Dinamika tekanan perekonomian tercermin pada kinerja perekonomian di hampir seluruh daerah yang terkontraksi, kecuali Papua dan Papua Barat (Gambar I.1). Tekanan permintaan domestik, khususnya konsumsi swasta terkontraksi di seluruh wilayah dengan kontraksi terdalam terjadi di Jawa.

Kinerja net ekspor di sebagian besar wilayah tumbuh positif pada triwulan II 2020. Perkembangan ini lebih dipengaruhi oleh impor yang menurun seiring melemahnya permintaan domestik. Penurunan aktivitas konsumsi dan terhambatnya realisasi sejumlah proyek investasi di berbagai daerah mengakibatkan impor barang konsumsi, bahan baku maupun barang modal melemah. Di sisi lain, kinerja ekspor juga terkontraksi, meski tidak sedalam tekanan yang terjadi pada impor. Hal ini dipengaruhi oleh indikasi perbaikan ekonomi di beberapa negara, terutama Tiongkok. Pemulihan ekonomi Tiongkok berdampak positif pada kinerja ekspor daerah, terutama besi baja dari wilayah Sulampua sebagai kontributor terbesar, serta logam dasar lainnya dari Jawa dan Sumatera. Permintaan Tiongkok juga mendorong peningkatan ekspor beberapa produk di daerah pada akhir triwulan II 2020 seperti produk kertas dari Jawa dan Sumatera, alas kaki dari Jawa, serta batubara dari Kalimantan. Namun, perbaikan kinerja ekspor lebih lanjut tertahan oleh kontraksi ekspor jasa karena aktivitas wisatawan mancanegara yang berkurang signifikan akibat covid-19, terutama di wilayah Balinusra.

Tekanan permintaan domestik dan masih terbatasnya kinerja eksternal, menekan kinerja lapangan usaha (LU) utama di berbagai daerah. Penurunan terutama pada kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Secara umum, kinerja LU PHR terkontraksi di seluruh wilayah terutama akibat turunnya aktivitas perdagangan besar maupun ritel, serta LU lainnya terkait aktivitas pariwisata, seperti penyediaan akomodasi dan restoran. Selain PHR, kinerja LU konstruksi juga terkontraksi seiring tertundanya sejumlah proyek investasi bangunan di berbagai daerah. Turunnya permintaan domestik dan eksternal pada akhirnya menekan kinerja LU industri pengolahan yang juga melambat di seluruh wilayah. Khusus di Papua dan Papua Barat yang masih mencatat pertumbuhan ekonomi positif, masing-masing ditopang oleh kinerja produksi tambang tembaga dan industri LNG. Di sisi lain, kinerja sektor pertanian tumbuh positif di seluruh wilayah didukung pergeseran panen raya, terutama bahan pangan.

Tekanan perekonomian daerah paling dalam terjadi di wilayah Jawa, terutama akibat melemahnya permintaan domestik. Perekonomian Jawa pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sejalan dengan penurunan aktivitas konsumsi swasta yang cukup dalam dibandingkan wilayah lain. Hal ini dipengaruhi implementasi PSBB di sejumlah daerah di Jawa guna menekan penyebaran Covid-19. Lebih lanjut, aktivitas produksi menurun sehingga mengakibatkan tekanan pada sektor ketenagakerjaan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Investasi juga melemah akibat tertundanya pembangunan beberapa proyek strategis nasional (PSN), diantaranya KA cepat Jakarta-Bandung, Proyek Tanggul Pantai Jakarta dan Bendungan Karian. Selain itu, penurunan investasi juga dipengaruhi oleh proses konsolidasi korporasi akibat tekanan perekonomian sehingga diikuti oleh penurunan belanja modal. Kontraksi juga terjadi pada konsumsi pemerintah akibat penyesuaian alokasi belanja untuk penanganan COVID-19, yang antara lain pada realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) yang lebih rendah – tidak semua golongan jabatan memperoleh alokasi THR. Di sisi lain, net ekspor masih tumbuh positif akibat penurunan impor yang cukup dalam, serta ditopang masih positifnya permintaan beberapa komoditas seperti produk emas batangan di Jawa Timur dan besi baja di Banten. Dari sisi LU, penurunan permintaan domestik dan eksternal menekan kinerja LU utama, terutama industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Perlambatan ekonomi lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja LU informasi dan komunikasi yang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas kebutuhan data dan transaksi digital. Di samping itu, LU pertanian di berbagai daerah di Jawa juga tumbuh positif akibat panen raya sejumlah komoditas pangan.

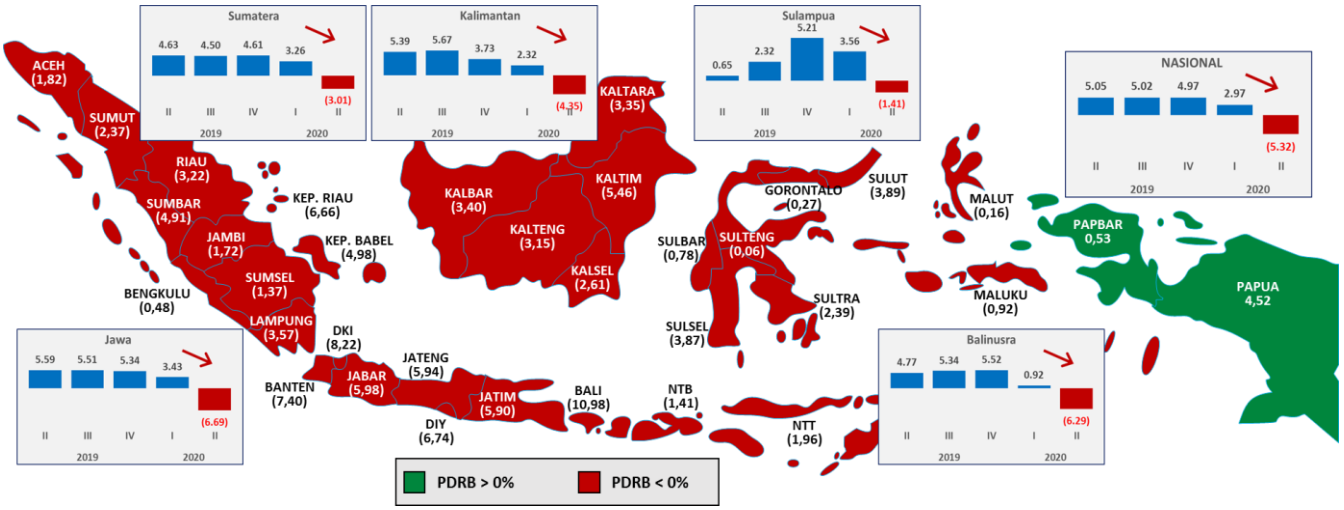

Sumber: BPS, diolah

Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan II 2020 (% yoy)

Tekanan perekonomian yang cukup dalam juga dialami wilayah Balinusra, terutama karena melemahnya aktivitas pariwisata. Jumlah kunjungan wisman yang terus menurun sejak triwulan I 2020, menghentikan kegiatan seluruh lapangan usaha yang terkait dengan aktivitas pariwisata. Hal ini mengakibatkan sumber penerimaan masyarakat di Balinusra menurun signifikan. Selain itu, investasi juga terkontraksi seiring dengan tertundanya pengerjaan beberapa proyek, diantaranya pembangunan beberapa hotel di Nusa Dua dan Mandalika, serta proyek *smelter* di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kinerja konsumsi pemerintah juga terkontraksi sejalan dengan realokasi anggaran dan penurunan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak. Di sisi lain, kinerja net ekspor tumbuh positif terutama karena turunnya kebutuhan impor dan perbaikan ekspor tembaga dari NTB. Namun, dalamnya penurunan ekspor jasa karena penurunan kunjungan wisman di masa pandemi menyebabkan perbaikan kinerja net ekspor menjadi terbatas. Dari sisi LU, penurunan kinerja pariwisata berdampak pada penurunan LU akomodasi makanan dan minuman, serta LU perdagangan. Selain itu, kinerja LU konstruksi juga melambat sejalan dengan perlambatan investasi bangunan. Namun, kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU pertanian dan LU pertambangan yang tetap tumbuh positif, terutama di NTB.

Perekonomian Sumatera tercatat tumbuh negatif pada triwulan II 2020 terutama akibat turunnya permintaan domestik. Aktivitas konsumsi swasta melemah seiring dengan penerapan PSBB di sejumlah daerah – meski dengan cakupan wilayah yang lebih terbatas dibandingkan Jawa. Kondisi ini lebih lanjut berdampak pada efisiensi yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya penghentian sementara kegiatan operasional usaha dan penyesuaian kebijakan penggunaan tenaga kerja, seperti penyesuaian besaran nilai THR dan *unpaid leave*. Perlambatan investasi juga terjadi di wilayah Sumatera, antara lain proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Demikian pula dengan konsumsi pemerintah daerah yang tumbuh terbatas akibat menurunnya pendapatan dan terbatasnya realisasi program kerja dan belanja operasional. Di sisi lain, kinerja net ekspor masih tumbuh positif karena impor yang turun cukup dalam ditengah kinerja beberapa produk ekspor masih positif, seperti CPO di Riau, alat telekomunikasi di Kepulauan Riau, dan aluminium di Sumatera Utara. Dari sisi LU, kontraksi terjadi di hampir seluruh LU utama Sumatera, kecuali pertanian yang masih tumbuh positif meskipun melambat.

Wilayah Kalimantan juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang negatif pada triwulan II 2020, terutama karena turunnya kinerja net ekspor. Net ekspor terkontraksi akibat melemahnya kinerja ekspor batubara karena permintaan Tiongkok yang turun seiring kinerja industri yang melemah sehingga berdampak pada penurunan kebutuhan energi, meskipun pada akhir triwulan II 2020 mulai membaik. Dari sisi domestik, sebagaimana terjadi wilayah lain konsumsi swasta maupun pemerintah juga mengalami kontraksi. Demikian pula kinerja investasi yang melemah karena penundaan beberapa proyek, diantaranya pembangunan PLTA di Kalimantan Utara dan pembangunan *smelter* alumina tahap II di Kalimantan Barat. Dari sisi LU, kontraksi pertumbuhan terjadi di hampir seluruh LU utama, terutama pertambangan dan PHR. Kontraksi lebih dalam tertahan oleh kinerja LU pertanian yang tumbuh positif didukung pergeseran panen raya terutama bahan pangan.

Perekonomian Sulampua mengalami pertumbuhan negatif, meskipun tidak sedalam wilayah lainnya karena ekspor yang masih tumbuh solid. Kontraksi perekonomian dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi swasta, tertundanya sejumlah investasi korporasi, serta dukungan belanja konsumsi pemerintah yang terbatas. Meski demikian, kinerja ekspor yang masih positif dapat menahan penurunan ekonomi lebih lanjut. Positifnya kinerja ekspor di wilayah ini terutama ditopang oleh permintaan produk besi baja yang merupakan turunan dari biji nikel yang masih kuat dari Tiongkok. Dari sisi produksi, peningkatan ekspor juga didukung oleh beroperasinya sejumlah lini produksi baru sejak akhir triwulan IV 2019, diantaranya smelter dan industri besi baja baru di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Selain produk besi baja, dorongan ekspor Sulampua juga bersumber dari meningkatnya produksi tambang bawah tanah Papua serta produksi LNG di Papua Barat. Dari sisi LU, kontraksi perekonomian Sulampua pada triwulan II 2020 terutama disebabkan oleh kinerja sektor perdagangan dan

konstruksi seiring aktivitas masyarakat yang terbatas dan tertundanya sejumlah proyek investasi. Namun, kontraksi lebih dalam tertahan oleh kinerja LU pertambangan, terutama produksi tembaga di Papua.

Sejalan dengan melemahnya kinerja perekonomian, permintaan terhadap pembiayaan kredit perbankan juga melambat di sebagian besar wilayah. Kredit tumbuh 1,6% (yoy) pada akhir triwulan II 2020, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,1% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan kredit yang melambat tersebut terjadi di hampir seluruh daerah. Perlambatan kredit terutama dipengaruhi oleh melambatnya kredit ke LU manufaktur dan PHR, sejalan dengan melambatnya kinerja LU tersebut. Di sisi lain, risiko NPL masih terjaga dibawah 5% di seluruh wilayah meski peningkatan NPL pada beberapa sektor tertentu mulai terindikasi di sejumlah wilayah. Kondisi ini sejalan dengan kinerja perekonomian yang melambat di seluruh wilayah.

Tracking Perekonomian Daerah Triwulan III 2020

Pemulihan ekonomi di seluruh daerah diprakirakan mulai terjadi pada triwulan III 2020. Perkembangan indikator perekonomian pada Juli 2020 menunjukkan peningkatan sejalan dengan pelonggaran PSBB di berbagai daerah. Hal ini terindikasi dari kenaikan indikator dini seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan *online*, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Aktivitas investasi yang sempat tertunda telah dimulai kembali juga diperkirakan dapat mendorong perbaikan kinerja investasi, termasuk sejumlah komitmen relokasi investasi dari beberapa korporasi global. Selain itu, dukungan realisasi fiskal daerah dan pusat juga mendorong perbaikan kinerja konsumsi pemerintah. Dari sisi eksternal, perekonomian global yang mulai membaik diperkirakan mendorong perbaikan prospek kinerja ekspor daerah, terutama untuk tujuan Tiongkok. Kinerja positif ekspor pada Juli 2020 tercermin dari kenaikan ekspor sejumlah komoditas, seperti besi dan baja, serta bijih logam terutama dari Sulampua. Membaiknya kinerja permintaan domestik dan eksternal akan mendorong perbaikan kinerja LU utama di daerah, terutama kinerja LU perdagangan dan LU konstruksi. Di sisi lain, kinerja LU pertanian yang menjadi penahan perlambatan pada triwulan II 2020, diperkirakan melambat di Sumatera dan Jawa karena berakhirnya periode panen raya.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Penurunan aktivitas perekonomian di berbagai daerah tercermin dari volume transaksi sistem pembayaran yang melambat. Perputaran transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2020 tumbuh melambat. Secara volume, SKNBI tumbuh 0,2% (yoy) atau sebanyak 35,9 juta transaksi; lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan lalu 13,3% (yoy). Secara nominal transaksi SKNBI tumbuh 8,2% (yoy) atau tercatat sekitar Rp964,9 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,3% (yoy). Sementara itu, volume transaksi keuangan melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) turun 20% (yoy) atau mencapai 2,15 juta transaksi, menurun dibanding triwulan I 2020 yang turun 6,6% (yoy). Secara nominal, RTGS tumbuh 0,23% (yoy) atau mencapai Rp33,35 triliun, melambat dibandingkan triwulan I 2020 yang tumbuh 11,9% (yoy). Sementara itu, posisi uang yang diedarkan meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2020 sejalan dengan pola historis saat HBKN (Idulfitri).

Perkembangan Inflasi

Hingga akhir triwulan II 2020, realisasi inflasi di seluruh daerah tetap rendah dan terkendali. Secara nasional, inflasi IHK tercatat 1,96% (yoy) pada Juni 2020, lebih rendah dibandingkan pada akhir triwulan I 2020 yang sebesar 2,96% (yoy). Lebih rendahnya inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi *Volatile Food* (VF) dan inflasi inti di sebagian besar wilayah, serta minimalnya tekanan inflasi *Administered Prices* (AP). Penurunan inflasi VF terjadi di seluruh wilayah, terutama bersumber dari penurunan harga komoditas aneka cabai dan bawang putih seiring melimpahnya pasokan dan minimalnya kendala distribusi ditengah PSBB yang terjadi. Sementara itu, penurunan inflasi inti dipengaruhi oleh melambatnya tekanan permintaan domestik di berbagai daerah seiring terbatasnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat terkait penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang rendah, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi AP tetap rendah disertai deflasi tarif angkutan udara yang lebih landai daripada periode sebelumnya seiring dengan pelonggaran pembatasan penerbangan di sebagian daerah. Lebih landainya deflasi tarif angkutan udara tersebut terutama terjadi di Sumatera, Jawa, dan Sulampua. Terjaganya inflasi selama triwulan II 2020 juga tidak terlepas dari sinergi koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang berfokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Memasuki triwulan III 2020, tekanan inflasi masih tetap rendah seiring dengan terbatasnya permintaan domestik (Gambar I.2). Inflasi IHK secara nasional tercatat 1,54% (yoy) atau lebih rendah dari realisasi inflasi pada akhir triwulan II 2020. Inflasi yang lebih rendah tersebut masih dipengaruhi oleh perlambatan inflasi VF dan inflasi inti, sementara tekanan inflasi AP sedikit meningkat. Perlambatan inflasi VF di seluruh wilayah didukung oleh masih melimpahnya pasokan komoditas hortikultura seiring panen di beberapa sentra produksi, serta terjaganya stok beras di tengah permintaan yang masih terbatas. Inflasi inti cenderung melambat di seluruh wilayah seiring permintaan domestik yang masih terbatas, meski tertahan tekanan inflasi komoditas emas perhiasan dan biaya pendidikan. Sementara, inflasi AP tetap rendah walaupun sedikit meningkat di sebagian wilayah kecuali Sumatera dan Balinusra, akibat inflasi aneka rokok yang disertai melandainya deflasi tarif angkutan.

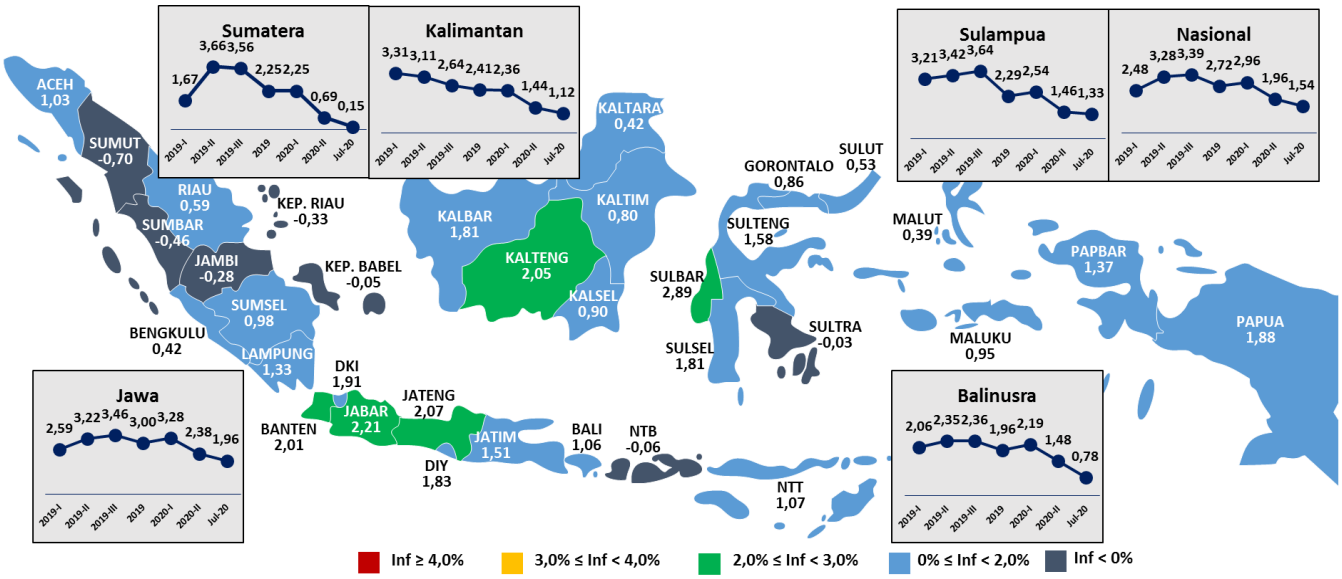

Sumber: BPS, diolah

Gambar I.2. Peta Inflasi Daerah, Juli 2020 (yoy)

Tetap rendahnya inflasi hingga Juli 2020 didukung oleh koordinasi pengendalian inflasi yang tetap solid di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi dilakukan terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah relaksasi PSBB. Di daerah, penguatan sinergi termasuk koordinasi antar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam kerangka kerja sama antardaerah, kolaborasi antara Pemda dengan perusahaan logistik untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok, penggunaan moda transportasi logistik alternatif (kereta api, kapal laut, dan pesawat udara), pengawalan dan pemantauan arus barang, prioritas bongkar muat bahan pangan, serta berlanjutnya pemanfaatan *platform* digital untuk produksi pertanian yang presisi dan perluasan pemasaran.

Prospek Perekonomian Daerah

Prospek Pertumbuhan Ekonomi 2020

Fase pemulihan perekonomian nasional diperkirakan dimulai pada triwulan III 2020. Dari sisi eksternal, dukungan pemulihan ekonomi nasional bersumber dari indikasi perbaikan perekonomian global, terutama dengan membaiknya perekonomian Tiongkok sejak triwulan II 2020 seiring mulai berkurangnya dampak COVID-19 dan realisasi stimulus fiskal. Ke depan, perekonomian negara-negara lainnya diperkirakan juga berangsur-angsur pulih. Hal ini terindikasi dari peningkatan mobilitas masyarakat, keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara, serta naiknya *purchasing managers index* (PMI) di beberapa negara maju dan berkembang. Perbaikan tersebut, akan menjadi penopang kinerja sektor eksternal di berbagai daerah. Dari sisi domestik, indikasi perbaikan permintaan domestik, juga tercermin pada berbagai indikator sejak Juli 2020, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan daring, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Pelonggaran PSBB diperkirakan mendukung perbaikan konsumsi dan investasi. Pemulihan permintaan domestik di seluruh wilayah juga diperkirakan mulai pada triwulan III 2020. Realisasi belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah, termasuk penyelenggaraan Pilkada pada akhir 2020, diperkirakan turut menopang pemulihan perekonomian.

Membaiknya permintaan domestik dan eksternal diperkirakan menopang pemulihan perekonomian Sumatera pada paruh kedua 2020. Kebijakan pelonggaran PSBB akan mendukung perbaikan konsumsi rumah tangga. Akselerasi belanja daerah juga diperkirakan meningkat, meski dengan pagu anggaran belanja yang lebih terbatas. Investasi yang sempat tertunda saat pandemi diperkirakan berlangsung kembali, antara lain PSN Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan pembangkit listrik, dan proyek swasta lainnya. Namun, investasi swasta baru diperkirakan masih tertahan karena pelaku usaha lebih cenderung melakukan proses konsolidasi. Sementara itu, produksi B30 akan terus didorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari sisi eksternal, permintaan komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) seperti CPO, karet, dan batu bara diperkirakan berangsung-angsur pulih, disertai dengan harga yang meningkat. Kinerja ekspor komponen elektronik yang menjadi salah satu komoditas ekspor utama di wilayah ini – khususnya Kepulauan Riau - diperkirakan juga tetap kuat ke depan. Di sisi lain, pemulihan permintaan domestik juga akan mendorong impor, terutama barang modal untuk investasi swasta dan bahan baku industri.

Pemulihan perekonomian Jawa terutama ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi RT diperkirakan membaik seiring pelonggaran PSBB di berbagai provinsi. Pembukaan kembali aktivitas usaha perdagangan ritel, serta penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan menopang pendapatan masyarakat yang bekerja di lapangan usaha tersebut. Realisasi belanja Pemerintah dan Pemerintah juga diperkirakan juga mendukung proses pemulihan, termasuk percepatan penyaluran bantuan sosial dan pencairan gaji ke 13 bagi PNS. Ke depan, aktivitas konsumsi masyarakat berpendapatan menengah tinggi menjadi kunci pemulihan perekonomian lebih lanjut. Investasi Pemerintah maupun swasta diperkirakan pulih secara gradual, terutama investasi bangunan. Rencana relokasi pabrik beberapa korporasi global ke beberapa kawasan industri di Jawa diperkirakan dapat turut menopang

kinerja investasi pada paruh kedua 2020. Kinerja sektor eksternal diperkirakan masih cukup kuat didukung perbaikan permintaan global yang mendukung ekspor LN, meski impor turut meningkat untuk memenuhi permintaan domestik baik konsumsi, investasi, maupun kebutuhan bahan baku industri.

Pemulihan perekonomian Kalimantan diperkirakan didorong perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Konsumsi rumah tangga diperkirakan mulai pulih pada triwulan III 2020 didukung pelonggaran PSBB, serta realisasi belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat. Investasi pemerintah dan swasta, antara lain pembangunan pembangkit listrik, PLTA dan smelter alumina, diperkirakan berlanjut kembali setelah sempat mengalami kendala operasional, karena mobilitas tenaga ahli dan logistik barang modal maupun barang impor. Potensi realisasi investasi di Kalimantan juga masih cukup besar, antara lain terkait hilirisasi batu bara serta pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Kinerja ekspor, khususnya batubara diperkirakan membaik ditopang permintaan Tiongkok seiring mulai pulihnya aktivitas industri yang berdampak pada peningkatan kebutuhan energi. Ekspor CPO ke Tiongkok dan India juga berpotensi meningkat dalam jangka pendek. Perbaikan ekspor tersebut turut didukung oleh peningkatan produksi tandan buah segar yang lebih baik karena kondisi cuaca yang lebih kondusif. Di sisi lain, sejalan dengan wilayah lainnya, kebutuhan impor juga akan meningkat sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, terutama konsumsi dan investasi.

Pemulihan perekonomian Balinusra diperkirakan berlangsung secara perlahan pada triwulan III 2020. Kinerja LU terkait pariwisata diperkirakan mulai pulih sebagaimana terindikasi dari meningkatnya kunjungan wisatawan domestik pada awal triwulan III 2020. Kondisi tersebut diperkirakan dapat menopang aktivitas konsumsi masyarakat yang bekerja pada LU terkait pariwisata. Konsumsi pemerintah daerah juga diperkirakan membaik, meski dari sisi pendapatan masih akan tertekan akibat terbatasnya aktivitas LU terkait pariwisata. Investasi, khususnya investasi bangunan diperkirakan membaik seiring kembali dimulainya pembangunan proyek perhotelan. Pemulihan kinerja sektor eksternal diperkirakan masih akan berjalan lambat, seiring terbatasnya kunjungan wisatawan mancanegara yang diperkirakan masih berlanjut hingga akhir tahun. Perbaikan kinerja eksternal diperkirakan ditopang oleh ekspor tembaga dan komoditas perikanan meski dampaknya relatif terbatas. Sementara itu, impor akan sedikit meningkat untuk memenuhi permintaan wisatawan domestik.

Pemulihan ekonomi Sulampua diperkirakan ditopang perbaikan permintaan domestik dan masih tetap kuatnya kinerja sektor eksternal. Pemulihan konsumsi RT diperkirakan akan dimulai pada triwulan III 2020 meski berlangsung secara gradual. Konsumsi pemerintah juga akan turut mendukung proses pemulihan tersebut. Realisasi belanja modal pemerintah pusat dan daerah diperkirakan dapat menopang kinerja investasi ke depan, meski beberapa proyek bendungan telah memasuki tahap akhir. Dari sisi swasta, investasi dalam rangka hilirisasi nikel juga diperkirakan menopang pemulihan investasi. Kinerja sektor eksternal Sulampua diperkirakan tetap kuat didukung oleh perbaikan dari sisi produksi, khususnya konsentrat tembaga Papua serta besi baja dari berbagai provinsi, ditopang oleh permintaan Tiongkok.

Di tengah tekanan perekonomian yang terjadi di seluruh wilayah, pandemi COVID-19 memberikan peluang bagi penguatan industri manufaktur. Pandemi COVID-19 di berbagai negara mengakibatkan disrupsi pada rantai pasokan industri global pasca tren *global outsourcing*. Hal ini mendorong berbagai korporasi untuk melakukan rekonfigurasi *sourcing strategy* dalam memenuhi permintaan, termasuk dengan cara melakukan relokasi sebagian kapasitas produksinya terutama ke negara-negara berkembang[1]. Perubahan perilaku tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung pemulihan pascapandemi sekaligus memperbaiki struktur perekonomian dan transkasi berjalan nasional, khususnya dengan menarik investasi dari korporasi manufaktur tersebut. Selain melalui investasi swasta, pemulihan perekonomian dalam jangka pendek juga perlu didukung oleh berbagai kebijakan untuk menopang kinerja industri manufaktur *existing*, terutama setelah dilonggarkannya PSBB. Penguatan industri manufaktur nasional untuk mendukung pertumbuhan dalam jangka pendek dan perbaikan transaksi berjalan akan diulas lebih lanjut pada **Bagian VII Isu Strategis: Mempercepat Pemulihan Industri Manufaktur Terdampak COVID-19 melalui Peningkatan Iklim Usaha untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Transaksi Berjalan.**

Prospek Inflasi 2020

Inflasi untuk keseluruhan tahun 2020 di berbagai daerah diprakirakan tetap rendah dan terkendali. Prakiraan inflasi yang tetap rendah ditopang oleh menurunnya tekanan inflasi pada kelompok inti dan VF seiring dengan permintaan yang masih belum kembali sekuat sebelum pandemi COVID-19. Pergeseran masa tanam yang sebelumnya diprakirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi VF justru berdampak pada peningkatan pasokan pangan pada paruh pertama 2020. Sementara itu, potensi kemarau pada paruh kedua diprakirakan minimal sehingga secara keseluruhan tetap kondusif mendukung perkiraan terjaganya produksi dan pasokan sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras dan aneka hortikultura. Selain itu, dukungan pengelolaan pasokan yang lebih intensif juga dapat memperkuat terjaganya pasokan pangan. Sementara itu, tekanan inflasi di paruh kedua tahun 2020 diprakirakan bersumber dari kelompok komoditas AP. Tekanan inflasi AP diperkirakan akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga jual eceran aneka rokok sejak awal tahun. Selain itu, terdapat potensi kenaikan tarif angkutan, khususnya angkutan udara, seiring pergeseran cuti bersama ke Desember 2020.

Untuk menjaga inflasi sesuai sasaran, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bank Indonesia secara konsisten terus mengarahkan

[1] Selengkapnya pada Oliver (2020); BCG (2020); Fitch Solution (2020).

ekspektasi inflasi untuk menjaga inflasi inti agar sesuai target sasaran melalui implementasi bauran kebijakan yang lebih akomodatif. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah juga terus diperkuat terutama untuk memitigasi risiko yang mungkin mengganggu stabilitas inflasi di tengah pandemi COVID-19, baik di tingkat pusat dan daerah. Sejumlah langkah pengendalian inflasi yang dilakukan akan terus diperkuat. Di tingkat pusat beberapa kebijakan tetap ditempuh untuk menjaga produksi pangan di tengah kemarau tahun 2020, pemberian subsidi distribusi dalam rangka intervensi penyaluran pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit, dan subsidi biaya sewa gudang untuk memberikan kesempatan kepada petani melakukan tunda jual. Selain itu, pemanfaatan kanal digital juga terus dioptimalkan untuk mendukung kelancaran distribusi seperti implementasi aplikasi belanja daring Toko Tani Indonesia Center oleh Kementerian Pertanian dan toko online panganandotcom oleh Bulog. Di tingkat daerah, koordinasi antardaerah juga terus diperkuat melalui forum koordinsi lintas wilayah untuk menyepakati langkah-langkah bersama guna menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Ke depan, koordinasi pengendalian inflasi akan terus difokuskan pada upaya memperkuat ketersediaan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi, antara lain melalui konsolidasi informasi stok pangan antar daerah, kerjasama pemanfaatan kanal digital untuk distribusi serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan.

BAGIAN 2
PEREKONOMIAN SUMATERA

Perekonomian Sumatera pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -3,01% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar 3,26% (yoy). Penurunan kinerja ekonomi dipengaruhi oleh kontraksi permintaan domestik sebagai dampak pandemi COVID-19, di tengah kinerja net ekspor yang masih positif. Di sisi lapangan usaha (LU), seluruh LU utama mengalami kontraksi, kecuali pertanian. Perkembangan ini tercermin pula dari aktivitas transaksi sistem pembayaran yang mengalami perlambatan. Sementara itu, ketahanan korporasi masih terjaga meski mengalami tekanan sejak triwulan I 2020, tercermin dari risiko kredit korporasi pada perbankan daerah yang masih berada dalam batas aman.

Memasuki triwulan III 2020, ekonomi Sumatera diprakirakan mengalami perbaikan meski terbatas, ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Dari sisi LU, perbaikan kinerja ekonomi terutama ditopang oleh LU pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya akibat tekanan yang terjadi pada paruh pertama, sehingga berdampak pada kinerja seluruh LU yang menurun.

Di sisi inflasi, inflasi Sumatera hingga triwulan II 2020 tercatat 0,69% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2020 sebesar 2,25% (yoy). Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok barang terkait pangan serta terkendalinya inflasi kelompok barang terkait berbagai kebutuhan rumah tangga. Inflasi pada triwulan III 2020 diprakirakan masih akan tetap rendah walaupun sedikit meningkat karena kenaikan harga hortikultura serta membaiknya permintaan sejalan dengan perbaikan aktivitas perekonomian. Inflasi wilayah Sumatera hingga akhir 2020 diprakirakan lebih rendah dari tahun 2019 seiring permintaan yang masih terbatas ditengah terjaganya pasokan pangan dan terkendalinya ekspektasi harga secara keseluruhan. Lebih dari itu, Pemerintah dan Bank Indonesia di seluruh provinsi di Sumatera akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan capain inflasi pada level yang rendah dan stabil.

Perekonomian Sumatera[2] pada triwulan II 2020 terkontraksi dipengaruhi penurunan permintaan domestik akibat COVID-19, di tengah kinerja net ekspor yang masih positif. Pertumbuhan ekonomi Sumatera tercatat -3,01% (yoy), setelah tumbuh 3,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel II.1). Penerapan implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19 dan larangan mudik saat Idulfitri menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan konsumsi swasta. Terbatasnya aktivitas publik juga berdampak pada terbatasnya realisasi anggaran belanja operasional maupun belanja modal pemerintah daerah. Hal ini turut dipengaruhi oleh tidak optimalnya kinerja pendapatan daerah baik yang bersumber dari pajak maupun dana perimbangan. Sejalan dengan menurunnya penjualan, rencana investasi bangunan maupun non-bangunan milik perusahaan swasta ikut mengalami penundaan, khususnya di Sumut, Babel, Kepri, dan Aceh. Di sisi lain, kinerja net ekspor tercatat meningkat seiring dengan penurunan ekspor yang tidak sedalam kontraksi impor. Ekspor komoditas utama seperti *crude palm oil* (CPO), karet (Sumsel, Sumut), elektronik (Kepri), serta batu bara (Sumsel, Aceh) mengalami kontraksi pada triwulan II 2020. Hal tersebut disertai kontraksi impor yang lebih besar seiring melemahnya permintaan untuk seluruh kategori barang impor yaitu barang konsumsi, barang modal, serta barang antara.

Di sisi LU, kontraksi pertumbuhan terjadi di hampir seluruh LU utama, kecuali LU pertanian. Kinerja LU pertambangan (Riau, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Aceh), serta LU industri pengolahan berbasis komoditas sumber daya alam (SDA) seperti CPO, *crumb rubber* (Sumsel, Jambi, Sumut), serta logam timah (Babel) mengalami tekanan karena penurunan permintaan dan harga. Kinerja LU konstruksi melambat sejalan dengan terbatasnya realisasi belanja infrastruktur serta tendensi *wait and see* dari pihak swasta. Sementara itu, LU perdagangan mencatat kontraksi yang cukup dalam akibat penurunan permintaan domestik dan penurunan kinerja pariwisata. Di sisi lain, LU pertanian masih mampu tumbuh positif meskipun melambat. Perlambatan usaha pertanian terjadi karena menurunnya produksi komoditas perkebunan utama yaitu sawit dan karet, di tengah berakhirnya panen raya padi di beberapa daerah sentra (Aceh, Sumbar, Sumsel).

Tabel II.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera (% yoy)

Provinsi	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Aceh	3.22	5.68	4.06	5.43	4.61	3.88	3.71	3.77	5.21	4.15	3.17	(1.82)
Sumatera Utara	4.73	5.27	5.38	5.30	5.18	5.31	5.25	5.11	5.21	5.22	4.65	(2.37)
Sumatera Barat	4.73	5.11	5.26	5.51	5.16	4.85	5.05	5.17	5.13	5.05	3.90	(4.91)
Riau	2.88	2.37	2.98	1.30	2.37	2.89	2.83	2.73	2.91	2.84	2.24	(3.22)
Kep. Riau	4.50	4.55	3.75	5.49	4.58	4.79	4.64	4.92	5.21	4.89	2.06	(6.66)
Bengkulu	5.10	5.11	4.99	4.76	4.99	5.08	5.00	4.98	4.79	4.96	3.80	(0.48)
Jambi	4.62	4.80	4.67	4.85	4.74	4.69	4.86	4.52	3.59	4.40	1.87	(1.72)
Sumatera Selatan	5.86	6.07	6.14	6.07	6.04	5.69	5.81	5.66	5.69	5.71	4.98	(1.37)
Kep. Bangka Belitung	2.52	4.52	7.09	3.71	4.46	2.81	3.45	3.03	3.99	3.32	1.35	(4.98)
Lampung	5.09	5.35	5.19	5.38	5.25	5.21	5.61	5.16	5.07	5.27	1.74	(3.57)
Sumatera	**4.35**	**4.66**	**4.71**	**4.47**	**4.55**	**4.57**	**4.63**	**4.50**	**4.61**	**4.57**	**3.26**	**(3.01)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Memasuki triwulan III 2020, perekonomian Sumatera diprakirakan membaik seiring pelonggaran PSBB.

[2] Cakupan asesmen wilayah Sumatera terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Lampung.

Meningkatnya aktivitas industri, perkantoran, dan pusat-pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, serta berlanjutnya program stimulus fiskal dan bantuan sosial diperkirakan menjadi faktor positif bagi konsumsi swasta mesti masih terbatas. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan upaya peningkatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk belanja modal. Investasi swasta diperkirakan kembali berjalan, terutama untuk investasi yang bersifat *multiyears*. Meski demikian, investasi baru diprakirakan masih tertahan karena pelaku usaha cenderung memprioritaskan pada upaya memulihkan penjualan. Kinerja ekspor diperkirakan membaik ditopang permintaan mitra dagang yang mulai pulih, serta perkiraan perbaikan harga komoditas terutama untuk CPO, karet, dan batubara. Sejalan dengan itu, kinerja impor diperkirakan meningkat terutama barang modal dan barang antara.

Dari sisi LU, perbaikan kinerja pada triwulan III 2020 diprakirakan terjadi di hampir seluruh LU utama Sumatera. LU industri pengolahan diprakirakan tumbuh meningkat didorong oleh perbaikan kinerja CPO, *oleochemical*, *crumb rubber*, logam dasar, serta produk kertas. Hal ini terindikasi dari hasil *liaison* kepada pelaku usaha (Sumut dan Riau). Untuk komoditas CPO, peningkatan kinerja juga ditopang oleh meningkatnya kebutuhan *fatty acid methyl ester* (FAME) terkait program B30, ketersediaan stok bahan baku dan kenaikan harga. Kinerja LU konstruksi dan perdagangan diprakirakan membaik sejalan dengan peningkatan aktivitas konsumsi dan investasi pada triwulan III 2020. Kinerja LU pertambangan diperkirakan membaik dibandingkan triwulan II 2020 terutama untuk komoditas tambang utama yakni minyak dan gas bumi (migas), batubara dan timah, ditopang perbaikan permintaan dan harga. Sementara itu, kinerja LU pertanian diprakirakan tetap tumbuh positif meski melambat akibat masuknya musim tanam padi di Sumsel. Selain itu, banjir yang terjadi di sejumlah areal lahan pertanian di Sumatera diperkirakan memengaruhi kinerja LU pertanian pada triwulan III 2020.

Kinerja Sisi Penggunaan

Konsumsi Swasta

Pada triwulan II 2020, konsumsi swasta terkontraksi seiring pembatasan aktivitas masyarakat yang menekan sisi permintaan. Kontraksi konsumsi swasta dipengaruhi penurunan aktivitas ekonomi akibat penerapan pembatasan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat seiring Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penularan Covid-19, termasuk larangan mudik pada saat Idulfitri. Menurunnya konsumsi swasta berdampak pada aktivitas industri, pariwisata, dan perdagangan yang menurun sehingga pada gilirannya menyebabkan pelaku usaha melakukan berbagai efisiensi, terutama terkait penggunaan tenaga kerja seperti *unpaid leave*, pencairan nominal THR (tunjangan hari raya) yang lebih rendah, serta PHK (pemutusan hubungan kerja). Penurunan kinerja konsumsi tersebut sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun dibanding periode sebelumnya (Grafik II.1).

Survei konsumen menunjukkan adanya ekspektasi penurunan penghasilan hingga enam bulan yang akan datang sebagai dampak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga cenderung menahan konsumsi serta lebih memilih menggunakan tabungan untuk menopang kebutuhan mereka. Hal ini tercermin dari persepsi tingkat pengeluaran dan posisi tabungan yang menurun (Grafik II.2). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan penyaluran kredit rumah tangga tumbuh melambat pada triwulan II 2020 menjadi sebesar 2,26% (yoy). Meski demikian, kondisi ketahanan rumah tangga diperkirakan masih cukup baik, tercermin dari risiko *non performing loan* (NPL) yang terjaga di bawah 5%.

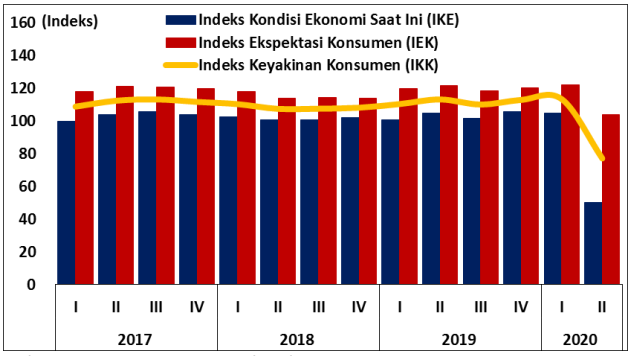

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik II.1. Indeks Keyakinan Konsumen

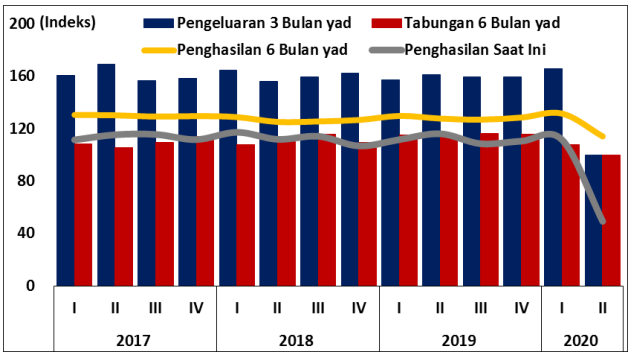

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik II.2. Indeks Kondisi Keuangan Konsumen

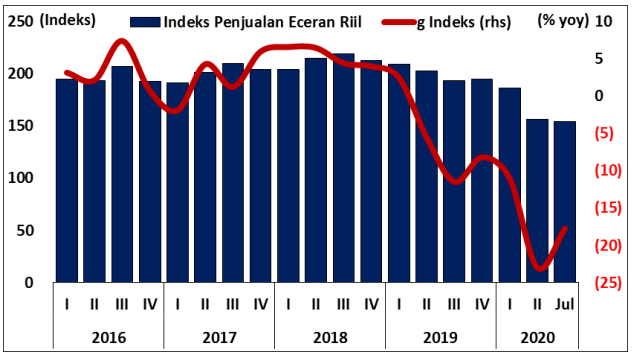

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (Medan), diolah

Grafik II.3. Perkembangan Indeks Penjualan Eceran Riil

Memasuki triwulan III 2020, konsumsi swasta diprakirakan membaik meski masih relatif terbatas. Perbaikan konsumsi rumah tangga sejalan dengan pelonggaran aktivitas sosial seiring transisi untuk adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, berlanjutnya stimulus fiskal melalui program bantuan sosial (bansos), pelaksanaan program padat karya, serta pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) tertentu diperkirakan dapat turut menopang kinerja konsumsi rumah tangga. Sementara itu,

beberapa tahapan kegiatan Pilkada serentak yang mulai dilaksanakan pada akhir triwulan III diperkirakan dapat mendorong konsumsi LNPRT di berbagai daerah. Perbaikan konsumsi tersebut sejalan dengan hasil survei Bank Indonesia yang menunjukkan membaiknya penjualan eceran pada awal triwulan III 2020 (Grafik II.3).

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2020 terkontraksi seiring terbatasnya realisasi program kerja dan menurunnya pendapatan daerah. Konsumsi pemerintah terkontraksi akibat terbatasnya realisasi program kerja dan belanja operasional seiring pembatasan kegiatan publik, terutama di Sumbar, Jambi, dan Sumsel. Selain itu, proses realokasi dan *refocusing* anggaran di tengah penyesuaian alokasi dana perimbangan juga turut menahan realisasi belanja. Meski demikian, upaya mendorong realisasi belanja untuk penanganan COVID-19 terus dilakukan untuk menahan penurunan konsumsi pemerintah yang lebih dalam. Di sisi lain, penurunan kinerja konsumsi pemerintah juga sejalan dengan penurunan pendapatan pemerintah daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi akibat pandemi. Penurunan pendapatan daerah tersebut sejalan dengan posisi giro Pemerintah di perbankan daerah yang mengalami penurunan (Grafik II.4).

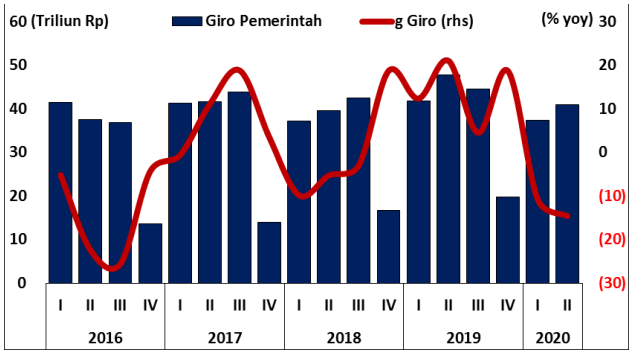

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik II.4. Giro Milik Pemerintah di Bank Umum

Memasuki triwulan III 2020, konsumsi pemerintah diprakirakan membaik dibanding triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut ditopang oleh realisasi belanja Pemda dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 serta penanganan dampak sosial dan ekonominya. Hal tersebut didukung kesiapan dari seluruh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menyusun revisi alokasi anggaran. Di samping itu, terdapat arahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda untuk mendorong realisasi program kerja prioritas non-COVID-19 yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbaikan konsumsi pemerintah juga akan ditopang oleh dimulainya tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak.

Investasi

Pada triwulan II 2020, investasi terkontraksi seiring dengan tertahannya realisasi investasi milik Pemerintah dan swasta. *Refocusing* anggaran akibat COVID-19 berdampak pada tertahannya penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera, antara lain proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun Kawasan Industri (KI). Selain itu, sejumlah kendala lain yang mengemuka antara lain terkait proses pembebasan lahan serta mobilisasi tenaga kerja dan material akibat penerapan PSBB. Di sisi lain, realisasi investasi swasta terkendala tendensi pelaku usaha yang bersikap *wait and see* mempertimbangkan perkembangan COVID-19 dan permintaan yang menurun. Kondisi ini sejalan dengan hasil *liaison* kepada pelaku usaha yang mengindikasikan adanya kecenderungan menunda investasi hingga pemulihan kondisi pandemi COVID-19 (Sumut, Babel, Kepri, Aceh). Melemahnya kinerja investasi juga tercermin dari penyaluran kredit investasi dari perbankan yang mengalami deselerasi (Grafik II.5).

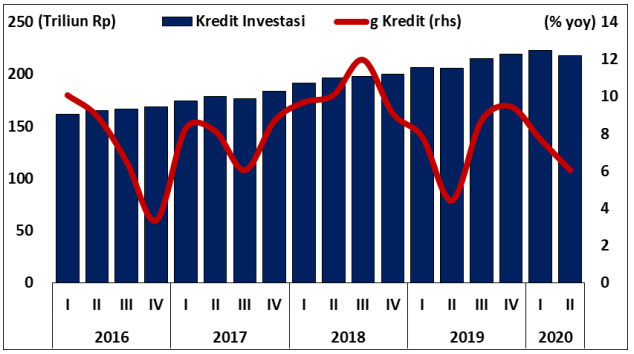

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik II.5. Penyaluran Kredit Investasi

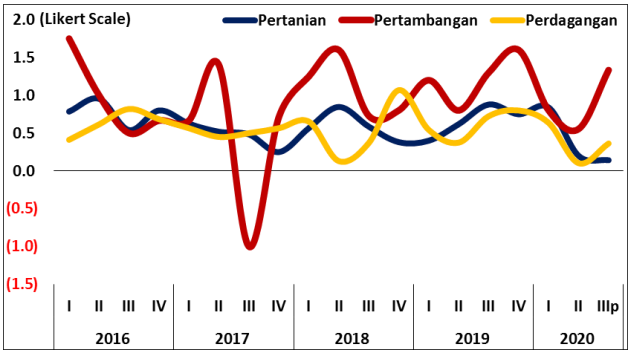

Sumber: Bank Indonesia

p) Prakiraan; Liaison sampai dengan Minggu II Agustus 2020

Grafik II.6. Perkembangan Investasi Pelaku Usaha

Kinerja investasi pada triwulan III 2020 diprakirakan mulai membaik. Perbaikan investasi didukung oleh berlanjutnya proyek JTTS meski tidak sebesar rencana semula. Penyelesaian JTTS pada 2020 ditargetkan untuk sejumlah ruas prioritas antara lain di Sumut, Sumbar, Riau, dan Aceh. Investasi bangunan fisik yang bersumber dari belanja daerah juga diprakirakan membaik meski masih terbatas sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mulai mendorong realisasi anggaran. Sementara itu, investasi swasta diperkirakan masih terbatas seiring dengan indikasi proses konsolidasi yang dilakukan korporasi sehingga menunda pembangunan gedung dan relokasi pabrik. Meski demikian, terdapat sejumlah proyek investasi yang terus berlangsung didukung oleh adanya kontrak jangka panjang *(multiyears)* dan kepastian permintaan. Beberapa proyek besar yang masih berlanjut antara lain adalah proyek-proyek pada usaha listrik, gas, dan air; sub-lapangan usaha industri pengolahan logam dasar; serta sub-lapangan usaha perkebunan. Perkiranaan perbaikan kinerja investasi tersebut sejalan dengan

hasil *liaison* yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Grafik II.6.)

Net Ekspor Barang dan Jasa[3]

Kinerja net ekspor pada triwulan II 2020 tumbuh meningkat dipengaruhi oleh kontraksi impor yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor. Kontraksi impor terjadi untuk seluruh kategori barang terutama barang konsumsi (Grafik II.7). Penurunan impor barang konsumsi dan barang modal sejalan dengan turunnya permintaan konsumsi swasta dan investasi. Sementara itu, penurunan impor barang antara (bahan baku) disebabkan oleh terbatasnya aktivitas produksi usaha *tradable (*Aceh, Kepri, Jambi, dan Sumsel). Di sisi lain, kontraksi ekspor terjadi karena turunnya permintaan eksternal untuk sebagian besar komoditas ekspor utama Sumatera (Grafik II.8). Penurunan ekspor terjadi antara lain untuk ekspor CPO ke Tiongkok dan Pakistan (Riau dan Sumut), karet ke Amerika Serikat (Sumsel dan Sumut), serta batu bara ke India dan Tiongkok (Sumsel dan Aceh). Selain itu, penurunan harga komoditas utama CPO, karet, dan batubara juga menjadi faktor lain yang menekan kinerja ekspor. Di sisi lain, ekspor pulp dan kertas masih tumbuh positif meski sedikit melambat. Perkembangan positif yang dialami oleh industri pulp dan kertas menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan untuk menopang pertumbuhan di masa pandemi (selengkapnya lihat Boks 1).

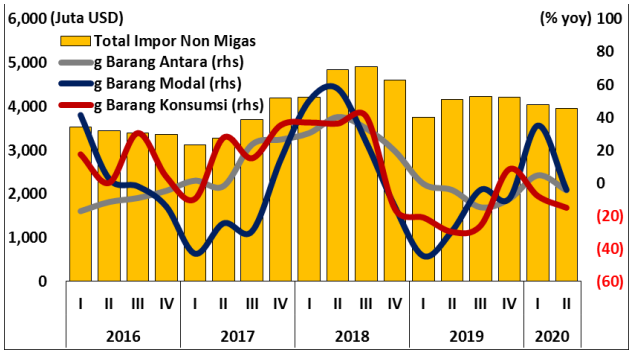

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.7. Nominal Impor Non-Migas Menurut Kategori

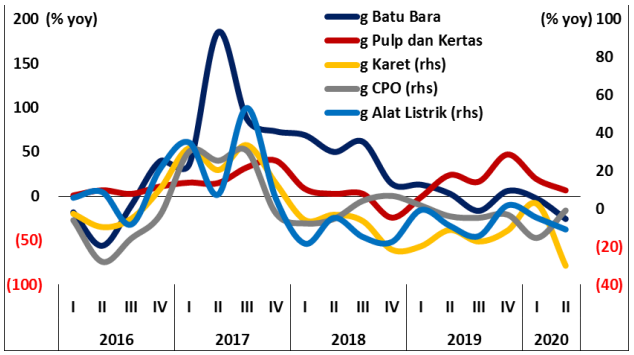

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.8. Volume Ekspor Non-Migas Komoditas Utama

Memasuki triwulan III 2020, kinerja ekspor dan impor diprakirakan mulai membaik. Tekanan terhadap ekspor luar negeri diprakirakan berkurang sejalan dengan perbaikan permintaan dari mitra dagang serta peningkatan harga komoditas perkebunan (Sumut, Sumsel, Jambi dan Riau). Peningkatan permintaan juga diperkirakan terjadi untuk produk elektronik (Kepulauan Riau) seiring mulai pulihnya perekonomian Singapura pasca kebijakan *circuit breaker*. Di sisi domestik, peningkatan ekspor didorong adanya kepastian kelanjutan program biodiesel serta mulai meningkatnya permintaan CPO dari industri pengolahan di Jawa. Prospek perbaikan kinerja ekspor tersebut sejalan dengan perkembangan *purchasing managers' index* negara importir yang menguat dan berada pada level ekspansi (di atas 50) (Grafik II.9). Sementara itu, sejalan dengan prakiraan perbaikan aktivitas perekonomian maka impor diperkirakan tumbuh meningkat didorong kebutuhan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, perkembangan impor yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbaikan ekspor sehingga perbaikan net ekspor diperkirakan masih terbatas.

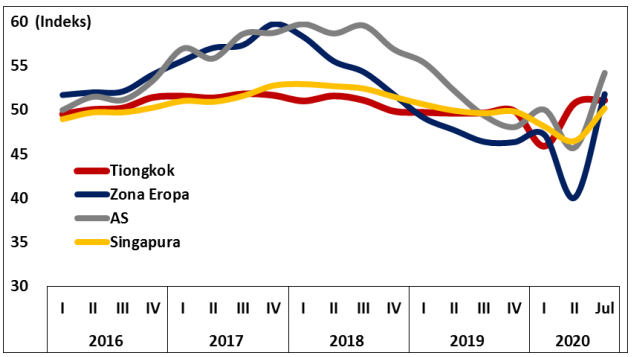

Sumber: Bloomberg dan Markit, diolah

Grafik II.9. *Purchasing Managers' Index* Mitra Dagang

Kinerja Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU pertanian pada triwulan II 2020 tetap tumbuh positif meski melambat seiring turunnya produksi perkebunan dan berakhirnya panen raya komoditas tanaman bahan makanan (tabama) di daerah sentra. Produksi kelapa sawit melambat sejalan dengan turunnya produktivitas akibat dampak musim trek dan rendahnya harga jual di Sumut dan Sumbar. Selain itu, produksi getah karet di Sumsel mengalami penurunan akibat permintaan domestik dan global yang terbatas. Sementara itu, produksi tabama relatif menurun pasca musim panen raya padi yang terjadi pada akhir triwulan sebelumnya di beberapa daerah seperti Aceh, Sumbar, dan Sumsel. Perlambatan pertumbuhan LU pertanian tersebut tercermin dari indeks nilai tukar petani (NTP) Sumatera yang menurun dibandingkan triwulan I 2020 (Grafik II.10).

Dari sisi korporasi, kinerja keuangan korporasi LU pertanian (publik) masih cukup baik mesti mengalami tekanan sejak triwulan I 2020. Hal ini tercermin dari rasio *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang berada di level negatif (Grafik II.11). Penurunan profitabilitas berdampak pada menurunnya *debt service coverage ratio* (DSCR) serta *interest coverage ratio* (ICR). Melemahnya kinerja keuangan dipengaruhi

[3] Wilayah Sumatera memiliki nominal net ekspor (total ekspor dikurangi impor) yang positif

oleh turunnya permintaan dan aktivitas produksi. Meski demikian, *current ratio* (CR) masih cukup baik, yaitu sebesar 1,11, yang mengindikasikan terjaganya likuiditas jangka pendek. Dari sisi perbankan, ketahanan korporasi pertanian juga masih cukup baik yang terlihat dari NPL-nya yang rendah yaitu sebesar 1,02% pada triwulan II 2020. Pertumbuhan kredit juga mencapai 7,33% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2020 (6,80%, yoy).

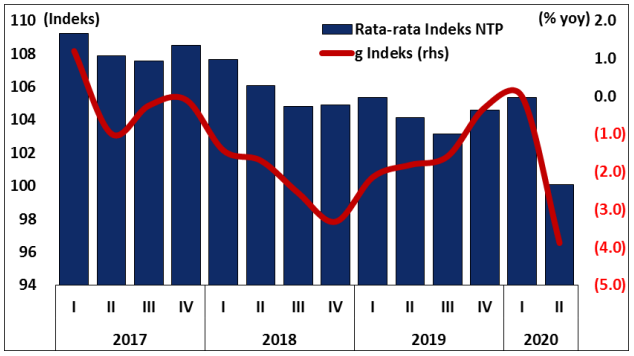

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik II.10. Nilai Tukar Petani

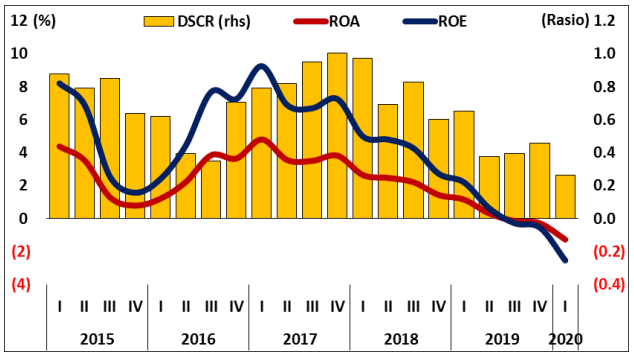

Sumber: Bloomberg (data sementara), diolah

Grafik II.11. Rasio Keuangan Korporasi Publik Usaha Pertanian di Sumatera

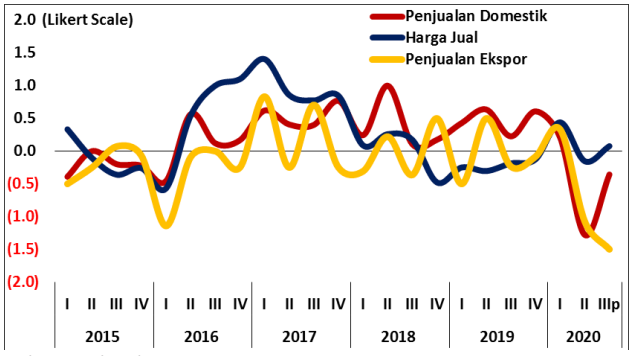

Sumber: Bank Indonesia

p) Prakiraan; Liaison sampai dengan Minggu II Agustus 2020

Grafik II.12. Perkembangan Kinerja Pelaku Usaha Pertanian

Memasuki triwulan III 2020, kinerja LU pertanian diprakirakan tumbuh melambat. Perlambatan ini dipengaruhi antara lain karena tibanya masa tanam padi di Sumsel, adanya banjir lahan hortikultura di Lampung, dan dampak negatif dari letusan gunung Sinabung di Sumut. Selain itu, produksi kopi juga diprakirakan menurun sejalan dengan permintaan global yang masih terbatas serta *oversupply* yang berdampak pada tren penurunan harga (Aceh, Sumut, dan Lampung). Meski demikian, perlambatan kinerja LU pertanian lebih lanjut diperkirakan tertahan oleh perbaikan harga dan permintaan CPO yang akan mendorong produksi tandan buah segar. Secara umum, hasil *liaison* menunjukkan adanya perbaikan permintaan domestik dan harga jual, di tengah masih menurunnya penjualan ekspor (Grafik II.12).

Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan II 2020, kontraksi LU pertambangan masih berlanjut disebabkan penurunan produksi dan harga. Penurunan kinerja pertambangan dan penggalian terutama disebabkan rendahnya capaian *lifting* migas di daerah produsen seperti Riau, Kepri, Sumsel, dan Jambi (Grafik II.13). Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh harga komoditas minyak yang mengalami tekanan akibat ketidakpastian perekonomian global. Selain itu, produksi batu bara di Aceh dan Sumsel juga mengalami penurunan sekitar 10% hingga 30% karena adanya pembatasan aktivitas penambangan akibat pandemi. Penurunan kinerja tambang timah juga terjadi di Babel karena permintaan ekspor dan harga komoditas timah yang masih rendah. Sejalan dengan itu, aktivitas penggalian pasir dan kaolin juga menurun seiring penurunan permintaan dari kegiatan konstruksi domestik (Babel).

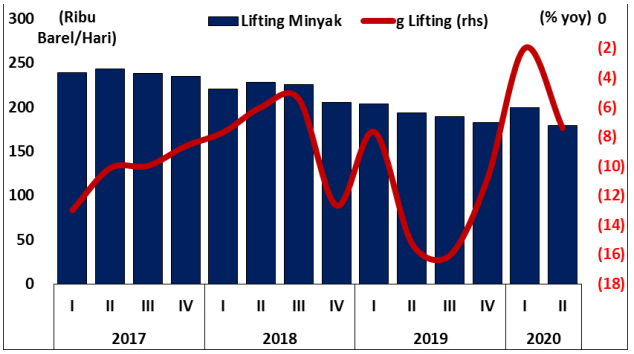

Sumber: SKK Migas (data dari empat titik lifting di Riau), diolah

Grafik II.13. *Lifting* Minyak

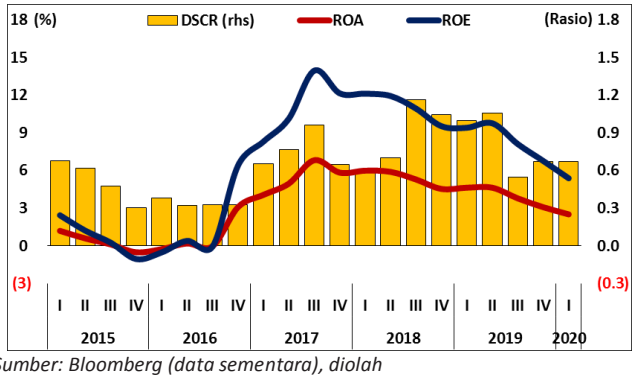

Sumber: Bloomberg (data sementara), diolah

Grafik II.14. Rasio Keuangan Korporasi Publik Usaha Pertambangan di Sumatera

Penurunan kinerja LU pertambangan sejalan dengan melemahnya kinerja keuangan korporasi tambang. Rasio profitabilitas tercatat melambat sejalan dengan menurunnya DSCR dan ICR (Grafik II.14). Meski demikian, likuiditas jangka pendek (CR) masih cukup baik ditopang *leverage* (DER) yang masih terjaga. Perkembangan ini lebih lanjut memengaruhi NPL tambang yang terindikasi mengalami peningkatan pada triwulan II 2020. Lebih lanjut, penyaluran kredit perbankan ke korporasi tambang tercatat mengalami kontraksi -21,35% (yoy) selama

periode laporan.

Kinerja LU pertambangan pada triwulan III 2020 diprakirakan mulai membaik ditopang oleh peningkatan permintaan dan harga. *Lifting* migas diprakirakan mulai sedikit meningkat, didorong oleh sentimen positif terhadap perkembangan harga minyak (Riau, Sumsel, Kepri, Jambi). Permintaan batubara domestik juga diprakirakan meningkat seiring dengan mulai meningkatnya konsumsi listrik domestik. Akan tetapi, perbaikan produksi batubara diperkirakan masih tertahan oleh terbatasnya permintaan dari Tiongkok dan India (Aceh, Sumsel, Lampung). Secara umum, proyeksi perbaikan kinerja usaha pertambangan juga didukung oleh realisasi harga komoditas ekspor utama Sumatera yang mulai menguat sejak awal triwulan III 2020 (Grafik II.15).

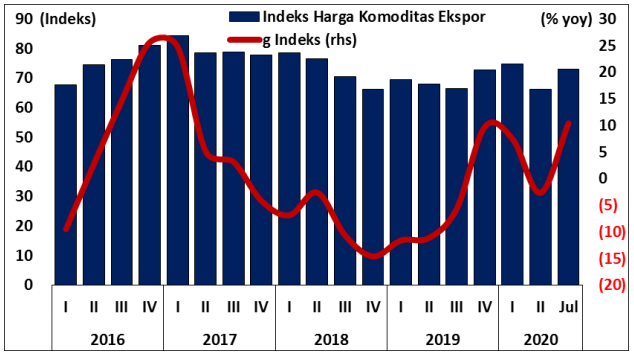

Sumber: World Bank, diolah

Grafik II.15. Indeks Harga Komoditas Ekspor Sumatera

Industri Pengolahan

LU industri pengolahan mengalami kontraksi pada triwulan II 2020 sejalan dengan pelemahan permintaan domestik dan global ditengah produksi yang terbatas. Produksi CPO mengalami penurunan akibat curah hujan yang cukup tinggi, belum optimalnya pemupukan, serta adanya *replanting* dari beberapa perusahaan besar. Selain itu, penurunan produksi juga dipengaruhi masih tingginya inventori. Penerapan PSBB juga berdampak pada turunnya permintaan domestik untuk konsumsi makanan dan bahan bakar minyak (BBM) dan produk olahan CPO (Sumbar dan Riau). Sementara itu, produksi olahan karet (Jambi dan Sumsel), serta barang elektronik (Kepri) mengalami penurunan terutama karena permintaan eksternal yang terbatas. Di sisi lain, kompetitor baru dari Vietnam, Myanmar, dan Laos turut memberi tekanan pada kinerja produk olahan karet. Beberapa jenis industri barang antara lainnya terindikasi tumbuh melambat karena turunnya permintaan dari industri pengolahan di Jawa. Perlambatan kinerja ini sejalan dengan penurunan utilisasi kapasitas produksi pada triwulan laporan (Grafik II.16).

Kontraksi LU industri pengolahan pada triwulan II 2020 berdampak pada kinerja keuangan korporasi yang menurun. Indikator profitabilitas (ROA, ROE) mencatat penurunan imbas dari terbatasnya permintaan global dan domestik akibat pandemi. Meski demikian, likuiditas (CR) serta kemampuan membayar beban keuangan (ICR) masih relatif terjaga. Di sisi lain, DSCR mengalami penurunan (Grafik II.17). Secara keseluruhan, aktivitas intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada debitur usaha industri pengolahan mengalami perlambatan. Pada akhir triwulan II 2020 pertumbuhan kredit tercatat 11,01% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 17,01% (yoy). Namun, NPL korporasi industri pengolahan masih relatif terjaga di bawah 5%.

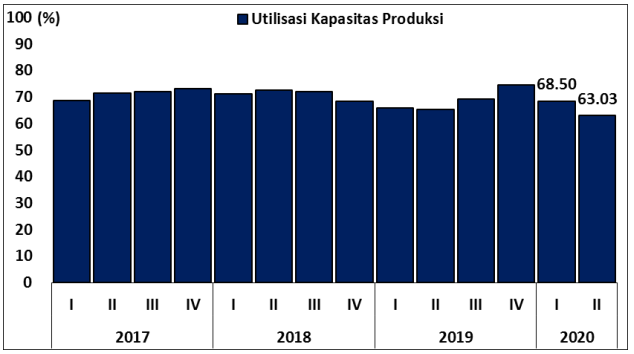

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Grafik II.16. Utilisasi Kapasitas Produksi Industri Pengolahan

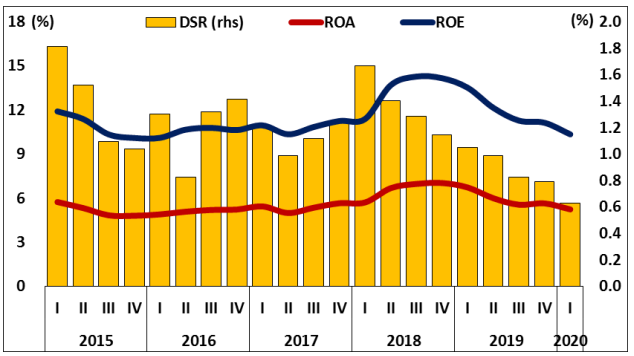

Sumber: Bloomberg (data sementara), diolah

Grafik II.17. Rasio Keuangan Korporasi Publik Usaha Industri Pengolahan di Sumatera

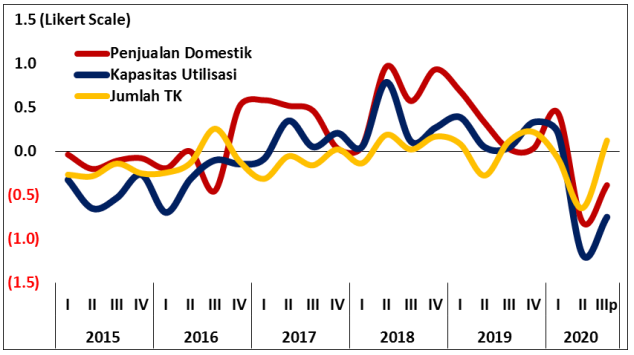

Sumber: Bank Indonesia

p) Prakiraan; Liaison sampai dengan Minggu II Agustus 2020

Grafik II.18. Perkembangan Kinerja Pelaku Usaha Industri Pengolahan

Memasuki triwulan III 2020, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tumbuh positif. Secara spasial, perbaikan kinerja diprakirakan terjadi di hampir seluruh daerah. Permintaan negara mitra dagang diprakirakan meningkat untuk hasil olahan karet di Sumsel, Sumut dan Jambi, serta barang elektronik di Kepri. Produksi CPO juga diprakirakan mengalami akselerasi sejalan dengan puncak panen sawit pada akhir triwulan di Riau. Sementara itu, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan mendorong perbaikan kinerja industri lainnya, seperti makanan dan minuman olahan, garmen, kayu, kertas, serta bahan kimia (Sumbar, Riau, dan Sumsel). Perbaikan tersebut sejalan dengan perkiraan meningkatnya kinerja penjualan domestik, kapasitas

utilisasi, serta jumlah tenaga kerja di LU industri pengolahan (Grafik II.18).

Konstruksi

Pada triwulan II 2020, LU konstruksi mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh terhambatnya aktivitas investasi sebagai dampak COVID-19. Penyelesaian proyek JTTS menghadapi sejumlah kendala terkait dengan *refocusing* anggaran pemerintah, *physical distancing* yang menghambat koordinasi pembebasan lahan, serta implementasi PSBB yang sempat menahan mobilisasi tenaga kerja dan material. Dampak covid-19 juga memengaruhi *cashflow* korporasi di LU konstruksi sehingga memengaruhi laju penyelesaian proyek JTTS, KEK, maupun KI. Beberapa rencana konstruksi swasta di Kepri, Aceh dan Sumut mengalami penundaan seiring kebijakan korporasi untuk melakukan efisiensi biaya di tengah pandemi. Penurunan kinerja LU konstruksi ini sejalan dengan hasil survei Bank Indonesia yang mengindikasikan adanya penurunan realisasi kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja, serta realisasi harga jual LU konstruksi (Grafik II.19).

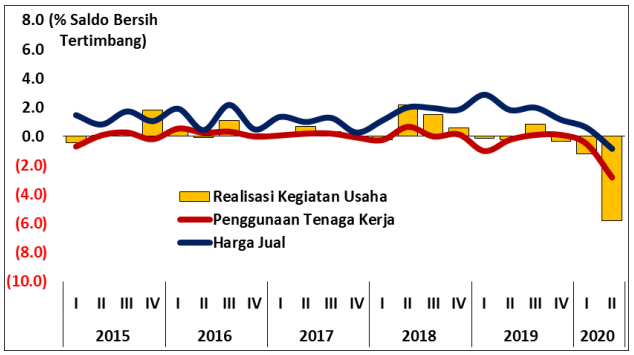

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Grafik II.19. Kinerja Usaha Konstruksi

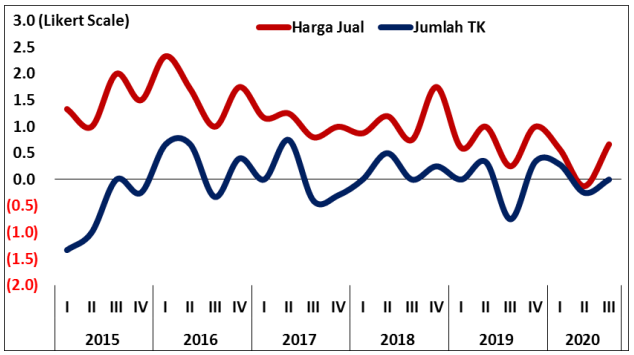

Sumber: Bank Indonesia

p) Prakiraan; Liaison sampai dengan Minggu II Agustus 2020

Grafik II.20. Perkembangan Kinerja Pelaku Usaha Konstruksi

Kinerja LU konstruksi pada triwulan III 2020 diprakirakan mulai membaik sejalan dengan berlanjutnya investasi. Perbaikan aktivitas konstruksi terutama ditopang oleh berlanjutnya penyelesaian pembangunan JTTS untuk ruas prioritas yang antara lain berada di Sumut dan Aceh. Sejumlah strategi ditempuh untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target yang telah mengalami revisi. Strategi tersebut antara lain penerapan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat di lokasi proyek, optimasi anggaran untuk ruas prioritas, serta memperkuat alternatif sumber pembiayaan. Sementara itu, proyek fisik swasta diperkirakan mulai membaik, khususnya untuk proyek *multiyears*. Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik di Sumsel, ekspansi kapasitas produksi di Sumut, dan pembangunan *smelter* di Babel. Membaiknya kinerja LU konstruksi mulai terlihat dari peningkatan harga dan jumlah tenaga kerja pelaku usaha (Grafik II.20).

Perdagangan

Sejalan dengan permintaan yang melambat, kinerja LU perdagangan selama triwulan II 2020 mengalami kontraksi. Penurunan LU ini terjadi di seluruh provinsi bersumber dari turunnya permintaan dan berkurangnya pendapatan rumah tangga. Aktivitas masyarakat selama periode Ramadhan-Idulfitri juga tidak setinggi tahun sebelumnya serta larangan mudik turut menahan permintaan. Di samping itu, kinerja LU perdagangan menghadapi tekanan dari penurunan kinerja pariwisata yang sangat dalam akibat kebijakan restriksi perjalanan dari sejumlah negara, tercermin dari penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) terutama di pintu masuk utama yaitu Kepri dan Sumut (Grafik II.21). Penurunan kinerja LU perdagangan juga dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan resesi yang terjadi pada beberapa mitra dagang. Kegiatan perdagangan ekspor antardaerah juga terpukul oleh turunnya permintaan dari industri pengolahan di Jawa.

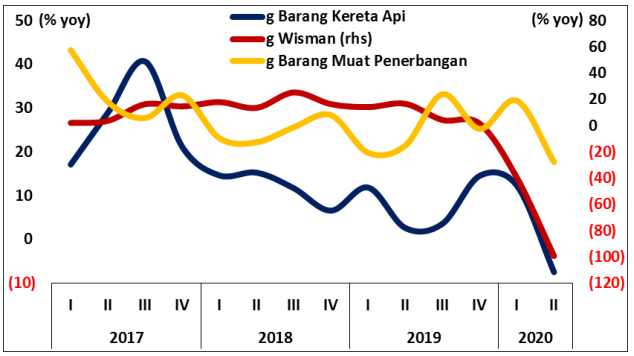

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik II.21. Perkembangan Wisatawan Mancanegara

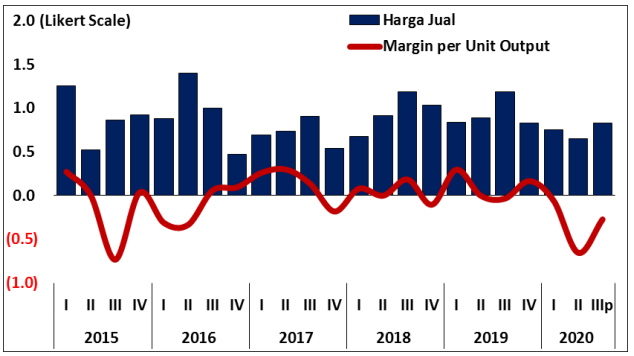

Sumber: Bank Indonesia

p) Prakiraan; Liaison sampai dengan Minggu II Agustus 2020

Grafik II.22. Perkembangan Kinerja Pelaku Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

Memasuki triwulan III 2020, LU perdagangan diprakirakan masih tertekan namun relatif membaik dibanding triwulan sebelumnya. Relaksasi pembatasan aktivitas sosial diperkirakan dapat mendorong pemulihan aktivitas perdagangan, meskipun diprakirakan belum akan kembali pada level sebelum pandemi

COVID-19. Hal ini didukung oleh optimisme konsumen yang mulai membaik secara gradual terutama pada ekspektasi kinerja ekonomi ke depan. Selain itu, peningkatan stimulus fiskal oleh Pemerintah melalui pemberian bansos maupun gaji ke-13 bagi ASN diperkirakan dapat mendorong daya beli masyarakat. Persiapan Pilkada diperkirakan memberi pengaruh positif pada penjualan barang ritel. Adapun prospek perbaikan aktivitas ekonomi di sejumlah negara mitra dagang akan ikut mendorong kinerja perdagangan besar barang ekspor. Meski demikian, aktivitas pariwisata yang masih terbatas akan menahan perbaikan lebih lanjut. Optimisme perbaikan LU perdagangan tercermin dari mulai meningkatnya harga jual dan margin dari pelaku usaha (Grafik II.22).

Fiskal Daerah

Hingga pertengahan tahun 2020, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi TKDD di Sumatera sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp103,37 triliun atau turun 6,27% dibanding periode yang sama tahun lalu (Rp110,28 triliun) -(Grafik II.23). Turunnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pagu TKDD 2020[4]. Penurunan realisasi terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa. Penurunan realisasi DAU terjadi di seluruh provinsi sejalan dengan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Penurunan DBH, khususnya di daerah basis tambang seperti Riau, Kepri, dan Sumsel, dipengaruhi oleh realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan Dana Desa lebih disebabkan oleh kendala administrasi berupa persyaratan yang belum terpenuhi secara lengkap.

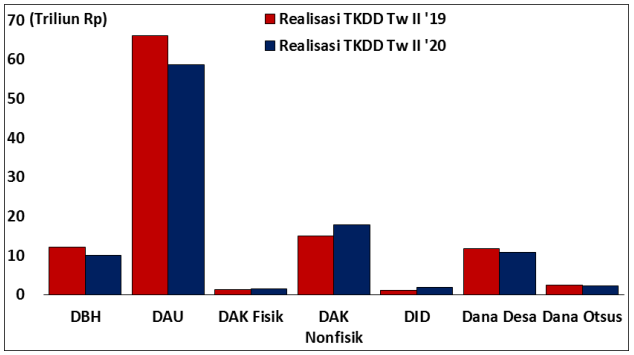

Sumber: DJPK – Kemenkeu, diolah

Grafik II.23. Realisasi Penyaluran TKDD Sumatera

Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan II 2020 sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi PAD Sumatera tercatat sebesar Rp20,15 triliun, lebih tinggi 2,67% dari realiasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp19,62 triliun. Perbaikan realisasi tersebut antara lain bersumber dari kenaikan realisasi PAD provinsi Lampung dan Sumatera Barat. Peningkatan PAD provinsi Lampung didukung adanya peningkatan penggunaan alat perekam *pajak (tapping box)* di rumah makan, tempat hiburan, dan hotel wajib pajak. Sementara itu, kenaikan realisasi PAD di Sumatera Barat didorong realisasi pendapatan dari pajak rokok dan bagi hasil dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru direalisasikan pada triwulan laporan.

Meski realisasi PAD pada Semester I 2020 meningkat, namun realisasi PAD untuk keseluruhan tahun 2020 diprakirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Realisasi PAD untuk keseluruhan tahun 2020, diperkirakan menurun sejalan dengan penyesuaian pagu anggaran PAD tahun 2020 yang dilakukan Pemda, dengan mempertimbangkan dampak pandemi yang cukup berat bagi beberapa LU utama penyumbang pendapatan. Penurunan pagu anggaran PAD terdalam terjadi di Bengkulu dan Kepri. Penyesuaian PAD di Bengkulu dipengaruhi oleh prospek pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang menurun akibat permintaan masyarakat yang melemah. Sementara itu, penyesuaian PAD di Kepri terutama disebabkan oleh penurunan kinerja pariwisata sehingga pendapatan dari pajak perhotelan dan restoran diprakirakan turun.

Realisasi belanja APBD Sumatera hingga triwulan II 2020 tercatat menurun, di tengah realisasi pendapatan APBD yang terbatas. Realisasi belanja APBD Sumatera sampai dengan triwulan laporan tercatat Rp86,13 triliun, atau turun -6,25% dari realisasi triwulan II 2019 yang sebesar Rp91,87 triliun. Penurunan terdalam terjadi di Sumut, Sumsel, dan Lampung. Secara umum, tertahannya realisasi belanja di berbagai daerah disebabkan oleh proses pengadaan belanja modal yang terkendala pandemi serta pembatasan kegiatan Pemda sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Meski secara nominal menurun, namun persentase realisasi penyerapan belanja APBD mengalami peningkatan seiring dengan penurunan pagu belanja APBD. Persentase realisasi anggaran tercatat mencapai 32,41%, sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 30,40% (Grafik II.24).

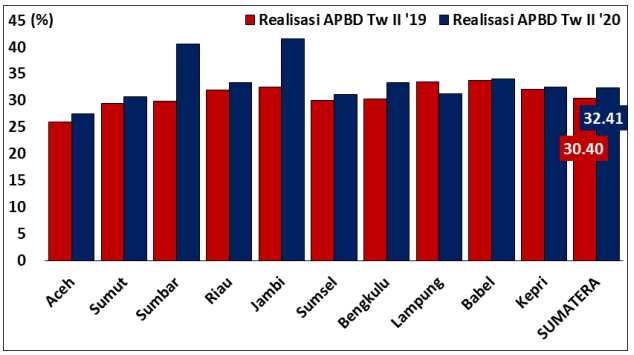

Sumber: Kemenkeu – sesuai dengan laporan yang telah masuk dari Pemerintah Daerah (Pemda), diolah

Grafik II.24. Persentase Realisasi Belanja Daerah (APBD)

[4] Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang kemudian kembali diperbaharui melalui Perpres No. 72/2020 Tanggal 27 Juni 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020

Perkembangan Inflasi Daerah

Realisasi inflasi Sumatera pada triwulan II 2020 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2020. Realisasi inflasi pada triwulan II 2020 sebesar 0,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy). Rendahnya tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di hampir seluruh provinsi, terutama untuk komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Harga aneka cabai menurun didukung kecukupan pasokan hasil panen di daerah sentra, baik di Sumatera (Sumut, Sumbar, Aceh) maupun Jawa. Sementara itu, harga bawang putih menurun karena terjaganya pasokan impor. Sementara itu, inflasi beberapa kelompok barang juga menurun sebagai dampak dari pandemi, antara lain kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi, informasi dan komunikasi, serta rekreasi (Grafik II.25). Inflasi wilayah Sumatera pada periode ini lebih dikontribusi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa seiring kenaikan harga emas perhiasan.

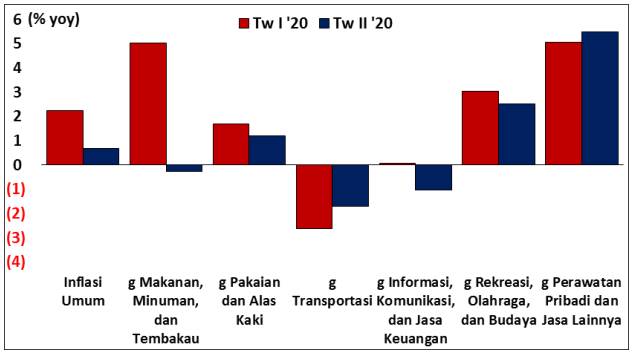

Sumber: BPS (tahun dasar 2018 = 100), diolah

Grafik II.25. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Memasuki triwulan III 2020, tekanan inflasi diprakirakan tetap rendah meski meningkat dibandingkan triwulan II 2020. Wilayah Sumatera pada Juli 2020 tercatat mengalami deflasi -0,14% (mtm) atau secara tahunan sebesar 0,15% (yoy) - (Tabel II.2). Hampir seluruh provinsi mengalami deflasi terutama disebabkan penurunan harga bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan tarif angkutan udara. Harga aneka bawang menurun sejalan dengan masuknya musim panen bawang merah dan terjaganya pasokan impor bawang putih. Sementara itu, harga daging ayam ras menurun didukung oleh membaiknya aktivitas produksi di Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumsel. Tarif angkutan udara menurun sejalan dengan permintaan yang masih terbatas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Rendahnya tekanan harga diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2020. Inflasi pada periode triwulan III 2020 diperkirakan lebih dipengaruhi oleh masuknya periode kemarau serta berakhirnya puncak panen komoditas cabai sehingga mulai mendorong kenaikan harga cabai (Grafik II.26). Selain itu, inflasi juga diperkirakan dipengaruhi tren harga emas perhiasan yang meningkat, serta kenaikan permintaan beberapa komoditas seperti daging ayam ras, aneka bawang, dan angkutan udara, meski masih terbatas.

Tabel II.2. Inflasi Daerah di Sumatera (% yoy)

Provinsi	2018				2019				2020		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Jul
Aceh	3.90	3.94	2.33	1.84	1.82	2.73	2.51	1.69	3.85	1.36	1.03
Sumatera Utara	3.91	3.36	1.63	1.22	1.05	5.87	4.47	2.33	1.81	(0.09)	(0.70)
Sumatera Barat	2.33	3.17	2.69	2.60	1.94	3.61	3.53	1.67	2.09	0.18	(0.46)
Riau	3.62	3.32	2.46	2.45	1.30	3.41	4.02	2.36	2.01	1.14	0.59
Kep. Riau	5.05	4.06	3.18	3.47	2.71	3.16	2.82	2.03	1.09	0.25	(0.33)
Bengkulu	3.18	3.77	2.87	2.35	1.65	2.69	3.40	2.91	2.42	0.87	0.42
Jambi	4.17	4.23	3.34	2.97	1.89	2.60	3.11	1.40	2.61	0.47	(0.28)
Sumatera Selatan	3.35	2.93	2.60	2.74	1.66	2.14	2.74	2.06	3.15	1.72	0.98
Kep. Bangka Belitung	3.01	2.55	3.46	3.19	2.72	3.69	4.26	2.62	1.82	0.20	(0.05)
Lampung	3.23	2.80	2.87	2.73	1.49	2.76	3.59	3.44	3.22	1.42	1.33
Sumatera	**3.70**	**3.38**	**2.52**	**2.40**	**1.67**	**3.66**	**3.56**	**2.25**	**2.25**	**0.69**	**0.15**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

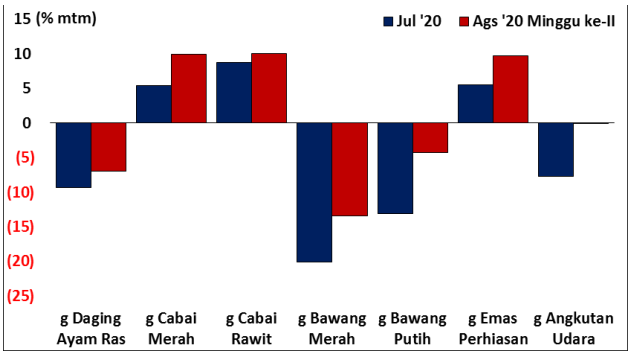

Sumber: Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia, diolah

Grafik II.26. Perubahan Harga Bulanan Beberapa Komoditas

Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan oleh TPID melalui strategi 4K untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi selama periode kemarau[5]. Untuk aspek K1, pemantauan harga secara rutin dilakukan terutama terkait implementasi harga eceran tertinggi untuk komoditas beras di Aceh dan Riau. Selain itu, upaya pengendalian harga pangan di tengah pasokan yang menurun akibat kemarau di Jambi dan Lampung, dilakukan melalui kegiatan operasi pasar berkoordinasi dengan instansi terkait. Pada aspek K2, upaya menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau dilakukan melalui percepatan tanam padi di Riau dan Sumatera Barat, serta penguatan infrastruktur irigasi dan pengairan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Bangka Belitung dan Bengkulu. Inisiasi dan tindak lanjut kegiatan kerja sama perdagangan komoditas pangan antardaerah juga senantiasa dijalankan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Terkait aspek K3, upaya memperlancar distribusi di tengah pandemi dilakukan terutama melalui pemberian prioritas bongkar-muat kepada kapal pengangkut komoditas pangan (Riau, Sumatera Selatan dan Jambi). Sementara itu, penguatan aspek K4 dilakukan secara kolaboratif melalui dialog dan penyuluhan kepada petani untuk memitigasi dampak risiko kekeringan.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Tunai Rupiah

Sistem Pembayaran Non-tunai

Di tengah kontraksi ekonomi pada triwulan II 2020, kegiatan sistem pembayaran nontunai tetap terselenggara dengan aman dan efisien. Nominal transaksi kliring tumbuh 0,52% (yoy) pada

[5] Kerangka 4K terdiri dari keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), serta komunikasi efektif (K4)

triwulan laporan, lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 13,88% (yoy) - (Grafik II.27). Secara spasial, perlambatan nominal transaksi terjadi di seluruh daerah, terutama di provinsi Sumut, Sumsel, Riau, dan Kepri yang memiliki peran ekonomi terbesar. Hal tersebut sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Secara volume, transaksi kliring juga mengalami kontraksi pertumbuhan dari 0,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -9,59% (yoy) pada triwulan laporan.

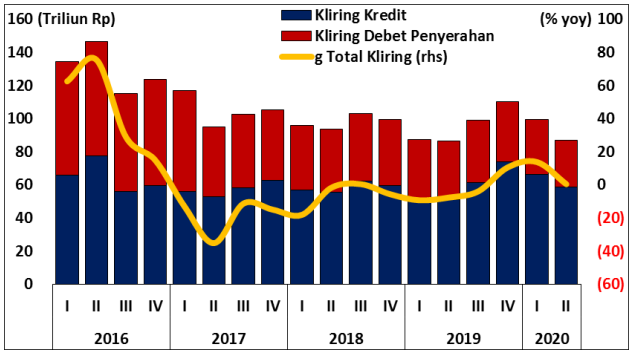

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.27. Nominal Transaksi Kliring Sumatera

Meski transaksi kliring melambat, nilai transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mengalami akselerasi pertumbuhan. Transaksi RTGS selama triwulan II 2020 tumbuh 4,70% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -6,67% (yoy) - (Grafik II.28)[6]. Secara spasial, peningkatan pertumbuhan terjadi di sebagian besar provinsi, terutama di Sumut dan Sumsel. Peningkatan tersebut mengindikasikan masih besarnya kebutuhan transaksi nontunai bernilai besar di tengah pandemi. Secara volume, setelmen melalui RTGS pada triwulan laporan tumbuh meningkat menjadi 17,40% (yoy), setelah terkontraksi pada triwulan I 2020 sebesar -5,93% (yoy).

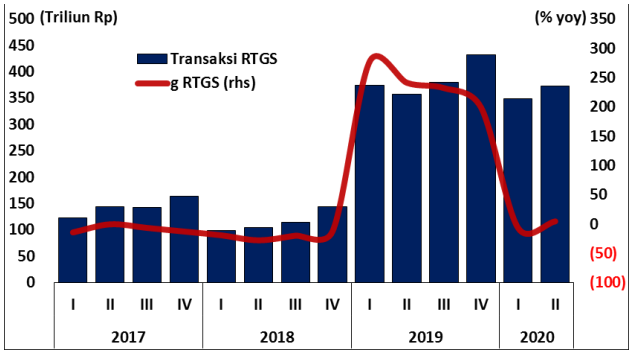

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.28. Nominal Transaksi RTGS Sumatera

Sementara itu, aktivitas transaksi nontunai di kalangan masyarakat dengan menggunakan kartu kredit mengalami penurunan pada triwulan II 2020. Penggunaan kartu kredit tercatat menurun -13,03% (yoy), setelah tumbuh 4,63% (yoy) pada triwulan I 2020 (Grafik II.29). Kontraksi yang terjadi secara umum sejalan dengan kontraksi ekonomi di seluruh provinsi. Dari sisi jenis transaksi, penurunan yang terjadi bersumber dari berkurangnya transaksi terkait *travel*, *business* maupun *leisure*, seperti pembelian tiket jasa transportasi, akomodasi, maupun atraksi. Di samping itu, transaksi belanja di pusat perbelanjaan, restoran maupun kafe, serta pasar swalayan juga relatif menurun seiring implementasi *physical distancing*.

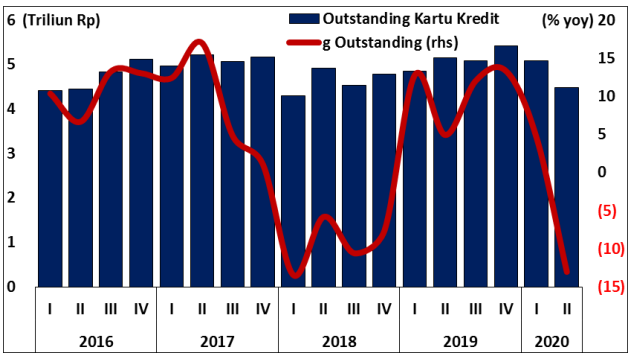

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Grafik II.29. *Outstanding* Nominal Kartu Kredit

Transaksi uang elektronik (UE) secara nominal meningkat pada triwulan II 2020. Total transaksi UE pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD) selama triwulan II 2020 mencapai Rp394,41 miliar, lebih tinggi dari total transaksi pada triwulan sebelumnya sebesar Rp337,50 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan realisasi perluasan program bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi COVID-19 dengan sumbangan kenaikan nominal terbesar bersumber dari Riau, Lampung, dan Kepri. Kenaikan transaksi UE sejalan dengan jumlah UE yang mengalami peningkatan di hampir seluruh provinsi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik II.30). Peningkatan rekening UE tersebut tercatat dari sekitar 160,73 ribu rekening pada triwulan I 2020 menjadi 167,65 ribu rekening pada triwulan II 2020.

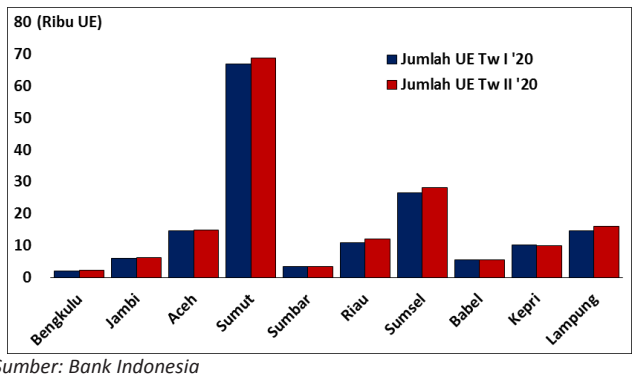

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.30. Perkembangan Jumlah UE

Di tengah kondisi pandemi, penyaluran bantuan sosial non tunai pada triwulan II 2020 mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal maupun jumlah penerima bantuan. Penyaluran Program Sembako di Sumatera tercatat Rp1,95 triliun pada triwulan laporan, lebih tinggi dari triwulan I 2020 (Rp1,43 triliun).

[6] Sejak Laporan Nusantara November 2019, dilakukan perubahan cakupan data RTGS yang dianalisis yaitu dengan menambahkan sandi alamat pengirim dan/atau penerima sebagai penentu lokasi (provinsi) transaksi yang sebelumnya hanya didasarkan pada sandi kota yang disampaikan bank

Hal ini juga dipengaruhi naiknya nominal bantuan Program Sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Maret 2020. Sementara itu, perluasan KPM Program Sembako di Sumatera juga meningkat dari sekitar 2,87 juta KPM pada triwulan I 2020 menjadi 3,25 juta KPM pada triwulan laporan. Peningkatan nominal penyaluran juga terpantau pada Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran PKH di Sumatera meningkat dari Rp1,63 triliun di tahap II menjadi Rp1,76 triliun pada triwulan II 2020[7]. Perbaikan penyaluran bansos tersebut didorong adanya perubahan sistem penyaluran bantuan PKH oleh Pemerintah yang sebelumnya triwulanan menjadi bulanan mulai April 2020 untuk tetap menjaga daya beli masyarakat saat pandemi. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan indeks bantuan rata-rata sebesar 25%, baik untuk bantuan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial sejak April 2020. Di sisi lain, jumlah KPM mengalami peningkatan dari 1,95 juta KPM pada penyaluran tahap II menjadi sekitar 2,14 juta KPM pada April-Juni 2020.

Seiring perluasan program bantuan sosial non tunai, tantangan terkait ketepatan data penyaluran perlu menjadi perhatian. Dengan semakin luasnya jumlah penerima manfaat dari program tersebut, tingkat ketepatan penyaluran perlu dijaga dan dioptimalkan. Koordinasi antara dinas sosial, bank penyalur, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci ketepatan penyaluran bantuan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan terus mendukung pemerintah di pusat maupun daerah dalam rangka penyaluran program bantuan sosial non tunai. Dukungan terutama akan diberikan untuk mengatasi beberapa kendala teknis penyaluran melalui fasilitasi Pemda dengan perbankan terkait pengkinian dan perbaikan kualitas data serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada KPM secara lebih intensif.

Perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda (ETP) di Sumatera sampai dengan triwulan II 2020 terus mengalami kemajuan yang positif. Tingkat elektronifikasi penerimaan maupun belanja daerah masing-masing tercatat sebesar 79%[8] dan 94% hingga periode laporan. Dari sisi penerimaan, pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah hampir terelektronifikasi di seluruh daerah. Meski demikian, masih banyak ruang untuk meningkatkan elektronifikasi dari retribusi Pemda. Untuk sisi belanja, mayoritas komponen belanja langsung maupun tidak langsung sudah terelektronifikasi. Perkembangan yang baik juga terlihat dari peningkatan kualitas jenis kanal yang digunakan, terutama kanal pembayaran teknologi menengah seperti *cash management system* (CMS) dan *mobile banking*. Sementara itu, penggunaan kanal yang lebih *advanced* seperti *financial technology*, *e-commerce*, dan toko *retail* juga telah mulai berkembang untuk transaksi penerimaan. Secara khusus, utilisasi QRIS *(quick response code Indonesian standard)* sudah mulai diimplementasikan di Kepri untuk penerimaan retribusi pasar dan pelayanan pelabuhan.

Lebih lanjut, implementasi elektronifikasi untuk sektor transportasi di Sumatera juga terus diperluas. Mayoritas pengembangan utamanya dilakukan untuk sistem perparkiran bandara (Sumut, Sumbar, Lampung, Bengkulu, Riau, Babel, Sumsel). Selain itu, terdapat implementasi elektronifikasi untuk pelabuhan di Aceh dan Lampung, serta bus berbasis aplikasi *online* di Jambi. Ke depan, sejumlah provinsi di Sumatera telah memiliki rencana peningkatan elektronifikasi antara lain untuk bus wisata di kawasan Danau Toba, Sumut, bus dalam kota di Palembang, Sumsel, serta bus dalam kota Pekanbaru, Riau.

Dengan terus berkembangnya upaya elektronifikasi dan literasi keuangan, indikator keuangan inklusif dapat terjaga dengan cukup baik hingga triwulan II 2020. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka rasio jumlah kantor layanan bank dan stabilnya rasio jumlah *automated teller machine* (ATM) terhadap luas wilayah Sumatera dibanding triwulan I 2020 (Grafik II.31). Di sisi lain, rasio jumlah agen layanan keuangan digital (LKD) terhadap luas wilayah tercatat sedikit menurun sehubungan dengan aktivitas perbankan yang relatif lebih terbatas dalam melakukan ekspansi di tengah pandemi. Berbagai dorongan untuk kemajuan aspek inklusivitas dan akses terhadap layanan keuangan akan terus dilakukan Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut tentunya akan dilakukan melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

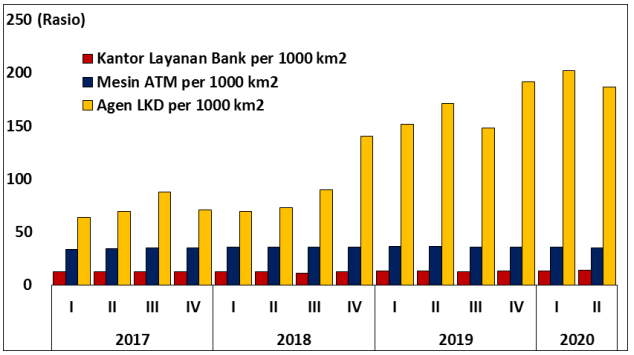

Sumber: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik II.31. Perkembangan Rasio Keuangan Inklusif

Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal perbankan di wilayah Sumatera secara agregat mengalami *net outflow* selama triwulan II 2020. Total *net outflow* triwulan laporan tercatat sebesar Rp6,02 triliun setelah pada triwulan sebelumnya terjadi *net inflow* sebesar Rp12,52 triliun (Grafik II.32). Terjadinya net outflow sejalan dengan siklus aliran uang meski terdapat kondisi *extraordinary* adanya pandemi COVID-19. Selama triwulan II 2020, uang kartal cenderung ke luar dari bank sentral dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk Idulfitri, meski tidak setinggi tahun sebelumnya. Secara spasial, net *outflow* tertinggi terjadi di Riau, Aceh, dan Sumsel.

Bank Indonesia senantiasa memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat dengan disertai penguatan protokol kesehatan dan

[7] Penyaluran tahap II dilakukan pada Maret 2020; Penyaluran selama triwulan II 2020 yaitu dari April s.d Juni 2020

[8] Transaksi yang dilakukan minimal melalui ATM atau *teller*; Terdapat revisi data dan laporan untuk tingkat penerimaan yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 81%

mitigasi risiko penyebaran COVID-19. Pemenuhan tersebut dilakukan baik dari segi jumlah, jenis pecahan, maupun kebersihannya. Kegiatan pemenuhan uang kartal terutama dilakukan dengan mengoptimalkan loket penukaran di perbankan umum dengan tetap menerapkan konsep *physical distancing* pada masa mengadaptasi kebiasaan baru di setiap daerah. Sejalan dengan upaya pembukaan aktivitas ekonomi, beberapa kegiatan terkait perkasan yang dihentikan pada awal masa pandemi telah mulai dilaksanakan secara terbatas. Ke depan, apabila kondisi pandemi semakin membaik, kegiatan kas keliling dalam dan luar kota akan dilaksanakan kembali dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga kualitas pelayanan kepada publik dalam penyediaan uang layak edar (ULE).

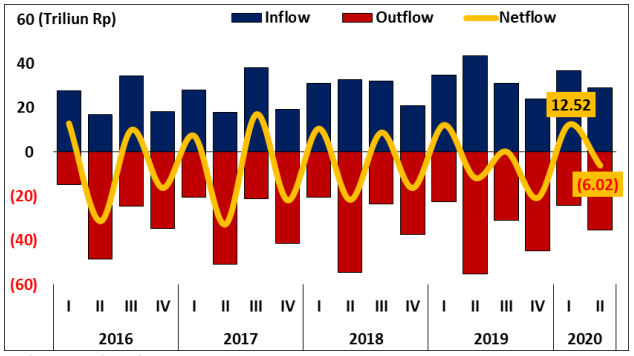

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.32. Aliran Uang Kartal

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan II 2020, aktivitas transaksi jual dan beli valuta asing (valas) dari pelaku usaha bukan bank tercatat tumbuh melambat[9]. Transaksi jual valas tumbuh melambat menjadi 32,12% (yoy) setelah mengalami pertumbuhan sebesar 228,68% (yoy) pada triwulan I 2020. Sementara itu, transaksi beli tumbuh melambat dari 219,14% (yoy) menjadi 30,64% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya kinerja pariwisata, baik kunjungan wisatawan asing ke dalam negeri (Kepri, Sumut) maupun wisatawan nusantara yang bepergian ke luar negeri.

Prospek Perekonomian

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut. Konsumsi swasta diperkirakan meningkat ditopang oleh membaiknya pendapatan didukung berbagai program stimulus, Pilkada serentak, serta perayaan Natal dan tahun baru. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat didukung upaya Pemda untuk mempercepat realisasikan anggaran belanja pada akhir tahun. Hal ini akan turut mendorong realisasi belanja modal yang akan menopang kinerja investasi. Sementara itu, net ekspor diprakirakan tumbuh membaik didukung permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sisi LU, seluruh LU utama Sumatera juga diprakirakan mengalami perbaikan kinerja. Produksi usaha *tradable* akan meningkat karena menguatnya permintaan, khususnya untuk komoditas sawit dan olahannya, karet dan olahannya, kopi, produk elektronik, migas, serta batu bara. Selanjutnya, kinerja usaha konstruksi akan menguat didorong upaya untuk mencapai target proyek bernilai besar seperti JTTS dan pembangkit listrik. Adapun perkembangan positif dari konsumsi dan net ekspor akan menjadi faktor penopang pertumbuhan usaha perdagangan besar dan eceran di hampir seluruh provinsi.

Perekonomian Sumatera untuk keseluruhan tahun 2020 diprakirakan tumbuh melambat akibat tekanan yang terjadi pada paruh pertama. Dari sisi penggunaan, konsumsi swasta mengalami penurunan kinerja seiring turunnya *pendapatan* masyarakat akibat pandemi COVID-19. Selain itu, tingkat permintaan sejak triwulan II 2020 relatif tidak setinggi tahun sebelumnya, termasuk pada saat perayaan HBKN. Konsumsi pemerintah juga diprakirakan mengalami penurunan akibat pendapatan yang tidak optimal. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya pagu Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait pajak dari pelaku usaha di daerah wisata dan pusat industri (Sumut, Sumsel, Babel, Lampung, Sumbar). Pengurangan TKDD dari pusat dan penurunan DBH terkait usaha pertambangan juga akan semakin membatasi realisasi belanja APBD, khususnya di Riau. Meski demikian, optimalisasi penyerapan belanja dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi diperkirakan dapat menahan penurunan yang lebih dalam.

Adanya *shock* dari pandemi turut berdampak pada melemahnya kinerja investasi dan net ekspor pada tahun 2020. Deselerasi investasi dipengaruhi oleh laju pembangunan infrastruktur yang tidak secepat rencana awal. Terdapat penyesuaian jadwal pada sebagian subproyek KEK/KI di Lampung dan Sumut, serta proyek JTTS di Sumbar, Riau dan Sumsel seiring penerapan *physical distancing*. Di samping itu, belanja modal dari Pemda juga tidak dapat direalisasikan secara optimal karena adanya realokasi anggaran. Dari sisi swasta, investasi non-bangunan juga tertahan akibat perilaku *wait and see* pelaku usaha terkait pandemi dan Pilkada. Sementara itu, turunnya kinerja net ekspor bersumber dari penurunan ekspor komoditas migas di Riau, Kepri, CPO, batu bara, *pulp* dan kertas di Sumut, Riau, Sumsel, elektronik di Kepri, karet di Sumsel, dan Jambi, serta timah di Babel, sejalan dengan penurunan permintaan global dan rendahnya harga komoditas. Selain itu, pendapatan ekspor jasa terkait pariwisata diprakirakan menurun cukup dalam akibat kontraksi kunjungan wisman di Kepri, Sumut, Sumbar dan Sumsel.

Sejalan dengan perlambatan di sisi permintaan, seluruh LU utama Sumatera diperkirakan mengalami tekanan untuk keseluruhan tahun 2020. Kinerja usaha pertanian diprakirakan melambat karena *lagging effect* kebakaran lahan 2019 di Riau, Sumsel, Jambi, serta penurunan produktivitas TBS seiring panen tanaman usia produktif yang banyak dilakukan tahun sebelumnya di Sumsel, Sumut, Riau. Produksi kopi juga diprakirakan tertahan sebagai dampak dari tren penurunan

[9] Data transaksi bersifat dinamis dan akan mengalami penyesuaian mengikuti ketersediaan laporan dari KUPVA BB

harga domestik akibat pasokan yang berlimpah di Aceh, Sumut, Lampung. Usaha pertambangan migas, batu bara, serta timah diprakirakan terkontraksi yang utamanya dipengaruhi oleh permintaan pasar yang menurun serta harga jual yang rendah. Kegiatan produksi usaha manufaktur utama seperti CPO serta turunannya, karet olahan, timah olahan, maupun produk elektronik juga cenderung melambat karena melemahnya permintaan. Sementara itu, LU konstruksi diprakirakan tumbuh relatif rendah sejalan dengan tertahannya investasi dari Pemerintah maupun swasta. Adapun usaha perdagangan akan terkontraksi seiring dengan penurunan kinerja konsumsi, ekspor luar negeri, maupun ekspor antardaerah.

Dinamika terkini mengindikasikan risiko terkait perkembangan COVID-19 perlu terus diwaspadai karena memperlambat kinerja perekonomian Sumatera. Pertama, jika pandemi terus berlangsung lebih lama maka akan berdampak terhadap pemulihan permintaan mitra dagang utama yang pada gilirannya memengaruhi kinerja sektor eksternal di Sumatera. Ekspor barang dan jasa akan semakin menurun sehingga menurunkan pendapatan pelaku usaha dan rencana investasi dapat terus mengalami penundaan. Kedua, pandemi akan memberikan risiko bagi penyelesaian berbagai proyek infrastruktur milik Pemerintah sehingga akan semakin tertinggal dari jadwal sehingga efek *multiplier*-nya akan berkurang. Ketiga, risiko berlanjutnya pandemi akan mengeskalasi ketidakpastian pasar dan dapat berujung pada fluktuasi harga komoditas (migas, batu bara, mineral, CPO). Pada gilirannya, hal tersebut berisiko menjadi faktor penahan produksi dari sisi penawaran.

Prospek Inflasi

Inflasi IHK Sumatera hingga akhir 2020 diprakirakan tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Inflasi yang terkendali akan didukung oleh rendahnya inflasi kelompok barang terkait pangan serta keperluan rutin rumah tangga lainnya. Inflasi pangan yang terjaga dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang membaik seiring dengan rendahnya risiko cuaca serta permintaan yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Permintaan yang terbatas juga berdampak pada terjaganya inflasi komoditas terkait sandang, sewa dan kontrak rumah, listrik dan bahan bakar, perabotan dan peralatan rumah tangga, serta barang dan jasa rekreasi. Meski demikian, terdapat risiko tekanan inflasi yang perlu di waspadai yang bersumber dari komoditas hortikultura, khususnya cabai, sebagai dampak dari level harga yang relatif rendah pada akhir 2019 di Riau, Babel, Sumut. Selain itu, dampak kenaikan cukai rokok serta peningkatan harga emas juga akan mendorong kenaikan inflasi lebih lanjut. Sementara itu, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara yang diperkirakan terjadi menjelang akhir tahun karena adanya pergeseran libur Idulfitri ke akhir tahun bersamaan dengan libur Natal dan tahun baru.

Koordinasi pengendalian inflasi di berbagai daerah akan terus dioptimalkan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam jangka pendek, berbagai program rutin dan inovasi akan terus digulirkan. Fokus saat ini di sebagian besar daerah adalah terkait monitoring stok pangan serta penguatan model kerja sama jasa transportasi *online* dengan pedagang pasar dalam rangka distribusi barang. Selanjutnya, dalam jangka menengah panjang, untuk mengantisipasi kemarau dan kondisi *extraordinary* seperti pandemi yang terjadi saat ini, TPID senantiasa melanjutkan program kerja utamanya. Beberapa program yang akan terus diperkuat sebagai bentuk tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera, serta Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov), yaitu: i) digitalisasi klaster pertanian baik dari sisi hulu maupun hilir; ii) bantuan perbaikan sistem irigasi bagi petani; iii) penguatan data stok pangan dan prognosa neraca pangan bulanan; iv) utilisasi infrastruktur penyimpan pangan seperti *controlled atmosphere storage* ataupun *cold storage* di Aceh, Sumbar, Sumut dan Jambi; v) penguatan peran Bulog sebagai stabilisator harga melalui program pasar murah; serta vi) penguatan peran BUMD dalam melakukan kerja sama perdagangan pangan antardaerah.

BOKS 1

Potensi Industri Pulp dan Kertas di Sumatera di tengah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020. Pelemahan perekonomian domestik dipengaruhi oleh penurunan permintaan baik dari domestik maupun eksternal. Dari domestik, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Dari eksternal, kebijakan *lockdown* di berbagai negara menyebabkan pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas dunia yang mengakibatkan kinerja ekspor Indonesia terkontraksi.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga memunculkan produk-produk ekspor yang resilien dan berpotensi menjadi produk unggulan baru. Ketika sebagian besar komoditas ekspor mengalami penurunan kinerja, beberapa produk manufaktur masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif, bahkan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Sejumlah produk turunan pulp dan kertas seperti tisu wajah/toilet, *paperboard*, tisu pembersih serta kertas tumbuh signifikan di triwulan II 2020, sehingga meningkatkan pangsa ekspor keempat produk tersebut terhadap total produk kertas dari 26,2% pada 2019 menjadi 36,9% (Grafik II.33).

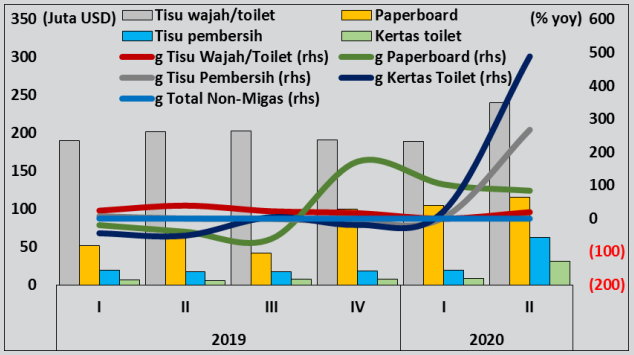

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.33. Perkembangan Ekspor Produk Turunan Kertas Nasional

Posisi Indonesia dalam perdagangan pulp dan kertas dunia relatif cukup baik. Pada 2019, Indonesia merupakan eksportir pulp terbesar ke-4 dunia dan urutan ke-1 dunia eksportir kertas[10]. Dengan kinerja tersebut, pulp dan kertas Indonesia mampu menyumbang devisa hasil ekspor sebesar US$7,1 miliar, atau 4,0% dari nilai ekspor nonmigas Indonesia[11].

Bagi Sumatera, pulp dan kertas merupakan produk ekspor unggulan daerah setelah kelapa sawit. Sumatera menjadi pemain utama dalam komoditas pulp dan kertas Indonesia dengan sumbangan nilai ekspor sebesar 67,7% di 2019 (Grafik II.34). Kontribusi ekspor pulp terbesar berasal dari Riau (40,4%) dan Sumatera Selatan (31,9%), sementara ekspor kertas terutama disumbang oleh Riau (89,1%). Adapun devisa yang diperoleh Sumatera mencapai US$4,8 miliar, atau mencapai 12,3% dari nilai ekspor nonmigas Sumatera di 2019[12].

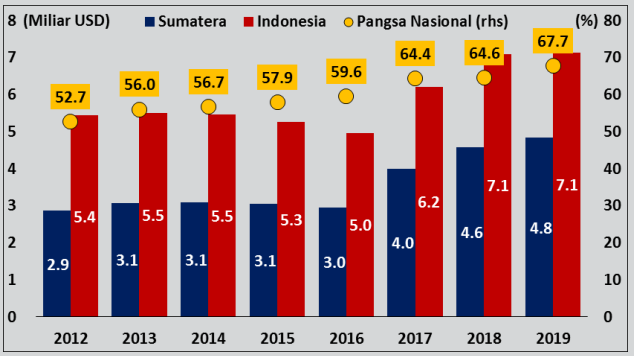

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.34. Perkembangan Ekspor Pulp dan Kertas Sumatera dan Nasional

Selain kinerja ekspor yang resilien di tengah pandemi COVID-19, industri pulp dan kertas memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Daya saing yang tinggi, tren neraca perdagangan yang membaik, adanya potensi permintaan global, serta adanya target peningkatan kapasitas produksi menjadi faktor pendukung prospek kinerja ekspor industri pulp dan kertas ke depan. Di samping itu, industri pulp dan kertas berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung salah satu industri prioritas, yaitu TPT, melalui diversifikasi pulp menjadi serat rayon.

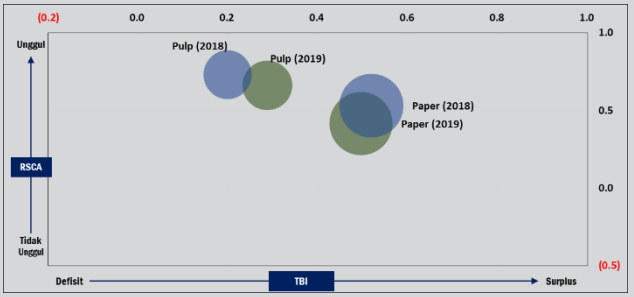

Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.35. Perkembangan RSCA dan TBI Pulp dan Kertas Nasional

Tingginya daya saing industri pulp dan kertas terlihat dari indikator RSCA dan TBI yang positif (Grafik II.35). Kondisi ini didukung oleh sebagian besar korporasi pulp dan kertas di Sumatera yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk pada tingkat *midstream* yang bernilai tambah. Selain itu

[10] Berdasarkan Data UN Comtrade

[11] Berdasarkan data APKI, ekspor pulp sebesar US$2,8 miliar dan kertas sebesar US$4,5 miliar

[12] Berdasarkan data APKI, ekspor pulp sebesar US$2,8 miliar dan kertas sebesar US$2,1 miliar

juga terlihat perkembangan hilirisasi pada sejumlah korporasi di Sumatera, di mana terdapat peningkatan ekspor untuk produk yang bernilai tambah lebih selama tiga tahun terakhir. Perkembangan ini mendorong tren neraca perdagangan pulp dan kertas yang meningkat.

Permintaan akan produk pulp dan kertas diyakini akan terus tumbuh ke depan disertai dengan pergeseran permintaan produk (Tabel II.3). Transaksi *e-commerce* yang semakin meningkat mendorong kebutuhan produk kemasan yang terbuat dari kertas seperti kotak kardus dan kertas kemasan untuk industri dan transportasi. Demikian pula halnya perilaku konsumen yang semakin peduli dengan aspek higienitas pascapandemi COVID-19, akan meningkatkan permintaan kemasan untuk makanan dan kertas tisu. Kondisi ini juga didukung oleh kekhawatiran akan sampah kemasan plastik yang sulit untuk didaur ulang. Di sisi lain, penurunan permintaan kertas tulis *(graphic papers)* akan terus berlanjut sejalan dengan tren digitalisasi. Namun, secara keseluruhan permintaan pulp dan kertas global akan meningkat. Kenaikan permintaan dunia tersebut sejalan dengan rencana peningkatan produksi industri pulp dan kertas domestik. Produksi pulp dan kertas nasional diperkirakan meningkat masing-masing dari 10,0 juta ton dan 12,7 juta ton di 2019 menjadi 12,8 juta ton dan 16,0 juta ton di 2024 (Grafik II.36).

Tabel II.3. Prospek Permintaan Produk Turunan Pulp dan Kertas

Produk	Sub Produk	Wilayah						
		Amerika Latin	Eropa Timur	Asia (Lainnya)	China	Amerika	Eropa Barat	Jepang
Tissue								
Graphic Papers	Mechanical							
	Newsprint							
	Wood Free							
Packaging Papers	Kraft Paper and Specialty							
	Carton Board							
	Containerboard							
Hardwood Pulp								
Softwood Pulp								

CAGR > 2%
CAGR 0 - 2%
CAGR < 0%

Sumber: McKinsey, 2019

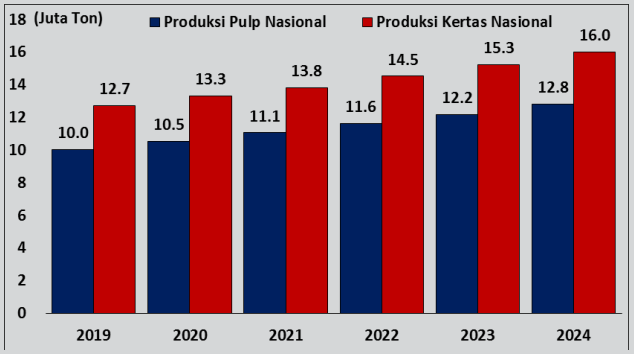

Sumber: Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)

Grafik II.36. Proyeksi Produksi Pulp dan Kertas Nasional

Tumbuhnya permintaan ke depan tidak terlepas dari luasnya pemanfaatan produk pulp dan kertas, termasuk untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam hal ini, pengolahan lebih lanjut dari *softwood pulp* akan menghasilkan produk rayon yang dapat menjadi bahan baku tekstil. Saat ini, proses tersebut mampu dilakukan oleh salah satu perusahaan di Sumatera melalui operasionalisasi pabrik terintegrasi dari perkebunan yang menghasilkan pulp untuk kemudian diolah menjadi *viscose rayon* sebagai kebutuhan bahan baku industri TPT domestik dan luar negeri. Selain diversifikasi produk, keberhasilan ini menciptakan nilai tambah ekspor yang besar melalui hilirisasi pulp ke *viscose rayon* dan meningkatkan *local value chain* antara Sumatera dan Jawa dalam menopang industri TPT sebagai salah satu industri prioritas nasional.

Di tengah prospek yang baik tersebut, pengembangan industri pulp dan kertas menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dari faktor produksi. Saat ini kebutuhan kertas daur ulang (KDU) yang meningkat belum dapat diimbangi oleh produksi domestik sehingga berdampak pada tren kenaikan impor KDU. Tingginya kebutuhan KDU disebabkan lebih dari 50% produk kertas yang diproduksi Indonesia menggunakan bahan baku tersebut. Pada 2020, total kebutuhan kertas daur ulang diperkirakan mencapai 7,8 juta ton dimana 4,2 juta ton di antaranya dipenuhi melalui impor (Grafik II.37). Ke depan, diperlukan strategi pemenuhan bahan baku KDU seperti mendorong pengelolaan limbah kertas bekas oleh industri pulp dan kertas maupun industri pengolahan limbah melalui pemberian insentif yang menarik.

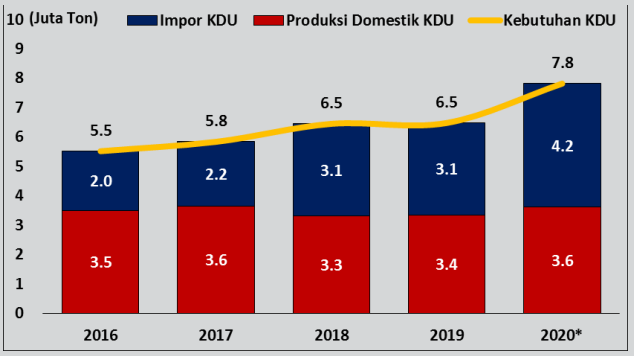

Sumber: Kementerian Perindustrian, asosiasi terkait

Grafik II.37. Perkembangan Kebutuhan Kertas Daur Ulang

Dari sisi pengaturan dan kelembagaan, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk menjaga keberlangsungan produksi dan meningkatkan hilirisasi. Di tengah upaya jangka panjang untuk mendorong pengelolaan limbah kertas bekas domestik, relaksasi ketentuan tingkat impuritas KDU impor dapat menjadi strategi jangka pendek untuk memenuhi pasokan bahan baku[13]. Sementara itu, pengembangan hilirisasi di Sumatera masih berpotensi untuk ditingkatkan melihat komposisi nilai ekspor pulp Sumatera yang mencapai 57,5% terhadap total ekspor industri pulp dan kertas, atau lebih tinggi dari pangsa ekspor pulp nasional sebesar 39,0%. Terkait hal ini, pemberian insentif dapat mendorong investasi lebih lanjut, salah satunya melalui usulan perluasan cakupan PMK No. 150 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) agar dapat mencakup industri kertas. Saat ini, peraturan tersebut memberikan insentif kepada 18 industri pionir, termasuk

[13] Diatur dalam Permendag No. 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri

industri pulp, namun belum mencakup industri kertas.

Dari sisi perdagangan, dukungan Pemerintah untuk mengurangi hambatan nontarif sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan produk kertas termasuk dalam lima besar komoditas ekspor Indonesia yang sering terkena hambatan dagang berupa dumping dan subsidi di negara tujuan ekspor. Bahkan, saat ini terdapat pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada produk *coated* dan *uncoated paper* oleh Amerika Serikat serta produk A4 *copy paper* oleh Australia, yang sedang diupayakan proses penyelesaiannya di *World Trade Organization*.

BAGIAN 3
PEREKONOMIAN JAWA

Perekonomian Jawa pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi 6,69% (yoy) dan terjadi merata di seluruh provinsi di Jawa. Kondisi ini tidak terlepas dari dinamika perekonomian global yang melambat sehingga memengaruhi kinerja ekspor dari Jawa, serta permintaan domestik yang menurun terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah di Jawa. Kontraksi pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh kontraksi konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Perkembangan ini lebih lanjut tercermin dari penurunan kinerja lapangan usaha (LU) utama di Jawa, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi dan makanan minuman.

Pemulihan ekonomi Jawa diperkirakan secara berangsur mulai terjadi pada triwulan III 2020. Perbaikan ekonomi yang diperkirakan terjadi pada seluruh provinsi tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat dan bisnis seiring relaksasi PSBB yang mulai dilakukan sejak akhir triwulan II 2020. Selain itu, program pemulihan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah, antara lain melalui penyaluran bantuan sosial, pembebasan dan diskon tagihan listrik rumah tangga, pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun berbagai stimulus yang diberikan kepada dunia usaha, diperkirakan dapat menopang konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha. Secara keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa diprakirakan tidak sebaik capaian tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi yang menekan permintaan.

Seiring dengan melemahnya permintaan domestik, inflasi Jawa pada triwulan II 2020 berada pada level yang rendah. Inflasi tercatat 2,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2020 yang sebesar 3,28% (yoy). Rendahnya realisasi inflasi juga dipengaruhi oleh dukungan kecukupan pasokan beberapa komoditas pangan utama yang disertai berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ditengah PSBB yang terjadi di sejumlah daerah. Memasuki triwulan III 2020, tekanan inflasi wilayah Jawa diprakirakan tetap rendah dan akan berlanjut hingga akhir 2020.

Perekonomian Jawa pada triwulan II 2020 terkontraksi 6,69% (yoy), menurun tajam dari triwulan I 2020 yang masih tumbuh 3,43% (yoy). Kontraksi pertumbuhan terjadi di seluruh wilayah terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan aktvitas masyarakat di sejumlah daerah (Tabel III. 1). Di samping itu, kinerja net-ekspor melambat meski masih dapat tumbuh positif. Hal ini terutama disebabkan oleh melemahnya ekspor ke negara-negara mitra dagang utama. Meskipun demikian, kinerja net-ekspor masih dapat tumbuh positif antara lain ditopang oleh ekspor emas dari Jawa Timur dan besi baja dari Banten. Sejalan dengan hal tersebut, sebagian besar lapangan usaha (LU) di kawasan Jawa pada triwulan II 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif (Grafik III.1).

Penurunan permintaan domestik tercermin dari kontraksi konsumsi rumah tangga dan investasi (Grafik III.2). Perkembangan ini tidak terlepas dari dampak penerapan PSBB di sebagian besar daerah di Jawa yang menahan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, kondisi ini menekan kinerja LU industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum (akmamin). Penurunan kinerja LU tersebut berdampak pada penyesuaian penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha, termasuk dengan merumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pada gilirannya menurunkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, penurunan permintaan domestik juga berdampak pada investasi terutama investasi non-bangunan, dalam bentuk penundaan atau pemotongan *capital expenditure* (capex). Penerapan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 juga berdampak pada terkendalanya kedatangan pekerja, baik tenaga ahli maupun konsultan asing, serta proses importasi barang modal dan bahan baku proyek. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) juga mengalami penundaan, antara lain KA cepat Jakarta-Bandung, Proyek Tanggul Pantai Jakarta, dan Bendungan Karian.

Tabel III.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa (yoy)

Provinsi	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
DKI Jakarta	5.96	5.93	6.38	6.40	6.17	6.22	5.48	5.89	5.96	5.89	5.06	(8.22)
Jawa Barat	5.92	5.62	5.59	5.52	5.66	5.39	5.67	5.15	4.11	5.07	2.73	(5.98)
Banten	5.84	5.55	5.90	5.99	5.82	5.45	5.36	5.41	5.90	5.53	3.19	(7.40)
Jawa Tengah	5.34	5.41	5.21	5.26	5.31	5.13	5.52	5.64	5.34	5.41	2.61	(5.94)
DI Yogyakarta	5.41	5.92	6.04	7.39	6.20	7.51	6.77	6.01	6.16	6.60	(0.17)	(6.74)
Jawa Timur	5.42	5.55	5.37	5.65	5.50	5.55	5.69	5.32	5.54	5.52	3.02	(5.90)
Jawa	**5.70**	**5.66**	**5.72**	**5.82**	**5.73**	**5.66**	**5.59**	**5.51**	**5.34**	**5.52**	**3.43**	**(6.69)**

Sumber: BPS (diolah)

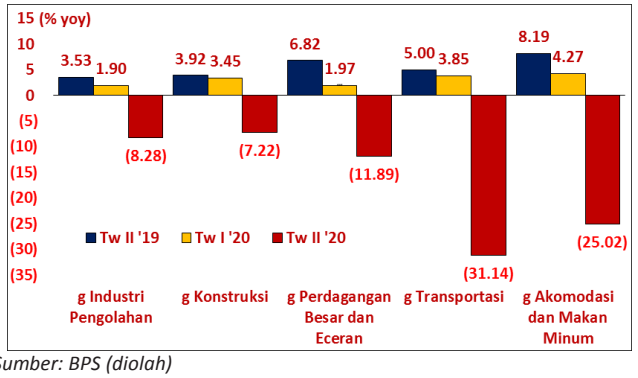

Sumber: BPS (diolah)

Grafik III.1. Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama Jawa

Dari sisi eksternal, penurunan permintaan global terutama dari mitra dagang memengaruhi kinerja ekspor berbagai daerah di Jawa. Ekspor dari wilayah Jawa pada triwulan II 2020 mengalami penurunan yang lebih dalam daripada capaian pada triwulan I 2020. Permintaan mitra dagang utama dan kendala dalam aktivitas perdagangan internasional berdampak pada kontraksi ekspor dan impor yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor komoditas utama wilayah Jawa, seperti

otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, dan kimia tercatat mengalami penurunan. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas ekspor yang masih tumbuh positif seperti emas dari Jawa Timur dan besi baja dari Banten. Secara keseluruhan, net ekspor Jawa masih dapat tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

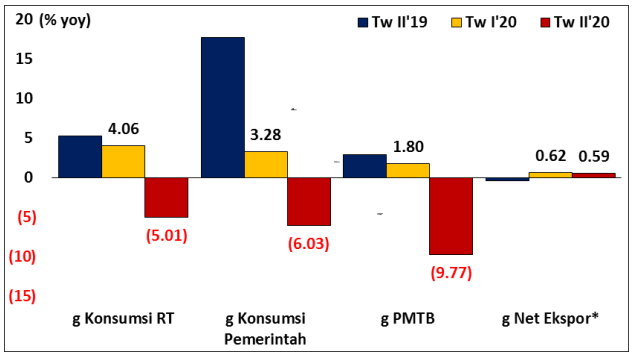

Sumber: BPS (diolah)

Grafik III.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Sisi Penggunaan

Konsumsi

Kinerja konsumsi rumah tangga di Jawa pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi akibat pelemahan permintaan masyarakat. Kontraksi ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya permintaan domestik seiring dengan pembatasan akitivitas masyarakat terkait upaya pencegahan COVID-19. Di samping itu, menurunnya permintaan berdampak pada pendapatan masyarakat karena aktivitas usaha yang berkurang, termasuk upaya pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan penggunaan tenaga kerja. Sampai dengan akhir Juni 2020, di wilayah Jawa tercatat sekitar 1,19 juta pekerja yang terdampak COVID-19, baik dari pekerja formal maupun pekerja sektor informal[14]. Di sisi lain, penurunan kinerja konsumsi juga dipengaruhi oleh penutupan beberapa pusat pembelanjaan, daerah wisata, dan penghentian sementara angkutan udara bagi penumpang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Adanya penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi terkonfirmasi dari penurunan indeks penghasilan dan konsumsi barang tahan lama pada triwulan II 2020 (Grafik III.3).

Sejalan dengan penurunan kinerja konsumsi, penyaluran kredit rumah tangga pada triwulan II 2020 tumbuh melambat. Perlambatan terjadi pada semua jenis kredit, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multiguna, dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) (Grafik III.4). Perlambatan kredit konsumsi tersebut mengkonfimasi perilaku rumah tangga dalam melakukan pengeluaran untuk pembelian barang tahan lama. Meskipun kredit konsumsi melambat, kualitas kredit ke sektor rumah tangga tetap terjaga dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 5%.

Dana pihak ketiga milik perseorangan pada triwulan II 2020 juga mengalami perlambatan. DPK jenis tabungan dan deposito tercatat tumbuh melambat, walaupun giro masih mengalami peningkatan (Grafik III.5). Hal ini diprakirakan akibat pendapatan rumah tangga yang berkurang sehingga sebagian masyarakat mulai menggunakan dana simpanannya untuk membiayai konsumsi. Kondisi dimaksud tercermin juga dari penurunan indeks pendapatan dan juga indeks tabungan (Grafik III.6)

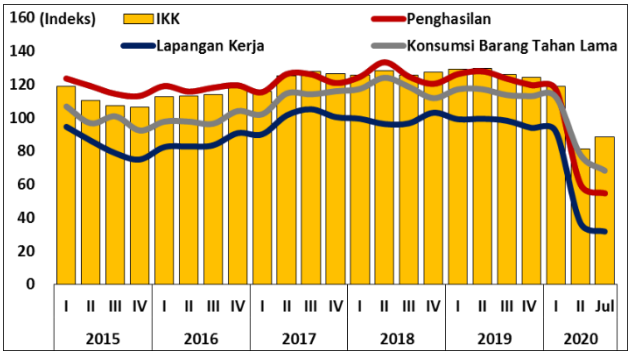

**hingga Juli 2019*

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik III.3. Perkembangan Indikator Konsumsi RT

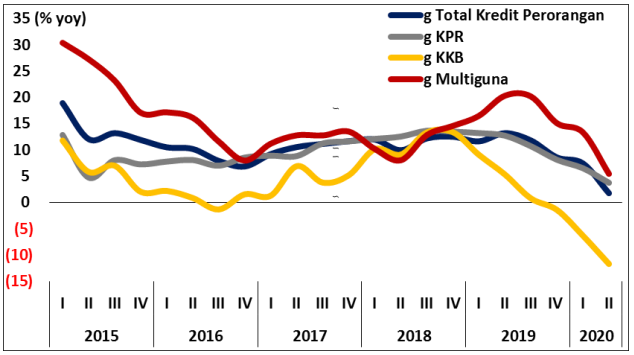

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.4. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,03% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor *base effect* dari tingginya konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun sebelumnya karena meningkatnya belanja untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu dan pilpres**.** Namun, kontraksi lebih dalam tertahan adanya peningkatan belanja APBN dan APBD dalam rangka penanganan dampak COVID-19.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 diprakirakan mulai mengalami perbaikan dibanding triwulan II 2020. Pelonggaran PSBB di berbagai daerah, disertai realisasi penyaluran bantuan sosial diperkirakan dapat menopang perbaikan konsumsi rumah tangga. Namun, perilaku antisipasi rumah tangga dalam mencegah penyebaran COVID-19 diprakirakan membuat sebagian kelompok rumah tangga masih akan membatasi konsumsinya. Prakiraan perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga ke depan terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumsen (IKK) – Survei Konsumen bulan Juli 2020 yang meningkat dibandingkan triwulan II 2020, meski masih

[14] Sumber: DSta dari Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Provinsi, Asosiasi Pengusaha anggota Kadin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dsta (2020), diolah.

berada pada level pesimis (Grafik III.3).

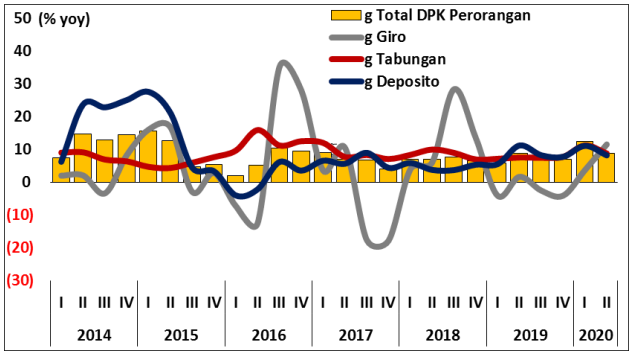

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.5. Pertumbuhan DPK Perseorangan

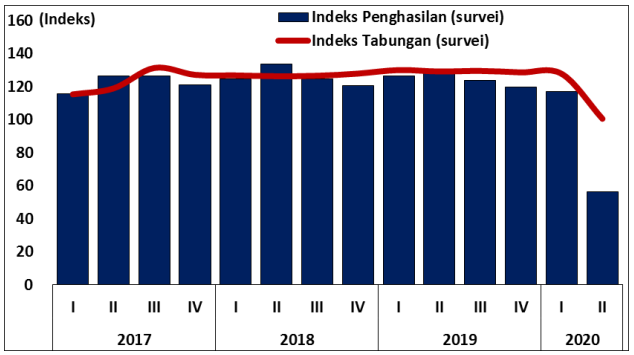

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.6. Indeks Penghasilan dan Tabungan

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2020 diperkirakan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkiraan perbaikan tersebut didorong oleh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, yang sempat tertunda di triwulan II 2020. Selain itu, adanya pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan POLRI diperkirakan turut meningkatkan konsumsi pemerintah[15]. Selanjutnya, pemberian stimulus untuk penanganan COVID-19, percepatan dan peningkatan penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19 serta berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi lainnya diperkirakan akan mendukung pertumbuhan positif konsumsi pemerintah di triwulan III 2020.

Investasi

Kinerja investasi pada triwulan II 2020 terkontraksi, baik pada investasi bangunan maupun non-bangunan. Penurunan investasi bangunan terutama akibat tertundanya pelaksanaan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Proyek Tanggul Pantai Jakarta, dan Bendungan Karian. Berbagai proyek tersebut menghadapi kendala antara lain terkait mobilitas tenaga ahli atau konsultan asing untuk mendukung penyelesaian proyek. Selain itu, terhambatnya impor bahan baku karena *lockdown* di negara asal bahan baku/barang modal turut menjadi kendala dalam penyelesaian proyek dimaksud. Sementara itu, penurunan kinerja investasi non-bangunan terutama dipengaruhi oleh tendensi *wait and see* korporasi dalam merealisasikan *Capex* yang telah direncanakan sebelumnya, di tengah permintaan yang menurun dan kendala ekspor-impor. Perlambatan investasi sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), penurunan penjualan semen, dan penurunan impor barang modal (Grafik III.7).

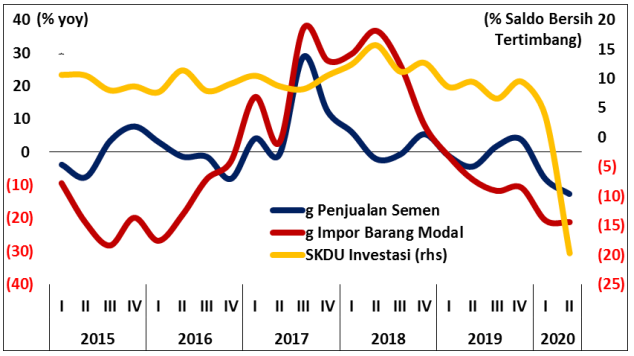

Sumber: Bank Indonesia dan Dirjen Bea Cukai (diolah)

Grafik III.7. Perkembangan Indikator Investasi

Pada triwulan III 2020 kinerja investasi diprakirakan membaik meski terbatas. Penundaan atau pemotongan anggaran investasi (*capex*) diperkirakan masih berlanjut sebagai upaya korporasi dalam rangka efisiensi biaya dan menjaga kondisi likuiditas usaha. Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, beberapa korporasi besar terindikasi melakukan revisi ke bawah anggaran capex-nya[16]. Selain itu, BUMN karya juga tercatat telah merevisi anggaran *capex*-nya 35%-75% lebih rendah dari nilai awal. Kendala tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun lokal, serta adanya realokasi anggaran infrastruktur pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan hambatan impor bahan baku akibat kebijakaan *lockdown* di negara produsen bahan baku, diperkirakan akan menekan kinerja investasi. Namun, di sisi investasi bangunan, penyelesaian beberapa PSN seiring pelonggaran PSBB diprakirakan dapat menahan kontraksi investasi lebih dalam.

Kinerja Ekspor-Impor

Ekspor luar negeri (LN) pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi cukup dalam (Grafik III.8). Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya ekspor sektor unggulan Jawa, antara lain otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, dan kimia. Kontraksi ekspor dipengaruhi oleh menurunnya permintaan dan adanya hambatan dalam pengiriman akibat penerapan *lockdown* di negara tujuan. Meski demikian, terdapat beberapa produk ekspor dari Jawa yang tetap tumbuh positif seperti emas dari Jawa Timur dan besi baja dari Banten sehingga dapat menahan perlambatan ekspor LN Jawa lebih lanjut. Sementara itu, sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang menurun, impor barang konsumsi dan barang modal juga tercatat mengalami penurunan.

[15] Total alokasi anggaran untuk pencairan gaji ke-13 bagi ASN (semua level ASN, TNI & POLRI) sebesar Rp28,82 triliun bersumber dari APBN sebesar Rp14,83 triliun dan APBD sebesar Rp13,99 triliun. Pencairan dilakukan pada bulan Agustus 2020.

[16] Hasil liaison yang dilakukan Kantor Perwakilan BI di Jawa

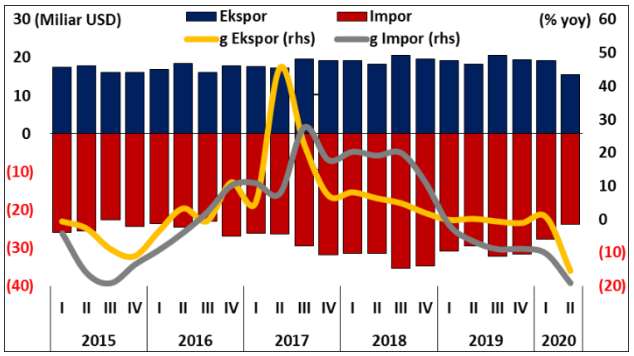

Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik III.8. Perkembangan Ekspor dan Impor Barang Non Migas Luar Negeri

Kontribusi net ekspor pada triwulan II 2020 melambat dibandingkan triwulan I 2020 meski tetap positif. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan ekspor antardaerah maupun ekspor jasa. Penurunan ekspor antardaerah ditengarai akibat perlambatan permintaan daerah di luar Jawa yang juga mengalami penurunan daya beli. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan volume muat barang di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan volume bongkar barang (Grafik III.9). Sementara itu, penurunan ekspor jasa disebabkan terutama oleh menurunnya kedatangan wisatawan asing sejalan dengan pembatasan aktivitas dan ditutupnya lokasi wisata.

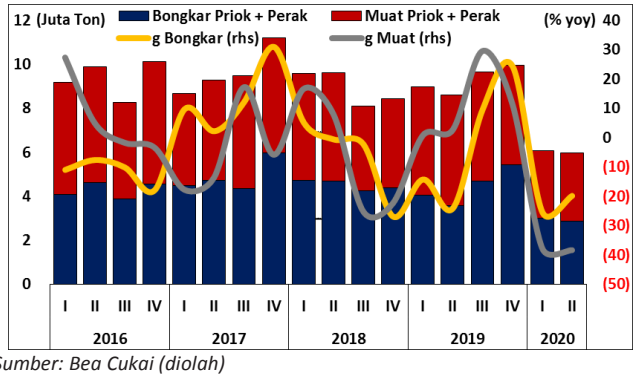

Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik III.9. Perkembangan Aktivitas Bongkar - Muat Barang Pelabuhan Utama di Jawa

Kinerja net ekspor Jawa pada triwulan III 2020 diprakirakan tumbuh lebih rendah karena peningkatan impor LN yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Ekspor ke negara tujuan ekspor utama Jawa diprakirakan tumbuh lebih baik, sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan eksternal dan mulai pulihnya pengiriman di pelabuhan mitra dagang. Namun, impor LN untuk ketiga kelompok barang (barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal) diprakirakan mengalami peningkatan yang lebih tinggi seiring dengan perkiraan membaiknya permintaan dalam negeri, perbaikan kinerja LU utama, dan mulai berlanjutnya investasi korporasi yang sempat tertunda.

Sisi Lapangan Usaha

Pertanian

Kinerja LU pertanian pada triwulan II 2020 meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Perkembangan positif dari LU pertanian bersumber dari panen raya tabama yang terjadi pada bulan April-Mei 2020. Selain itu, produksi aneka cabai dan bawang merah, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur, mengalami peningkatan seiring kondusifnya cuaca pada triwulan II 2020 sehingga turut mendukung kinerja LU pertanian. Di sisi lain, ekspor pertanian sedikit melambat disebabkan penurunan permintaan global sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian tersebut selama periode laporan tercermin dari kembali naiknya kapasitas utilisasi sektor pertanian (Grafik III.10).

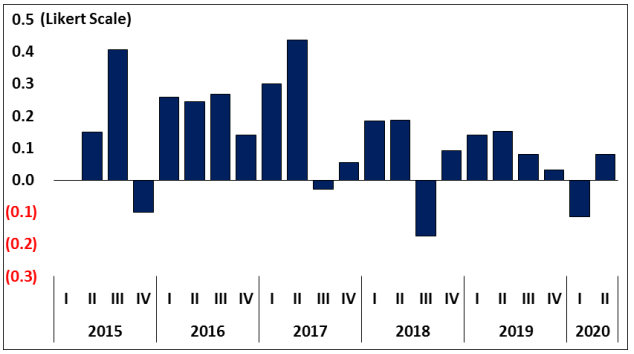

Sumber: BPS (diolah) dan liaison Bank Indonesia

Grafik III.10. Perkembangan Indikator LU Pertanian

Kinerja LU pertanian diprakirakan melambat pada triwulan III 2020. Perlambatan kinerja sektor pertanian dipengaruhi oleh berakhirnya musim panen raya padi. Namun, perkiraan musim kemarau basah yang mencapai puncaknya pada Agustus 2020 diperkirakan dapat mendukung produksi pertanian lebih baik, sehingga menopang kinerja LU pertanian lebih lanjut. Lebih lanjut, perkiraan panen sejumlah komoditas hortikultura di beberapa daerah sentra di Jawa, serta mulai masuknya musim giling tebu diperkirakan berdampak positif pada kinerja LU pertanian.

Industri Pengolahan

Kinerja LU industri pengolahan pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi akibat penurunan permintaan global dan domestik. Perlambatan permintaan global dari negara mitra dagang utama terlihat dari volume perdagangan dunia yang menurun. Selain itu, kendala pasokan bahan baku impor yang antara lain disebabkan oleh *lockdown* di negara asal barang turut memengaruhi kinerja industri pengolahan. Di sisi domestik, permintaan rumah tangga yang turun tajam turut menyebabkan kontraksi LU industri pengolahan. Industri otomotif, TPT, dan alas kaki adalah industri yang paling terdampak pandemi COVID-19. Melambatnya LU industri pengolahan tercermin dari penurunan *Purchasing Manager Index* Jawa (Grafik III.11), penurunan kapasitas utilisasi industri pengolahan di Jawa (Grafik III.12), serta penurunan impor bahan baku dan bahan modal. Meski demikian, ketahanan korporasi pada lapangan usaha industri pengolahan ini masih terjaga sebagaimana tercermin dari rasio NPL korporasi industri pengolahan yang masih berada di bawah *threshold* 5% (Grafik III.13).

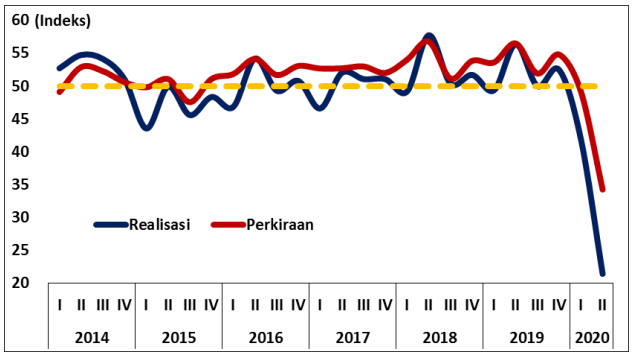

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.11 Perkembangan Indikator *Purchasing Manager Index* Jawa

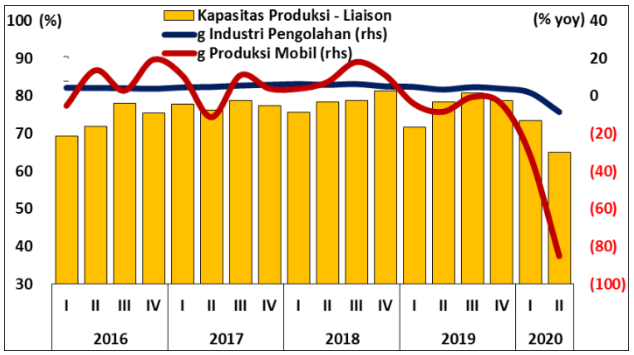

Sumber: BPS diolah, Gaikindo diolah dan Liaison Bank Indonesia

Grafik III.12 Perkembangan Indikator LU Industri Pengolahan

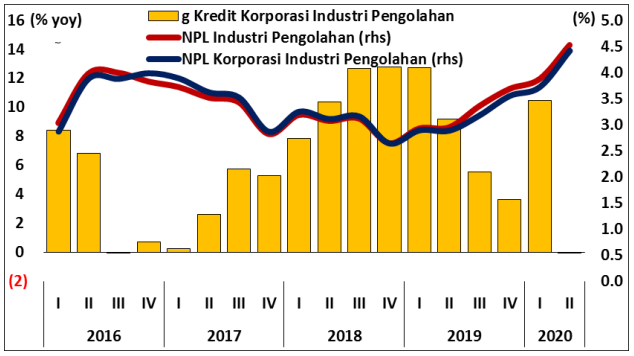

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.13 Perkembangan Kredit dan NPL Industri Pengolahan di Jawa

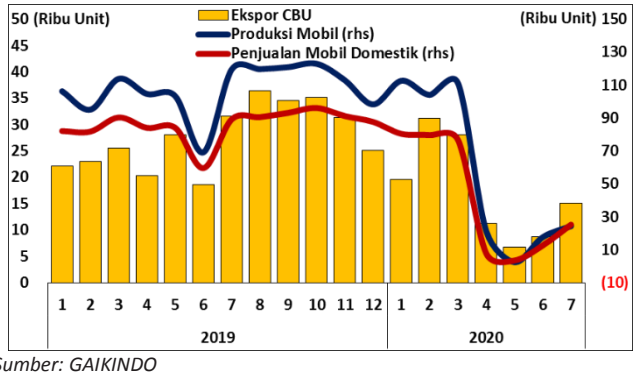

Sumber: GAIKINDO

Grafik III.14 Data Ekspor CBU serta Produksi dan Penjualan Mobil

Dengan prakiraan kondisi global yang sedikit membaik, kinerja LU industri pengolahan diperkirakan mulai mengalami perbaikan walaupun masih sangat terbatas. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, beberapa mitra dagang utama Jawa telah membuka kembali lalu lintas perdagangannya. Kondisi ini mendukung prakiraan membaiknya LU industri pengolahan. Di sisi lain, relaksasi PSBB dan perilaku adaptasi kebiasaan baru oleh masyarakat juga diduga akan turut mendorong kinerja LU industri pengolahan. Perkiraan perbaikan kinerja industri pengolahan antara lain terindikasi dari mulai meningkatnya produksi dan penjualan industri otomotif pada awal triwulan laporan, termasuk ekspor CBU, sejak akhir triwulan II 2020 (Grafik III.14).

Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi. Kondisi Covid-19 turut memengaruhi kecepatan penyelesaian beberapa proyek konstruksi, seperti proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, Tol Cisumdawu fase 2 dan fase 3, pekerjaan konstruksi jalan tol Semarang-Demak, bendungan Bodri, serta proyek LRT di Jakarta. Penurunan kinerja LU konstruksi juga tercermin dari penurunan penjualan semen pada triwulan II 2020, kredit konstruksi serta SBT kegiatan usaha konstruksi dari SKDU (Grafik III.15).

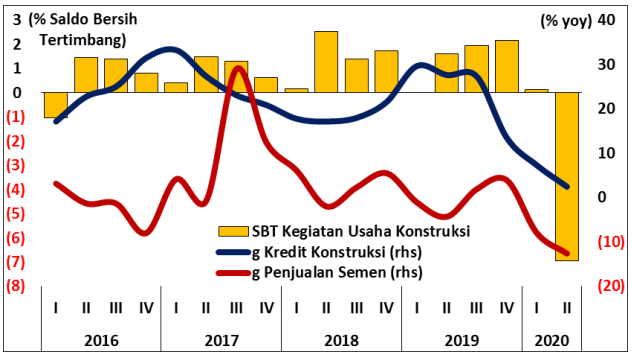

Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik III.15 Perkembangan Indikator LU Konstruksi

Pada triwulan III, kinerja LU konstruksi diprakirakan membaik meski masih terkontraksi. Perbaikan LU konstruksi seiring relaksasi PSBB dan berlanjutnya pekerjaan proyek infrastruktur yang sempat tertunda. Selain itu, kendala impor bahan bahu akibat penerapan *lockdown* di negara mitra dagang diperkirakan mulai berkurang. Kendala mobilitas tenaga kerja asing yang bekerja di berbagai proyek investasi juga mulai teratasi dengan tetap mengedepankan protokol COVID-19. Sementara itu, penurunan alokasi *capex* maupun perolehan kontrak baru beberapa BUMN karya akibat ditundanya sejumlah PSN akibat realokasi anggaran infrastruktur diperkirakan menahan perbaikan kinerja sektor kontruksi .

Perdagangan

Kinerja LU perdagangan pada triwulan II 2020 mengalami penurunan seiring melemahnya permintaan domestik. Kebijakan *Working From Home* (WFH) maupun *Learning From Home* (LFH) sejak pertengahan Maret 2020, yang dilanjutkan dengan penerapan PSBB sejak awal April, dan penutupan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan turut menekan kinerja sektor perdagangan. Penurunan kinerja perdagangan tercermin pula dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (Grafik III.16).

Pada triwulan III 2020, kinerja LU perdagangan diprakirakan membaik, meskipun masih terkontraksi. Perkiraaan perbaikan LU perdagangan dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang

mulai pulih seiring pelonggaran PSBB dan kembali dibukanya pusat perbelanjaan, perkantoran, beberapa lokasi wisata. Namun, pertumbuhan LU perdagangan diperkirakan masih tertahan oleh permintaan domestik yang masih belum setinggi pra-COVID-19 maupun kondisi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19.

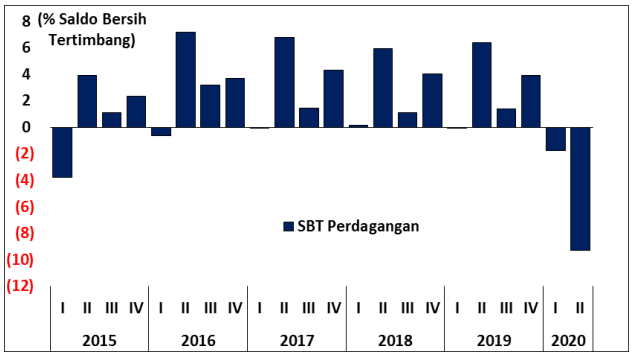

Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik III.16 Perkembangan Indikator LU Perdagangan

Fiskal Daerah

Realisasi belanja APBD di wilayah Jawa pada triwulan II 2020 mengalami penurunan. Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2020 tercatat Rp153,8 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp160,9 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *recofusing* kegiatan dan anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan dampak pembatasan aktivitas masyarakat.

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II-2020 mengalami penurunan. Realisasi pendapatan daerah tercatat -7,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Penurunan pendapatan dipengaruhi rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masing-masing mengalami penurunan sebesar -8,53% dan -9.98% dibanding tahun sebelumnya seiring dengan menurunnya aktivitas ekonomi dan berbagai kebijakan keringanan pembayaran pajak daerah. Sementara penurunan TKDD lebih disebabkan oleh penurunan alokasi TKDD tahun 2020 sejalan dengan implementasi Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020 sebagai bentuk rasionalisasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan dampak COVID-19. Penyaluran TKDD sampai dengan triwulan II 2020 antara lain ditopang oleh realisasi Dana Desa yang lebih tinggi dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari alokasi dana desa. Meski demikian, terdapat beberapa daerah di Jawa dengan realisasi penyaluran dana desa yang masih rendah akibat kendala administrasi.

Perkembangan Inflasi

Seiring dengan aktivitas masyarakat yang terbatas ditengah pasokan pangan yang terkendali, inflasi Jawa pada triwulan II 2020 tercatat rendah. Inflasi Jawa pada akhir triwulan II 2020 tercatat 2,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode akhir triwulan I 2020 yang sebesar 3,28% (yoy). Rendahnya inflasi terjadi secara merata di seluruh daerah di Jawa (Tabel III.2). Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok transportasi (-0,08% (yoy) seiring penurunan tarif transportasi antardaerah, baik udara maupun darat, akibat pembatasan mobilitas masyarakat terkait COVID-19. Demikian halnya dengan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat lebih rendah yakni sebesar 4,16% (yoy) dibanding periode sebelumnya yang sebesar 6,80% (yoy) – (Grafik III.17). Lebih rendahnya capaian inflasi tersebut dipengaruhi oleh pasokan pangan yang cukup melimpah didukung panen dan pasokan dari sumber lainnya.

Tabel III.2 Perkembangan Inflasi Spasial

Provinsi	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
DKI Jakarta	3.23	3.31	2.88	3.27	3.01	3.49	3.72	3.23	3.22	2.18
Jawa Barat	3.91	3.09	3.17	3.54	2.42	3.48	3.85	3.21	3.94	2.76
Banten	3.55	3.00	3.42	3.42	2.97	3.72	3.64	3.30	2.99	2.50
Jawa Tengah	3.39	2.72	2.79	2.82	1.82	2.52	3.12	2.80	3.25	2.48
DI Yogyakarta	3.29	2.69	2.77	2.66	2.61	3.11	2.99	2.77	2.95	1.95
Jawa Timur	3.17	2.67	2.76	2.86	2.35	2.40	2.45	2.12	2.28	2.04
Jawa	**3.47**	**3.04**	**2.98**	**3.24**	**2.59**	**3.22**	**3.46**	**3.00**	**3.28**	**2.38**

Sumber: BPS, diolah

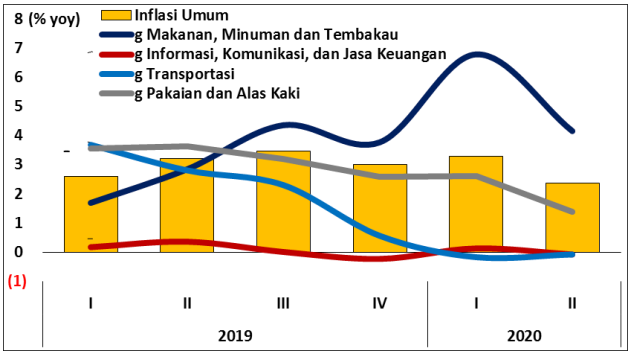

Sumber: BPS (diolah)

Grafik III.17 Perkembangan Inflasi Wilayah Jawa

Beberapa komoditas yang memberi andil pada inflasi di wilayah Jawa pada periode triwulan II 2020 antara lain daging ayam ras, bawang merah, serta aneka rokok. Kenaikan harga daging ayam ras disebabkan terbatasnya pasokan karena adanya kebijakan pengurangan pasokan *day old chicks* (DOC) pasca terjadi *over supply* pada awal triwulan II 2020, sementara kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh kurang optimalnya pasokan panen di saat musim hujan. Adapun kenaikan harga rokok putih dan rokok kretek filter yang terjadi seiring dampak dari kenaikan cukai rokok pada awal tahun yang dibebankan secara berkala pada konsumen. Di samping itu, meningkatnya harga emas perhiasan turut memberikan andil pada inflasi Jawa sepanjang triwulan II 2020.

Memasuki triwulan III 2020, tekanan inflasi di berbagai daerah di Jawa diprakirakan tetap rendah. Inflasi Juli 2020 tercatat 1,96% (yoy), lebih rendah dari bulan Juni 2020 sebesar 2,38% (yoy). Penurunan inflasi pada awal triwulan III 2020 terjadi di semua daerah di Jawa, didukung oleh tercukupinya pasokan komoditas pangan utama, seperti bawang merah dan daging ayam ras serta masih cukupnya pasokan bawang putih, beras, dan aneka cabai. Risiko kemarau pada paruh kedua 2020 diperkirakan minimal sehingga tidak akan mengganggu pasokan pangan. Di sisi lain, risiko kenaikan harga diperkirakan masih terbatas seiring dengan peningkatan permintaan yang masih

belum setinggi kondisi pra-COVID-19. Namun, tren kenaikan harga emas global perlu menjadi perhatian.

Ke depan, TPID di Jawa tetap berfokus untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kerangka ketersediaan pasokan, TPID mendorong pelaksanaan *contract farming*, optimalisasi mesin *Controlled Atmosphere Storage* (CAS), optimalisasi jaringan irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) serta bantuan sumur bor dan pompa. Sementara di sisi keterjangkauan harga, TPID melakukan program perlindungan asuransi usaha tani guna melindungi petani dari kegagalan panen, serta pelaksanaan pasar murah *online* untuk menjaga kestabilan harga. Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, TPID di jawa mendorong kerjasama antardaerah, optimalisasi pasar tradisional dengan bekerjasama dengan penyedia transportasi *online*.

Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran Nontunai

Transaksi nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2020 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2020, transaksi nominal SKNBI di Jawa tumbuh 11,43% (yoy) dengan nominal mencapai Rp 816,85 triliun dan volume sebanyak 32,44 juta transaksi (grafik III.18). Dalam perkembangannya, provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mencatatkan kenaikan rata-rata harian nominal transaksi SKNBI meski dengan rata-rata harian volume transaksi yang menurun. Sementara itu, daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten mencatatkan penurunan baik rata-rata harian nominal maupun volume transaksi SKNBI. Secara spasial, transaksi SKNBI didominasi oleh DKI Jakarta (79,8%), disusul Jawa Timur (8,1%), dan Jawa Barat (6,5%).

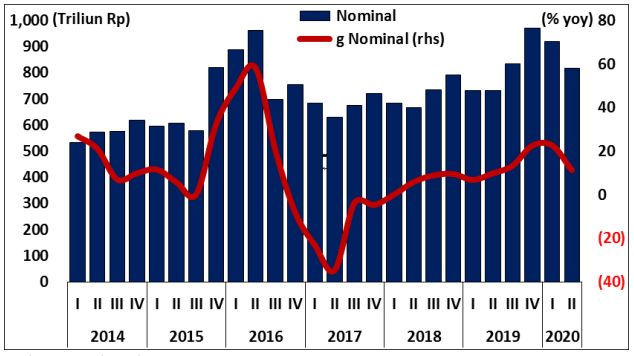

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.18 Nominal Transaksi SKNBI

Transaksi nontunai pada triwulan II 2020 melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) masih mengalami peningkatan. Pertumbuhan nominal dan volume transaksi RTGS di Jawa meningkat masing-masing sebesar 40,8% (yoy) dan 77,8% (yoy) dan terjadi di hampir seluruh provinsi di Jawa kecuali Jawa Tengah. Sementara itu, nominal RTGS mencapai Rp4.412 triliun dengan volume transaksi sebanyak 1.019 ribu transaksi (grafik III.19). Transaksi RTGS di Jawa didominasi oleh DKI Jakarta dengan porsi 82,3%, Jawa Timur (9,2%), dan Jawa Barat (4,6%). Melambatnya transaksi nontunai retail melalui SKNBI tidak terlepas dari menurunnya konsumsi dan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal maupun informal, sebagaimana tercermin dari Survei Konsumen di wilayah Jawa pada Juni 2020.

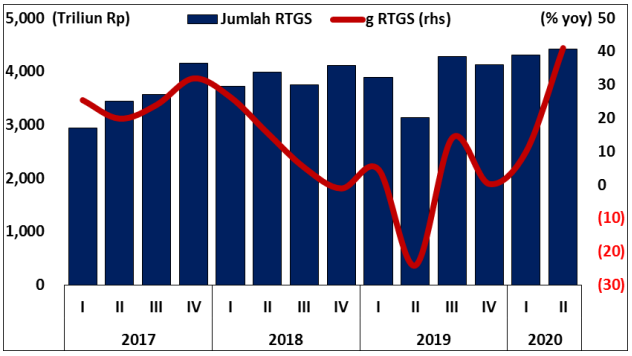

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.19 Nominal Transaksi RTGS

Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2020, arus uang Rupiah di Jawa mengalami *net inflow*. *Net inflow* uang Rupiah di Jawa tercatat sebesar Rp0,14 triliun atau berkebalikan dibandingkan *net outflow* yang terjadi pada triwulan II 2019 (Grafik III.20). Kondisi ini dipengaruhi oleh Idul Fitri 2020 yang jatuh pada 22-23 Mei 2020 sehingga ditengarai dalam triwulan laporan sudah terjadi arus masuk kembali. Selain itu, berkurangnya penarikan uang tunai saat lebaran di masa pandemi COVID-19 tercermin dari total *outflow* triwulan II 2020 yang relatif lebih rendah dari triwulan II 2019.

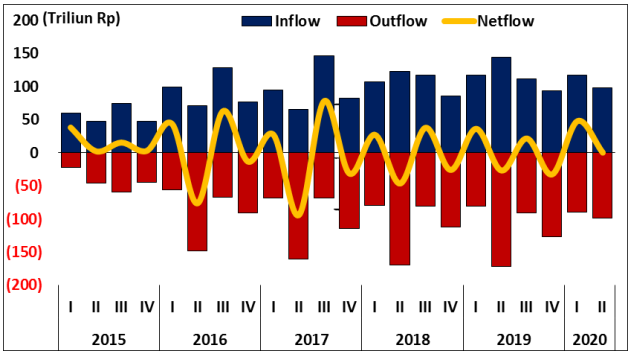

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.20 Perkembangan *Inflow* dan *Outflow*

Bank Indonesia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat dengan disertai penguatan protokol kesehatan dan mitigasi risiko penyebaran COVID-19. Pemenuhan tersebut dilakukan baik dari segi jumlah, jenis pecahan, maupun kebersihannya. Kegiatan pemenuhan uang kartal terutama dilakukan dengan mengoptimalkan loket penukaran di perbankan umum dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejalan dengan upaya pembukaan aktivitas ekonomi, beberapa kegiatan terkait perkasan yang dihentikan pada awal masa pandemi telah mulai dilaksanakan secara terbatas. Ke depan, kegiatan kas keliling dalam dan luar kota akan dilaksanakan kembali dengan mengedepankan protokol kesehatan. Hal ini ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga kualitas pelayanan kepada publik dalam penyediaan uang layak edar (ULE)

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan II 2020, transaksi jual-beli Uang Kertas Asing (UKA) melalui KUPVA BB berizin di Jawa mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2020 (grafik III.21). Total transaksi KUPVA BB selama triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp41,12 triliun, terdiri dari transaksi jual sebesar Rp20,51 triliun atau turun sebesar 45,8% (qtq) dibandingkan triwulan I 2020 dan transaksi beli Rp20,61 triliun atau turun sebesar -9,4% (qtq) dibandingkan triwulan I 2020. Penurunan transaksi terjadi di seluruh provinsi di Jawa. Mata uang yang mendominasi transaksi jual maupun beli di Jawa adalah dolar AS (porsi 23%) dan dolar Singapura (porsi 16%). Penurunan transaksi jual maupun beli valuta asing ini sejalan dengan turunnya jumlah kunjungan wisatawan selama pandemi COVID-19.

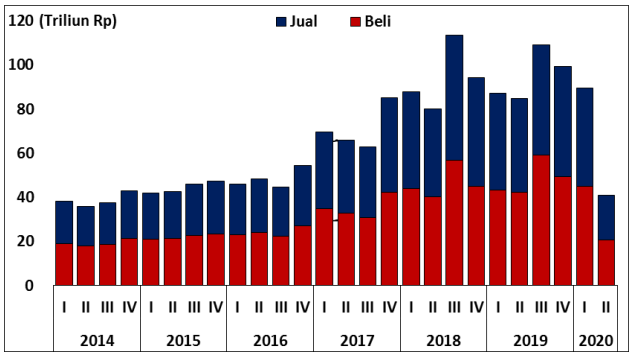

Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.21 Perkembangan Transaksi Jual Beli Valas di KUPVA BB

Prospek Perekonomian

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 diperkirakan memengaruhi kinerja perekonomian Jawa untuk keseluruhan tahun 2020. Pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak pandemi COVID-19 memberikan tekanan kepada perekonomian Jawa dari sisi eksternal. Sementara itu, terbatasnya aktivitas sosial ekonomi di beberapa daerah ikut memengaruhi kinerja permintaan domestik. Berdasarkan kondisi tersebut, ekonomi Jawa pada tahun 2020 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Perlambatan ekonomi diperkirakan dialami oleh seluruh daerah di Jawa.

Dari sisi eksternal, penurunan permintaan global berdampak pada penurunan kontribusi net ekspor Jawa. Perkembangan kinerja ekspor yang paling terdampak antara lain indutri alas kaki, TPT, otomotif. Kontribusi net ekspor mengalami penurunan seiring dengan turunnya permintaan mitra dagang utama di tengah pelemahan ekonomi pada masa karantina dan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang utama Jawa. Sebaliknya, produksi dari beberapa industri yang bergantung pada bahan baku impor juga terhambat terkait COVID-19 di negara asal impor. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga turut menekan kinerja ekspor jasa. Lebih lanjut, kinerja lapangan usaha utama berdampak pada penurunan permintaan domestik.

Menurunnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor diikuti kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan konsolidasi. Beberapa perusahaan di Jawa melakukan penundaan investasi, maupun efisiensi biaya produksi. Penundaan investasi antara lain terindikasi dari penurunan kinerja investasi bangunan maupun investasi nonbangunan. Selain itu, berkurangnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) akibat relokasi anggaran infrastruktur juga berpengaruh pada kinerja investasi bangunan. Pembangunan beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang tertunda, diantaranya beberapa proyek di provinsi Jawa Timur, seperti di kawasan Gerbangkartosusila, Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis, Lintas Selatan dan proyek Migas di Bojonegoro, serta pembangunan smelter pengolahan mineral di Gresik.

Kinerja investasi Jawa ke depan diperkirakan ditopang oleh adanya relokasi perusahaan global. Perkembangan terkini mengindikasikan terdapat rencana pengalihan beberapa pabrik dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan, yang diantaranya memilih untuk relokasi ke Jawa pada semester II 2020. Perkembangan ini memberikan sinyal yang positif bagi prospek investasi ke depan, khususnya investasi manufaktur. Dalam kaitan ini, kesiapan daerah untuk meningkatkan kinerja investasi perlu terus diperkuat untuk dapat mengoptimalkan momentum peluang masuknya investasi baru (lihat Boks 2).

Dari sisi fiskal, berbagai insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah–diperkirakan dapat menopang konsumsi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.03/2020, insentif fiskal yang telah diterapkan Pemerintah Pusat, antara lain PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% serta pengembalian pendahuluan PPN. Sementara insentif fiskal di tingkat daerah, antara lain penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, tidak ada kenaikan PBB 2020, pengurangan pokok pajak daerah bagi pelaku usaha terdampak COVID-19, penghapusan BBNKB selama periode tertentu, serta pembebasan tarif progresif. Sementara, dorongan dari sisi fiskal daerah juga akan berasal dari peningkatan penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan pilkada serentak pada akhir tahun 2020.

Prospek Inflasi

Inflasi wilayah Jawa sampai dengan akhir 2020 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Penurunan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan seiring dengan perlambatan ekonomi. Selain itu, perkiraan tekanan inflasi kelompok bahan pangan yang diperkirakan tidak setinggi tahun lalu juga menahan laju inflasi pada tahun 2020. Inflasi bahan pangan yang terkendali didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif dan minimnya risiko kemarau pada tahun 2020.

Rendahnya inflasi juga didukung ketersediaan pasokan komoditas pangan yang tetap terjaga. Kecukupan pasokan tersebut tidak terlepas dari berbagai peningkatan produktivitas pertanian yang dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang bersinergi dalam TPID. Upaya digitalisasi UMKM pertanian binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah melalui pemanfaatan teknologi

pertanian di sisi produksi, *online retailer* di sisi hilir serta pengunaan sistem pembayaran non tunai juga turut mendukung ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi.

Beberapa upaya pengendalian inflasi tetap dilakukan oleh TPID dalam kerangka 4K. Hal ini dilakukan di seluruh Jawa, seperti optimalisasi mesin *Controlled Atmosphere Storag*e (CAS), pemberian bantuan sumur bor dan pompa, program perlindungan asuransi usaha tani guna melindungi petani dari kegagalan panen, pelaksanaan pasar murah *online*, serta optimalisasi pasar tradisional dengan bekerjasama dengan penyedia transportasi *online*. Beberapa langkah tersebut diharapkan mampu menahan tekanan inflasi yang diperkirakan berasal dari kenaikan cukai dan HJE rokok dan inflasi kelompok transportasi.

BOKS 2

Relokasi Industri serta Kesiapan Daerah dan Kawasan Industri di Jawa dalam Mendukung Peningkatan Investasi

Kondisi Investasi saat ini

Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta Pandemi COVID-19 telah menciptakan ketidakpastian bagi perekonomian dunia. Disrupsi pada *global value chain*, baik karena kebijakan proteksi perdagangan maupun pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan produktivitas dan kapasitas perekonomian yang diikuti dengan sikap *wait and see* pelaku usaha dalam merealisasikan investasi. PBB memperkirakan bahwa investasi global akan turun sebesar 30%-40% pada tahun 2020 hingga 2021. Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia yang mengalami tren penurunan angka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada triwulan II 2020, kinerja pertumbuhan PMDN Indonesia hanya sebesar 2,2% (yoy) melambat dibandingkan triwulan I 2020 sebesar 32,4% (yoy), dan merupakan capaian terendah dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, kinerja pertumbuhan PMA Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 2,7% (yoy).

Di Jawa, penurunan investasi terkonfirmasi oleh penurunan kinerja penanaman modal, baik domestik maupun asing. Pada triwulan II 2020, pertumbuhan PMDN dan PMA di Jawa masing-masing terkontraksi sebesar 34,9% (yoy) dan 36,9% (yoy) (Grafik III.22 dan Grafik III.23). Kondisi tersebut tidak terlepas dari perlambatan kinerja industri pengolahan yang merupakan kontributor utama perekonomian Jawa dengan pangsa mencapai 28% dari PDRB Jawa. Oleh karena itu, perbaikan kinerja industri pengolahan di Jawa akan berdampak pada peningkatkan investasi di Jawa.

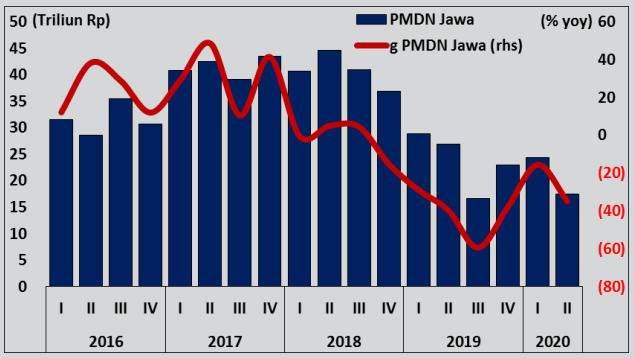

Sumber: BKPM, diolah

Grafik III.22. Perkembangan PMDN di Jawa

Di tengah tren relokasi perusahaan ke Indonesia, sejumlah kendala investasi perlu untuk segera diatasi. Beberapa kendala yang masih mengemuka, seperti terkait perizinan investasi (termasuk lahan), serta kualitas dan regulasi daerah perlu segera diatasi untuk memastikan daya saing investasi yang lebih baik. Langkah upaya terpadu yang terus ditempuh oleh Pemerintah melalui berbagai penyederhanaan proses perijinan melalui *Online Single Submission* (OSS) hingga pemberian insentif perpajakan, akan memberikan optimisme bagi peningkatan kinerja investasi ke depan. Terlebih, memperbesar peluang Indonesia untuk dapat menangkap tren relokasi perusahaan global.

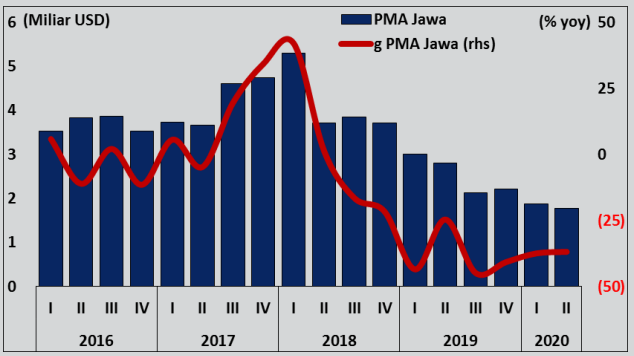

Sumber: BKPM, diolah

Grafik III.23. Perkembangan PMA di Jawa

Tren Relokasi Perusahaan Global

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan peluang pengembangan industri di Indonesia. Potensi pengembangan industri dapat difokuskan pada industri yang produknya mendapatkan hambatan perdagangan, baik di Amerika Serikat maupun di Tiongkok. Selain itu, pengembangan industri dapat diakselerasi dengan memanfaatkan peluang relokasi perusahaan global, antara lain dari Tiongkok, guna mensiasati hambatan dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Pada paruh pertama 2020, terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan berencana untuk merelokasi industrinya ke berbagai tempat di Jawa. Relokasi perusahaan yang bergerak dalam industri ban, piranti *sound system*, serta piranti elektronik, *home appliances,* dan *spare part* untuk otomotif ini berpotensi menambah investasi yang cukup besar yakni mencapai USD780 juta. Adapun relokasi investasi tersebut rencananya akan dilakukan pada beberapa daerah di Jawa, yakni Jawa Barat dengan total investasi USD616 juta, Banten dengan investasi sebesar USD150 juta, dan Jawa Tengah dengan investasi sebesar USD14 juta. Selain mensiasati hambatan dagang yang dikenakan Amerika Serikat atas produk asal Tiongkok, relokasi ini juga tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia, seperti potensi pasar yang besar sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, serta biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah

dibandingkan Tiongkok[17]. Dalam kaitan ini, peran pemerintah provinsi menjadi sangat besar untuk dapat memastikan realisasi relokasi tersebut terutama dengan memberikan kepastian dalam perizinan investasi se-efisien mungkin. Selain itu, kesiapan infrastruktur serta tingkat produktivitas sumber daya manusia yang tinggi menjadi kunci bagi daya saing daerah.

Adanya relokasi tersebut dapat meningkatkan *local value chain* dan *global value chain* industri manufaktur di Jawa maupun Nasional. Peningkatan *global value chain* terutama didorong oleh peningkatan produksi dari enam perusahaan tersebut, yang mayoritas produknya akan di ekspor ke Amerika Serikat, serta beberapa negara lain di Asia dan Eropa. Sementara itu, peningkatan *local value chain* ditopang potensi peningkatan permintaan bahan baku lokal dari keenam perusahaan tersebut, seperti karet, kayu dan olahan kayu, serta logam. Namun demikian, daya saing bahan baku lokal harus terjaga baik dari sisi harga maupun sisi kualitas agar tidak kalah bersaing dengan bahan baku impor, sehingga bisa terserap dengan optimal oleh industri hilir domestik.

Untuk mengoptimalkan peluang relokasi perusahaan global, kesiapan kawasan industri juga perlu terus dipersiapkan. Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, merupakan salah satu kawasan yang secara khusus dipersiapkan untuk menjadi tujuan relokasi. Kawasan Industri Batang tidak saja menawarkan beberapa keunggulan khususnya dari sisi biaya, seperti kemudahan penggunaan lahan, upah buruh yang relatif rendah, namun juga menawarkan lokasi yang strategis, yaitu berada di lintasan Tol Trans Jawa, Kereta Api Jakarta-Surabaya, serta Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Selain itu mengingat status kepemilikan lahan yang awalnya dimiliki oleh BUMN perkebunan, proses pembebasan lahan diperkirakan lebih mudah, sehingga pembangunan Kawasan Industri Batang bisa dipercepat. Proses pembangunan kawasan industri Batang telah dimulai sejak bulan Juli 2020 dan ditargetkan bisa selesai dalam 6 bulan ke depan.

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Jawa Tengah juga memiliki potensi besar menarik investor. Kawasan Industri Kendal telah berubah status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sejak Desember 2019. KEK sejatinya mampu menyediakan fasilitas non-fisik yang tidak dimiliki Kawasan Industri, seperti fasilitas pengurangan PPN dan pajak barang mewah. Namun demikian, penyelesaian fasilitas fisik yaitu sarana dan prasarana penunjang industri, seperti ketersediaan air masih menjadi kendala. Percepatan penyelesaian fasilitas fisik ini menjadi target perbaikan utama di tahun 2020 seiring dibentuknya Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2020.

Merespons peluang relokasi perusahaan global ke Indonesia, berbagai langkah terus ditempuh untuk meningkatkan daya saing[18]. Adapun upaya perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah, antara lain (i) percepatan perizinan berusaha melalui penyempurnaan *Online Single Submission* (OSS) termasuk integrasi insentif bagi pelaku usaha[19] , (ii) optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam percepatan kemudahan berusaha[20], dan (iii) percepatan penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas serta infrastruktur kawasan industri. Di tengah pandemi COVID-19 yang berlangsung, pemerintah juga berupaya untuk terus menjaga kinerja industri antara lain dengan memberikan Izin Operasional dan Mobiitas Kegiatan Industri (IOMKI)[21].

[17] Upah minimum rata-rata Indonesia per akhir 2019 adalah sebesar USD1,304/tahun sedangkan upah minimum rata-rata Tiongkok di periode yang sama adalah sebesar USD2,031/tahun.

[18] Pada periode 2018 -2019 terdapat 56 perusahaan yang merelokasi produksinya dari Tiongkok, namun tidak satupun yang merelokasi produksinya ke Indonesia, di mana 28 perusahaan merelokasi ke Vietnam, 11 perusahaan ke Taiwan, dan 8 perusahaan ke Thailand, dan sisanya terbagi ke negara berkembang lain selain Indonesia.

[19] *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*

[20] Surat Mendagri No.067/14066/SJ dan 067/14067/SJ tanggal 16 Desember 2019 yang berisi perintah untuk pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan ke DPMPTSP, evaluasi/pembatalan/revisi PERDA/PERKADA yang menghambat, serta penggunaan teknologi informasi untuk integrasi data

[21] Surat Edaran Menperin No.4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional Pabrik dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAGIAN 4
PEREKONOMIAN KALIMANTAN

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada triwulan II 2020 mengalami tekanan akibat dampak COVID-19. Penurunan kinerja perekonomian dipengaruhi pelemahan dari sisi domestik maupun kinerja eksternal. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial memengaruhi permintaan domestik sehingga pola konsumsi periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) tumbuh lebih rendah dari historisnya. Selain itu, dukungan fiskal daerah masih terbatas akibat menurunnya sumber penerimaan. Di sisi lain, penurunan kinerja perekonomian negara mitra dagang utama, mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produk eskpor utama Kalimantan.

Di sisi inflasi, hingga akhir triwulan II 2020 inflasi wilayah Kalimantan tercatat rendah dan berada dalam kisaran sasaran nasional 3±1%. Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh terbatasnya tekanan permintaan akibat pembatasan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta penurunan tarif angkutan udara, di tengah pasokan pangan yang memadai didukung minimalnya kendala distribusi.

Perekonomian Kalimantan pada paruh kedua 2020 akan terus membaik didorong kenaikan permintaan domestik sejalan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peningkatan realisasi belanja fiskal, serta mulai pulihnya kinerja ekspor. Perkembangan sampai dengan bulan Juli 2020 memperkuat indikasi pemulihan permintaan domestik dimaksud, tercermin pada kenaikan indikator dini seperti mobilitas masyarakat, membaiknya aktivitas investasi yang sempat tertahan, serta mulai pulihnya aktivitas industri pada negara mitra dagang utama, sehingga akan mendorong permintaan beberapa produk ekspor seperti batubara dan crude palm oil (CPO). Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan untuk keseluruhan tahun 2020 diprakirakan tidak setinggi tahun sebelumnya, akibat tekanan yang terjadi terkait COVID-19. Dengan kondisi tersebut capaian inflasi pada 2020 diprakirakan tetap rendah dan berada pada kisaran sasaran, meski beberapa risiko inflasi pada semester II tetap perlu menjadi perhatian.

Pertumbuhan Ekonomi

Tekanan eksternal maupun domestik menyebabkan ekonomi Kalimantan pada triwulan II 2020 terkontraksi. Perekonomian Kalimantan pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,35% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh positif 2,32% (yoy) (Tabel IV.1). Penurunan paling dalam terjadi pada komponen eskpor yang lebih lanjut tercermin dari kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan LU industri pengolahan yang menurun. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh daerah di Kalimantan, dengan yang paling dalam dialami Kalimantan Timur. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini terutama dipengaruhi penangguhan kargo batubara ke Tiongkok dan India. Memasuki triwulan III 2020, perekonomian Kalimantan diprakirakan mulai membaik, terutama dengan pemulihan permintaan domestik pasca pelonggaran PSBB. Selain itu, pemulihan juga ditopang oleh kembali berlanjutnya pengerjaan proyek strategis Kalimantan yang sempat terkendala.

Tabel IV.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kalimantan

Provinsi	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Kalimantan Barat	5.03	5.23	4.89	5.13	5.07	5.17	5.11	5.08	4.66	5.00	2.69	(3.40)
Kalimantan Tengah	4.48	5.57	6.40	6.12	5.65	5.96	7.54	5.17	6.02	6.16	2.95	(3.15)
Kalimantan Selatan	4.99	4.57	5.10	5.78	5.12	4.28	4.19	4.02	3.85	4.08	4.18	(2.61)
Kalimantan Timur	1.80	1.96	2.06	4.84	2.67	5.11	5.06	6.31	2.67	4.77	1.27	(5.46)
Kalimantan Utara	5.82	5.03	5.64	7.65	6.05	7.21	7.91	6.56	6.04	6.91	5.01	(3.35)
Kalimantan	**3.26**	**3.38**	**3.63**	**5.34**	**3.91**	**5.23**	**5.39**	**5.67**	**3.73**	**4.99**	**2.32**	**(4.35)**

Sumber: BPS

Kinerja Sisi Penggunaan

Konsumsi

Pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada penurunan konsumsi akibat terbatasnya mobilitas masyarakat. Hal tersebut juga berdampak pada perubahan perilaku konsumsi saat periode HBKN yang tidak setinggi pola historisnya. Kontraksi konsumsi terutama dipengaruhi oleh penurunan aktivitas konsumsi swasta. Konsumsi rumah tangga terkontraksi 2,41% (yoy), sementara konsumsi LNPRT juga mengalami kondisi yang sama. Perlambatan konsumsi rumah tangga terjadi di seluruh daerah di Kalimantan. Perlambatan konsumsi tersebut sejalan dengan indikator Indeks Keyakinan Konsumen, meski secara bulanan, mulai terdapat indikasi perbaikan pada akhir triwulan II 2020 (Grafik IV.1).

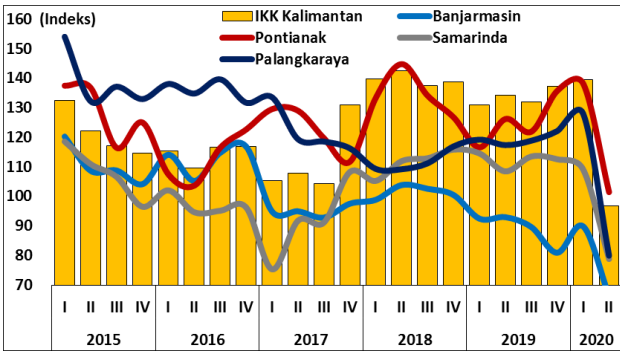

Sumber: Survei Konsumen

Grafik IV.1. Indeks Keyakinan Konsumen

Perlambatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari pertumbuhan kredit sektor rumah tangga yang melambat. Kredit rumah tangga tumbuh 8,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020 sebesar 8,53% (yoy), dengan risiko kredit yang cenderung meningkat, namun masih di bawah 5% (Tabel IV.2). Perlambatan tersebut bersumber dari seluruh jenis kredit, terutama kredit peralatan RT dan Multiguna.

Memasuki triwulan III 2020, kinerja konsumsi swasta diprakirakan mulai pulih seiring pelonggaran PSSB. Dorongan pemulihan konsumsi rumah tangga juga didukung oleh dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) serentak, berlanjutnya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah, serta realisasi fiskal daerah yang umumnya meningkat pada paruh kedua. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi Konsumen yang meningkat (Grafik IV.2).

Tabel IV.2. Penyaluran Kredit Rumah Tangga di Kalimantan

	Growth Kredit (% yoy)			NPL (%)		
	IV '19	I '20	II '20	IV '19	I '20	II '20
Kredit RT	7.75	8.53	8.29	1.95	2.06	2.25
KPR	5.36	4.55	3.22	4.15	4.24	4.40
KKB	9.55	11.95	9.71	1.57	1.77	2.65
Alat RT	43.43	44.94	32.52	1.81	2.19	3.22
Multiguna	9.35	16.35	12.21	0.78	0.92	1.01
Lainnya	2.36	(45.61)	(1.55)	1.13	1.19	1.20

Sumber: LBU, diolah

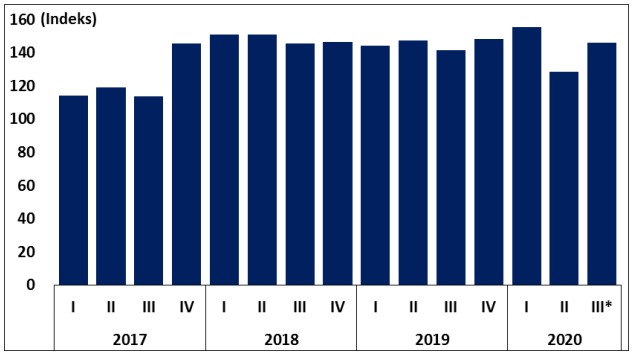

Sumber: Survei Konsumen

Grafik IV.2. Indeks Ekspektasi Konsumen

Perlambatan konsumsi tidak hanya terjadi pada konsumsi swasta, namun juga konsumsi pemerintah. Perubahan postur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat penurunan kinerja perekonomian berdampak pada sumber penerimaan dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih terbatas. Di sisi lain, Pemda juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran guna mendukung upaya penanggulangan COVID-19 di daerah. Penurunan penerimaan fiskal antara lain berdampak pada penyesuaian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19 di wilayah Kalimantan masih relatif terbatas yaitu sebesar 7,06% atau Rp0,48 triliun yang digunakan untuk belanja kesehatan sebesar Rp0,21 triliun, penanganan dampak ekonomi, sebesar Rp0,14 triliun dan penyediaan jaringan pengaman sosial (*social safety net*/JPS) sebesar Rp0,13 triliun.

Secara keseluruhan, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 2,58% (yoy). Peran konsumsi pemerintah yang terbatas terjadi di seluruh provinsi terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara karena realisasi belanja modal dan fisik yang tertahan seiring penundaan pengerjaan beberapa proyek strategis. Namun, memasuki triwulan III 2020 konsumsi pemerintah diprakirakan mulai meningkat didorong percepatan penyerapan stimulus fiskal untuk upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, serta peningkatan belanja terkait persiapan Pilkada Serentak dan pelaksanaan proyek pemerintah yang kembali berlanjut.

Investasi

Pembatasan aktivitas masyarakat juga berdampak pada tertahannya realisasi investasi di Kalimantan pada triwulan II 2020. Pertumbuhan investasi pada triwulan II 2020 terkontrasi -0,86% (yoy), turun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masih tumbuh positif 2,53% (yoy). Beberapa penyesuaian jadwal investasi terjadi pada beberapa proyek strategis di Kalimantan, seperti pembangunan PLTA di Kalimantan Utara dan pembangunan *smelter* alumina tahap II di Kalimantan Barat. Meski demikian, masih terdapat proyek yang berlangsung normal, seperti proyek RDMP (*Refinery Development Master Plan*) V Balikpapan, proyek pembangunan Pelabuhan Kijing, dan beberapa proyek pemerintah lainnya, seperti Jembatan Pulau Balang dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, sehingga menahan penurunan lebih dalam. Hal ini juga terindikasi dari data realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) triwulan II 2020 yang membaik (Grafik IV.3).

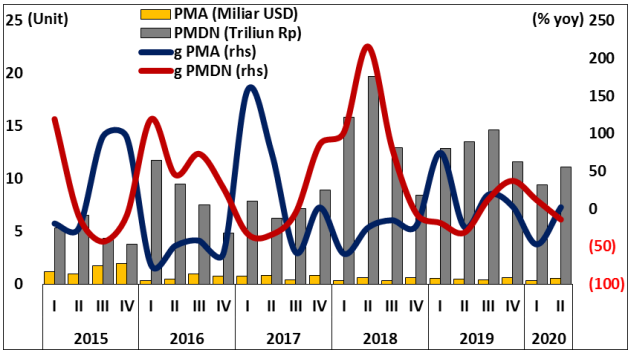

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik IV.3. Realisasi PMA dan PMDN di Kalimantan

Kinerja investasi diprakirakan membaik pada triwulan III 2020 pasca pelonggaran PSBB. Beberapa kendala teknis investasi pada paruh pertama telah dapat diatasi, baik terkait mobilitas tenaga ahli maupun logistik barang. Pengerjaan beberapa proyek yang sebelumnya sempat tertunda akan kembali berlanjut antara lain proyek pembangkit listrik Tanah Laut di Kalimantan Selatan, pembangunan Smelter Alumina Tahap II di Kalimantan Barat, pembangunan PLTA di Kalimantan Utara serta investasi *multiyears* oleh korporasi swasta lainnya.

Kinerja Ekspor Impor

Penurunan permintaan eksternal dan pelemahan harga komoditas menekan kinerja ekspor Kalimantan pada triwulan II 2020. Ekspor terkontraksi sebesar 5,16% (yoy) pada triwulan II 2020. Penurunan aktivitas ekonomi dunia yang juga disebabkan oleh pandemi COVID-19, berdampak pada *oversupply* batubara di pasar global. Aktivitas ekonomi Tiongkok yang mulai pulih belum mampu mendorong peningkatan permintaan ekspor batubara Kalimantan akibat pasokan domestik yang masih mencukupi dan telah berangsur pulih pasca *lockdown* di triwulan I 2020 (Grafik IV.4). Di tengah pelemahan ekspor batubara, ekspor komoditas CPO mulai mengalami peningkatan pada Juni 2020 dipengaruhi pelonggaran aktivitas ekonomi di India sehingga mulai mendorong importir untuk melakukan *restocking.* Perkembangan ini lebih lanjut menahan kontraksi ekspor Kalimantan lebih dalam.

Perbaikan ekspor diprakirakan mulai terjadi pada triwulan III, seiring membaiknya aktivitas ekonomi negara mitra dagang

utama. Dampak COVID-19 di Tiongkok yang mereda telah mendorong pemulihan aktivitas industri, tercermin dari *purchasing manager's index* (PMI) yang membaik (Grafik IV.5). Hal ini menjadi pendorong peningkatan kebutuhan batubara untuk memasok kebutuhan energi. Selain itu, terdapat potensi pelonggaran kuota impor batubara di Tiongkok karena harga batubara domestik negara tersebut yang lebih tinggi dibandingkan harga batubara impor. Selain itu, ekspor CPO juga diprakirakan membaik seiring pasokan minyak nabati yang berkurang akibat banjir di Tiongkok sehingga menyebabkan gangguan produksi minyak canola.

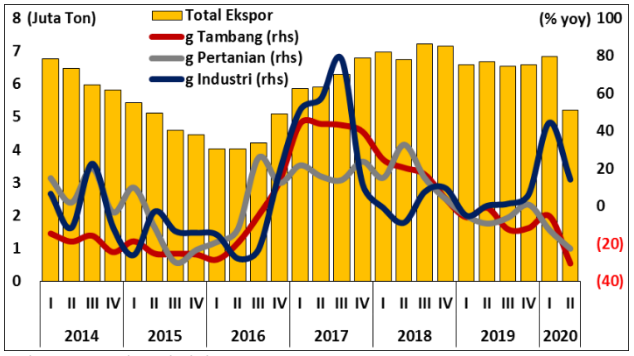

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik IV.4. Nilai Ekspor Kalimantan

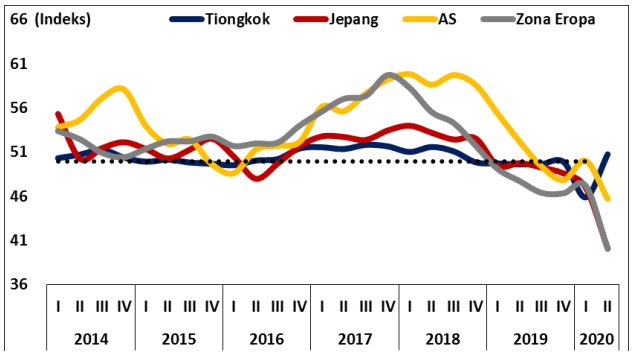

Sumber: Bloomberg

Grafik IV.5. Purchasing Managers' Index

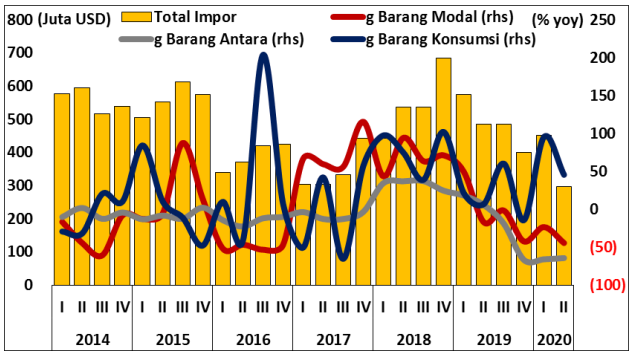

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik IV.6. Impor Menurut Kategori Barang

Sejalan dengan ekspor, kinerja impor juga tertekan pada triwulan II ditandai kontraksi pertumbuhan sebesar 3,53% (yoy). Kontraksi impor disebabkan penurunan permintaan domestik dan aktivitas kilang minyak di Kalimantan Timur. Hal ini tercermin dari impor barang konsumsi dan barang modal yang mengalami penurunan (Grafik IV.6). Pada triwulan III 2020 impor Kalimantan diperkirakan mengalami perbaikan akibat meningkatnya konsumsi, seiring pemulihan aktivitas ekonomi pasca pelonggaran PSBB dan akselerasi investasi pada berbagai proyek strategis Kalimantan.

Kinerja Lapangan Usaha

Pertanian

Pertumbuhan kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kalimantan terganggu karena faktor cuaca. LU pertanian tumbuh 0,82% (yoy) lebih rendah dari triwulan I 2020 yang sebesar 2,42% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh penurunan aktivitas perkebunan kelapa sawit akibat kemarau panjang pada paruh kedua tahun 2019. Perlambatan kinerja LU pertanian, juga disebabkan oleh penurunan produksi karet akibat kualitas sadapan yang menurun sebagai dampak curah hujan yang tinggi pada triwulan berjalan. Faktor curah hujan tersebut juga berdampak pada penurunan produksi padi di beberapa sentra produksi. Hal ini dikonfirmasi dengan perkembangan produksi tandan buah segar (TBS) dan padi yang mengalami penurunan pada triwulan II 2020 (Grafik IV.7). Sejalan dengan melambatnya kinerja LU pertanian, pembiayaan perbankan pada LU pertanian juga melambat. Pada triwulan II 2020, penyaluran kredit untuk LU pertanian tumbuh 10,29% (yoy), melambat dibandingkan dengan 16,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Meski demikian, kualitas kredit masih terjaga dengan *non-performing loan* (NPL) pada triwulan II 2020 yang masih berada di bawah 5% (Tabel IV.3).

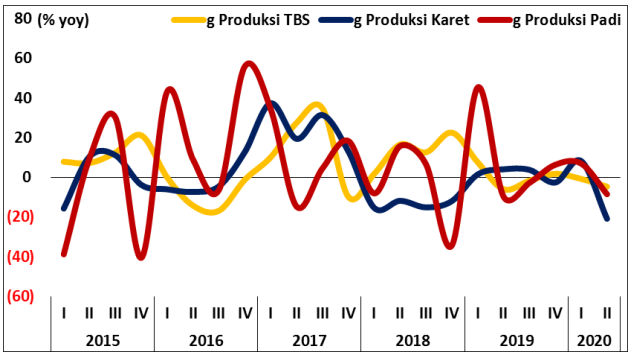

Sumber: Produsen dan Dinas Pemda terkait, diolah

Grafik IV.7. Pertumbuhan Produksi Pertanian

Tabel IV.3. Perkembangan Kredit, NPL dan LaR Korporasi

Sektor	g Kredit (% yoy)		NPL (%)		LAR (%)	
	I '20	II '20	I '20	II '20	I '20	II '20
Umum	**16.16**	**4.03**	**2.06**	**3.17**	**13.35**	**12.61**
Sektor Utama	15.88	3.99	1.73	2.74	11.43	11.58
Pertanian	16.72	10.29	0.66	0.60	1.88	4.00
Pertambangan	34.75	10.47	1.67	2.61	17.41	12.59
Industri	(4.21)	(27.35)	1.26	1.55	3.74	7.66
Konstruksi	31.68	37.54	7.65	2.71	42.25	33.50
Perdagangan	2.12	(7.64)	2.46	6.47	22.84	24.10

Sumber: LBU, diolah

Memasuki triwulan III 2020, LU pertanian diprakirakan tumbuh meningkat seiring panen tanaman kelapa sawit. Puncak panen tandan buah segar sawit (TBS) diprakirakan terjadi pada triwulan III 2020. Banjir yang sempat terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah pada awal triwulan III diperkirakan tidak berdampak signifikan pada produksi TBS. Di samping itu, kinerja perkebunan karet diperkirakan meningkat sejalan dengan harga karet global yang membaik. Indikasi peningkatan kinerja pertanian tersebut

tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan peningkatan di seluruh provinsi pada awal triwulan III 2020 (Grafik IV.8).

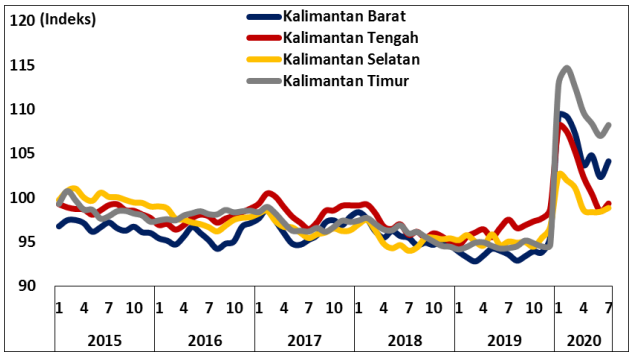

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik IV.8. Nilai Tukar Petani

Pertambangan

Penurunan permintaan eksternal menekan kinerja LU pertambangan pada triwulan II 2020. LU pertambangan pada triwulan II 2020 terkontraksi -6,16% (yoy), jauh di bawah periode triwulan I 2020 yang tumbuh positif 0,82% (yoy) - (Grafik IV.9). Kontraksi LU pertambangan dipengaruhi oleh penurunan kinerja pertambangan batubara akibat penurunan permintaan ekspor antara lain karena *oversupply* di pasar global disertai tren harga yang menurun. Selain itu, penurunan aktivitas manufaktur di Tiongkok dan India akibat dampak COVID-19 turut memengaruhi penurunan permintaan terhadap batubara Kalimantan. Tekanan pada LU pertambangan juga tercermin dari perlambatan penyaluran pembiayaan dari perbankan kepada korporasi pada LU ini**.** Pada triwulan II 2020, penyaluran kredit untuk LU pertambangan tumbuh 10,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 34,75% (yoy). Sementara itu, kualitas kredit yang disalurkan masih tetap terjaga dibawah 5% pada pada triwulan II 2020 walaupun mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel IV.3).

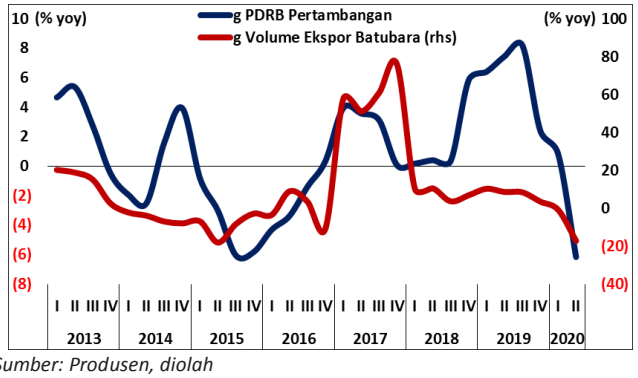

Sumber: Produsen, diolah

Grafik IV.9. Pertumbuhan Volume Ekspor Batubara

Mulai pulihnya permintaan eksternal pada triwulan III 2020 diprakirakan mendorong perbaikan kinerja LU pertambangan di Kalimantan. Perbaikan aktivitas ekonomi Tiongkok, diprakirakan mendorong peningkatan kebutuhan bahan bakar energi. Selain itu, meski pasokan batubara domestik Tiongkok mulai pulih pasca *lockdown* di triwulan I 2020, namun harga batubara domestik masih lebih tinggi dibandingkan batubara impor, termasuk asal Indonesia. Optimalisasi produksi oleh perusahaan batubara juga akan dilakukan dalam rangka persiapan musim hujan. Namun, indikasi kebijakan untuk memperketat pengawasan impor batubara oleh Pemerintah Tiongkok menjadi risiko yang dapat menahan kinerja LU pertambangan tumbuh lebih tinggi

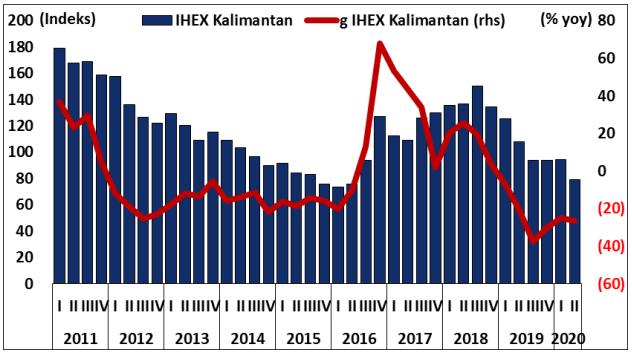

Sumber: Worldbank, diolah

Grafik IV.10. Indeks Harga Komoditas Ekspor Kalimantan

Industri Pengolahan

Menurunnya permintaan domestik dan eksternal berdampak pada kinerja LU industri pengolahan yang mengalami kontraksi. LU industri pengolahan Kalimantan terkontraksi 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020, jauh di bawah triwulan I 2020 yang tumbuh positif 2,77% (yoy). Kontraksi LU industri pengolahan sejalan dengan penurunan permintaan CPO dan karet dari negara mitra dagang utama, serta permintaan domestik untuk B30 yang turun karena aktivitas masyarakat yang terbatas. Hal ini tercermin dari produksi CPO triwulan II 2020 yang tumbuh melambat (Grafik IV.11). Selain itu, penghentian sementara operasional kilang minyak Balikpapan turut menyebabkan kontraksi kinerja industri pengolahan. Kinerja LU industri pengolahan diprakirakan mulai membaik pada triwulan III 2020 seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi domestik yang akan mendorong permintaan B30, serta kembali beroperasinya kilang minyak di Balikpapan.

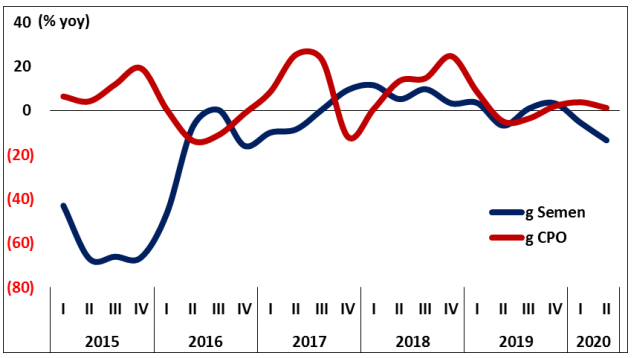

Sumber: Produsen, diolah

Grafik IV.11. Pertumbuhan Produksi Manufaktur

Konstruksi

Melambatnya aktivitas investasi berdampak pada kinerja LU konstruksi yang mengalami kontraksi. LU konstruksi tercatat terkontraksi 2,99% (yoy) pada triwulan II 2020, setelah pada triwulan I 2020 masih tumbuh positif 0,82% (yoy). Kontraksi LU ini sejalan dengan penurunan kinerja investasi akibat pembangunan beberapa proyek strategis Kalimantan yang tertunda antara lain proyek pembangkit listrik Tanah Laut di Kalimantan Selatan, pembangunan Smelter Alumina Tahap II di

Kalimantan Barat, serta pembangunan PLTA di Kalimantan Utara. Pertumbuhan LU konstruksi pada triwulan II 2020 yang melambat tercermin dari pertumbuhan penjualan semen yang masih mengalami perlambatan dan pertumbuhan penyaluran kredit konstruksi yang juga cenderung melambat (Grafik IV.12). Pada triwulan III 2020, lapangan usaha konstruksi diprakirakan mulai membaik seiring proyek-proyek yang sempat tertunda kembali berjalan, antara lain proyek pembangkit listrik Tanah Laut, pabrik pupuk, pengembangan irigasi, pembangunan pasar Bauntung dan Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru Batulicin di Kalimantan Selatan, pembangunan Smelter Alumina Tahap II di Kalimantan Barat, pembangunan Bendungan Sepaku-Semoidi Kalimantan Timur, pembangunan PLTA di Kalimantan Utara, maupun proyek *multiyears* oleh korporasi swasta lainnya.

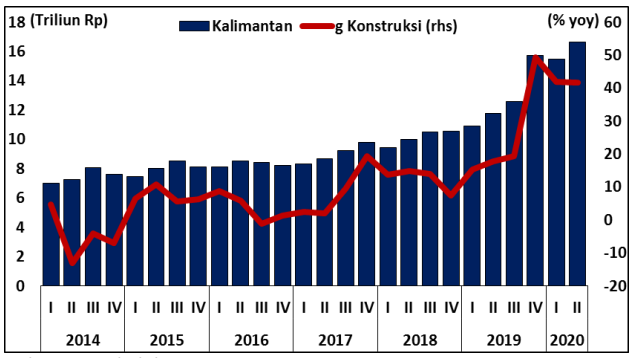

Sumber: LBU, diolah

Grafik IV.12. Kredit Konstruksi Kalimantan

Perdagangan

Penurunan konsumsi dan aktivitas ekspor impor, berdampak pada turunnya kinerja LU perdagangan. Pertumbuhan LU perdagangan di Kalimantan pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi 7,42% (yoy). Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Eceran (IPE) maupun aktivitas bongkar-muat di pelabuhan utama Kalimantan yang menunjukkan penurunan volume perdagangan selama triwulan II 2020 akibat penurunan aktivitas ekonomi (Grafik IV.13). Pada triwulan III 2020, kontraksi diprakirakan mulai mengalami perbaikan sejalan peningkatan permintaan konsumsi rumah tangga, peningkatan mobilitas masyarakat, serta perbaikan kinerja perdagangan luar negeri.

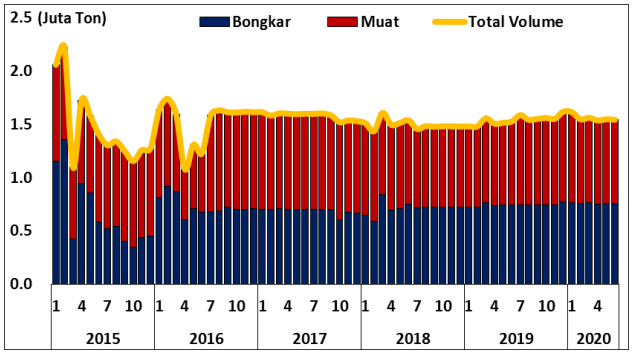

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik IV.13. Volume Bongkar Muat Pelabuhan Utama Kalimantan

Fiskal Daerah

Dari sisi penerimaan, realisasi pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 50,32%, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu[22]. Tingkat realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2019 sebesar 40,94%. Kondisi ini disumbang oleh peningkatan pada seluruh komponen pendapatan (Tabel IV.4). Peningkatan realisasi pendapatan terjadi di beberapa provinsi, dengan realisasi tertinggi di Kalimantan Selatan, terutama didorong oleh realisasi pendapatan asli daerah sebesar 53,73% (Tabel IV.5). Perbaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan II 2020, terjadi hampir di seluruh provinsi, yakni di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, disebabkan oleh relaksasi pajak seperti program pembebasan denda administrasi dan bunga yang mendorong pemasukan sektor pajak kendaraan bermotor. Lebih lanjut, peningkatan penerimaan juga didukung oleh optimalisasi layanan unggulan seperti Samsat Keliling (SAMKEL) dan Samsat *Drive Thru* serta berbagai kemudahan akses pelayanan di tengah pandemi COVID-19.

Tabel IV.4. Realisasi Agregat APBD Propinsi di Kalimantan

Komponen APBD	Realisasi (%)	
	II '19	II '20
	Agregat Kalimantan	
Pendapatan APBD Provinsi	**40.94**	**50.32**
Pendapatan Asli Daerah	38.31	51.95
Dana Perimbangan	43.53	49.16
Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.08	48.44
Belanja APBD Provinsi	**28.91**	**31.88**
Belanja Operasional + Transfer	31.59	33.86
Belanja Modal	16.97	20.33
Belanja Tidak Terduga	0.03	36.80

Sumber: SKPD masing-masing propinsi

Tabel IV.5. Realisasi Agregat APBD Propinsi

Komponen APBD	Realisasi (%) Tw II '19				
	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltim	Kaltara
Pendapatan APBD Provinsi	**52.80**	**23.21**	**29.77**	**46.32**	**42.53**
Pendapatan Asli Daerah	52.63	32.04	21.00	42.85	37.71
Dana Perimbangan	52.89	21.09	39.06	50.16	44.82
Lain-lain Pendapatan yang Sah	51.62	0.75	51.53	26.77	1.19
Belanja APBD Provinsi	**27.81**	**26.83**	**34.54**	**29.13**	**24.48**
Belanja Operasional + Transfer	0.00	27.15	38.58	32.58	30.85
Belanja Modal	3.49	26.31	19.39	7.40	9.37
Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
Komponen APBD	**Realisasi (%) Tw II '20**				
	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltim	Kaltara
Pendapatan APBD Provinsi	**47.30**	**45.39**	**52.18**	**54.46**	**48.30**
Pendapatan Asli Daerah	39.65	55.79	53.73	59.63	38.71
Dana Perimbangan	52.93	40.46	50.68	49.89	52.24
Lain-lain Pendapatan yang Sah	79.03	51.97	53.90	44.12	13.52
Belanja APBD Provinsi	**22.61**	**30.22**	**43.61**	**31.40**	**31.89**
Belanja Operasional + Transfer	23.83	28.89	47.52	34.56	31.68
Belanja Modal	5.52	30.91	25.01	16.68	33.87
Belanja Tidak Terduga	3,002.66	45.34	26.23	11.99	0.00

Sumber: SKPD masing-masing propinsi

Penyerapan belanja APBD pada triwulan II 2020 sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penyerapan belanja di Kalimantan pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 31,88%, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 28,91%. Kenaikan ini terjadi terutama pada komponen belanja tak terduga yang

[22] Data merupakan agregat realisasi APBD Propinsi, tidak temasuk APBD Kab/Kota

merupakan alokasi untuk penanganan dampak COVID-19. Khusus Kalimantan Utara, realisasi anggaran penanganan COVID-19 tidak dicatatkan dalam komponen Belanja Tidak Terduga. Realisasi penyerapan belanja modal yang paling tinggi terjadi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah didukung oleh berbagai paket pengadaan yang telah dilakukan, serta berlanjutnya konstruksi proyek infrastruktur pemerintah antara lain pembangunan jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dan Proyek PLTA di Kalimantan Utara.

Realisasi dana desa Kalimantan mengalami peningkatan terutama terkait penanganan dampak COVID-19. Transfer dana desa (RKUN ke RKUD) triwulan II 2020 terealisasi 62%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama periode sebelumnya yang sebesar 59,60%. Pemanfaatan dana desa Kalimantan diprioritaskan untuk penanganan dampak COVID-19 melalui optimalisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa. Hal tersebut didasari oleh Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Perkembangan Inflasi

Inflasi Kalimantan pada akhir triwulan II 2020 cukup rendah karena penurunan permintaan di tengah dukungan pasokan pangan yang memadai. Pada triwulan laporan, inflasi Kalimantan tercatat 1,44% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2020 yang tercatat sebesar 2,36% (yoy) - (Grafik IV.14). Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama karena deflasi komoditas ikan antara lain ikan layang/benggol, ikan tongkol, ikan patin, dan ikan bandeng. Di samping itu, kelompok transportasi juga mengalami deflasi, terutama untuk komoditas angkutan udara serta bensin yang merupakan komoditas dengan andil deflasi terbesar. Inflasi Kalimantan lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan, sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang mencapai level tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir.

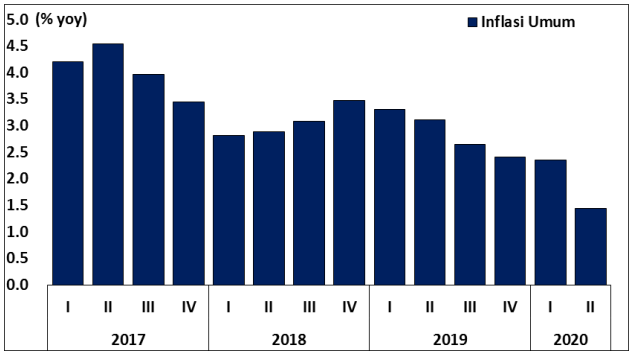

Sumber: BPS, diolah (data 2017 – 2019 menggunakan SBH 2012 dan data 2020 menggunakan SBH 2018)

Grafik IV.14. Inflasi Umum Kalimantan

Memasuki triwulan III, inflasi diperkirakan tetap rendah meski sedikit meningkat seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Pada bulan Juli 2020, secara bulanan masih terjadi deflasi sebesar 0,10% (mtm). Indikasi kenaikan harga pangan mulai terjadi pada minggu pertama Agustus 2020 khususnya pada komoditas cabai merah (Grafik IV.15). Pelonggaran PSBB diprakirakan meningkatkan permintaan sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pembukaan operasional beberapa pusat perbelanjaan dan perkantoran, maupun usaha hotel, restoran, dan usaha di bidang kuliner. Di sisi lain, berakhirnya musim panen komoditas hortikultura diprakirakan turut memengaruhi perkembangan harga. Selain komoditas pangan, permintaan angkutan udara juga diprakirakan meningkat sejalan dengan pembukaan kembali beberapa rute penerbangan. Meski demikian, rendahnya inflasi di Kalimantan masih akan didukung oleh panen raya beras lokal yang terjadi pada triwulan III 2020.

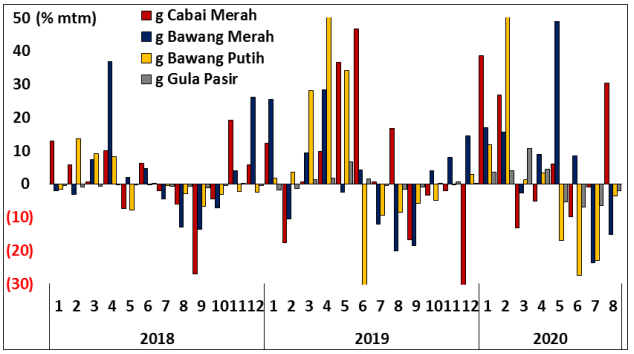

Sumber: Survei Pemantauan Harga

Grafik IV.15. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas

Untuk meminimalkan risiko tekanan inflasi, TPID di Kalimantan melakukan sejumlah program dalam kerangka strategi 4K[23]. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan harga antara lain: (i) menjaga keterjangkauan harga dengan menyelenggarakan pasar murah, penguatan fungsi Toko Tani dan E-Warung, serta mendukung program penyaluran bansos; (ii) menjaga kelancaran distribusi melalui pemantauan ketersediaan stok dari daerah – daerah sentra produksi terutama pada masa PSBB, dan penyediaaan layanan belanja dari rumah melalui *platform* digital yang menghubungkan masyarakat dengan pedagang lokal di pasar; (iii) komunikasi efektif dengan melakukan koordinasi melalui media digital *(online meeting),* menjaga ekspektasi masyarakat antara lain melalui siaran pers bekerja sama dengan pihak media cetak maupun elektronik, dan mendiseminasikan informasi ketersediaan pasokan selama masa pandemi COVID-19.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sistem Pembayaran Nontunai

Di tengah perlambatan ekonomi, transaksi non tunai dengan RTGS pada triwulan II 2020 masih tumbuh positif. Volume transaksi melalui *Real Time Gross Settlement* RTGS pada triwulan II 2020 tercatat meningkat sebesar 179,69% (yoy), lebih tinggi

[23] Strategi 4K dalam pengendalian inflasi meliputi: i) Kestabilan Harga; ii) Ketersediaan Pasokan; iii) Kelancaran Distribusi; dan iv) Komunikasi Efektif.

dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 89,89% (yoy) (Grafik IV.16). Secara nominal, transaksi RTGS pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar 62,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 33,77% (yoy) (Grafik IV.17).

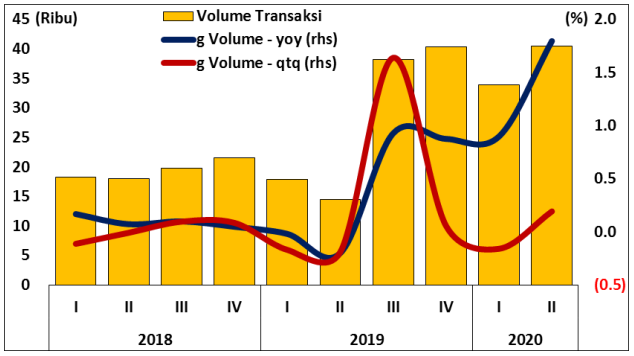

Grafik IV.16. Volume Transaksi RTGS

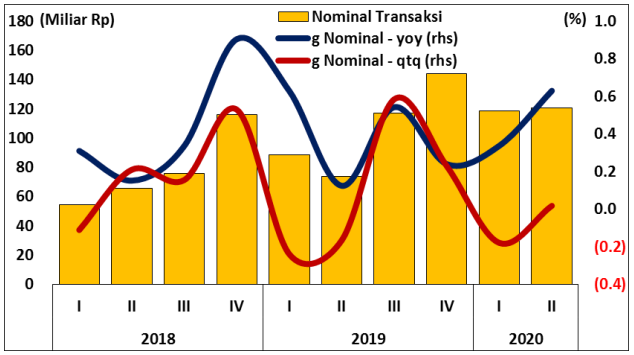

Grafik IV.17. Nominal Transaksi RTGS

Sementara itu nominal transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tumbuh melambat. Dari sisi volume kliring tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,22% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 1,6% (yoy) (Grafik IV.18). Total nominal kliring pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh sebesar 5,74% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,39% (yoy) (Grafik IV.19).

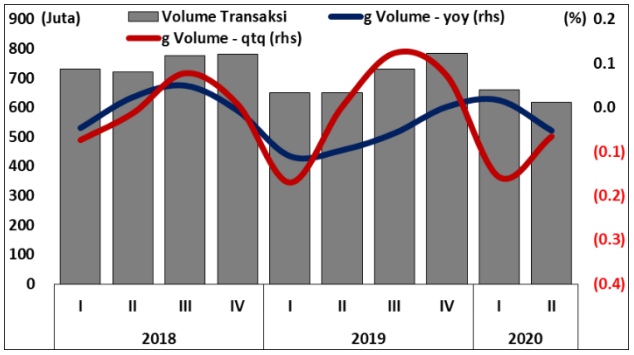

Grafik IV.18. Volume Transaksi SKNBI

Transfer dana luar negeri dari dan menuju Kalimantan masih tercatat cukup tinggi serta mencatat peningkatan *net inflow*. Pada triwulan II 2020, Kalimantan mencatatkan aliran dana masuk dari luar negeri sebesar Rp231,37 miliar dan aliran dana keluar dari Kalimantan ke luar negeri sebesar Rp28,14 miliar. Dengan demikian transaksi transfer dana luar negeri mengalami *net inflow* sebesar Rp203,23 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* Rp192,57 miliar. Secara spasial, seluruh wilayah di Kalimantan mencatatkan *net inflow* dengan nilai tertinggi di Kalimantan Barat sebesar Rp98,21 miliar, sejalan dengan jumlah TKI yang tinggi dari provinsi tersebut.

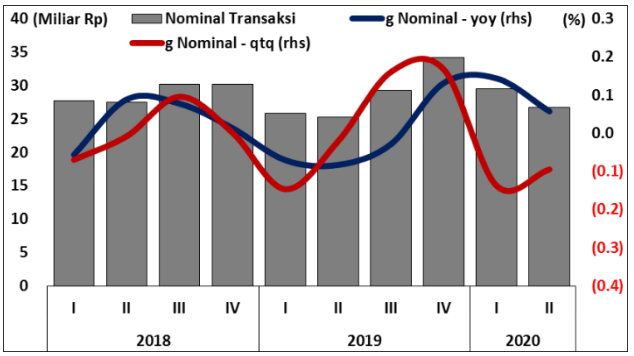

Grafik IV.19. Nominal Transaksi SKNBI

Penyaluran untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako melalui elektonifikasi mengalami peningkatan pada triwulan II 2020. Nominal penyaluran Program Sembako di Kalimantan pada triwulan II 2020 mencapai sebesar Rp400,35 miliar, dengan realisasi penyerapan tercatat 78,20%, serta penyerapan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan. Peningkatan ini sejalan dengan perluasan KPM penerima bantuan sosial dan penambahan nilai bantuan sebagai upaya penanganan dampak COVID-19. Secara keseluruhan, jumlah KPM pada triwulan II 2020 bertambah dari sejumlah 104.431 penerima menjadi sejumlah 662.954 penerima.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Triwulan II 2020 telah mencapai 100% sejalan dengan penyaluran di tingkat nasional yang juga mencapai 100%. Total penyaluran PKH pada triwulan I 2020 mencapai Rp98,35 miliar yang disalurkan kepada 388.489 KPM. Secara spasial, penyaluran PKH dengan jumlah KPM terbesar berada di wilayah Kalimantan Barat yaitu sebanyak 158.957 KPM. Di sisi lain, realisasi penyerapan PKH di Kalimantan pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 91,89% lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 94,82% pada periode yang sama. Upaya perluasan bantuan sosial di Kalimantan dihadapkan pada tiga tantangan utama, antara lain: (1) akurasi data KPM perlu ditingkatkan seperti permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda hingga NIK yang tidak ditemukan; (2) kendala infrastruktur dan teknologi seperti keterbatasan jangkauan koneksi dan permasalahan lupa sandi (pin) menjadi tantangan dalam perluasan Bansos Non Tunai dan peningkatan serapannya; (3) Mekanisme penyaluran bansos di daerah yang secara geografis susah dijangkau dan blankspot belum diatur dalam ketentuan yang spesifik.

Pengelolaan Uang Rupiah

Kebutuhan uang kartal masyarakat di Kalimantan selama triwulan II 2020 tercatat *net outflow*. Kondisi tersebut tercermin dari posisi net *outflow* sebesar Rp4,24 triliun setelah pada triwulan I 2020 mengalami net *inflow* Rp4,11 triliun. Secara spasial hampir seluruh wilayah Kalimantan mencatatkan net *outflow* terkecuali Kalimantan Selatan yang mengalami net *inflow* sebesar Rp0,34 triliun. Sementara, Kalimantan Tengah mencatatkan net *outflow* tertinggi di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp2,15 triliun. Berdasarkan nominal pecahannya,

permintaan terhadap uang kartal masih didominasi uang pecahan besar yaitu uang pecahan Rp100.000 (64,37%) dan Rp50.000 (30,77%).

KUPVA Bukan Bank

Pada triwulan II 2020, transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di wilayah Kalimantan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Transaksi KUPVA BB di Kalimantan pada triwulan II 2020 tercatat Rp71,47 miliar untuk transaksi penjualan dan Rp73,51 miliar untuk transaksi pembelian. Nilai tersebut lebih rendah dibanding transaksi penjualan dan pembelian pada triwulan I 2020 yang masing-masing sebesar Rp210,45 miliar dan Rp213,71 miliar. Secara spasial, KUPVA BB berizin (Kantor Pusat dan Kantor Cabang) terbanyak terdapat di Kalimantan Barat sebesar 42 KUPVA BB dengan nominal transaksi pembelian sebesar 69,69 miliar.

Prospek Perekonomian

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pemulihan ekonomi Kalimantan diperkirakan terus berlanjut pada paruh II 2020 ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Peningkatan konsumsi swasta didorong oleh implementasi pola hidup era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pelaksanaan Pilkada serentak dan perayaan HBKN, liburan di akhir tahun, serta dialihkannya libur Idul Fitri 2020 ke akhir tahun. Selain itu, dorongan belanja Pemerintah seiring penyelesaian proyek-proyek pembangunan infrastruktur diperkirakan juga akan meningkatkan konsumsi pemerintah. Investasi juga diperkirakan meningkat seiring berlanjutnya beberapa proyek investasi korporasi yang sempat tertunda pada paruh pertama 2020. Selain itu, dorongan investasi juga akan bersumber dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur seiring dengan penetapan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) di provinsi tersebut. Ekspor luar negeri diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan batubara menjelang musim dingin di negara mitra dagang serta pulihnya kegiatan industri di Tiongkok. Selain batubara, permintaan produk ekspor CPO juga diprakirkaan meningkat, antara lain ke India seiring dengan perayaan Diwali di pertengahan triwulan. Peningkatan permintaan CPO karena pulihnya aktivitas ekonomi di dalam negeri, juga akan mendorong perbaikan ekspor antar daerah Kalimantan.

Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan permintaan akan direspons oleh peningkatan kinerja beberapa LU utama. Kinerja LU pertambangan akan membaik sejalan dengan produksi batubara yang meningkat karena permintaan menjelang musim dingin di negara mitra dagang utama. Sementara LU industri pengolahan dan pertanian juga akan meningkat dipengaruhi oleh peningkatan produksi TBS dan CPO. Perbaikan konsumsi karena penyelenggaraan Pilkada serentak, perayaan HBKN dan liburan akhir tahun, serta perdagangan luar negeri maupun antar daerah akan mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan. Selanjutnya penyelesaian beberapa proyek investasi swasta dan Pemerintah di Kalimantan akan menjadi pendorong LU konstruksi pada periode akhir tahun. Namun demikian, perbaikan ekonomi pada semester II, diperkirakan tetap tidak akan mampu mengompensasi tekanan pada semester I akibat dampak COVID-19, yang mengakibatkan penurunan kinerja permintaan domestik maupun eksternal.

Beberapa risiko baik eksternal maupun internal pada 2020 perlu diwaspadai karena berpotensi menekan perekonomian pada semester II 2020. Dari sisi eksternal, risiko pemulihan permintaan ekspor batubara dari Tiongkok akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan pemulihan ekonomi domestik di negara tersebut, di tengah proses pemulihan negara mitra dagang Tiongkok yang lebih lambat. Dalam kaitan tersebut, untuk menjaga pemulihan ekonomi domestik, Tiongkok akan lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pelonggaran impor batubara dari negara lain. Dari sisi internal, kecepatan pemulihan konsumsi swasta juga akan ditentukan oleh proses transisi penerapan adaptasi kebiasaan baru selama COVID-19, di tengah belum ditemukannya vaksin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akselerasi peran fiskal daerah perlu terus didorong untuk menjadi penopang perekonomian, baik dalam rangka penanggulangan COVID-19 maupun belanja rutin.

Tekanan perekonomian selama periode COVID-19, memberikan *lessons learned* bagi arah pengembangan perekonomian Kalimantan ke depan. Kalimantan sebagai daerah yang mengandalkan komoditas dari sektor pertambangan dan perkebunan tidak lepas dari dinamika harga komoditas di pasar global yang menyebabkan kerentanan perekonomian dalam jangka menengah-panjang. Dalam kaitan tersebut perlu strategi untuk memperkuat struktur perekonomian Kalimantan sebagaimana telah dilakukan di wilayah lain yang bergantung pada sumber daya alam. Hilirisasi komoditas batubara menjadi methanol (*coal-to-methanol*) dapat menjadi opsi untuk memperkuat *local value chain* dan mendorong perbaikan defisit neraca pembayaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan (lihat Boks 3).

Prospek Inflasi

Inflasi Kalimantan pada 2020 diprakirakan tetap rendah dan berada dalam rentang sasaran inflasi 3,0±1%, ditopang oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Kemarau basah pada tahun 2020 diprakirakan meningkatkan produksi hasil pertanian. Selain itu, terkendalinya inflasi juga dipengaruhi oleh tekanan permintaan yang terbatas seiring perlambatan konsumsi swasta dan rumah tangga. Sumber tekanan inflasi pada 2020 diperkirakan berasal dari peningkatan beberapa tarif yang diatur oleh pemerintah seperti tarif cukai rokok dan harga jual eceran. Untuk mendukung pencapaian tersebut, sinergi kebijakan TPID akan terus diperkuat. Program kerja TPID pada tahun 2020 dengan strategi 4K selama 2020 akan difokuskan pada: (i) penguatan peran perusahaan daerah dalam melakukan stabilisasi harga, antara lain melalui pasar murah; (ii) peningkatan produksi komoditas pangan melalui *urban farming* komoditas cabai, tomat, dan aneka sayuran serta melalui intensifikasi program peningkatan pasokan beras; (iii) perluasan lahan pertanian seperti melalui program SERASI di Kalimantan Selatan dan *Food Estate* di Kalimantan Tengah, dan (IV)

peningkatan kerjasama antara daerah, khususnya dalam upaya pemenuhan pasokan dari daerah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi.

Overview, Tantangan, dan Potensi Industri Petrokimia di Kalimantan Timur

Petrokimia adalah bentuk uraian dari minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki rantai hilir yang panjang dan dibutuhkan sebagai *intermediary goods* di industri manufaktur dalam negeri. Industri petrokimia di Indonesia terdiri dari tiga *stream* utama yang memiliki bahan utama dari komponen migas yaitu olefin, aromatik, dan syngas (Gambar IV.1). Integrasi *forward linkage* industri petrokimia, terutama ke industri prioritas, terbentuk melalui produk olefin (*ethylene*, *propylene*), dan aromatik (*xylene*). Sementara itu, produk syngas lebih banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk (dari amonia) dan berpotensi sebagai bahan baku pembuatan *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) untuk biodiesel (dari methanol). Di Kalimantan, industri petrokimia yang ada saat ini mencakup pengolahan methanol dan amonia yang kemudian diolah menjadi pupuk urea dan pupuk NPK.

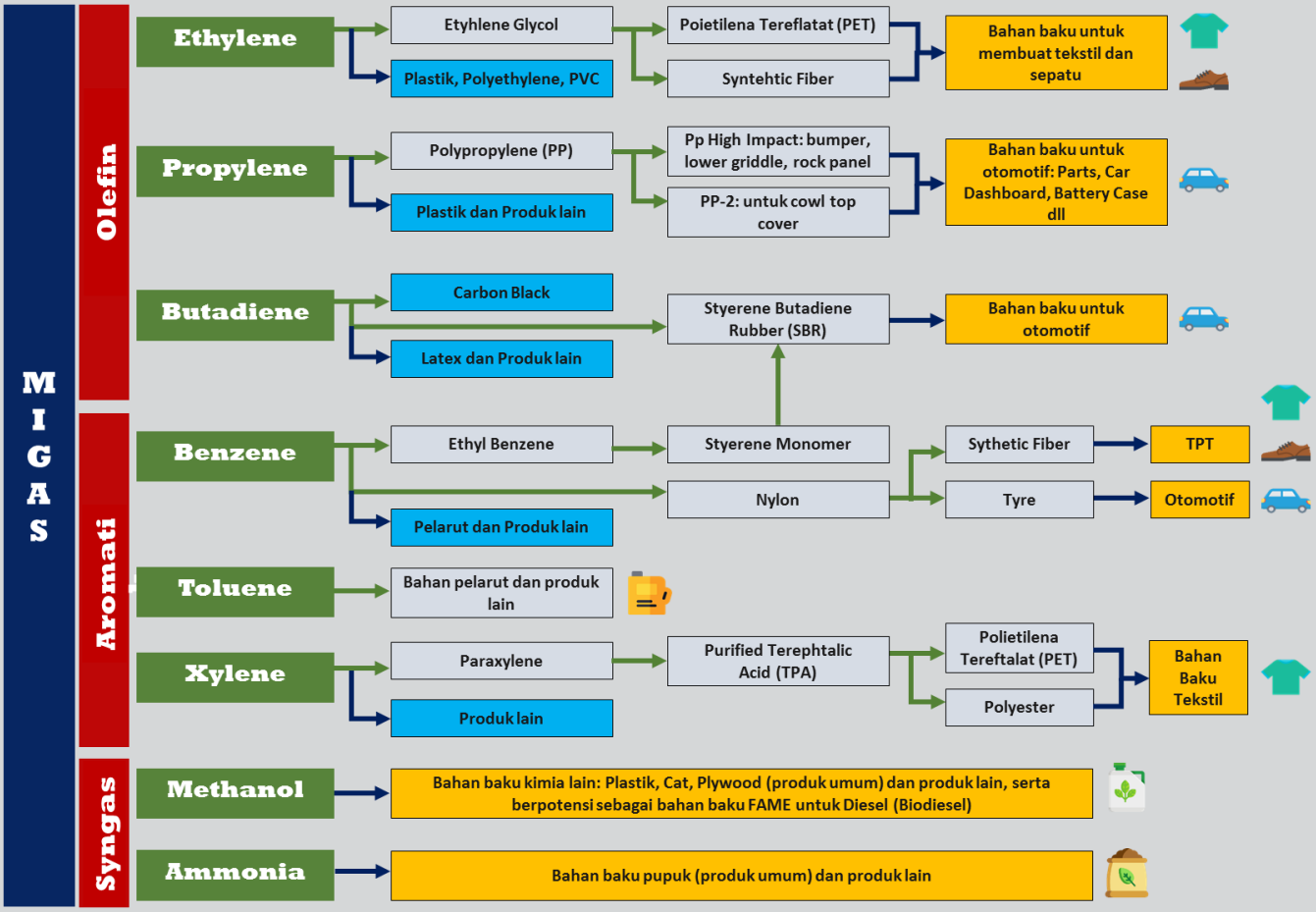

Gambar IV.1. Pohon Industri Petrokimia

Kinerja Industri Petrokimia Kalimantan

Industri petrokimia di Kalimantan secara spesifik terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang terdiri dari industri methanol dan industri pupuk. Industri methanol yang terletak di Kalimantan Timur merupakan satu-satunya industri penghasil methanol di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi hingga 660,000 ton/tahun dan kapasitas utilisasi antara 90% – 100%. Berdasarkan data historis, produksi methanol Kaltim dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan akibat permintaan yang melambat (Grafik IV.20). Hal tersebut searah dengan tren perlambatan ekspor methanol dunia (Grafik IV.21). Berdasarkan pangsa penjualan, sekitar 70% dari produk industri methanol di Kaltim dialokasikan untuk ekspor ke Jepang, Korea, Cina, dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Industri Pupuk di Kaltim merupakan salah satu industri pupuk terbesar di Indonesia. Industri pupuk di Kaltim memiliki kapasitas produksi amonia dan pupuk urea masing-masing hingga 2,74 juta ton/tahun dan 3,43 juta ton/tahun. Secara umum kapasitas utilisasinya telah mencapai maksimal kapasitas produksi yang ada dan dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan tren yang stabil dan di level yang tinggi (Grafik IV.22). Adapun pangsa penjualan pupuk urea Kaltim sebesar 70% dipasok untuk domestik dan sisanya diekspor ke Fillipina, Meksiko, dan India.

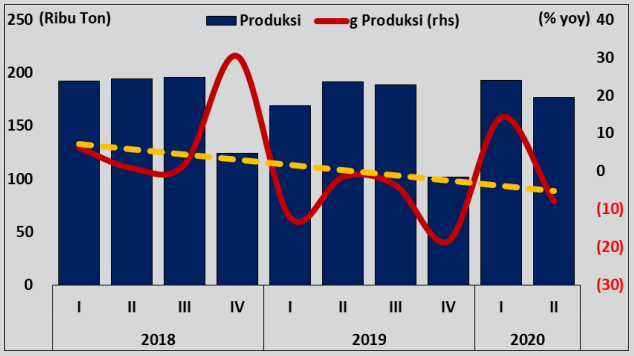

Sumber: Industri Methanol Kaltim , 2020 (diolah)

Grafik IV.20. Produksi Methanol Kaltim

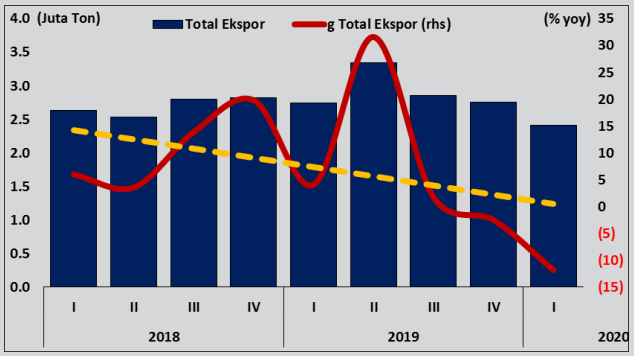

Sumber: trademap.org , 2020 (diolah)

Grafik IV.21. Ekspor Methanol Dunia

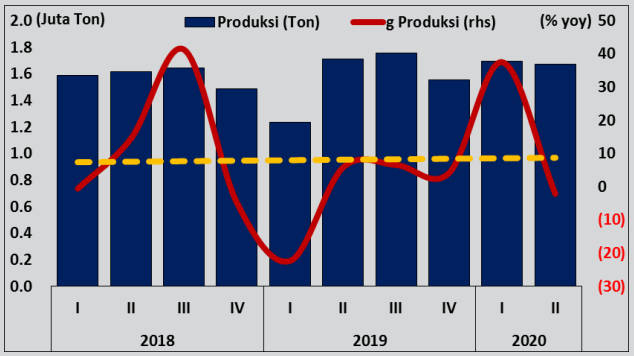

Sumber: Industri Pupuk Kaltim , 2020 (diolah)

Grafik IV.22. Produksi Pupuk Kaltim

Di tengah pandemi Covid-19, produksi maupun penjualan pupuk mengalami sedikit hambatan, namun secara umum untuk perusahaan pupuk masih cukup optimis mampu memenuhi target tahunannya. Meskipun terdapat kendala pasokan bahan baku kimia dari Tiongkok, namun hal tersebut lebih disebabkan oleh proses pengadaan yang mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan produksi juga turut mengalami keterlambatan. Sementara dari sisi operasional, perusahaan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat serta menerapkan kebijakan split operation yang sedikit banyak memengaruhi kinerja perusahaan. Di sisi penjualan, kendala yang dihadapi antara lain penambahan waktu distribusi akibat penerapan prosedur terkait protokol Covid-19, penurunan penyerapan pupuk di pasar internasional yang mengakibatkan oversupply dan penurunan harga. Diharapkan seiring pemulihan ekonomi domestik maupun global pada paruh kedua 2020 dapat mendorong peningkatan kinerja industri petrokimia. Lebih lanjut target tahunan dari industri pupuk di Kalimantan Timur pada tahun 2020 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2019. Secara umum pencapaian target on track, dimana kinerja secara year to date tahun 2020 lebih tinggai 14,5% dibandingkan tahun 2020.

Tantangan dan Potensi Industri Petrokimia Kalimantan

Tantangan yang dihadapi dari sisi produksi industri petrokimia di Kalimantan Timur terutama pada sisi hulu migas yang pasokannya mengalami *natural declining*. Hal tersebut terkonfirmasi dari kinerja *lifting* gas di Kaltim dalam 10 tahun terakhir tercatat mengalami penurunan sebesar 13,41% (yoy) per tahun. (Grafik IV.23).

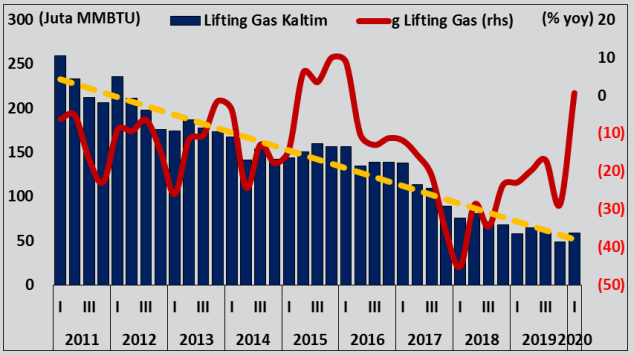

Sumber: Distamben Kaltim , 2020 (diolah)

Grafik IV.23. Kinerja *Lifting* Gas Kaltim

Sementara itu, bahan baku methanol selama ini hanya bersumber dari natural gas tersebut. Lebih lanjut, selain dari faktor hulu gas yang mengalami *natural declining*, harga gas yang masih relatif tinggi dibandingkan negara lain juga menjadi penyebab biaya produksi industri petrokimia di Kalimantan Timur relatif tinggi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan permen ESDM Nomor 8 tahun 2020 terkait penurunan harga gas, namun implementasinya harus terus didorong mengingat harga gas non pertamina yang masih berada di atas level USD6/mmbtu (Grafik IV.24).

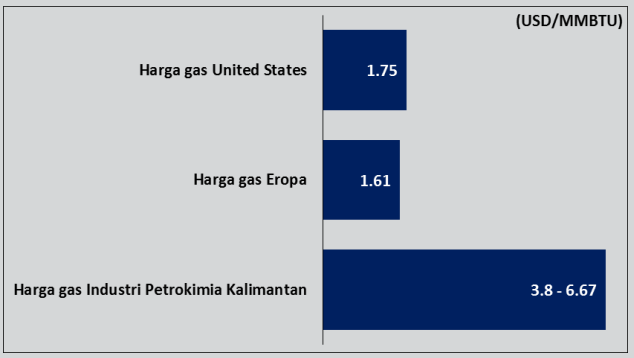

Sumber: ESDM dan World Bank (diolah)

Grafik IV.24. Perbandingan Harga Gas Petrokimia

Dengan kondisi tersebut, guna mendukung ketersediaan bahan

baku untuk produksi methanol, perlu upaya pencarian bahan baku alternatif selain dari migas agar dapat memenuhi kebutuhan domestik methanol yang mencapai 2 juta ton pertahun yang selama ini sebagian dipenuhi dari impor.

Sementara itu, pengembangan pada industri pupuk dirasa masih belum optimal karena masih ditemui hambatan pembayaran kompensasi pupuk bersubsidi. Diprakirakan bila kompensasi tersebut dapat dioptimalkan tentunya dapat dialokasikan secara maksimal kepada pengembangan usaha lainnya. Selain itu tantangan industri pupuk juga berasal dari aspek kerjasama dan perdagangan, yaitu terkait dengan pasar global yang mulai menunjukkan laju pertambahan pembangunan pabrik-pabrik amonia. Hal tersebut tentu akan meningkatkan persaingan penjualan amoniak di pasar global (Gambar IV.2).

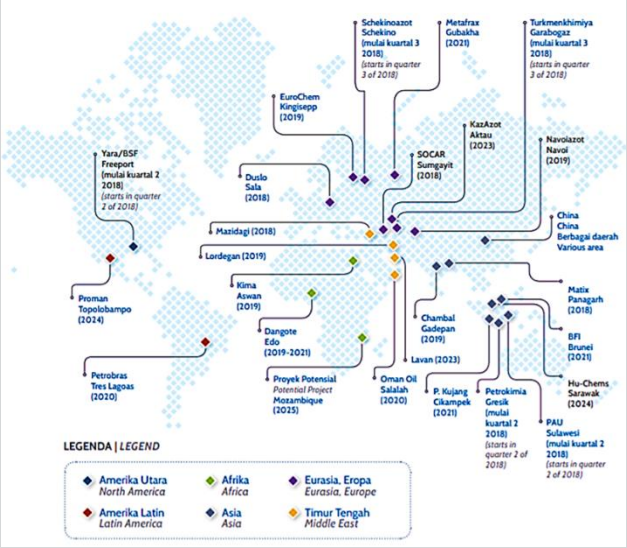

Sumber:Pupuk Kaltim , 2019 (diolah)

Gambar IV.2. Rencana Pembangunan Pabrik Amonia

Saat ini, industri methanol yang berkembang masih menjadi net importir sehingga perlu dukungan penguatan *local value chain* oleh Pemerintah. Kebutuhan industri methanol di Kalimantan Timur tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 1,1 juta ton/tahun. Namun, saat ini industri eksisting hanya mampu memenuhi sebesar 660.000 ton/tahun sehingga kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Grafik IV.25). Untuk itu, diperlukan penguatan *local value chain* melalui pembatasan produk impor methanol dalam rangka penguatan serapan domestik, antara lain mendorong implementasi B30 yang bisa meningkatkan kebutuhan methanol domestik serta implementasi harga beli methanol di dalam negeri yang mampu bersaing dengan harga beli di luar negeri.

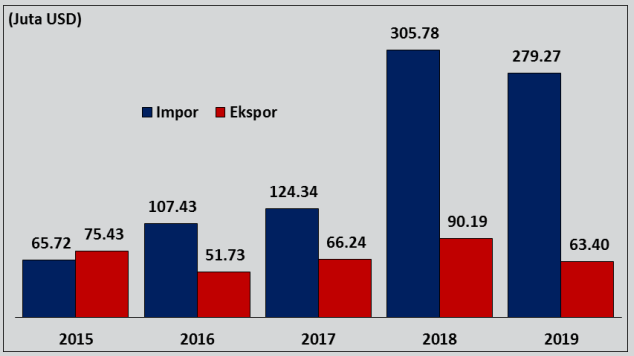

Sumber: Comtrade (diolah)

Grafik IV.25. Nilai Perdagangan Methanol Indonesia

Penguatan Industri Pendukung Biodiesel

Industri kimia diperkirakan akan tumbuh semakin pesat seiring dengan rencana pembangunan pabrik *coal to methanol* dari konsorsium perusahaan swasta dalam negeri dan perusahaan swasta dari Amerika Serikat yang memiliki *success story* di bidang yang sama. Pembangunan pabrik tersebut akan dilakukan di Kalimantan Timur dengan nilai investasi lebih dari 2 Miliar USD. *Timeline* pembangunan pabrik tersebut diperkirakan akan rampung dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024. Pabrik *coal to methanol* tersebut diprakirakan mampu menghasilkan 1,8 juta ton/tahun sehingga sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan methanol domestik yang mencapai 2 juta ton/tahun, yang lebih lanjut mampu menghemat devisa nasional. Di samping itu, pembangunan pabrik *coal to methanol* ini juga dapat menjadi salah satu solusi ataupun sebagai alternatif bahan baku pengolahan industri petrokimia yang saat ini dihadapkan dengan persoalan *natural declining* hulu migas di Kalimantan.

Selain itu, potensi industri petrokimia lainnya juga bersumber dari program hilirisasi CPO menjadi B30, B40 hingga B50. Hal tersebut bisa berdampak positif baik dari sisi peningkatan kebutuhan methanol yang merupakan bahan campuran utama biodiesel, maupun dari sisi peningkatan kebutuhan pupuk NPK yang merupakan salah satu input utama dalam perkebunan sawit. Lebih lanjut, kapasitas produksi pupuk NPK sendiri oleh Industri Pupuk di Kaltim adalah sebesar 350 ribu ton/tahun dengan tingkat utilisasi baru sebesar 68%, sehingga dengan program hilirisasi CPO tersebut diharapkan juga secara paralel mampu meningkatkan kinerja Industri Petrokimia di Kalimantan.

BAGIAN 5
PEREKONOMIAN BALINUSRA

Perekonomian Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada triwulan II 2020 terkontraksi -6,29% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 0,94% (yoy). Dari sisi permintaan, penurunan kinerja ekonomi terutama bersumber dari penurunan konsumsi, investasi dan net ekspor jasa sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dari sisi lapangan usaha (LU), kontraksi terjadi pada hampir semua LU utama yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (akmamin), konstruksi dan industri pengolahan. Namun, kontraksi lebih dalam tertahan oleh kinerja LU Pertanian dan LU Pertambangan yang masih tumbuh positif ditopang adanya peningkatan produksi. Penurunan kinerja ekonomi tersebut berdampak pada peningkatan risiko keuangan korporasi dan rumah tangga.

Memasuki triwulan III 2020, perekonomian Balinusra diperkirakan mulai membaik seiring mulai meningkatnya aktivitas masyarakat meski masih relatif terbatas. Dari sisi penggunaan, perbaikan ekonomi di topang oleh kinerja konsumsi (swasta dan pemerintah), investasi, dan ekspor yang membaik. Dari sisi LU, membaiknya perekonomian terutama bersumber dari kembali meningkatnya aktivitas yang terkait dengan sejumlah LU utama (Konstruksi, Akmamin, Pertambangan, dan Pertanian) seiring penerapan new normal.

Di sisi inflasi, inflasi Balinusra pada triwulan II 2020 tercatat 1,48% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I 2020. Memasuki triwulan III 2020, tren penurunan inflasi diperkirakan berlanjut dipengaruhi turunnya permintaan masyarakat di tengah pasokan yang memadai, serta didukung berbagai upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Untuk keseluruhan tahun 2020, inflasi diperkirakan lebih rendah dari 2019 antara lain dipengaruhi oleh berlanjutnya tren penurunan tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Balinusra pada triwulan II 2020 tumbuh -6,29% (yoy), terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,92% (yoy), terutama akibat melemahnya aktivitas pariwisata (Tabel V.1). Dari sisi penggunaan, kontraksi ekonomi bersumber dari penurunan kinerja konsumsi, investasi dan net ekspor jasa. Melambatnya konsumsi swasta disebabkan oleh menurunnya daya beli RT akibat terhentinya kegiatan terkait pariwisata yang menjadi kontributor utama ekonomi Balinusra. Sementara kontraksi pada konsumsi pemerintah dipengaruhi kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran yang disertai dengan penurunan pendapatan daerah. Kinerja investasi terkontraksi dipengaruhi adanya kebijakan *physical distancing*, penundaan proyek swasta, serta kebijakan realokasi anggaran belanja modal pemerintah. Sementara itu, pembatasan sosial dan penerapan restriksi penerbangan dari seluruh dunia, menyebabkan penurunan jumlah wisatawan mancangera (wisman), sehingga berdampak pada kinerja ekspor yang terkontraksi cukup dalam.

Tabel V.1. Pertumbuhan Ekonomi Balinusra

Provinsi	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Bali	5.55	6.01	6.13	7.59	6.33	6.01	5.69	5.34	5.51	5.63	(1.14)	(10.98)
NTB	0.04	(1.33)	(13.88)	(1.20)	(4.46)	1.70	2.12	6.46	5.70	4.01	3.19	(1.41)
NTT	5.01	5.02	5.14	5.34	5.13	5.30	6.36	3.87	5.32	5.20	2.84	(1.96)
Balinusra	**3.75**	**3.52**	**(0.66)**	**4.43**	**2.71**	**4.59**	**4.77**	**5.34**	**5.52**	**5.07**	**0.92**	**(6.29)**

Sumber: BPS (diolah)

Dari sisi LU, kontraksi pada LU utama menjadi penyebab melambatnya ekonomi di triwulan II 2020, seiring pererapan pembatasan sosial. Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) terkontraksi akibat penurunan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisman. Sementara itu, kinerja LU konstruksi terkontraksi sebagai dampak dari realokasi anggaran belanja modal serta implementasi *physical distancing* yang mengakibatkan penundaan pengerjaan sejumlah proyek bernilai besar. Namun demikian, kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Pertanian dan LU Pertambangan yang tetap tumbuh positif, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Secara spasial, melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari Bali yang ekonominya ditopang pariwisata. Besarnya ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata membuat Bali menjadi rentan terdampak kebijakan penanganan COVID-19. Pasca-implementasi penutupan penerbangan dari dan ke negara wisman utama, kunjungan wisman di Bali terkontraksi cukup dalam pada triwulan II 2020. Hal ini menyebabkan permintaan pada LU utama Bali yaitu LU Akmamin dan LU Transportasi menurun tajam. Sementara itu, ekonomi NTB dan NTT juga mengalami kontraksi, namun tidak sedalam kontraksi yang terjadi di Bali karena ditopang oleh kinerja LU Pertanian dan LU Pertambangan yang masih cukup baik.

Pada triwulan III 2020, ekonomi Balinusra diprakirakan membaik sejalan dengan aktivitas LU utama yang kembali bergerak di era *new normal*. Lapangan usaha terkait dengan sektor pariwisata (Akamamin, Transportasi dan Perdagangan) diprakirakan membaik seiring dengan dibukanya jalur penerbangan domestik dari dan ke Balinusra. Seiring dengan hal tersebut, LU Pertanian juga membaik ditopang oleh panen raya yang berlangsung pada Agustus-September 2020. Sektor pertambangan juga diprakirakan menjadi kontributor atas perbaikan di triwulan III 2020, seiring dengan membaiknya perekonomian negara mitra dagang, terutama Tiongkok.

Kinerja Sisi Penggunaan

Konsumsi Swasta

Pada triwulan II 2020, konsumsi swasta terkontraksi sebesar

3,75% (yoy), memburuk dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif 3,05% (yoy). Kontraksi terutama disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat terhentinya kegiatan pariwisata yang merupakan sumber ekonomi utama di wilayah ini sebagai dampak COVID-19. Selain itu, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat seperti pembatasan jam operasional pertokoan dan pasar turut memengaruhi sepinya kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sebagaimana tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun signifikan (Grafik V.1).

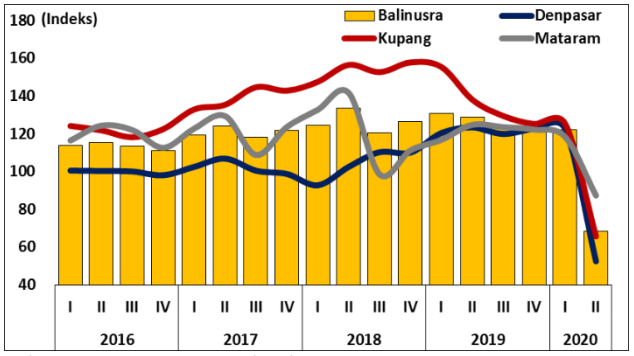

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik V.1. Indeks Keyakinan Konsumen

Pada triwulan II 2020 penyaluran kredit perbankan kepada sektor RT di Balinusra tumbuh 4,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (8,10% yoy). Perlambatan kredit RT terutama bersumber dari seluruh jenis kredit yaitu KPR dan KPA, KKB, kredit peralatan RT, dan kredit Multiguna (Tabel V.2). Sementara itu, risiko kredit cenderung meningkat, tercermin dari NPL yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meskipun masih di bawah batas aman 5,0%.

Tabel V.2. Pertumbuhan Kredit RT

Indikator & Wilayah	g Kredit (% yoy)					
	I '19	II '19	III '19	IV '19	I '20	II '20
Total Kredit	6.93	8.26	7.03	8.35	8.10	4.09
KPR + KPA	10.38	10.24	8.08	5.34	3.94	1.00
KKB	11.25	7.26	5.39	3.82	4.48	(5.29)
Peralatan RT	55.65	76.41	64.04	27.17	33.21	0.88
Multiguna	4.92	7.79	6.27	9.95	9.78	5.81
NTB	6.09	7.88	7.39	8.86	6.13	3.46
Bali	6.12	7.15	6.17	6.95	7.28	2.83
NTT	9.49	10.88	8.23	10.40	11.88	7.19

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Memasuki triwulan III 2020, kinerja konsumsi swasta diprakirakan sedikit membaik seiring penerapan kebijakan tatanan kehidupan era baru (*new normal*) dan penyelenggaraan pilkada. Kebijakan *new normal* diterapkan sebagai upaya untuk menggerakan kembali aktivitas ekonomi masyarakat namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Di Provinsi Bali, kebijakan tersebut diikuti dengan penerapan sertifikasi *CHSE* untuk hotel, kawasan wisata, dan biro perjalanan[24]. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan, sehingga mendorong kunjungan wisata domestik dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pemulihan konsumsi diperkirakan bersumber dari prakiraan realisasi jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah yang meningkat pada triwulan III 2020. Sementara itu, konsumsi LNPRT diprakirakan tumbuh positif seiring dengan persiapan pelaksanaan Pilkada. Prakiraan membaiknya konsumsi swasta pada triwulan III 2020 juga tercermin dari indikator perkembangan penjualan eceran yang mulai meningkat (Grafik V.2).

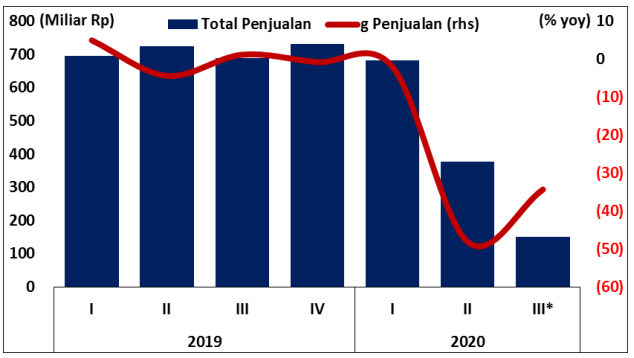

**) Juli 2020*

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (diolah)

Grafik V.2. Perkembangan Indeks Penjualan Eceran

Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan II 2020 konsumsi pemerintah terkontraksi 6,20% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,31% (yoy) sejalan dengan turunnya belanja Pemda. Konsumsi pemerintah terkontraksi sejalan dengan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 sehingga terjadi penurunan pagu belanja APBD. Selain itu, realisasi pendapatan daerah juga lebih rendah akibat penurunan pajak dunia usaha serta transfer pemerintah pusat ke daerah. Penurunan penerimaan pendapatan daerah tercermin dari semakin dalamnya kontraksi giro pemerintah (Grafik V.3).

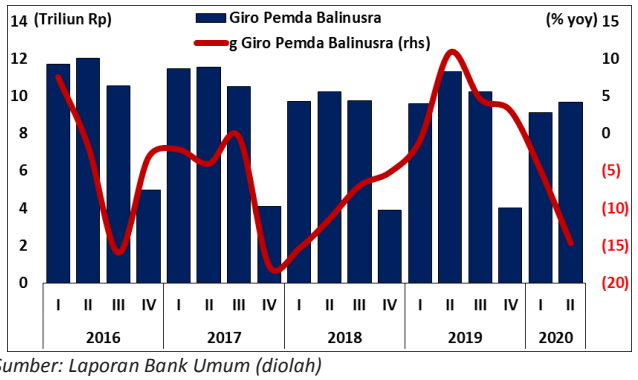

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik V.3. Giro Pemerintah Daerah di Bank Umum

Kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat pada triwulan III 2020 seiring dengan kebutuhan untuk realisasi terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan belanja kesehatan. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan didorong oleh realisasi penyaluran JPS dan Belanja Kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat/daerah dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Selain itu, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah juga diprakirakan akan didorong oleh rencana percepatan program untuk penyelamatan kegiatan

[24] Clean, Healthy, Safety, Environment

usaha, Kelompok Usaha Informal, UMKM dan IKM, serta Koperasi.

Investasi

Investasi Balinusra pada triwulan II 2020 terkontraksi lebih dalam sebesar 10,22% (yoy), dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,49% (yoy), seiring dengan tertundanya pengerjaan proyek. Beberapa proyek yang tertunda antara lain pembangunan hotel di Nusa Dua (Bali) dan Mandalika (NTB), serta *smelter* di NTB. Tertundanya sejumlah proyek tersebut merupakan dampak dari kebijakan *physical distancing* serta adanya hambatan mobilitas tenaga kerja domestik dan luar negeri. Kontraksi kinerja investasi juga tercermin dari melambatnya kinerja kredit investasi (Grafik V.4).

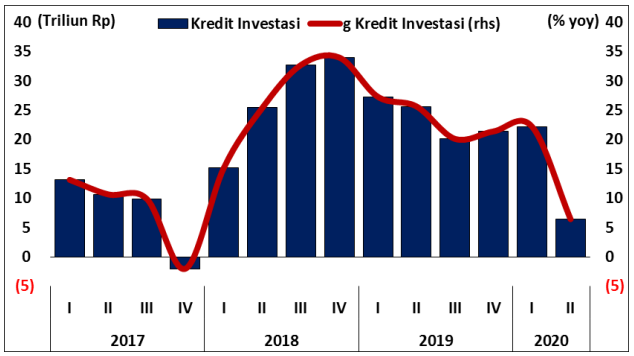

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik V.4. Penyaluran Kredit Investasi

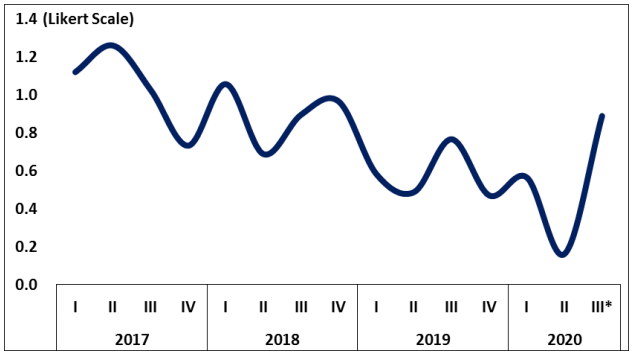

**) Juli 2020*

Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

Grafik V.5. Perkembangan Skala Likert Investasi

Pada triwulan III 2020, investasi diprakirakan sedikit membaik seiring dimulainya kembali pengerjaan sejumlah proyek konstruksi. Tertundanya pengerjaan sejumlah proyek membuat realisasi investasi bangunan pada triwulan II 2020 berada di bawah target, sehingga akan mulai dipercepat pada triwulan III 2020. Sejumlah proyek seperti pembangunan hotel di kawasan Nusa Dua dan mandalika juga mulai kembali dikerjakan. Indikasi membaiknya investasi pada triwulan III 2020 terkonfirmasi oleh peningkatan terbatas skala likert investasi[25] (Grafik V.5).

Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor triwulan II 2020 terkontraksi dalam akibat menurunnya kunjungan wisman sebagai dampak pencegahan COVID-19. Ekspor triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 85,85% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 18,07% (yoy). Kontraksi terutama bersumber dari ekspor jasa seiring dengan menurunnya kunjungan wisman ke Balinusra (Grafik V.6). Sementara itu, ekspor barang tumbuh 145,42% (yoy), meningkat dari triwulan lalu yang terkontraksi -13,58% (yoy). Meningkatnya ekspor barang ini terjadi akibat adanya peralihan permintaan dari sejumlah negara eksportir lain yang belum mampu berproduksi secara optimal sehingga meningkatkan permintaan barang dari Indonesia. Hal ini terkonfirmasi antara lain dari meningkatnya pangsa ekspor udang segar/beku ke AS dari 6,61% pada triwulan I 2020 menjadi 17.82% di triwulan II 2020[26]. Kondisi ini sejalan dengan laporan *US Departement of Commerce* yang menyebutkan terjadinya peningkatan pertumbuhan impor udang segar/beku dari Indonesia yaitu dari 23,87% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi 29,21% (yoy) pada triwulan II 2020.

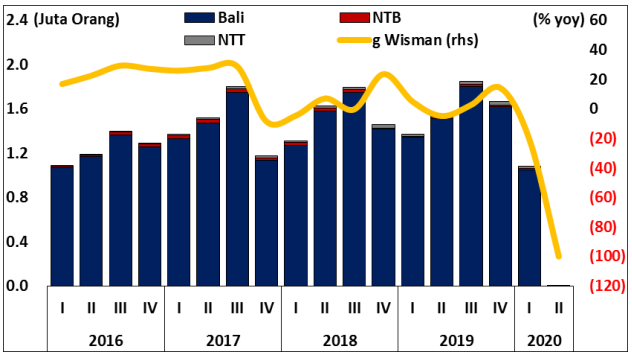

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik V.6. Jumlah Wisatawan Mancanegara

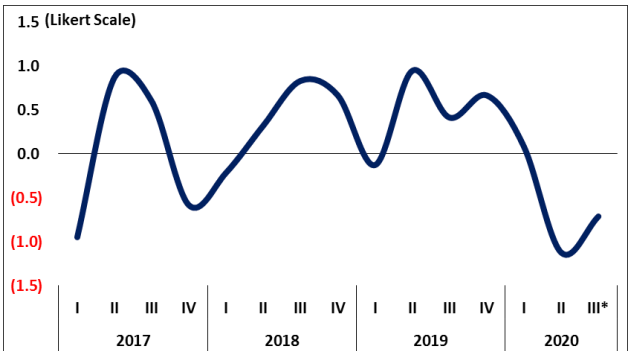

**) Juli 2020*

Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

Grafik V.7. Perkembangan Skala Likert Penjualan Ekspor

[25] Skala likert disini adalah alat dalam statistik yang digunakan untuk menilai indikator dalam *diary notes* kegiatan Liaison Bank Indonesia. Pada variable investasi, skala likert menilai seberapa besar pertumbuhan asset baru untuk kegiatan investasi seperti membeli mesin-mesin produksi, pembangunan Gedung baru, dll. Skala likert 0 mengindikasikan kondisi yang cenderung stabil atau sama dengan trend pertumbuhan rata-rata. Skala likert negative mengindikasikan perusahaan tidak melakukan kegiatan investasi. Skala likert di atas 0 mengindikasikan terjadi penambahan asset kegiatan investasi.

[26] Pangsa ekspor dari keseluruhan ekspor udang segar/beku balinusra

Pada triwulan III 2020, kontraksi ekspor diprakirakan masih akan berlanjut namun sedikit membaik seiring dengan meningkatnya ekspor barang. Kontraksi ekspor pada triwulan III 2020 diperkirakan masih akan berlanjut sejalan dengan prakiraan masih terkontraksinya kunjungan wisman. Kontraksi ekspor sedikit tertahan oleh membaiknya ekspor barang seperti hasil perikanan dan tembaga. Membaiknya ekspor juga terkonfirmasi dari peningkatan skala likerts penjualan ekspor[27] (Grafik V.7).

Kinerja Impor

Impor luar negeri Balinusra pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 76,85% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 29,61% (yoy), terutama impor barang konsumsi dan modal. Menurunnya impor disebabkan oleh melambatnya penurunan impor barang modal seiring dengan menurunnya kinerja investasi. Selain itu, menurunnya kinerja pariwisata juga menyebabkan penurunan impor barang konsumsi (Grafik V.8). Pada kondisi normal, impor barang konsumsi dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan wisman maupun wisnus, antara lain *dairy product* dan minuman beralkohol seperti *wine*.

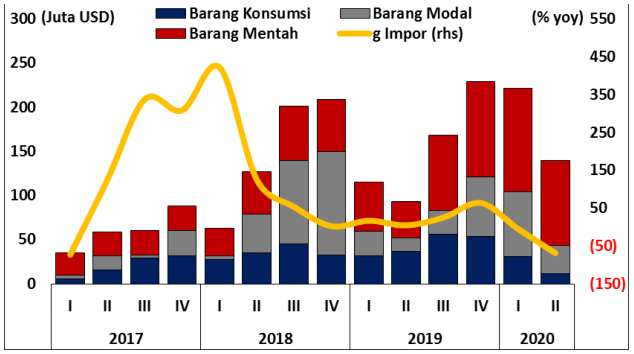

Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik V.8. Perkembangan Impor

Pada triwulan III 2020, kontraksi impor diprakirakan akan terus berlanjut namun cenderung membaik. Pada triwulan III 2020, kinerja impor diprakirakan akan membaik seiring dengan prakiraan membaiknya aktivitas konstruksi. Selain itu, impor barang konsumsi diprakirakan juga akan meningkat seiring dengan dibukanya kembali pariwisata di Bali, terutama untuk wisatawan domestik.

Kinerja Lapangan Usaha

Pertanian

Pada triwulan II 2020, LU Pertanian tumbuh 1,99% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,27% (yoy). Peningkatan ini ditopang oleh sub LU Pertanian Tanaman Bahan Pangan, sementara kinerja sub LU Perikanan tertahan karena faktor cuaca. Kondisi ini dipengaruhi antara lain karena masa panen raya padi yang mengalami pergeseran dari bulan Maret menjadi April di sejumlah sentra pertanian di Balinusra. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) Balinusra masih melanjutkan tren penurunan sejak triwulan I 2020 (Grafik V.9). Di sisi lain, produksi perikanan di NTT masih rentan mengalami gejolak karena kondisi cuaca di laut yang sulit diprediksi, sehingga menjadi kendala nelayan dalam menangkap ikan segar dengan jumlah konsisten.

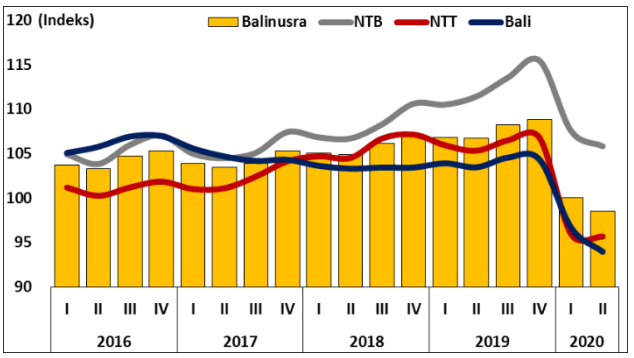

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik V.9. Nilai Tukar Petani

Pada triwulan III 2020, kinerja LU Pertanian di Balinusra diprakirakan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh musim panen beberapa komoditas hortikultura di beberapa sentra produksi Balinusra, serta musim kemarau yang cenderung basah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terindikasi dari hasil survei kegiatan dunia usaha yang menunjukkan peningkatan (Grafik V.10). Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, utamanya yang bersumber dari penundaan pembangunan irigasi akibat *refocusing* anggaran Pemerintah Daerah dalam menghadapi COVID-19. Hal ini diperkirakan dapat mengurangi ketahanan para petani dalam menghadapi musim kemarau. Selain itu, hama tanaman dan penyakit hewan ternak seperti *African swine flu* juga berpotensi menghambat laju pertumbuhan LU Pertanian.

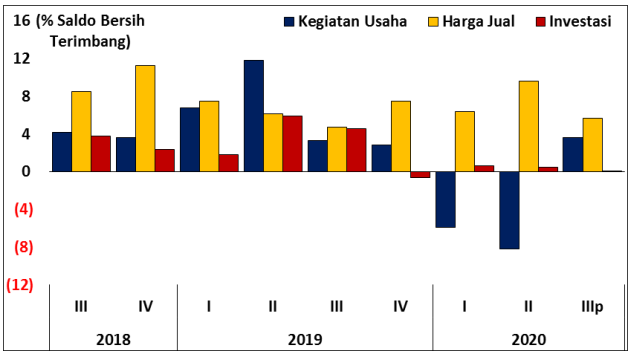

p) Proyeksi

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (diolah)

Grafik V.10. Kegiatan Dunia Usaha Pertanian

Kinerja keuangan sektor pertanian masih terjaga. Pada triwulan

[27] Serupa dengan skala likert investasi, skala likert penjualan ekspor bersumber dari kegiatan liaison bank Indonesia. Skala likert penjualan ekspor menilai volume penjualan produk yang berorientasi pada pasar ekspor. Metode penghitungan skala juga serupa dengan skala investasi dimana 0 mengindikasikan kondisi stabil, negatif mengindikasikan penurunan, dan di atas 0 mengindikasikan peningkatan.

II 2020 kredit LU Pertanian masih tumbuh positif sebesar 20,12% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,07% (yoy). Adapun kualitas kredit tercatat membaik sebagaimana tercermin dari tingkat NPL yang turun. Meskipun demikian, risiko terhadap kredit pertanian tetap perlu menjadi perhatian seiring meningkatnya *loan at risk* (LaR) pada LU tersebut.

Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2020 mengalami peningkatan, menjadi sebesar 38,52% (yoy) dari 15,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Akselerasi LU Pertambangan terutama didorong oleh membaiknya produksi tembaga di NTB[28] (Grafik V.11). Adapun tujuan penjualan konsentrat tembaga sampai dengan triwulan II 2020 adalah 52% domestik dan 48% ke luar negeri. Pertumbuhan penjualan domestik tumbuh sebesar 26,9%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar 15,5%(yoy). Sementara volume ekspor LN pada triwulan II 2020 merupakan ekspor tertinggi selama setahun terakhir, mengingat pada periode yang sama di tahun 2019 tidak terdapat ekspor konsentrat tembaga.

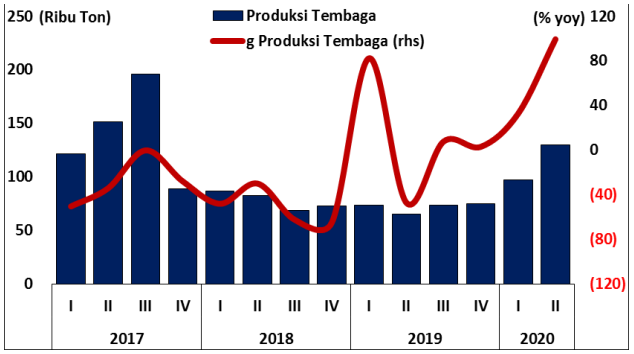

Sumber: Perusahaan Tambang di Balinusra (diolah)

Grafik V.11. Perkembangan Produksi Tembaga Balinusra

Pada triwulan III 2020, kinerja LU Pertambangan diprakirakan kembali meningkat. Prakiraan ini didukung oleh semakin membaiknya produksi dan kualitas bijih tembaga di NTB. Musim kemarau pada triwulan III 2020 diprakirakan akan berkontribusi positif pada aspek keselamatan kerja pada saat menambang sehingga dapat turut mendorong peningkatan produktivitas di area pertambangan. Selain itu, prakiraan meningkatnya pertumbuhan LU Pertambangan juga dipengaruhi oleh prospek meningkatnya harga komoditas tembaga sebagai dampak *trade balance* tembaga global yang mengalami defisit. Berdasarkan hasil liaison, pada triwulan III 2020, terjadi peningkatan permintaan tembaga dari Tiongkok ditengah masih belum pulihnya suplai tembaga dari Chili dan Peru sebagai dampak COVID-19.

Konstruksi

LU Konstruksi Balinusra pada triwulan II 2020 terkontraksi 11,49% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan lalu sebesar 0,43% (yoy). Hal itu disebabkan oleh tertundanya pembangunan beberapa proyek konstruksi akibat pandemi COVID-19. Beberapa proyek tersebut antara lain berbagai proyek hotel di kawasan *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) Nusa Dua dan ITDC Mandalika, pengembangan bandara I Gusti Ngurah Rai, dan pembangunan *smelter* PT. AMNT. Hal ini sebagaimana terkonfirmasi dari melambatnya pertumbuhan kredit konstruksi dan pertumbuhan realisasi kegiatan usaha bangunan (Grafik V.12) serta konsumsi semen (Grafik V.13). Kredit kontruksi pada triwulan II 2020 terkontraksi 12,07% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -10,75% (yoy). Sejalan dengan itu, penjualan semen juga terkontraksi lebih dalam dari -8,02% (yoy) menjadi -15,99% (yoy).

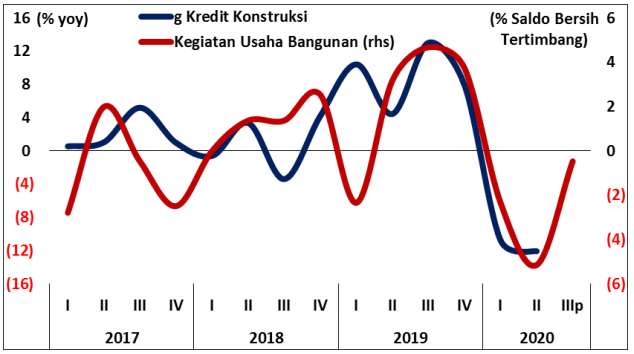

p) proyeksi

Sumber: LBU dan Survey Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (diolah)

Grafik V.12. Perkembangan Kredit Konstruksi dan Kegiatan Usaha Bangunan

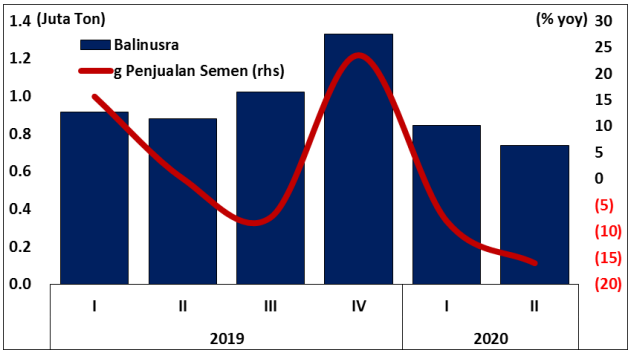

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.13. Pertumbuhan Penjualan Semen

Memasuki triwulan III 2020, pertumbuhan LU Konstruksi diprakirakan membaik. Hal ini didorong oleh kembali berlanjutnya pengerjaan proyek fisik pemerintah dan investasi bangunan swasta seiring dengan mulai dilonggarkannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di era *new normal*. Selain itu, Kemenkumham juga telah memberikan izin tenaga kerja asing yang bekerja di luar PSN[29]. Indikasi peningkatan ini tercermin dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang memperkirakan perbaikan perkiraan realisasi kegiatan usaha konstruksi di triwulan III 2020 (Grafik V.12).

Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan Balinusra pada triwulan II 2020 tumbuh -6,95% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan lalu yang tumbuh 1,15% (yoy). Menurunnya Kinerja LU Perdagangan

[28] Pada triwulan II 2020 produksi tercatat tumbuh sebesar 99,43% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 32,82% (yoy)

[29] Permenkumham No. 11 Tahun 2020

dipengaruhi terutama oleh implementasi berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat serta menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan kinerja LU Perdagangan terkonfirmasi dari penurunan pertumbuhan omzet penjualan survei penjualan eceran pada triwulan II 2020 yang sebesar -49,30% (yoy), menurun dari triwulan I 2020 yang sebesar -2,07% (yoy) (Grafik V.2).

Pada triwulan II 2020 kredit LU Perdagangan terkontraksi sebesar -0,54% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 4,38% (yoy). Menurunnya kredit LU Perdagangan sejalan dengan menurunnya kinerja LU tersebut terhadap perekonomian Balinusra. Meskipun demikian, risiko kredit LU Perdagangan masih cukup terjaga. Hal ini tercermin dari tingkat NPL pada triwulan II 2020 yang tercatat sebesar 3,45%, terjaga di bawah *threshold 5%.*

Pada triwulan III 2020, LU Perdagangan diprakirakan membaik. Membaiknya LU Perdagangan seiring dengan prakiraan membaiknya konsumsi, normalisasi jam operasional pusat perdagangan di Balinusra, dan peningkatan ekspor pada triwulan III 2020. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan peningkatan kegiatan usaha perdagangan di triwulan III 2020 (Grafik V.14).

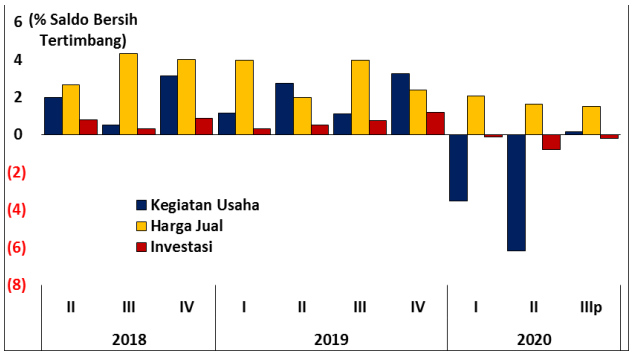

p) Proyeksi
Sumber: Survey Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (diolah)
Grafik V.14. Perkembangan Kegiatan Perdagangan

Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman

LU Akmamin pada triwulan II 2020 terkontraksi 34,38% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,25% (yoy). Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan wisman ke Balinusra (Grafik V.6), seiring adanya kebijakan *travel restriction* di tengah pandemi COVID-19, baik oleh Indonesia maupun negara asal wisman. Sementara wisman merupakan konsumen utama untuk LU Akmamin ini. Selain itu, aktivitas pembatasan kegiatan MICE pemerintah ditengarai juga ikut andil dalam turunnya LU Akmamin. Perlambatan LU ini juga sebagaimana tercermin dari hasil Saldo Bersih Tertimbang[30] Kegiatan Usaha SKDU LU akmamin yang menurun di triwulan II 2020 (Grafik V.15).

Memasuki triwulan III 2020, kinerja LU Akmamin diprakirakan membaik. Perbaikan kinerja LU Akmamin ini terutama didorong oleh mulai dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan domestik sejak 31 Juli 2020. Hal ini juga terindikasi dari ekspektasi pelaku usaha hasil SKDU yang menunjukkan perbaikan (Grafik V.15).

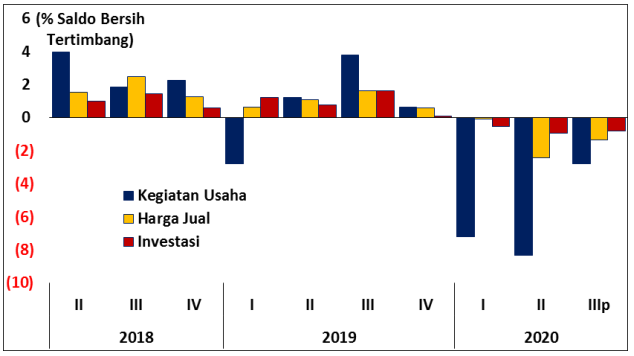

p) Proyeksi
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (diolah)
Grafik V.15. Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Akmamin

Fiskal Daerah

Realisasi pendapatan APBD Balinusra hingga triwulan II 2020 terkontraksi 14,2% (yoy) sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi. Realisasi pendapatan APBD secara nominal tercatat sebesar Rp30,1 triliun, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp35,0 triliun, meskipun secara persentase lebih baik (Tabel V.3). Penurunan pendapatan daerah terjadi di seluruh daerah di Balinusra, dengan penurunan terjadi pada hampir semua komponen pendapatan. Perkembangan ini tidak terlepas dari penyesuaian alokasi dana perimbangan dan penurunan penerimaan daerah seiring aktivitas usaha yang terbatas, terutama dengan kontraksi kinerja pariwisata yang cukup dalam. Penyesuaian yang dilakukan oleh daerah melalui *refocusing* dan realokasi anggaran daerah berimplikasi pada postur APBD yang lebih rendah.

Tabel V.3. Realisasi Pendapatan APBD di Balinusra*

Komponen APBD	Realisasi (Miliar Rp)		(% yoy)	Realisasi (%)*	
	II '19	II '20	II '20	II '19	II '20
Pendapatan APBD Balinusra	**35,042.37**	**30,068.51**	**(14.19)**	**44.61**	**45.28**
Bali	12,059.75	10,700.82	(11.27)	46.34	51.49
NTB	9,938.33	8,684.82	(12.61)	42.56	45.84
NTT	13,044.28	10,682.86	(18.10)	45.33	40.06

Sumber: DJPK, diolah
**) Keterangan: Data APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota*

Belanja APBD Balinusra tumbuh terkontraksi 3,05% (yoy) seiring dengan pendapatan yang lebih rendah. Kontraksi belanja daerah APBD di Balinusra terjadi di seluruh provinsi yang antara lain disebabkan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran, termasuk penyesuaian penyaluran Dana Desa. Realisasi belanja pada triwulan II 2020 tercatat lebih rendah dibandingkan periode

[30] Saldo bersih adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". Sementara itu Saldo Bersih Tertimbang adalah perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

yang sama tahun sebelumnya (Tabel V.4). Kontraksi belanja APBD di berbagai daerah di Balinusra terutama terjadi pada komponen belanja operasional dan transfer. Pagu alokasi belanja yang lebih rendah menyebabkan secara persentase realisasi penyerapan belanja APBD Balinusra pada triwulan II 2020 tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Tabel V.4. Realisasi Belanja APBD di Balinusra*

Komponen APBD	Realisasi (Miliar Rp)		(% yoy)	Realisasi (%)*	
	II '19	II '20	II '20	II '19	II '20
Belanja APBD Balinusra	**23,009.89**	**22,308.11**	**(3.05)**	**28.34**	**33.13**
Bali	9,240.13	8,733.89	(5.48)	39.08	39.15
NTB	6,666.16	6,511.97	(2.31)	28.32	36.33
NTT	7,103.60	7,062.25	(0.58)	27.24	26.07

Sumber: DJPK, diolah
**) Keterangan: Data APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota*

Perkembangan Inflasi

Inflasi Balinusra pada triwulan II 2020 tercatat rendah sebesar 1,48% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I 2020. Secara spasial, Bali dan NTT pada triwulan II 2020 tercatat mengalami perlambatan inflasi, sedangkan NTB tercatat mengalami deflasi (Tabel V.5). Deflasi di NTB merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir.

Tabel V.5. Perkembangan Inflasi Balinusra (%, yoy)

Provinsi	2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II
Bali	1.85	2.14	2.54	2.38	3.04	2.18
NTB	2.45	3.39	2.18	1.86	1.63	(0.17)
NTT	2.12	1.35	2.06	0.67	1.65	1.57
Balinusra	**2.06**	**2.35**	**2.36**	**1.96**	**2.52**	**1.48**

Sumber: BPS (diolah)

Perlambatan inflasi terjadi di sebagian besar kelompok barang, dengan penurunan terdalam terlihat untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Melandainya inflasi terutama disebabkan oleh penurunan permintaan sebagai dampak terhentinya industri pariwisata, penurunan daya beli masyarakat, serta pembatasan mobilitas. Penurunan tekanan harga di kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama terlihat untuk sub-kelompok makanan. Beberapa komoditas penyumbang deflasi diantaranya daging ayam ras, telur ayam dan ikan. Hal ini pada tahap selanjutnya berpengaruh pada penurunan harga bahan makanan jadi (ayam goreng dan ikan bakar). Selanjutnya, penurunan tekanan harga pada kelompok transportasi disebabkan oleh penurunan harga tiket angkutan udara dan angkutan antar kota, disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat dalam rangka *containment* COVID-19. Di sisi lain, inflasi masih terjadi untuk kelompok perlengkapan rumah tangga dan perawatan pribadi, terutama untuk barang terkait kebersihan dan kesehatan, seperti pembasmi nyamuk dan handuk (Tabel V.6).

Inflasi pada triwulan III 2020 diprakirakan melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan harga pada barang tahan lama serta tarif pesawat terbang diprakirakan masih menunjukkan tren penurunan, seiring dengan belum pulihnya perekonomian serta daya beli masyarakat yang masih lemah. Memasuki triwulan III 2020, secara bulanan inflasi pada bulan Juli 2019 tercatat kembali turun menjadi -0,24% (mtm)**.** Deflasi terutama disebabkan oleh penurunan signfikan pada harga bahan pangan. Dari sisi suplai, terjadi peningkatan pasokan seiring dengan panen komoditas hortikultura yang jatuh pada akhir triwulan II 2020. Disamping itu, kondisi cuaca cenderung kondusif untuk produksi pertanian di triwulan III 2020. Sementara dari sisi permintaan, penurunan terjadi seiring dengan masih belum pulihnya industri pariwisata. Selanjutnya, tarif angkutan udara juga kembali mengalami penurunan yang lebih dalam sebagai bentuk upaya maskapai penerbangan untuk meningkatkan *load factor*. Di sisi lain, harga emas perhiasan tercatat meningkat, sejalan dengan peningkatan harga emas dunia untuk *safe haven* akibat *re-emergence* klaster COVID-19 di beberapa negara.

Tabel V.6. Inflasi Balinusra Berdasarkan Kelompok (%, yoy)

Provinsi	Tw II '20			
	Bali	NTB	NTT	Balinusra
Makanan, Minuman dan Tembakau	2.54	0.30	4.06	2.22
Pakaian dan Alas Kaki	0.06	0.59	1.64	0.51
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	2.35	(0.39)	(0.14)	1.12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	1.44	1.22	0.72	1.29
Kesehatan	2.11	1.92	3.72	2.22
Transportasi	(2.72)	(6.73)	(3.10)	(3.76)
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.76	(0.51)	(0.94)	0.17
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3.28	1.33	0.02	2.32
Pendidikan	7.85	1.40	2.75	6.12
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3.90	0.44	0.95	2.76
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4.73	6.46	6.73	5.50
Inflasi Umum	**2.18**	**(0.17)**	**1.57**	**1.48**

Sumber: BPS (diolah)

Dalam upaya menjaga stabilitas harga, TPID di Balinusra tetap berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi. Hal ini dilakukan melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, keterjangkauan harga melalui pasar murah, koordinaasi dengan pemangku kepentingan untuk kelancaran distribusi, serta menjaga ekspektasi harga. TPID Balinusra akan secara berkelanjutan melaksanakan program kerja di provinsi masing-masing dengan mengacu pada *framework* 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Beberapa program kerja utama yang dilakukan di masing-masing provinsi adalah:

a) Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga (K1), TPID Provinsi Bali melakukan kegiatan Pasar Gotong Royong untuk dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian petani.

b) Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan (K2), TPID memberikan bantuan berupa *dome* pengering cabai bagi petani di NTB. Hal ini bertujuan agar petani dapat mengolah kembali cabai yang dihasilkan ke dalam bentuk cabai olahan. Disamping itu, TPID meningkatkan kerjasama antar daerah (KAD), baik di dalam wilayah Balinusra maupun dengan wilayah lainnya.

c) Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi (K3), TPID menjadi jembatan bagi petani untuk dapat *go digital*, dimulai dari kerja sama dengan *marketplace* di daerah masing-masing. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dari petani hingga sampai di konsumen.

d) Dalam rangka menjaga komunikasi efektif (K4), TPID bersama

dengan Pemerintah Daerah melakukan *encouragement* kepada berbagai pihak untuk melibatkan petani dan memasukkan *fresh produce* dalam pemberian bantuan sosial nontunai.

Lebih lanjut, dalam menghadapi musim kemarau pada paruh kedua 2020, TPID bersama dengan pemerintah daerah akan terus memastikan kondisi pasar tetap dapat menyerap komoditas hasil panen untuk menjaga tingkat harga, baik dari sisi petani maupun konsumen.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sistem Pembayaran Nontunai

Pada triwulan II 2020, aktivitas sistem pembayaran nontunai melalui RTGS tercatat meningkat, sedangkan SKNBI tercatat melambat. Secara nominal, pembayaran nontunai nilai besar melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di wilayah Balinusra menunjukkan peningkatan menjadi Rp61,20 triliun dari Rp50,18 pada triwulan sebelumnya (Grafik V.16). Di sisi lain, volume dan nilai nominal transaksi kliring mengalami perlambatan. Volume transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2020 tercatat sebanyak 403 ribu lembar (Grafik V.17) dengan nilai nominal sebesar Rp14,25 triliun (Grafik V.18), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 525 ribu lembar dengan nilai nominal sebesar Rp18,95 triliun.

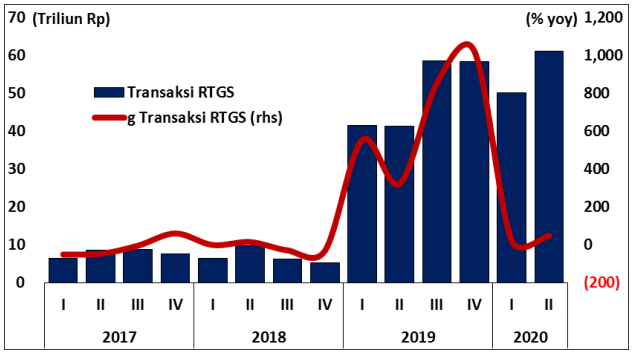

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.16. Nominal Transaksi RTGS

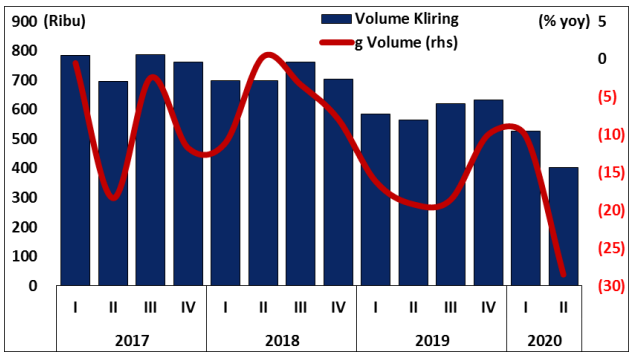

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.17. Volume Transaksi SKNBI

Selama triwulan II 2020, aliran transfer dana luar negeri melalui Perusahaan Transfer Dana (PTD) tercatat mengalami *net inflow* meskipun menurun dari sisi nominal. Dalam periode ini, transfer dana dari luar negeri tercatat Rp1,13 triliun (Grafik V.19), dengan sebagian besar ditujukan ke wilayah Bali sebesar Rp0,55 triliun. Sementara itu, aliran dana dari Balinusra ke luar negeri melalui PTD tercatat sebesar Rp29,67 miliar. Dengan demikian, posisi aliran transfer dana asing ke Balinusra pada triwulan II 2020 tercatat *net inflow* sebesar Rp1,10 triliun. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami nominal *net inflow* sebesar Rp1,12 triliun. Penurunan *net inflow* tersebut seiring dengan kebijakan Pemerintah terkait pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia akibat COVID-19 sejak April 2020.

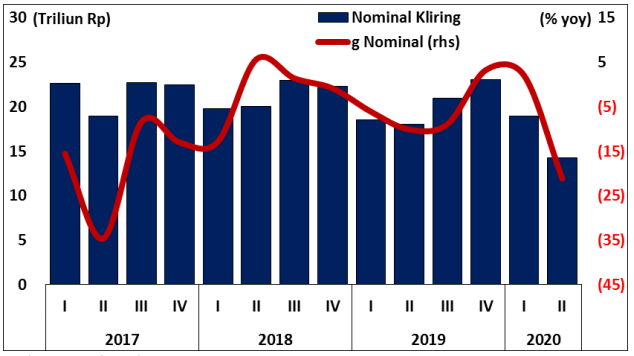

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.18. Nominal Transaksi SKNBI

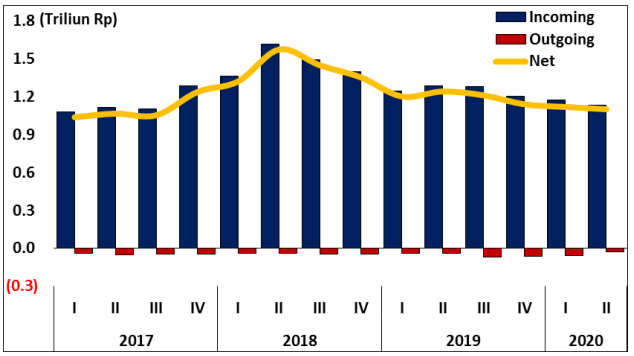

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.19. Transaksi PTD Non-Bank

Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Balinusra pada triwulan II 2020 menunjukkan posisi *net outflow*. *Net outflow* tercatat sebesar Rp1,02 triliun, sesuai dengan siklus distribusi uang yang mengalami *net outflow* pada triwulan II (Grafik V.20). Meskipun demikian, *net outflow* pada triwulan II 2020 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,61 triliun.

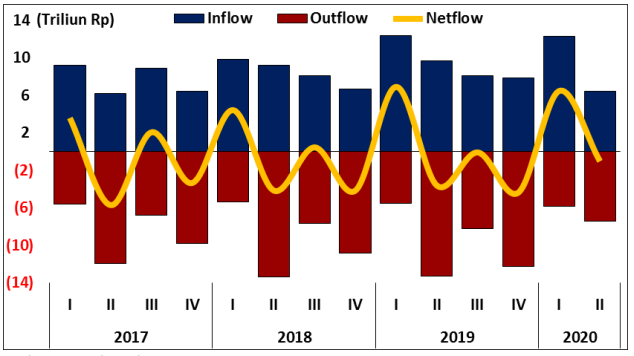

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.20. Aliran Uang Kartal

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Kegiatan KUPVA BB berizin di Balinusra menurun. Pada triwulan II 2020, jumlah transaksi KUPVA BB di Balinusra untuk transaksi penjualan dan pembelian masing-masing sebesar Rp0,63 triliun dan Rp0,62 triliun (Grafik V.21). Nominal transaksi KUPVA tersebut mengalami perlambatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan penurunan jumlah wisman pada triwulan II 2020.

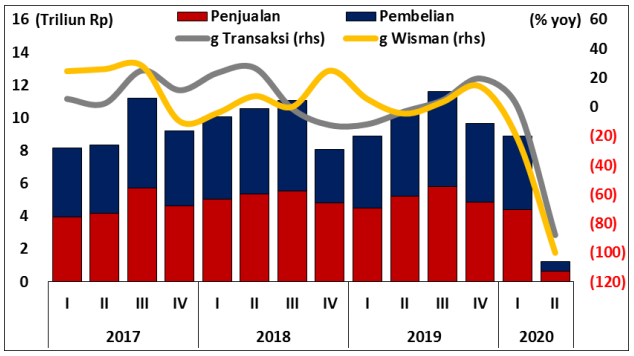

Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.21. Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Lebih lanjut, upaya perlindungan konsumen terus dilakukan, untuk meningkatkan aspek amenitas pariwisata. Terkait dengan upaya perlindungan kepada masyarakat, Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak berwajib dan desa adat setempat, seperti Desa Adat Badung dan Desa Adat Gianyar (di mana KUPVA BB mayoritas berlokasi) untuk melakukan penertiban KUPVA BB. Selain itu, pengembangan kegiatan KUPVA berizin di destinasi pariwisata prioritas nasional Mandalika dan Labuan Bajo akan terus ditingkatkan.

Bantuan Sosial Nontunai

Peningkatan elektronifikasi di Balinusra didukung oleh implementasi bantuan sosial. Penyaluran dan penyerapan bantuan Program Sembako di Balinusra hingga Juni 2020 cukup optimal dengan pencapaian penyaluran dan penyerapan yang hampir mencapai 100%. Angka persentase tersebut di atas nasional dan merupakan salah satu yang tertinggi dibanding wilayah lain. Penyaluran dan penyerapan bantuan PKH hingga bulan Juni 2020 juga sudah optimal dengan pencapaian penyaluran sebesar 100% dan penyerapan sebesar 91,46%, namun masih berada di bawah persentase penyerapan nasional. Secara spasial, penyerapan di Bali lebih tinggi dibandingkan dengan NTB dan NTT.

Dari sisi infrastruktur, infrastruktur pendukung relatif memadai. Penyaluran dan penyerapan bansos nontunai di Balinusra baik sebelum dan sesudah perluasan bantuan dalam masa pandemi COVID-19 relatif memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio pelayanan e-warong yang ideal (di bawah 1:250) hingga akses jumlah mesin ATM dan kantor jaringan Bank Penyalur yang terjangkau dari segi jarak, meskipun masih cukup terbatas di wilayah NTT. Selain itu, cakupan jaringan telekomunikasi telah mencapai 96% dari total wilayah Balinusra.

Implementasi elektronifikasi bansos masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Dari segi informasi dan data, terdapat ketidaksesuaian data antar-intansi yang dapat diatasi dengan pemanfaatan sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengkinian data dimulai dari level desa. Dari segi infrastruktur, dapat dilakukan pemanfaatan teknologi seperti EDC *offline* dan VSAT untuk daerah *blankspot*, pembuatan jadwal untuk memastikan operasional *e*-warong terus berjalan, serta melakukan kerja sama dengan pihak aparat desa/satgas bansos dalam pendistribusian selama masa pandemi COVID-19 dan pengecekan kualitas pasokan di *e*-warong. Dari segi implementasi, transformasi instrumen bansos dari kartu menjadi digital (QRIS) dapat menjawab tantangan yang dialami bank penyalur terkait tingginya biaya dan lamanya waktu dalam penyediaan infrastruktur, khususnya EDC. Dari segi koordinasi dan ketentuan, penyusunan SOP penanganan pengaduan keluhan di kantor cabang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian.

Prospek Perekonomian

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perbaikan perekonomian Balinusra diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua 2020. Dari sisi penggunaan, membaiknya perekonomian Balinusra bersumber dari peningkatan kinerja komponen konsumsi RT, investasi dan ekspor. Kinerja konsumsi RT diperkirakan membaik seiring dengan pemulihan pendapatan masyarakat, meskinterbatas. Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor diperkirakan bersumber dari komoditas tambang seiring dengan peningkatan target produksi dan membaiknya perekonomian mitra dagang utama (Tiongkok, Korea Selatan dan Filipina). Sementara perkiraan membaiknya investasi seiring dengan prospek pemulihan ekonomi pada triwulan IV 2020 dan berlanjutnya beberapa proyek konstruksi swasta yang sempat terhenti akibat kendala teknis sebagai dampak pandemi COVID-19. Dari sisi LU, membaiknya prakiraan perekonomian terutama ditopang oleh sektor pertambangan.

Untuk keseluruhan tahun 2020, perekonomian Balinusra 2020 diperkirakan tumbuh lebih rendah dari 2019 akibat tekanan COVID-19 yang cukup besar. Dari sisi penggunaan, kontraksi perekonomian bersumber dari seluruh komponen. Kontraksi konsumsi terjadi seiring dengan aktivitas yang menurun, sementara daya beli juga melemah. Kontraksi investasi disebabkan oleh tertundanya sejumlah investasi swasta dan pemerintah. Pelaku usaha cenderung bersikap *wait and see* dan menunda realisasi investasi hingga pandemi berakhir. Sementara itu, dari sisi pemerintah terjadi penundaan bahkan pembatalan sejumlah proyek fisik sebagai dampak realokasi belanja modal untuk penanganan COVID-19. Kinerja konsumsi pemerintah juga menurun karena penyesuaian target pendapatan dan rencana belanja yang lebih rendah, serta *refocusing* dan realokasi anggaran. Adapun kinerja ekspor diperkirakan terkontraksi yang terutama bersumber pada ekspor jasa sebagaimana tercermin dari kunjungan wisman yang terus tumbuh negatif serta belum dibukanya kunjungan wisman hingga akhir tahun 2020. Sementara itu, dari sisi LU, kontraksi terjadi pada hampir seluruh LU sebagai dampak pandemi COVID-19 dan sejumlah kebijakan

pembatasan sosial nasional dan domestik. Namun demikian, LU yang masih dapat tumbuh positif diantaranya LU Pertanian dan Pertambangan seiring dengan peningkatan produksi (lihat Boks 4) serta LU Informasi dan Komunikasi dan LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sejalan dengan peningkatan permintaan sarana penunjang komunikasi saat aktivitas bekerja dari rumah.

Prospek Inflasi

Untuk keseluruhan tahun 2020, inflasi Balinusra diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan komoditasnya, perkiraan melandainya inflasi bersumber dari tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga. Disamping itu, tekanan inflasi bahan pangan juga melambat seiring dengan penurunan permintaan masyarakat di masa pandemi.

Koordinasi pengendalian inflasi di wilayah Balinusra terus difokuskan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K yang sesuai dengan *blueprint* TPID. Beberapa upaya yang dilakukan TPID di wilayah Balinusra antara lain: 1) program untuk menjaga keterjangkauan harga dengan memanfaatkan teknologi digital; 2) program peningkatan produksi melalui pemanfaatan teknologi/mekanisasi pertanian; 3) upaya untuk mengatasi permasalahan pasokan antarwaktu dengan pembenahan distribusi maupun kegiatan kerjasama antardaerah; dan 4) pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi pada media cetak dan elektronik. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam kegiatan rapat koordinasi TPID, baik di tingkat wilayah Balinusra maupun di masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

BOKS 4

Tantangan dan Potensi Hilirisasi Tembaga Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Balinusra

Lapangan usaha pertambangan merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Balinusra. Pertumbuhan sektor pertambangan di wilayah Balinusra menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama 3 tahun terakhir. LU pertambangan juga merupakan salah satu LU yang tetap memiliki kinerja positif di tengah pandemi COVID-19 (Grafik V.22).

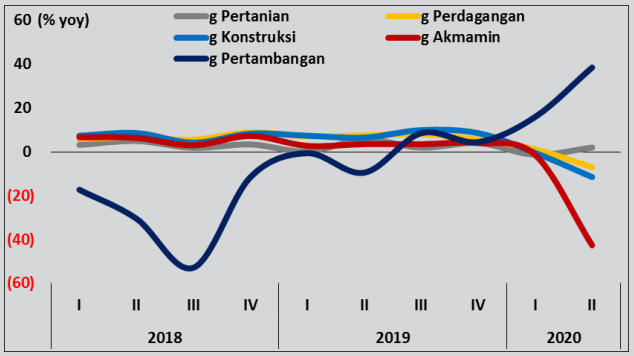

Sumber: BPS (diolah)

Grafik V.22 Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama di Balinusra

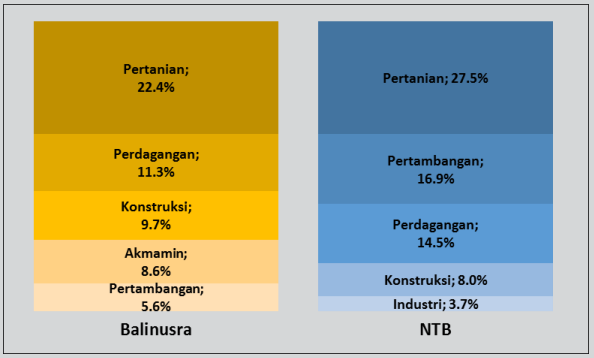

Sumber: BPS (diolah)

Grafik V.23 Pangsa Lapangan Usaha Utama di Balinusra dan NTB

Kinerja LU Pertambangan di wilayah Balinusra didukung oleh aktivitas pertambangan di Provinsi NTB. NTB merupakan provinsi dengan cadangan tembaga paling tinggi diantara provinsi lainnya di wilayah Balinusra. Kondisi ini menempatkan pertambangan sebagai kontributor terbesar kedua, setelah pertanian dalam perekonomian NTB (Grafik V.23). Saat ini, aktivitas pertambangan NTB didominasi oleh pertambangan bijih logam, terutama bijih tembaga[31]. Salah satu blok penghasil tembaga di NTB adalah Blok Batu Hijau yang merupakan tambang tembaga dan emas kedua terbesar di Indonesia.

Hilirisasi tembaga berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Balinusra. Hilirisasi konsentrat tembaga menjadi produk turunan seperti katoda dapat meningkatkan nilai tambah bruto sektor pertambangan Balinusra. Selain itu, hilirisasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja.

Potensi Tembaga di Balinusra

Potensi tembaga di Balinusra cukup besar baik dari sisi volume maupun kualitas. Produksi tembaga di Balinusra terutama bersumber dari Provinsi NTB, di mana sepanjang tahun 2020[32], keseluruhan ekspor[33] bijih tembaga di Balinusra berasal dari Provinsi tersebut. Secara volume, pangsa ekspor bijih tembaga Balinusra relatif besar, mencakup sekitar 35,8% ekspor bijih tembaga nasional.

Kadar timbal tembaga Balinusra yang rendah mendukung upaya hilirisasi. Konsentrat tembaga dari Balinusra mengandung kadar timbal yang rendah, sehingga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan kualitas tembaga yang dihasilkan wilayah Sulampua[34]. Kadar timbal yang terkandung dalam konsentrat tembaga memengaruhi proses pemurnian tembaga menjadi katoda (produk pemurnian atau hilir mineral), di mana semakin rendah kadar timbal konsentrat, akan semakin memudahkan proses pemurniannya.

Cadangan tembaga Balinusra cukup besar untuk menjaga keberlangsungan pasokan tembaga. Saat ini produksi tembaga Balinusra terutama bersumber dari pertambangan di Blok Batu Hijau, NTB. Pada tahun 2020, proses eksploitasi telah memasuki fase 7 dan diperkirakan akan menghasilkan 2,03 juta ton tembaga dan 4,12 juta ons emas**.** Fase 7 tersebut merupakan fase terakhir dari pertambangan di Blok Batu Hijau dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026. Selain Blok batu hijau, terdapat area tambang baru lain di NTB yang memiliki potensi cadangan tembaga, yaitu Blok Elang.

Cadangan mineral pada Blok Elang diperkirakan mencapai 5,89 juta ton tembaga dan 19,5 juta ons emas. Kegiatan tambang di Blok Elang saat ini berada dalam tahap eksplorasi akhir dan akan dilanjutkan dengan tahap perencanaan ekploitasi kandungan mineral. Produksi konsentrat tembaga pada Blok Elang

[31] Share bijih logam mencapai 75% dari total aktivitas pertambangan di NTB atau 67% dari total aktivitas pertambangan di Balinusra.

[32] Dari Januari hingga Juni 2020.

[33] Pasar utama ekspor tembaga Balinusra adalah Jepang, Korea Selatan dan Filipina, serta Tiongkok (pengiriman pertama ke Tiongkok mulai triwulan II 2020).

[34] Berdasarakan keterangan perusahaan Smelter yang mengolah produk tembaga Balinusra.

diprakirakan akan mencapai puncaknya pada saat memasuki puncak fase 7 pada tahun 2023.

Selain Blok Elang, cadangan tembaga baru juga ditemukan di Pulau Sumbawa. Per Desember 2019, total sumber daya mineral tertunjuk[35] di Pulau Sumbawa diperkirakan sebanyak 0,76 miliar ton yang terdiri dari 0,93 persen tembaga dan 0,56 gram/ton (g/t) emas. Penemuan sumber cadangan tembaga baru ini berdampak positif terhadap prospek hilirisasi khususnya dalam mendukung ketersediaan pasokan tembaga.

Perkembangan Hilirisasi Tembaga di NTB

Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk mineral melalui UU Minerba. Sesuai dengan amanat UU No.55 tahun 2009 yang diperbaharui menjadi UU No. 3 tahun 2020, bahwa setiap pemegang IUP atau IUPK pada kegiatan operasi mineral logam wajib meningkatkan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas dimaksud. Selama 3 (tiga) tahun setelah UU tersebut diterbitkan, pemerintah masih memperbolehkan para pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK mineral logam untuk menjual hasil mineral logam yang belum dimurnikan dengan tetap menerapkan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 164/PMK.010/2018. Pada UU tersebut, pengolahan/pemurnian harus tetap memperhatikan aspek peningkatan nilai ekonomi dan kebutuhan. Selain itu, Pemerintah juga menjamin keberlangsungan manfaat hasil dan/atau pemurnian tersebut. Mengacu pada undang-undang tersebut, perusahaan tambang di NTB berkomitmen untuk membangun *smelter* yang berlokasi di dekat kawasan pertambangan Pulau Sumbawa. *Smelter* tersebut memiliki kapasitas input sebesar 1,3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan mampu menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga/tahun. Selain pengembangan smelter, perusahaan juga berencana mengembangkan kawasan industri (KI) produk hilir tembaga di wilayah Sumbawa sebagai upaya optimalisasi nilai tambah produk. Lokasi yang dekat dengan tempat penambangan dan tersedianya fasilitas pelabuhan Benete serta jalan turut menjadi faktor pendukung pengembangan kawasan industri di Sumbawa.

Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proses pembangunan *smelter*. Dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan *smelter* dilakukan melalui pembentukan tim percepatan pembangunan industri *smelter* dan industri turunannya. Tim tersebut bertugas membantu percepatan proses perizinan dan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk membangun *smelter.* Selain itu, smelter dan kawasan industri Sumbawa juga menjadi salah satu program dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Perpres No.18 tahun 2020. Hal tersebut merupakan hasil dukungan pemerintah Provinsi NTB untuk pengembangan hilirisasi tembaga di NTB yang sejalan dengan program pengembangan perekonomian daerah melalu industrialisasi. Lokasi *smelter* yang berada dalam Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat dapat mendorong KI tersebut menjadi Kawasan industri prioritas nasional.

Progres pembangunan smelter tembaga di Sumbawa telah mencapai 22,97%, dan ditargetkan mulai beroperasi pada 31 Desember 2022. Proses pembangunan smelter saat ini sudah mencapai tahap lelang, namun terkendala masuknya calon vendor dari luar negeri (Tiongkok, Korea Selatan, India dan Finlandia) ke Indonesia akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, adanya diskresi izin masuk TKA yang bekerja maupun berkunjung ke Indonesia dalam rangka investasi[36] diharapkan dapat membuat proses pembangunan smelter kembali berjalan. Selain kendala proses pembangunan, terdapat sejumlah tantangan lainnya yang dapat menghambat optimalisasi nilai tambah dari hilirisasi tembaga.

Tantangan Hilirisasi Tembaga

Tantangan utama hilirisasi tembaga bersumber dari tingginya kebutuhan investasi dan *streamlining* aturan terkait hilirisasi. Meski hilirisasi tembaga dapat memberikan nilai tambah pada tembaga, namun diperlukan investasi besar untuk pembangunan smelter. Besarnya nilai investasi tersebut menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan smelter. Di samping itu, *streamlining* aturan terkait hilirisasi juga diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan smelter.

Nilai tambah produk pemurniaan tembaga yang rendah berpotensi menghambat upaya hilirisasi. Sesuai dengan amanat UU No.3 2020, pelaku tambang mineral diharuskan meningkatkan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter/pemurnian logam. Namun demikian, nilai tambah dari produk permurniaan tembaga hanya sekitar 7%[37], sementara nilai investasi pembangunan smelter cukup tinggi sehingga proses hilirisasi tembaga menjadi tidak ekonomis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan nilai tambah dari proses hilirisasi.

Prospek hilirisasi tembaga juga menghadapi tantangan dari rendahnya serapan katoda tembaga oleh domestik. Hal ini dikarenakan rantai pasok tembaga pada industri antara dan produk hilir tembaga masih belum optimal (Gambar V.1). Berdasarkan pohon industri tembaga, industri antara untuk komoditas tembaga saat ini masih terbatas pada produk kawat tembaga dan industri kabel. Rendahnya pengembangan industri hilir tembaga tersebut tercermin dari hasil simulasi indeks keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang tercatat sebesar 0,711[38]. Di sisi lain, rendahnya penyerapan katoda oleh domestik juga dipengaruhi masih tingginya impor katoda akibat adanya kebijakan bea impor katoda sebesar 0% (Grafik V.24).

[35] Sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh berdasarkan hasil tahap eksplorasi umum.

[36] Surat edaran Kemenkumkam No.IMI-UM.01.01-4047 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Pemberian Izin Masuk Orang Asing Berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020

[37] Nilai tambah pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat diperkirakan sebesar 80%, sementara nilai tambah pengolahan konsentrat menjadi katoda yang merupakan produk pemurniaan tembaga hanya sekitar 7%.

[38] Nilai Indeks < 1 menunjukkan rendahnya keterkaitan sektor yang menggunakan katoda tembaga sebagai input produksi.

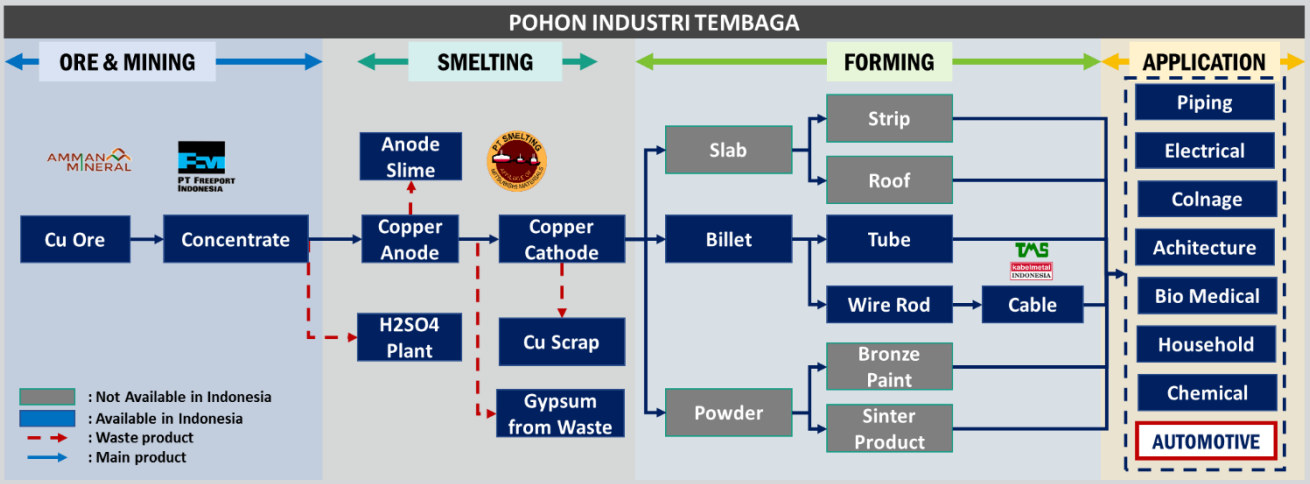

Sumber: Kementerian Perindustrian RI (diolah)

Gambar V.1. Pohon Industri Tembaga

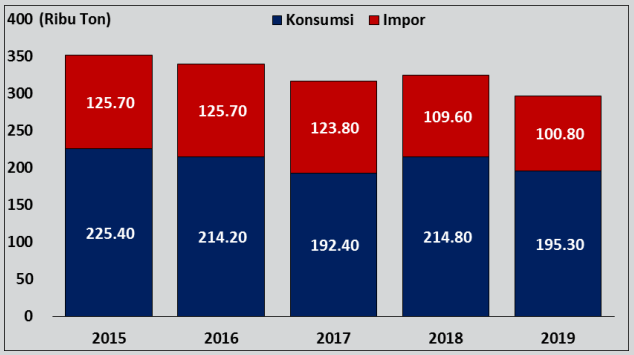

Sumber: Bappenas (diolah)

Grafik V.24 Serapan Domestik dan Impor Katoda Tembaga

Prospek Hilirisasi Tembaga Balinusra

Peluang penyerapan katoda di pasar internasional diprakirakan akan meningkat dalam 5 tahun ke depan, terutama didukung oleh masa pemulihan ekonomi di sejumlah negara. Ekonomi Tiongkok diperkirakan pulih lebih cepat dibandingkan negara lainnya pasca pandemi di topang oleh sektor logam dasar dan kimia/farmasi (Tabel V.7). Pemulihan sektor logam dasar Tiongkok berpotensi meningkatkan permintaan komoditas logam, termasuk komoditas *refined copper* atau produk hasil pemurnian tembaga seperti katoda. Hal tersebut terkonfirmasi dari meningkatnya impor *refined copper* Tiongkok pasca dibukanya kembali sektor ekonomi di Tiongkok (Grafik V.25). Peningkatan permintaan Tiongkok tersebut dapat menjadi peluang bagi produksi Hilirisasi Tembaga Nasional dalam jangka pendek.

Tabel V.7 Estimasi Waktu Pemulihan Ekonomi Sejumlah Negara

	Jepang	AS	Eurozone	Tiongkok
Recovery	Tw III 2022	Tw III 2021	Tw I 2022	**Tw III 2020**
Leading Sector	Otomotif	Elektronik	F&B dan Chemical/Pharma	**Logam Dasar dan Chemical/Pharma**
Lag Sector	Tekstil	Tekstil	Tekstil	**Tekstil**

Sumber: Oxford Economics, diolah

Prospek hilirisasi juga masih cukup besar seiring dengan pengembangan industri nasional 4.0. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mempercepat implementasi industri 4.0, pemerintah memfokuskan pengembangan 5 sektor industri utama (industri makanan, kimia dan farmasi, tekstil, elektronik, dan otomotif) (Grafik V.26). Salah satu bentuk implementasi industri 4.0 pada sektor otomotif adalah pengembangan kendaraan berbasis listrik nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, pemerintah berencana mengembangkan industri kendaraan berbasis listrik di dalam negeri. Pada PP tersebut, disampaikan bahwa industri KBL harus memenuhi kebutuhan komponennya atau disebut Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan porsi yang terus meningkat. Hal tersebut tentunya akan mendukung serapan tembaga di dalam negeri mengingat katoda merupakan komponen penting pada produksi mobil listrik.

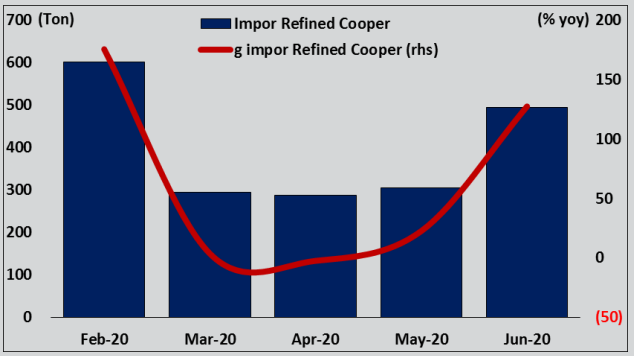

Sumber: CEIC (diolah)

Grafik V.25 Impor *Refined Copper* oleh Tiongkok

Prospek hilirisasi juga masih cukup besar seiring dengan pengembangan industri nasional 4.0. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mempercepat implementasi industri 4.0, pemerintah memfokuskan pengembangan 5 sektor industri utama (industri makanan, kimia dan farmasi, tekstil, elektronik, dan otomotif) (Grafik V.26). Salah satu bentuk implementasi industri 4.0 pada sektor otomotif adalah pengembangan kendaraan berbasis listrik nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, pemerintah berencana mengembangkan industri kendaraan berbasis listrik di dalam negeri. Pada PP

tersebut, disampaikan bahwa industri KBL harus memenuhi kebutuhan komponennya atau disebut Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan porsi yang terus meningkat. Hal tersebut tentunya akan mendukung serapan tembaga di dalam negeri mengingat katoda merupakan komponen penting pada produksi mobil listrik (Tabel V.8).

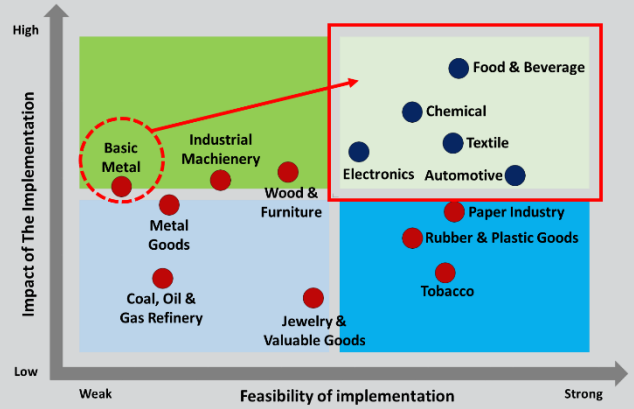

Sumber: Kementerian Perindustrian

Grafik V.26 *Roadmap* Industri Nasional 4.0

Tabel V.8. Penggunaan Tembaga per komponen unit kendaraan listrik

(kg)	ICEV	HEV	PHEV	BEV	Ebus Hybrid	Ebus BEV
Battery		1.0	22.0	40.0	12.0	292.0
Inventer		0.3	0.3	0.3	1.0	1.0
Electric Motor		5.0	5.0	9.9	20.0	20.0
HV Wire		5.0	5.0	5.0	11.0	11.0
Other	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
LV Wire	18.0	23.0	23.0	23.0	40.0	40.0
Total	**23.0**	**39.3**	**60.3**	**83.2**	**89.0**	**369.0**

Sumber: Copper alliance, IDTechEX, BYD, DBS Bank, diolah

Upaya Mendorong Percepatan Hilirisasi

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap tantangan dan peluang terkait hilirisasi tembaga, maka dapat dilakukan analisis *Strength – Weakness – Opportunity – Threat* (SWOT) sebagai berikut:

Gambar V.2 Analisis SWOT Hilirisasi Tembaga

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, beberapa hal yang dapat didorong untuk mendorong hilirisasi tembaga di Balinusra, antara lain:

a) Mendorong hilirisasi tembaga di NTB untuk pemenuhan target capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengembangan kendaraan berbasis listrik nasional.

b) Mendorong pembangunan industri antara/hilir tembaga di Kawasan Industri Sumbawa Barat, sehingga meningkatkan nilai tambah serta mendorong Balinusra sebagai daerah pemasok tembaga dalam pengembangan industri 4.0.

Streamlining aturan dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi logam nasional.

BAGIAN 6
PEREKONOMIAN SULAMPUA

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap kinerja perekonomian Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) pada triwulan II 2020. Dari sisi internal, penurunan permintaan domestik akibat pembatasan aktivitas sosial-ekonomi terkait penanganan COVID-19 menyebabkan perekonomian Sulampua terkontraksi. Meski demikian, ekspor luar negeri masih dapat tumbuh positif didukung permintaan yang masih terjaga dan perbaikan sisi produksi sehingga menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi Sulampua lebih dalam. Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan dan LU konstruksi terkontraksi akibat permintaan domestik yang turun dan penundaan investasi. Di sisi lain, peningkatan produksi tambang dan operasional beberapa korporasi hilirisasi nikel menopang kinerja LU pertambangan dan industri pengolahan untuk tetap tumbuh positif.

Memasuki triwulan III 2020, perekonomian Sulampua diperkirakan membaik ditopang mulai pulihnya konsumsi domestik. Konsumsi diperkirakan membaik didukung pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas sosial-ekonomi, meski berlangsung secara gradual akibat daya beli yang belum sepenuhnya pulih dan cukup besarnya jumlah pekerja yang terdampak COVID-19. Realisasi stimulus fiskal diperkirakan dapat menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Untuk keseluruhan tahun 2020, dampak COVID-19 mengakibatkan ekonomi Sulampua diperkirakan tumbuh terbatas dibandingkan dengan tahun 2019. Ekspor luar negeri diperkirakan menjadi penopang ekonomi Sulampua selama tahun 2020, didukung adanya peningkatan produksi tambang dan kinerja positif industri besi baja.

Di sisi harga, tekanan inflasi Sulampua pada triwulan II 2020 tetap rendah seiring permintaan domestik yang terbatas. Selain itu, rendahnya tekanan inflasi juga didukung terjaganya pasokan pangan seiring panen yang berlangsung dan minimnya kendala distribusi di tengah pembatasan mobilitas masyarakat di sejumlah daerah. Menurunnya permintaan domestik akibat dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih memengaruhi inflasi pada triwulan III 2020, meski sedikit meningkat seiring berlalunya masa panen dan relaksasi PSBB. Hingga akhir tahun 2020, tekanan inflasi Sulampua diprakirakan masih akan rendah dan berada dalam sasaran inflasi nasional.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulampua[39] pada triwulan II 2020 terkontraksi sebagai dampak COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Sulampua pada triwulan II 2020 tercatat -1,41% (yoy), setelah pada periode triwulan sebelumnya masih dapat tumbuh sebesar 3,56% (yoy). Meskipun demikian, kontraksi ekonomi Sulampua masih relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat yang tumbuh positif di tengah kontraksi perekonomian yang terjadi pada seluruh provinsi lainnya di Indonesia. (Tabel VI.1)

Dari sisi permintaan, kontraksi perekonomian Sulampua terutama diakibatkan oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh negatif. Kontraksi aktivitas konsumsi RT, yang pangsanya sekitar 50% dari keseluruhan ekonomi Sulampua, dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas sosial-ekonomi terkait COVID-19. Perkembangan ini lebih lanjut diikuti oleh berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha baik melalui efisiensi biaya operasional maupun penggunaan tenaga kerja, antara lain dengan pemberlakuan *unpaid leave* hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada pendapatan masyarakat. Sementara itu, kontraksi investasi diakibatkan realokasi belanja modal pemerintah dan tertundanya investasi swasta (PMA maupun PMDN). Di sisi lain, kinerja ekspor masih dapat tumbuh tinggi, meski belum memberi pengaruh langsung pada peningkatan daya beli masyarakat karena pangsanya terhadap PDRB yang hanya sekitar 20% dan masih terkonsentrasi pada beberapa daerah tertentu.

Tabel VI.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sulampua

Provinsi	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Sulawesi	**6.81**	**6.77**	**6.87**	**6.15**	**6.64**	**6.52**	**6.70**	**6.51**	**6.88**	**6.65**	**3.83**	**(2.76)**
Sulawesi Selatan	7.29	7.35	7.17	6.44	7.06	6.58	7.41	7.19	6.48	6.92	3.07	(3.87)
Sulawesi Barat	5.53	6.81	7.40	5.26	6.25	5.97	5.14	5.16	6.37	5.66	4.92	(0.78)
Sulawesi Tenggara	6.15	6.13	7.14	6.23	6.42	6.39	6.32	6.43	6.87	6.51	4.37	(2.39)
Sulawesi Tengah	6.63	6.20	7.05	5.28	6.28	6.54	6.26	6.15	9.59	7.15	4.91	(0.06)
Gorontalo	6.13	7.43	5.25	7.23	6.50	6.75	6.71	5.72	6.47	6.41	4.06	(0.27)
Sulawesi Utara	6.63	5.77	5.59	6.10	6.01	6.57	5.53	5.19	5.45	5.66	4.27	(3.89)
Mapua	**17.31**	**17.74**	**6.55**	**(9.53)**	**7.02**	**(9.60)**	**(13.09)**	**(7.39)**	**0.97**	**(7.40)**	**2.85**	**2.36**
Maluku	5.38	5.53	6.38	6.43	5.94	6.29	6.08	5.26	4.73	5.57	4.01	(0.92)
Maluku Utara	7.90	7.31	8.21	8.25	7.92	7.70	7.49	4.12	5.38	6.13	3.06	(0.16)
Papua	26.73	23.89	6.20	(17.95)	7.37	(18.66)	(23.91)	(15.05)	(3.73)	(15.72)	1.48	4.52
Papua Barat	5.93	12.85	6.93	0.14	6.25	(0.25)	(0.49)	2.93	8.27	2.66	5.14	0.53
Sulampua	**9.83**	**9.90**	**6.77**	**1.18**	**6.76**	**1.57**	**0.65**	**2.32**	**5.21**	**2.45**	**3.56**	**(1.41)**

Sumber: BPS, diolah

Dari sisi LU, kontraksi pertumbuhan pada triwulan II 2020 terutama terjadi pada kinerja LU perdagangan dan LU konstruksi. Hal tersebut diakibatkan pembatasan aktivitas sosial-ekonomi dan penundaan beberapa proyek investasi. Namun, penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh kinerja LU pertambangan dan LU industri pengolahan yang masih tumbuh positif sebagai dampak hilirisasi nikel. Produksi tembaga di Papua tercatat meningkat, sementara produksi tambang nikel dan industri olahannya tetap optimal. Panen raya pada triwulan II 2020 juga mendorong LU pertanian tumbuh positif, meski bencana banjir menghambat produksi dan

[39] Cakupan asesmen wilayah Sulampua terdiri dari 10 provinsi yaitu Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Gorontalo, Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku, Maluku Utara (Malut), Papua dan Papua Barat (Papbar)

distribusi di sejumlah daerah serta musim kemarau menghambat produktivitas perikanan tambak.

Kinerja Sisi Penggunaan

Konsumsi

Kinerja konsumsi mengalami kontraksi sebagai dampak dari turunnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi swasta terkontraksi 4,95% (yoy), menurun cukup dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 3,25% (yoy). Kontraksi pertumbuhan konsumsi swasta terutama dipengaruhi oleh penurunan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang lebih lanjut berdampak pada daya beli sebagai dampak COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 dan upaya penanganan yang terjadi selama periode HBKN Idulfitri menyebabkan konsumsi rumah tangga menjadi tidak setinggi pola historisnya.

Sejalan dengan konsumsi yang mengalami kontraksi, penyaluran kredit konsumsi melambat. Pertumbuhan positif kredit rumah tangga (RT) terjadi pada jenis Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kredit multiguna, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami kontraksi (Tabel VI.2). Penurunan pertumbuhan penyaluran kredit Sulampua terjadi di seluruh provinsi. Meski demikian, kualitas kredit tetap terjaga sebagaimana tercermin dari rasio NPL yang masih dalam batas aman.

Tabel VI.2. Perkembangan Kredit RT Sulampua

Kategori	g Kredit (% yoy)					
	2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II
Total	**10.16**	**7.98**	**8.33**	**8.35**	**8.47**	**5.51**
- KPR	7.99	4.87	3.77	0.20	1.00	(1.23)
- KKB	12.54	7.77	4.46	11.99	13.45	2.72
- Multiguna	10.62	10.79	9.06	11.74	12.00	9.18

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Tabel VI.3. Perkembangan DPK Rumah Tangga

Kategori	Nominal (Triliun Rp)						
	2018	2019				2020	
	IV	I	II	III	IV	I	II
Total DPK	**187.10**	**175.07**	**181.77**	**181.65**	**200.33**	**187.50**	**194.75**
- Tabungan	130.09	118.20	122.46	123.36	141.30	127.56	134.82
- Giro	8.31	6.79	8.01	6.34	7.35	6.27	6.33
- Deposito	48.70	50.08	51.31	51.95	51.68	53.67	53.61
Kategori	**g DPK (% yoy)**						
	2018	2019				2020	
	IV	I	II	III	IV	I	II
Total DPK	**6.02**	**7.00**	**9.24**	**8.03**	**7.07**	**7.10**	**7.14**
- Tabungan	7.44	6.95	8.88	8.67	8.62	7.92	10.09
- Giro	0.16	5.49	14.15	(8.31)	(11.54)	(7.66)	(21.01)
- Deposito	3.41	7.33	9.39	8.89	6.12	7.18	4.49

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penghimpunan DPK rumah tangga di Sulampua mengalami peningkatan sejalan dengan terbatasnya konsumsi masyarakat. Peningkatan nominal DPK didukung oleh peningkatan yang terjadi pada tabungan dan giro meski deposito tumbuh menurun. Secara tahunan total DPK mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, khususnya untuk jenis tabungan (Tabel VI.3). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih menyimpan dananya pada jenis simpanan yang lebih mudah dicairkan. Peningkatan DPK ini diperkirakan terkait dengan respons masyarakat yang cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan dana yang dimiliki, mencermati ketidakpastian terhadap dampak COVID-19 lebih lanjut.

Peran konsumsi pemerintah daerah juga masih terbatas dalam mendorong perekonomian Sulampua. Pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 5,23% (yoy) pada triwulan II 2020. Kontraksi tersebut disebabkan terbatasnya realisasi belanja pemerintah setelah realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Belanja daerah yang masih rendah antara lain diakibatkan belum terserapnya anggaran kesehatan, antara lain untuk pengadaan alat kesehatan.

Kinerja konsumsi diperkirakan secara gradual mulai pulih pada triwulan III 2020. Indikasi perbaikan konsumsi rumah tangga tercermin dari peningkatan keyakinan konsumen di awal triwulan III 2020, sejalan dengan proses *recovery* (Grafik VI.1). Perbaikan kinerja juga diperkirakan terjadi pada konsumsi pemerintah yang akan meningkat seiring dengan pola musiman dan percepatan realisasi anggaran penanganan COVID-19. Meskipun demikian, perbaikan konsumsi diperkirakan masih terbatas yang antara lain dipengaruhi oleh tingginya jumlah PHK dan *unpaid leave* di Sulampua, sehingga menahan konsumsi RT tumbuh tinggi pada triwulan mendatang.

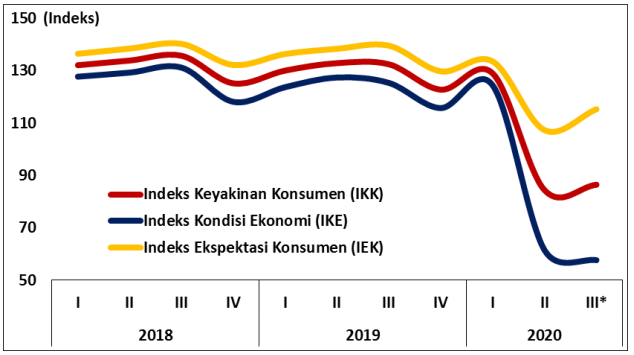

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik VI.1. Indeks Keyakinan Konsumen

Investasi

COVID-19 juga berdampak pada kinerja investasi di Sulampua yang mengalami kontraksi pertumbuhan. Kinerja investasi Sulampua pada triwulan II 2020 terkontraksi 2,94% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif 8,28% (yoy). Kontraksi investasi terutama dipengaruhi realokasi anggaran belanja modal pemerintah akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada tertahannya investasi swasta yang tercermin dari penurunan realisasi investasi terutama yang bersumber dari Penanaman Modal asing (PMA) yang tercatat terkontraksi 19,43% (yoy). Selain itu, beberapa kendala yang mengemuka seperti mobilitas akses tenaga kerja ahli untuk mendukung penyelesaian proyek investasi juga menahan realisasi inflasi lebih lanjut. Sementara itu, investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih dapat tumbuh positif (Grafik VI.2). Meskipun investasi secara agregat wilayah tercatat kontraksi, namun masih terdapat provinsi yang mencatatkan pertumbuhan

positif yakni Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara didorong realisasi investasi terkait kelistrikan, pembangunan perumahan, dan industri logam dasar.

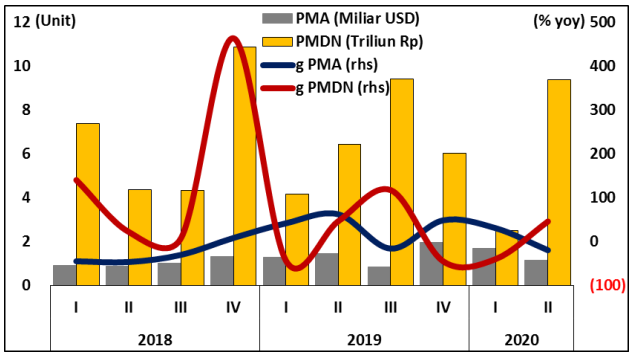

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik VI.2. Realisasi PMA dan PMDN di Sulampua

Kinerja investasi diperkirakan mulai pulih pada triwulan III 2020. Terdapat optimisme peningkatan realisasi belanja modal Pemerintah yang diharapkan dapat mendorong investasi setelah tertunda pada periode sebelumnya serta berlanjutnya konstruksi industri hilirisasi nikel. Berbagai kendala penyelesaian proyek investasi yang sempat mengemuka juga mulai teratasi. Di sisi lain, penundaan pembangunan infrastruktur di kawasan KEK Likupang serta tendensi *wait and see* pelaku usaha di tengah pandemi yang belum sepenuhnya pulih diperkirakan menjadi faktor penahan kinerja investasi.

Kinerja Ekspor-Impor

Kinerja ekspor luar negeri (LN) Sulampua tercatat menguat di tengah pandemi COVID-19. Ekspor LN Sulampua pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar 21,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,15% (yoy). COVID-19 secara umum tidak mengganggu aktivitas produksi, baik tembaga maupun smelter nikel di Sulampua, sehingga menopang kinerja ekspor pertambangan dan industri pengolahan (Grafik VI.3). Peningkatan produksi *underground mining* Papua juga dapat mendorong ekspor konsentrat tembaga tumbuh hampir 100%. Kinerja industri pengolahan yang positif menopang pertumbuhan ekspor luar negeri lebih kuat, khususnya untuk produk olahan nikel berupa *stainless steel*. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mendukung tetap tingginya kinerja ekspor olahan nikel: (1) permintaan Tiongkok tetap kuat dengan tidak berhentinya produksi baja meskipun permintaannya melemah dikarenakan Pemerintah Tiongkok tidak menginginkan meningkatnya tingkat pengangguran; (2) Adanya hubungan khusus perusahaan induk atau afiliasi antara perusahaan baja di Tiongkok sebagai importir dengan perusahaan eksportir hilirisasi nikel di Indonesia; (3) mulai berproduksinya beberapa pabrik smelter baru di 2020.

Memasuki triwulan III 2020, kinerja ekspor Sulampua diprakirakan tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kinerja ekspor besi baja diperkirakan masih tinggi didorong permintaan negara mitra khususnya Tiongkok pasca meredanya COVID-19, serta meningkatnya produksi besi baja dari beberapa smelter baru yang beroperasi sejak akhir tahun 2019. Di sisi lain, melambatnya pertumbuhan ekspor Sulampua diperkirakan akibat masih tertahannya permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama selain Tiongkok, khususnya untuk industri LNG.

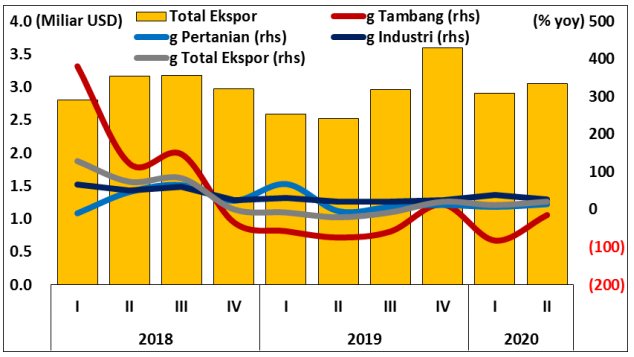

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik VI.3. Nilai Ekspor Sulampua

Berbeda dengan ekspor, kinerja impor pada triwulan II 2020 tercatat melambat. Impor luar negeri Sulampua pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh 10,48% (yoy), relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,84% (yoy). Melambatnya impor luar negeri terutama terjadi pada komponen impor barang modal sejalan dengan penundaan investasi yang dilakukan pelaku usaha sebagai dampak COVID-19. Impor barang modal pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 18,83% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh 32,70% (yoy) (Grafik VI.4).

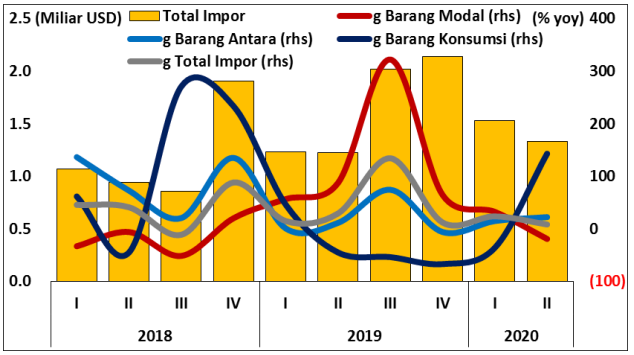

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik VI.4. Impor Menurut Kategori Barang

Pada triwulan III 2020 kinerja impor diperkirakan kembali akan melambat. Perlambatan impor diperkirakan akibat tertahannya impor barang modal sering masih terbatasnya perbaikan realisasi investasi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga dipengaruhi oleh telah selesainya sejumlah proyek smelter pada triwulan sebelumnya dan mundurnya proyek industri LNG di Papua Barat.

Kinerja Lapangan Usaha

Pertanian

Kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan II 2020 masih tumbuh positif meski melambat. Kinerja LU pertanian pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar 0,72% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 2,14% (*yoy*). Pertumbuhan yang masih positif didukung oleh berlangsungnya panen raya pada triwulan II 2020. Di sisi lain, perlambatan kinerja LU pertanian tercermin pada penurunan kinerja ekspor beberapa komoditas utama pertanian,

terutama kakao dan perikanan (Grafik VI.5). Melambatnya kinerja LU pertanian dipengaruhi oleh masuknya musim kemarau yang berdampak pada produktivitas perikanan tambak, serta bencana banjir yang menimpa sebagian wilayah sentra produksi, terutama di Sulawesi dan Maluku, sehingga berdampak pada penurunan produksi dan terhambatnya distribusi hasil pertanian.

Memasuki triwulan III 2020, kinerja LU pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2020. Peningkatan didorong oleh membaiknya permintaan. Dari sektor perkebunan, harga komoditas minyak kelapa dan karet yang diprediksi mengalami peningkatan diharapkan dapat memberikan insentif lebih baik bagi petani. Selain itu, produksi sawit diperkirakan meningkat seiring peningkatan pola produksi industri pengolahan sawit di KEK Sorong yang berproduksi sejak triwulan sebelumnya.

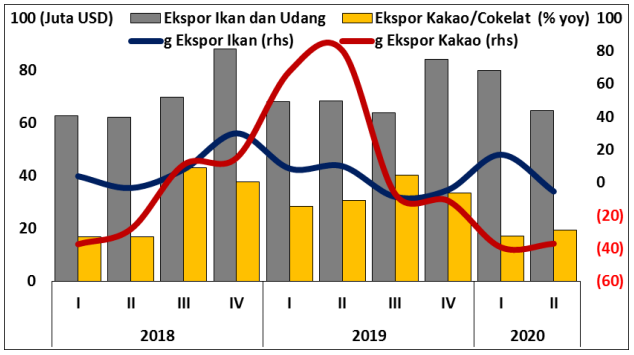

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik VI.5. Ekspor Komoditas Perikanan dan Perkebunan

Pertambangan

LU pertambangan mencatatkan kinerja yang sangat baik di tengah pandemi COVID-19. Kinerja LU pertambangan pada triwulan II 2020 tumbuh 9,59% (yoy), jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh 4,27% (yoy). Peningkatan produksi dan harga hasil tambang menopang perbaikan kinerja LU tersebut sehingga menjadi salah satu penahan kontraksi perekonomian Sulampua. Perbaikan kinerja LU pertambangan terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas tambang emas dan tembaga yang disertai terus meningkatnya produksi tembaga sejalan dengan perbaikan produksi tambang bawah tanah di Papua (Grafik VI.6). Di samping itu, diterbitkannya regulasi harga patokan mineral menjaga harga jual bijih nikel dalam negeri dan mendukung keberlangsungan kinerja pertambangan nikel.

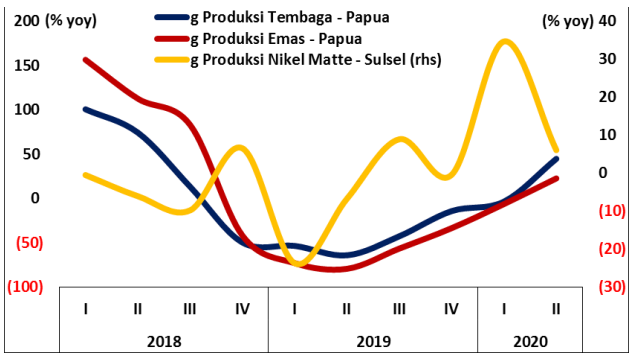

Sumber: Produsen, diolah

Grafik VI.6. Pertumbuhan produksi mineral di Sulampua

Pada triwulan III 2020 kinerja pertambangan diperkirakan masih tumbuh positif meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan produksi tambang bawah tanah Papua yang diperkirakan terus berlanjut, meski relatif terbatas dibandingkan produksi tambang *open pit* yang beroperasi pada tahun 2019.

Industri Pengolahan

LU industri pengolahan pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja LU industri pengolahan pada triwulan II 2020 masih dapat tumbuh 1,46% (yoy) di tengah pandemi Covid-19, meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,56% (yoy). Perkembangan ini ditopang oleh produksi dan ekspor besi baja yang masih cukup kuat pada periode triwulan laporan (Grafik VI.7). Masih kuatnya ekspor terutama untuk memenuhi permintaan bahan baku perusahaan baja di Tiongkok (sebagai induk perusahaan eksportir besi baja Indonesia). Korporasi baja Tiongkok tetap beroperasi seiring upaya negara tersebut untuk menekan tingkat pengangguran. Meskipun ekspor besi baja ke Tiongkok relatif tidak terdampak, namun ekspor ke negara non-Tiongkok, terutama ke Eropa mengalami penurunan. Di sisi lain, perlambatan kinerja industri pengolahan dipengaruhi penurunan kinerja industri makanan yang signifikan akibat turunnya permintaan sehingga korporasi kesulitan untuk menjual hasil produksinya.

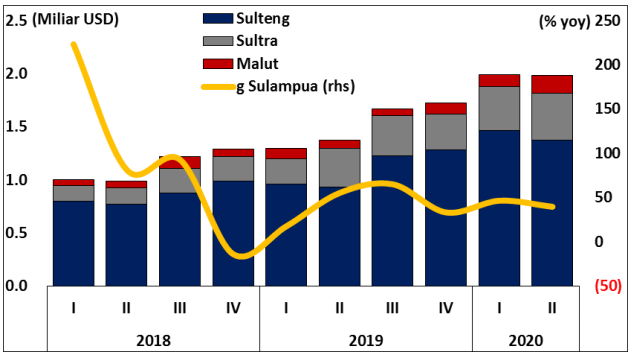

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik VI.7. Ekspor Besi Baja Sulampua

Pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan tetap positif meski melanjutkan perlambatan pada triwulan III 2020. Perlambatan kinerja LU industri dipengaruhi oleh masih terbatasnya permintaan negara mitra dagang selain Tiongkok yang masih dalam proses pemulihan perekonomian. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga akhir tahun 2020, terutama dipengaruhi oleh permintaan yang belum optimal dan penundaan investasi akibat COVID-19. Sementara itu, membaiknya kinerja operasional perusahaan besi baja diperkirakan dapat menopang kinerja LU industri tetap tumbuh positif. Ke depan, kinerja industri pengolahan di wilayah Sulampua dapat tetap tumbuh positif didukung konsistensi berbagai upaya untuk peningkatan nilai tambah atau hilirisasi komoditas pertambangan. Permintaan nikel dunia yang diperkirakan semakin tinggi, termasuk untuk menjadi komponen utama baterai di industri mobil listrik, sehingga dapat berdampak positif pada prospek perekonomian Sulampua ke depan (selengkapnya lihat Boks 5).

Konstruksi

Kinerja LU konstruksi mengalami kontraksi seiring penyesuaian jadwal konstruksi proyek akibat COVID-19. Kontraksi pertumbuhan LU konstruksi disebabkan penyesuaian pelaksanaan beberapa poyek strategis dan penurunan realisasi belanja modal pada triwulan II 2020 di tengah pandemi COVID-19. Beberapa proyek strategis yang terdampak antara lain terkait proyek infrastruktur PON XX di Papua, bendungan Pamukkulu dan jalan layang AP Pettarani di Sulawesi Selatan, serta Trans Halmahera di Maluku Utara. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penyesuaian jadwal konstruksi yang semakin lama, sehingga mengakibatkan kinerja LU konstruksi semakin tertekan. Hal ini juga terkonfirmasi dari data konsumsi semen di Sulampua yang masih mengalami kontraksi (Grafik VI.8).

Memasuki triwulan III 2020, kinerja LU konstruksi diperkirakan akan lebih baik seiring pelonggaran PSBB. Pelonggaran ini diperkirakan akan mendukung kelanjutan pembangunan proyek Pemerintah setelah sebelumnya sempat tertunda. Upaya Pemerintah dalam peningkatan realisasi anggaran juga merupakan salah satu pendorong perbaikan kinerja LU konstruksi.

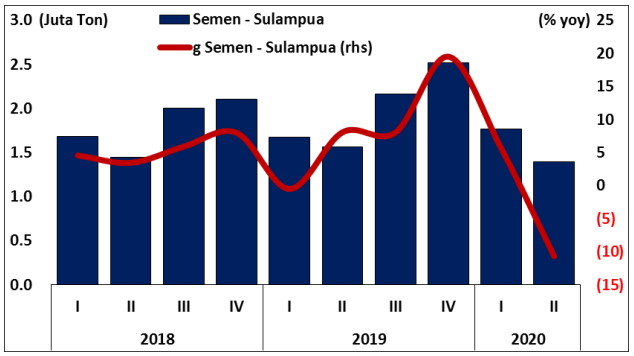

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik VI.8. Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen Sulampua

Perdagangan

Kinerja LU perdagangan pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi karena melambatnya permintaan domestik. Pertumbuhan LU perdagangan pada triwulan II 2020 terkontraksi 6,09% (yoy), dari sebelumnya yang tumbuh positif 1,93% (yoy). Kontraksi LU perdagangan sejalan dengan menurunnya konsumsi karena pembatasan aktivitas sosial-ekonomi terkait COVID-19 yang juga disertai penurunan pendapatan. Indikasi perlambatan kinerja LU perdagangan juga tercermin dari pergerakan hasil SKDU perdagangan di triwulan II 2020 yang menurun (Grafik VI.9).

Kinerja LU perdagangan diprakirakan mulai membaik pada triwulan III 2020 seiring pelonggaran PSBB. Memasuki awal triwulan III, indikator konsumsi menunjukkan adanya perbaikan (Grafik VI.1). Perkembangan positif ini diperkirakan juga berdampak pada kinerja LU perdagangan. Pelonggaran PSSB dan dimulainya adaptasi kebiasaan baru sejak akhir triwulan II diperkirakan dapat mendorong perbaikan kinerja perekonomian, termasuk LU perdagangan seiring mulai membaiknya mobilitas masyarakat dan permintaan domestik. Selain itu, perbaikan kinerja LU perdagangan juga dipengaruhi adanya pencairan gaji ke-13 PNS dan percepatan realisasi anggaran bansos.

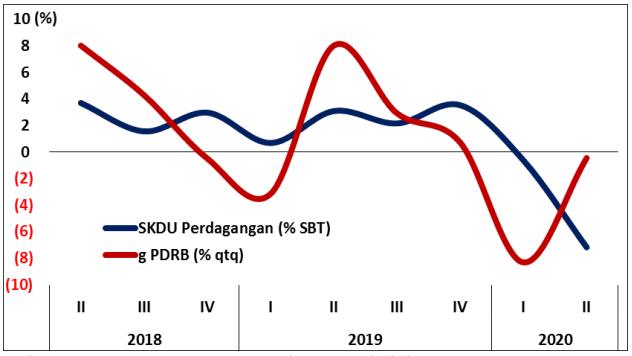

Sumber Survei Kegiatan Dunia Usaha, BPS, diolah

Grafik VI.9. SBT SKDU Perdagangan di Sulampua

Fiskal Daerah

Realisasi pendapatan APBD provinsi di wilayah Sulampua pada triwulan II 2020 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan APBD provinsi di Sulampua pada triwulan II 2020 sebesar Rp19,1 triliun (34,5% dari pagu), atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp21,6 triliun (39,6% dari pagu) - (Tabel VI.4). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya dana perimbangan yang dilakukan untuk realokasi penanganan COVID-19. Penurunan realisasi dana perimbangan terjadi sejalan dengan *refocusing* anggaran dan realokasi belanja Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan COVID-19, sehingga pagu dana perimbangan tercatat turun 1,1% dibandingkan dengan pagu pada triwulan I tahun 2020, sebelum penyesuaian APBD. Sampai dengan akhir Triwulan II 2020, dana perimbangan terealisasi Rp12,5 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang sebesar Rp15,5 triliun. Sementara itu, perbaikan pendapatan asli daerah (PAD) dan pos lain-lain pendapatan yang sah meningkat, namun belum mampu mengompensasi penurunan dana perimbangan. Penurunan pendapatan Pemda tercermin dari simpanan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang turun 11,2% (yoy) - (Grafik VI.10). Penurunan realisasi pendapatan secara nominal terjadi di hampir seluruh provinsi, kecuali Sulteng, Maluku, dan Papua yang masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

Tabel VI.4. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi di Sulampua

Komponen Pendapatan (Triliun Rp)	Tw II 2019		Tw II 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan APBD Provinsi	**54.6**	**21.6**	**55.3**	**19.1**
Pendapatan Asli Daerah	10.4	4.8	10.4	5.1
Dana Perimbangan	39.9	15.5	31.6	12.5
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.3	1.3	13.4	1.6
Belanja APBD Provinsi	**55.5**	**15.3**	**59.0**	**16.0**
Belanja Operasional + Transfer	44.0	14.3	47.3	14.8
Belanja Modal	11.4	1.0	10.7	0.9
Belanja Tidak Terduga	0.1	0.0	1.0	0.3

Sumber: BPKAD provinsi

Di tengah pendapatan transfer yang lebih terbatas, sejumlah Pemerintah Daerah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari PAD. Mekanisme pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi diimplementasikan oleh hampir seluruh provinsi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Pembebasan denda pembayaran pajak kendaraan

bermotor juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulut, Malut, dan Papua guna mendorong pendapatan pajak kendaraan bermotor. Di Maluku, Pemda setempat bersinergi untuk mendukung kelancaran ekspor luar negeri melalui pemberian kemudahan perizinan bagi perusahaan ekspor dan layanan 24/7, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

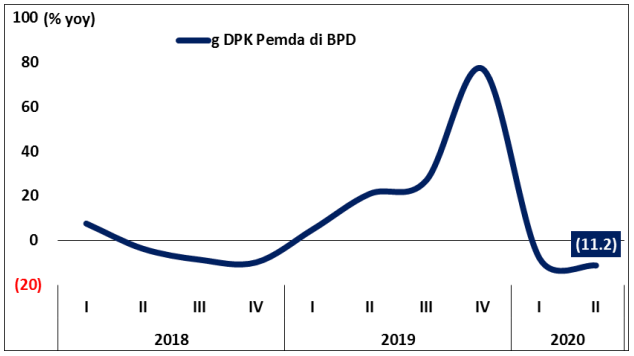

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik VI.10. Pertumbuhan DPK Pemerintah Daerah Wilayah Sulampua di BPD

Sejalan dengan pendapatan yang lebih terbatas, serapan belanja APBD juga lebih rendah akibat serapan belanja operasional dan transfer yang lebih rendah. Meskipun secara nominal realisasi lebih tinggi, namun penyerapan belanja pada triwulan II 2020 sebesar 27,2% (Rp16 triliun) dari pagu yang ditetapkan, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang terealisasi 27,6% (Rp15,3 triliun) dari pagu (Tabel VI.4). Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh penyaluran THR relatif terbatas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terdapat kelompok jabatan (eselon I dan II) yang tidak menerima THR sebagai akibat dari upaya penghematan belanja untuk penanggulangan COVID-19. Selain itu, kinerja belanja operasional dipengaruhi belanja perjalanan dinas, honor kegiatan, dan belanja operasional lainnya menjadi lebih terbatas seiring dengan pembatasan aktivitas dan penerapan bekerja dari rumah (*work from home*). Realisasi belanja modal juga lebih rendah karena tertundanya penyelenggaraan sejumlah proyek infrastruktur sejalan dengan pengalihan anggaran dan dampak COVID-19. Di sisi lain, realisasi belanja tidak terduga disumbang oleh kenaikan belanja untuk penanganan dampak COVID-19.

Tabel VI.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Penanggulangan COVID-19 (Miliar Rp)

Provinsi	Alokasi (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)
Bantuan Sosial Penanggulangan Covid-19			
Sulawesi Utara (APBN+APBD)	205.6	205.5	100.0
Gorontalo (APBD)	50.8	30.0	59.0
Sulawesi Tengah (APBD)	112.8	49.5	43.9
Sulawesi Selatan (APBD)	500.0	156.5	31.3
Sulawesi Tenggara (APBD)	400.0	273.1	68.3
Maluku (APBN)	602.2	602.2	100.0
Maluku Utara (APBD)	163.2	51.0	31.2
Papua (APBD)	321.0	140.0	43.6
Papua Barat (APBD)	10.0	10.3	103.0

Sumber: BPKAD provinsi

Alokasi bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19 di Sulut, Maluku, dan Papbar telah terealisasi sepenuhnya. (Tabel VI.5). Bantuan sosial disalurkan dalam rangka penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Meski demikian, realisasi bantuan sosial di beberapa daerah untuk penanggulangan dampak ekonomi berupa stimulus modal usaha UMKM, insentif pengurangan pajak dan pembebasan pajak, serta insentif perpanjangan waktu dana bergulir masih belum optimal. Lebih lanjut, serapan dana Pilkada serentak di beberapa daerah di Sulampua juga masih belum optimal (Tabel VI.6). Belanja Pemda untuk bantuan penanggulangan COVID-19 dan penyelenggaraan Pilkada diperkirakan dapat membantu pemulihan ekonomi pada paruh kedua 2020.

Tabel VI.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 (Miliar Rp)

Provinsi	Alokasi (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)
Pilkada Serentak 2020			
Sulawesi Utara	0.2	0.1	40.0
Gorontalo	32.0	32.0	100.0
Sulawesi Tengah	241.2	199.9	82.9
Sulawesi Selatan	655.2	262.1	40.0
Sulawesi Tenggara	339.3	24.9	7.4
Maluku	48.3	0.1	0.1
Maluku Utara	90.3	0.0	0.0
Papua	360.6	317.2	88.0

Sumber: BPKAD provinsi

Perkembangan Inflasi

Perlambatan permintaan domestik berdampak pada rendahnya inflasi Sulampua pada triwulan II 2020. Inflasi Sulampua pada triwulan II 2020 sebesar 1,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy). Lebih rendahnya inflasi disumbang oleh kelompok makanan minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perlengkapan rumah tangga, rekreasi olah raga, serta penyediaan mamin/restoran (Tabel VI.7). Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat turun dari 5,38% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 2,50% (yoy) pada triwulan II 2020. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya permintaan karena pembatasan aktivitas sosial-ekonomi ditengah pasokan pangan yang terjaga. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sulampua pada triwulan II 2020 berada di bawah tingkat inflasi nasional dan berada dalam kisaran sasaran (Grafik VI.11). Turunnya inflasi terjadi di seluruh provinsi di Sulampua. Terkendalinya stabilitas inflasi ini tidak lepas dari dukungan upaya TPID dalam menjaga kestabilan harga pangan sehingga pada triwulan II 2020 pasokan pangan di kawasan Sulampua tetap stabil ditengah pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah.

Memasuki triwulan III 2020, inflasi Sulampua diperkirakan tetap rendah. Inflasi pada Juli 2020 tercatat 1,33% (yoy). Masih rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya tekanan permintaan ditengah pasokan komoditas bahan pangan utama masyarakat Sulampua yang terjaga. Rendahnya inflasi diperkirakan akan terus berlanjut untuk keseluruhan triwulan III 2020. Tekanan permintaan yang masih terbatas menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi Sulampua tetap rendah meskipun relaksasi PSBB telah dilakukan. Meski demikian, tekanan inflasi diperkirakan akan sedikit mengalami peningkatan

seiring dengan berlalunya masa panen dan penyesuaian cukai rokok.

Tabel VI.7. Inflasi Berdasarkan Kelompok

KOMPONEN	2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II
Inflasi Umum	**3.21**	**3.02**	**3.70**	**2.29**	**2.19**	**1.46**
Mamin dan Tembakau	0.78	2.85	5.11	3.57	5.38	2.50
Pakaian dan Alas Kaki	3.63	3.41	3.93	2.83	2.89	1.55
Perumahan dan Bahan Baku RT	1.10	0.98	0.85	0.47	0.14	0.23
Perlengapan, Peralatan RT	2.57	2.26	1.90	1.67	1.52	1.25
Kesehatan	2.67	2.34	3.23	3.22	3.34	4.01
Transportasi	11.44	7.59	6.93	0.82	(4.46)	(3.50)
Informasi, Komunikasi, dan Keuangan	4.11	2.04	(1.15)	(1.57)	(1.56)	(0.64)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2.62	2.17	2.20	2.01	1.39	1.19
Pendidikan	1.46	1.41	4.21	4.44	4.42	4.46
Penyediaan Mamin / Restoran	2.87	2.92	4.17	3.49	4.99	4.46
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2.73	3.17	4.58	4.17	5.07	5.74

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

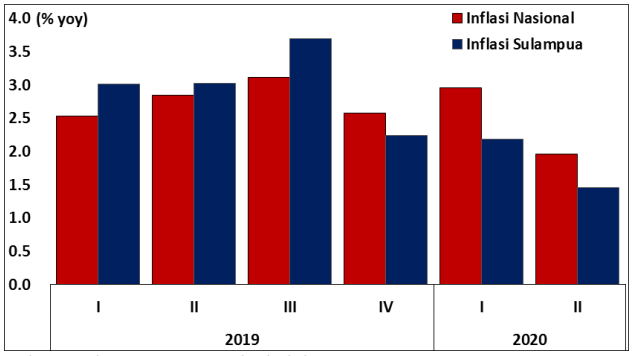

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik VI.11. Inflasi Sulampua dan Nasional

Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya memenuhi ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi serta pengutan kerja sama antardaerah. Upaya tersebut perlu dilakukan dalam masa pemulihan ekonomi khususnya Sulampua. Upaya memperkuat koordinasi dan sinergi TPID se-Sulampua, ditempuh antara lain melalui pelaksanan Rakorwil TPID secara daring yang diikuti oleh sepuluh provinsi se-Sulampua. Rapat koordinasi yang terus dilakukan ditengah pandemi COVID-19 bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk mencapai stabilitas harga pangan. Selain itu rapat koordinasi juga menyepakati untuk dapat mendorong digitalisasi pertanian sebagai inovasi untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan TPID di Sulampua melalui sejumlah program stategis yang mengacu pada strategi 4K. Dari sisi keterjangkauan harga, kerjasama antardaerah sebagai upaya menjaga pasokan komoditas pangan strategis terus didorong dan dioptimalkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara akan menjadi salah satu alternatif model pengembangan kerjasama antar daerah se-Sulampua.

Di sisi ketersediaan pasokan, TPID Sulampua terus berupaya untuk melakukan penguatan produksi dan cadangan pangan. Upaya ini antara lain ditempuh melalui optimalisasi digitalisasi di sektor pertanian 4.0, yakni dengan pengembangan dan pemanfaatan platform digital yang telah tersedia, menjaga kontinuitas pasokan, melibatkan seluruh *stakeholder* daerah, serta integrasi data produksi dan transaksi. Selain itu, terdapat rencana untuk pembentukan *working group* TPID se-sulampua, untuk saling berbagi data faktual antardaerah dalam mewujudkan Big Data pangan.

Kelancaran distribusi dilakukan dengan penguatan digitalisasi informasi pangan untuk mendukung kerjasama dan perdagangan antardaerah. Digitalisasi informasi pangan akan terus dioptimalkan untuk dapat memperoleh data yang faktual mengenai surplus dan defisit masing-masing daerah untuk mendukung perdagangan antardaerah. Selain itu, strategi penguatan manajemen stok dan distribusi pangan secara regional akan terus dilakukan agar Sulampua dapat menjadi penyangga pasokan pangan nasional.

Upaya menjaga komunikasi yang efektif dilakukan dengan penguatan koordinasi TPID, termasuk kerjasama antar daerah. Rakorwil TPID se-Sulampua merekomendasikan penguatan koordinasi dan sinergi. Pembentukan *working group* atau sekretariat bersama TPID Sulampua masih dalam tahap penjajakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti upaya penguatan KAD dalam pengendalian inflasi dan pengembangan komoditas pangan strategis di Sulampua.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sistem Pembayaran Nontunai

Transaksi sistem pembayaran nontunai melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) menurun sejalan dengan aktivitas ekonomi yang lebih rendah akibat COVID-19. Nominal transaksi RTGS pada triwulan II 2020 menurun menjadi Rp89,3 triliun, dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp92,3 triliun dan triwulan IV 2019 yang tercatat sebesar Rp135,9 triliun (Grafik VI.12)[40]. Walaupun nominal transaksi turun, volume transaksi RTGS sedikit meningkat pada triwulan II 2020 menjadi 37.593 transaksi. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 35.121 transaksi (Grafik VI.13). Peningkatan volume transaksi merupakan indikasi bahwa ekonomi di masyarakat mulai meningkat pasca pelonggaran PSBB di masa pandemi COVID-19.

Transaksi sistem pembayaran non tunai melalui kliring juga mengalami penurunan, baik secara volume maupun nominal. Volume transaksi menggunakan kliring di wilayah Sulampua menurun dari 723.281 lembar pada triwulan I 2020 menjadi 607.451 lembar pada triwulan II 2020 (Grafik VI.14). Sejalan dengan itu, nominal transaksi kliring juga terpantau menurun. Nominal transaksi kliring wilayah Sulampua di triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp26,8 triliun atau tumbuh 8,03% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp28,8 triliun (13,07%, yoy) (Grafik VI.15). Penurunan volume dan nominal

[40] Terdapat penyesuaian dalam proses pemetaan data transaksi regional (spasial) RTGS sejak triwulan III 2019, sehingga data tidak dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

transaksi kliring pada triwulan berjalan terpantau masih normal terjadi sesuai siklusnya dan diharapkan naik kembali pada triwulan III.

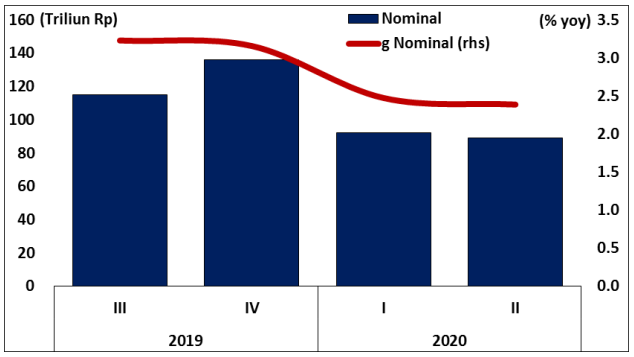

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.12. Nominal Transaksi RTGS

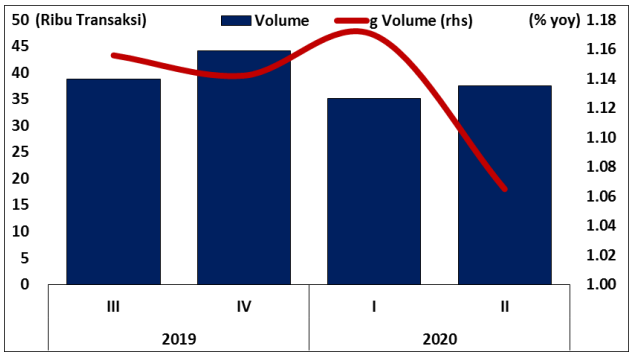

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.13. Volume Transaksi RTGS

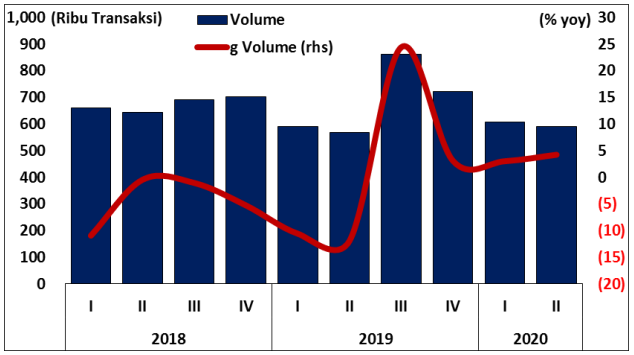

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.14. Volume Transaksi Kliring

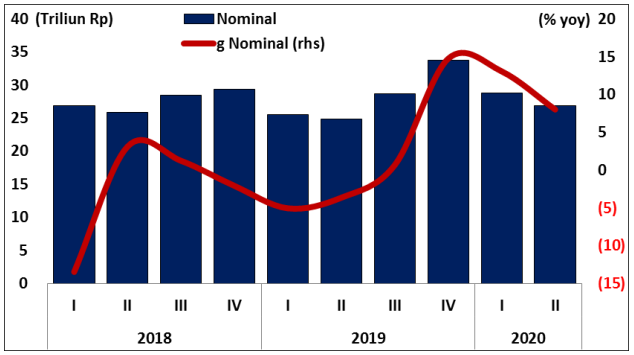

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.15. Nominal Transaksi Kliring

Transaksi APMK yang tercermin pada transaksi kartu ATM/Debet dan kartu kredit tercatat menurun. Penurunan aktivitas ekonomi akibat penyebaran pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan PSBB tercermin dari turunnya volume dan nominal transaksi ATM/Debet. Volume transaksi nontunai menggunakan ATM/Debet di triwulan II tercatat 98,7 juta transaksi, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 111 juta transaksi. Sementara itu, nominal transaksi ATM/D turun menjadi 101,6 triliun dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 118,4 triliun. Penurunan terjadi pada seluruh jenis transaksi ATM/D (belanja, tarik tunai, *online, interbank* dan antarbank). Pangsa terbesar transaksi ATM/Debet di Sulampua masih didominasi oleh transaksi tarik tunai dan transfer antarbank. Sejalan dengan transaksi ATM/D, volume dan nominal transaksi kartu kredit pada triwulan II 2020 juga menurun. Volume transaksi kartu kredit tercatat 1,05 juta transaksi dibandingkan dengan triwulan lalu yaitu 1,52 juta transaksi. Dari sisi nominalnya, transaksi menurun dari 1,6 triliun pada triwulan I menjadi 967,0 miliar pada triwulan II 2020. Penggunaan kartu ATM/D dan kartu kredit lebih banyak digunakan oleh rumah tangga dibandingkan dengan korporasi, sehingga transaksi dengan alat pembayaran ini mengikuti pola konsumsi rumah tangga.

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) PKH terus direalisasikan secara optimal. Penambahan nominal dan perluasan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BSNT menjadi salah satu stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat kurang mampu, terutama pada masa pandemi COVID-19 di Sulampua. Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat 100% pada triwulan II 2020, sama seperti periode-periode sebelumnya. PKH disalurkan kepada 1,05 juta KPM dengan total nominal mencapai Rp897,5 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat disalurkan kepada 958.274 KPM dengan total nominal sebesar Rp834,4 miliar. Namun, realisasi penyerapan BPNT di Sulampua masih lebih rendah dibanding nasional. Realisasi penyerapan BPNT Sulampua pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 82,2%, lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 87,4% pada periode yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Sulampua yang masih terdapat banyak *remote area,* sehingga banyak KPM yang mengalami kesulitan merealisasikan bantuannya. BPNT tercatat disalurkan kepada 1,7 juta KPM dengan besaran bantuan Rp337,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2020 dengan total KPM sebanyak 1,32 juta KPM dengan nominal bantuan Rp263,7 miliar.

Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi uang tunai yang melalui Bank Indonesia di Wilayah Sulampua selama triwulan II 2020 mengalami *net outflow*. Posisi *net outflow* sebesar Rp6,14 triliun, berbeda dengan posisi *net inflow* triwulan sebelumnya sebesar Rp15,32 triliun (Grafik VI.16). Terjadinya *net outflow* sesuai dengan pola historisnya, dimana kecenderungan masyarakat menarik uang tunai lebih tinggi dalam menghadapi hari raya Lebaran. Secara spasial, *net inflow* terjadi di seluruh Provinsi di Sulampua. *Net inflow* tertinggi dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua masing-masing sebesar Rp1,5 triliun dan Rp891,2 miliar.

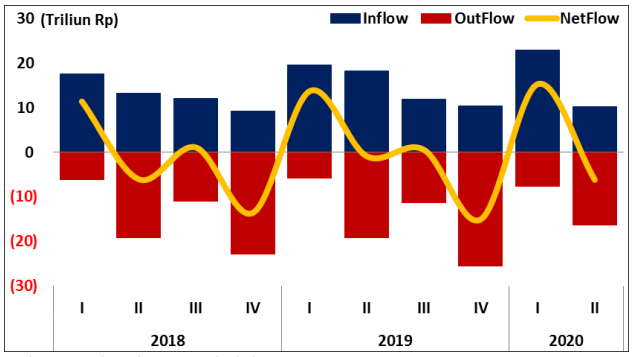

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik VI.16. Aliran Uang Kartal

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dibandingkan triwulan sebelumnya, transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di wilayah Sulampua mengalami penurunan yang cukup signifikan. Transaksi KUPVA BB di Sulampua pada triwulan II 2020 tercatat mencapai Rp357,2 miliar untuk transaksi penjualan dan Rp381,9 miliar untuk transaksi pembelian. Transaksi tersebut lebih rendah dibanding transaksi penjualan dan pembelian pada triwulan I 2020 yang masing-masing tercatat sebesar Rp735,8 miliar dan Rp759,0 miliar. Penurunan transaksi penjualan dan pembelian valas terjadi karena masyarakat masih menunda perjalanan ke luar negeri karena pandemi COVID-19 serta adanya larangan ibadah umrah dan haji. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulampua pada triwulan II 2020 tercatat sebanyak 267 wisatawan, menurun hingga 99,4% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 23.246 wisatawan atau turun sebesar 52,8% (yoy).

Prospek Perekonomian

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulampua tahun 2020 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, utamanya akibat dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak multidimensi bagi Sulampua. Pembatasan fisik untuk menekan penyebaran pandemi berdampak pada tertahannya konsumsi domestik, yang secara historis merupakan motor penggerak ekonomi Sulampua dari sisi penggunaan. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan utamanya terjadi pada LU perdagangan, industri pengolahan, serta akomodasi makan dan minum sejalan dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, serta pelaksanaan *work from home* dan *learn from home*.

Konsumsi rumah tangga, dengan *share* 48,7% terhadap total PDRB Sulampua tahun 2019, diperkirakan akan melambat cukup dalam pada tahun 2020. Hal ini utamanya disumbang oleh penurunan konsumsi pada semester I 2020 sejalan dengan *physical distancing* dan penerapan PSBB. Lebih lanjut, kondisi ini memengaruhi terbatasnya omset usaha sehingga diikuti oleh penyesuaian penggunaan tenaga kerja antara lain melalui *unpaid leave* dan PHK. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode panen raya justru mengalami penurunan, berbeda dengan pola umumnya. Indikasi pemulihan yang mulai terlihat pada awal paruh kedua didukung pelonggaran PSBB diperkirakan dapat berdampak positif pada konsumsi. Namun, perbaikan konsumsi diperkirakan masih relatif terbatas.

Konsumsi pemerintah pada 2020 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh *refocussing* dan realokasi belanja serta tertundanya belanja modal. Peran konsumsi pemerintah daerah yang terbatas terutama karena menurunnya sumber pendapatan. Penyesuaian dana transfer dan sumber pendapatan dari pajak juga diperkirakan lebih rendah karena menurunnya aktivitas ekonomi memengaruhi kemampuan belanja daerah pada 2020. Selain itu, lebih berbagai upaya penghematan juga diperkirakan menahan konsumsi pemerintah untuk tumbuh lebih tinggi. Belanja pemerintah daerah di Sulampua diperkirakan ditopang belanja tidak terduga untuk penanggulangan dampak pandemi. Sementara itu, realisasi belanja modal juga diperkirakan mulai meningkat pada paruh kedua 2020. Selain itu, tambahan dana transfer untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyelenggaraan pilkada serentak diperkirakan mendorong konsumsi di triwulan III dan IV 2020.

Investasi pada 2020 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan 2019, dipengaruhi oleh penundaan realisasi investasi dan tendensi *wait and see* pelaku usaha. Pembangunan proyek swasta dan Pemerintah mengalami penundaan, beberapa di antaranya yaitu penyelesaian pembangunan kilang di Papbar dari rencana awal tahun 2021 menjadi tahun 2022, penundaan investasi dalam rangka penyelenggaraan PON XX di Papua, dan penundaan aktivitas investasi oleh korporasi besar di Papua dan Sulteng. Beberapa proyek strategis nasional, seperti Bendungan Baliase, Passelloreng, dan Karalloe (Sulsel) serta Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), juga telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan beroperasi di tahun 2020. Penurunan investasi lebih dalamdiperkirakan tertahan oleh beberapa pembangunan infrastruktur yang masih berlanjut.

Ekspor luar negeri diperkirakan menjadi penopang ekonomi Sulampua pada tahun 2020. Peningkatan ekspor diperkirakan ditopang oleh komoditas tambang, sejalan dengan peningkatan produksi *underground mining* di Papua. Selain itu, ekspor perdana *stainless steel slab* di Sultra dan baja karbon di Sulteng diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor untuk keseluruhan tahun. Peningkatan juga ditopang oleh permintaan dari Tiongkok yang masih positif, sejalan dengan komitmen pemerintah Tiongkok untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah penyebaran COVID-19.

Dari sisi LU, melambatnya pertumbuhan Sulampua pada 2020 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja LU transportasi dan pergudangan serta LU perdagangan. Penundaan keberangkatan umrah sejak triwulan I 2020, penutupan penerbangan domestik dan internasional sejak tanggal 24 April 2020 s.d. 31 Mei 2020 untuk zona merah penyebaran COVID-19, dan larangan mudik HBKN Idulfitri mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi secara signifikan. Pembatasan fisik dalam rangka menekan penyebaran pandemi berdampak pada pembatasan/penutupan sementara operasional usaha

perdagangan, di tengah omset yang menurun akibat lebih terbatasnya permintaan. Penyelenggaraan sejumlah *event* yang secara historis meningkatkan permintaan LU perdagangan juga tertunda. Di sisi lain, kinerja positif LU pertambangan diperkirakan menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan peningkatan produksi *underground mining* di Papua serta produksi bahan baku konsentrat nikel untuk menopang produksi perdana industri NPI di Sulteng dan *stainless steel* di Sultra. Selain itu, sumber galian emas baru di Sulteng diperkirakan dapat menjadi sumber pertumbuhan LU pertambangan.

Sejumlah faktor eksternal dan domestik menjadi risiko yang dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Sulampua. Dari eksternal, penetapan bea masuk *anti-dumping* dari berbagai negara dengan kisaran 18% hingga lebih dari 100% dikenakan pada produk *stainless steel* Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya daya saing produk ekspor Sulampua. Dari dalam negeri, risiko berlanjutnya pandemi COVID-19 berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi, baik dari sisi produksi maupun permintaan. Di sisi lain, terjaganya permintaan ekspor khususnya dari Tiongkok, serta relaksasi PSBB diiringi upaya percepatan realisasi belanja pemerintah di akhir tahun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulampua.

Prospek Inflasi

Untuk keseluruhan tahun 2020, inflasi diprakirakan tetap rendah dan berada dalam kisaran sasaran. Terbatasnya tekanan permintaan akibat COVID-19 ditengah pasokan pangan yang terjaga dengan baik, disertai minimnya kendala distribusi berdampak positif pada rendahnya inflasi. Inflasi lebih dipengaruh oleh kenaikan harga emas dan minyak dunia yang belum stabil, peningkatan tarif impor, serta siklus tahunan kenaikan biaya pendidikan Perguruan Tinggi/Akademi. Selanjutnya, inflasi bahan makanan yang sempat terkendala penerapan PSBB dan karantina wilayah di beberapa daerah diperkirakan tetap terkendali seiring intensifnya upaya untuk memastikan kelancaran distribusi. Inflasi di Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diperkirakan relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Sulampua meski masih berada pada rentang sasaran.

Beberapa risiko pencapaian inflasi tetap menjadi fokus upaya pengendalian inflasi di wilayah Sulampua. Potensi tekanan inflasi dari komoditas bahan makanan tetap menjadi perhatian. Hal ini seiring dengan potensi berlangsungnya musim angin timur pada pertengahan tahun 2020 yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan komoditas ikan segar. Namun, penurunan permintaan selama masa pandemi COVID-19 dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga menjadi *downside risk* inflasi di Sulampua. Selain itu, upaya berkelanjutan dalam perbaikan infrastruktur konektivitas guna menjaga kelancaran pasokan terus dilakukan. Pengawasan distribusi dan tata niaga juga terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Untuk mengurangi risiko peningkatan tekanan inflasi 2020, efektivitas program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta sinergi antar pemangku kepentingan terus ditingkatkan. Berbagai daerah di Sulampua telah merencanakan penajaman program dan sinergi pengendalian inflasi tahun 2020 pada *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2019-2021. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai sasaran inflasi baru yang lebih rendah, yaitu 3%±1% pada 2020 dan 2021. Rencana program TPID di Sulampua pada 2020 di antaranya adalah: (i) penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dalam rangka stabilisasi harga; (ii) perluasan dan optimalisasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta (iii) penguatan kelembagaan petani.

BOKS 5

Hilirisasi Pertambangan Nikel (Industri Baterai) dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Terdampak COVID-19

Di tengah tekanan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, kinerja lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan hasil tambang di wilayah Sulampua masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif dan menjadi penopang ekonomi di triwulan II 2020. Komoditas besi baja pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar 18,29% (yoy) dan mendominasi ekspor Sulampua dengan pangsa sebesar 53% atau senilai 1.998 juta dolar AS (Grafik VI.17).

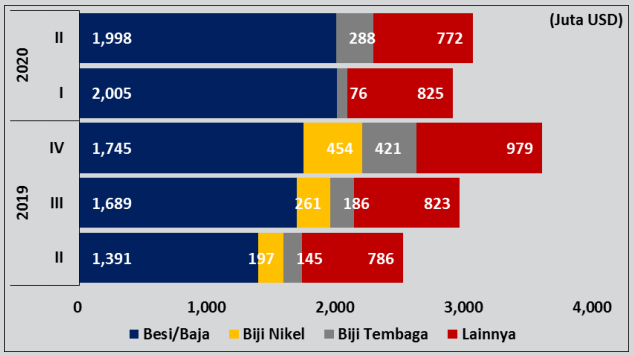

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik VI.17. Ekspor Sulampua Berdasarkan Komoditas

Dominasi ekspor besi baja tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Sulampua. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi cadangan SDA nikel yang terkandung di Sulampua mencapai kisaran 73,5 juta ton. Selain itu, cadangan kobalt berkisar 1,3 juta ton.

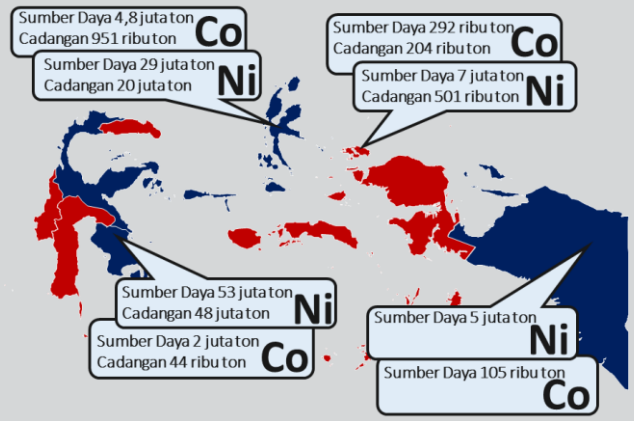

Sumber: Kementerian ESDM (diolah)

Gambar VI.1. Potensi Nikel dan Kobalt Sulampua

Hasil pemetaan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) produk ekspor Sulampua menunjukkan bahwa komoditas tambang, khususnya *ferronickel*, *nickel mattes*, dan *nickel ores* menjadi komoditas yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

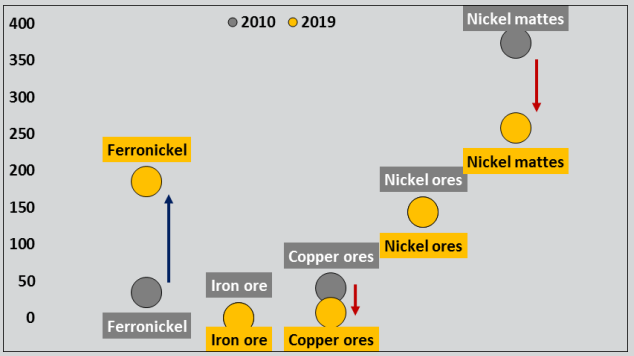

Sumber: Bank Indonesia dan UN Comtrade (diolah)

Grafik VI.18. *Revealed Comparative Advantage* Produk Ekspor Sulampua[41]

Melihat kinerja ekspor dan potensi SDA yang dimiliki, maka upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi nikel perlu terus dioptimalkan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa prospek permintaan nikel masih berpotensi mengalami kenaikan yang terutama didorong oleh peningkatan penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

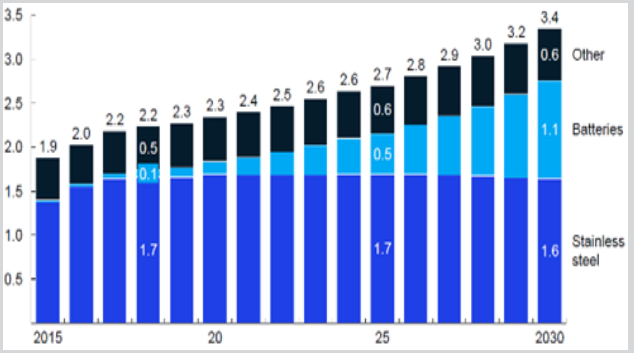

Sumber: McKinsey

Grafik VI.19. Permintaan Nikel Dunia

Penggunaan kendaraan listrik mengalami kenaikan signifikan dalam empat tahun terakhir, terutama di Tiongkok. Subsidi pembelian kendaraan listrik oleh pemerintah Tiongkok mendorong kenaikan jumlah kendaraan listrik. Pada 2019, pangsa kendaraan listrik di Tiongkok hampir mencapai 90% dari total kendaraan listrik secara global. Peningkatan jumlah kendaraan listrik di Tiongkok juga didukung oleh penyediaan infrastruktur, khususnya pengisi daya (*charger*). Jumlah pengisi daya cepat (*fast charger*) di Tiongkok mencapai 82% dari total infrastuktur sejenis secara global.

Kenaikan permintaan kendaraan listrik membuat neraca pasokan

[41] suatu komoditas memiliki daya saing tinggi bila nilai RCA > 1.

komoditas nikel kelas I di pasar global diperkirakan mengalami penurunan bahkan mengarah kepada kondisi defisit. Nikel kelas I merupakan jenis nikel yang antara lain digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

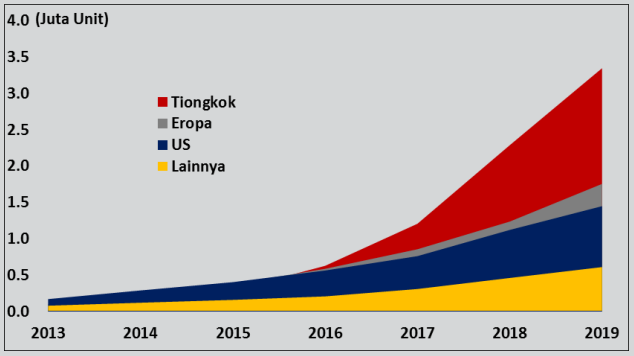

Sumber: International Energy Agency

Grafik VI.20. Jumlah Kendaraan Listrik

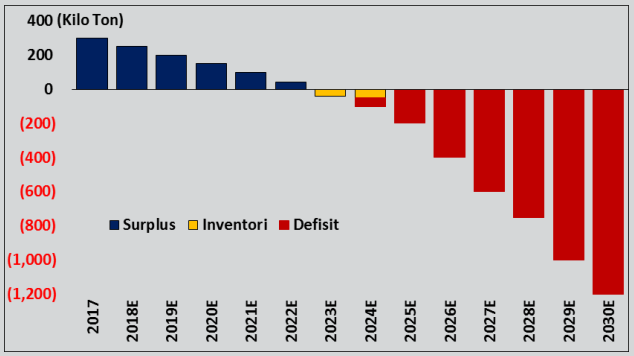

Sumber: Vale

Grafik VI.21. Neraca Produksi Global Komoditas Nikel Kualitas I

Dalam upaya peningkatan nilai tambah hasil tambang nikel, pemerintah melalui beberapa kementerian terkait telah merumuskan peta jalan pengembangan baterai kendaraan listrik yang melibatkan BUMN dalam konsorsium, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Beberapa regulasi pendukung pengembangan industri kendaraan listrik juga telah diterbitkan, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan dan penetapan beberapa standarisasi ISO untuk komponen kendaraan listrik.

Pelaku usaha di Indonesia juga telah merespons prospek permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Beberapa perusahaan tambang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara sedang melakukan pembangunan smelter nikel jenis *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) untuk dapat menghasilkan produk nikel kelas I berupa nikel sulfat sebagai bahan baku utama baterai listrik.

Pembangunan smelter HPAL masih terkendala oleh izin pengelolaan limbah. Rencana perusahaan untuk membuang limbah yang telah dinetralisir ke dasar laut (*deep sea tailing placement*) belum mendapatkan izin dari kementerian terkait. Kendala izin tersebut semakin diperberat oleh residu nikel (*nickel slag*) yang masih dimasukkan ke dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) karena jumlahnya yang sangat besar. Berdasarkan berbagai penelitian, residu nikel hasil pengolahan HPAL tidak mengandung bahan yang berbahaya dan telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri lain di beberapa negara.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Dari hasil *focus group discussion* (FGD) dengan sejumlah pakar diketahui bahwa efisiensi biaya bahan baku menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan industri baterai. Komponen bahan baku memiliki pangsa 58% dari harga baterai. Dengan mempertimbangkan lokasi dan ketersediaan bahan baku serta biaya pekerja, biaya produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia berpotensi 8% lebih murah dibanding Tiongkok.

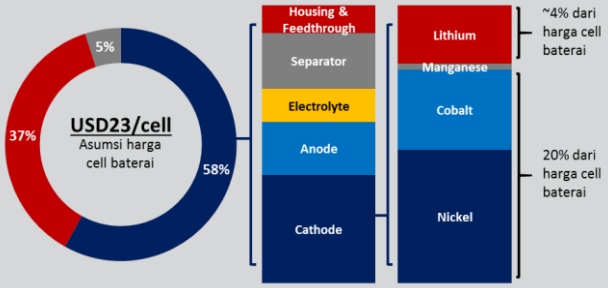

Sumber: FGD Bank Indonesia

Grafik VI.22. Struktur Komponen Biaya Produksi Baterai

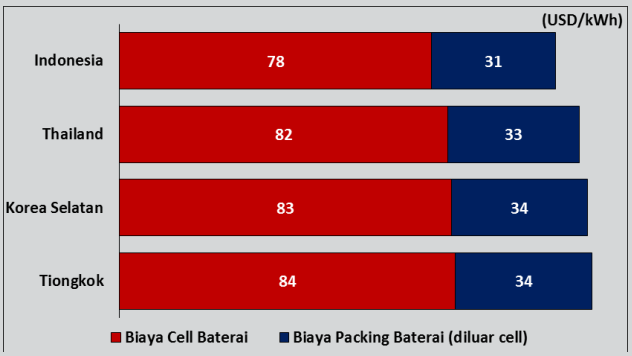

Sumber: BloombergNEF

Grafik VI.23. Perbandingan Biaya Produksi Baterai

Potensi besar dalam pengembangan hilirisasi pertambangan nikel untuk baterai kendaraan listrik memerlukan dukungan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Untuk lebih mengoptimalkan perolehan nilai tambah dari hilirisasi nikel, hendaknya pendirian industri baterai nasional perlu segera direalisasikan. Selain itu, diperlukan regulasi yang memberi insentif terhadap terjadinya transfer teknologi dari industri asing ke industri domestik. Dalam jangka panjang, penguasaan teknologi akan meningkatkan peran industri domestik dalam mata rantai produksi baterai kendaraan listrik.

BAGIAN 7

ISU STRATEGIS: MEMPERCEPAT PEMULIHAN INDUSTRI MANUFAKTUR TERDAMPAK COVID-19 MELALUI PENINGKATAN IKLIM USAHA UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERBAIKAN TRANSAKSI BERJALAN

Dalam upaya transformasi Indonesia menuju negara maju, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dukungan struktur neraca transaksi berjalan yang kuat, salah satunya melalui sektor manufaktur. Sejalan dengan arah pengembangan industri manufaktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perbaikan transaksi berjalan tersebut, pemerintah telah berupaya secara konsisten untuk mendukung industri manufaktur, di antaranya melalui perbaikan iklim usaha. Namun, dinamika ketidakpastian global diprakirakan masih akan terus berlanjut, di antaranya akibat trade war yang meningkatkan perilaku inward looking, dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan supply chain disruption sehingga keduanya berisiko mengganggu kinerja industri manufaktur domestik. Meski demikian, gangguan dari eksternal tersebut menimbulkan harapan baru dengan munculnya sejumlah produk manufaktur dengan kinerja ekspor yang resilien di tengah pandemi COVID-19. Di tengah berbagai tantangan ke depan, muncul sejumlah peluang penguatan industri manufaktur, baik dari sisi penguatan ekspor unggulan yang didukung dengan peningkatan iklim usaha, potensi ekspor produk industri baru yang resilien di tengah pandemi COVID-19 (produk industri low hanging fruits), maupun penguatan local value chain sebagai solusi dari ketergantungan bahan baku impor yang masih tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja manufaktur di tengah tantangan dan peluang tersebut, strategi pengembangan manufaktur tetap dilakukan berdasarkan strategi pendekatan yang difokuskan pada dua sisi (two pronged approach reform strategy) dengan melanjutkan industri prioritas jangka pendek, yaitu otomotif, TPT, dan alas kaki berikut industri pendukungnya, serta tambahan industri prioritas baru, yakni petrokimia, logam (emas dan hilirisasi nikel), serta pulp & paper. Strategi pengembangan industri manufaktur ini perlu langkah segera untuk mempercepat pemulihan sektor manufaktur pada masa pandemi maupun pasca COVID-19.

Latar Belakang

Industri manufaktur masih menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Industri manufaktur dinilai lebih produktif dan memiliki efek berantai yang luas hingga mampu menggerakkan rantai nilai di belakangnya (*backward linkage*) maupun di depannya (*forward linkage*) sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, menyerap lebih banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa, dan menjadi sumber penerimaan pajak utama negara.

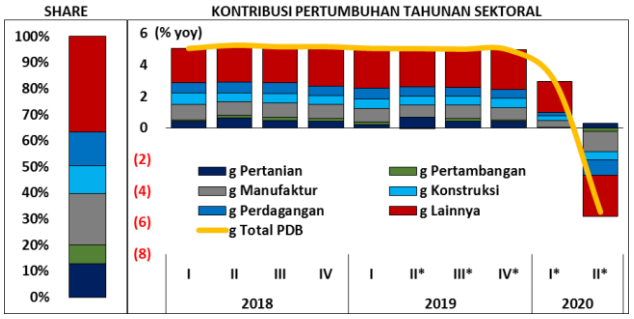

Grafik VII.1. Peran Manufaktur dalam Perekonomian

Pengembangan industri manufaktur juga penting untuk melanjutkan momentum akselerasi menuju negara maju berpendapatan tinggi (*high income country*). Untuk mendukung transformasi Indonesia menuju *high income country* pada tahun 2045, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dukungan struktur neraca transaksi berjalan yang kuat, salah satunya melalui sektor manufaktur.

Dalam beberapa tahun terakhir berbagai upaya mendorong akselerasi pertumbuhan manufaktur telah dilakukan. Upaya mendorong akselerasi pertumbuhan dilakukan, salah satunya melalui reformasi struktural untuk memperbaiki iklim usaha, seperti pemberian berbagai insentif fiskal, simplifikasi proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), perbaikan sistem logistik, dan berbagai kebijakan lainnya. Upaya reformasi struktural juga didukung oleh sinergi lintas Kementerian/ Lembaga yang baik, yang salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (RAKORPUSDA) Manufaktur. Forum yang melibatkan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya dibentuk guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional.

Upaya akselerasi pertumbuhan manufaktur menghadapi tantangan yang besar. Setidaknya ada dua tantangan besar yang saat ini menjadi kendala dalam mendorong pertumbuhan manufaktur, yaitu terjadinya peningkatan tensi perdagangan (*trade war*) antara Amerika Serikat (AS) - Tiongkok dan pandemi COVID-19. *Trade war* meningkatkan perilaku *inward looking* negara-negara mitra utama, sementara pandemi COVID-19 mendorong terjadinya *supply chains disruption*. Kedua *shock* tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kinerja manufaktur nasional. Namun, di tengah tantangan tersebut terdapat beberapa peluang yang muncul dan dapat sumber pertumbuhan manufaktur dalam jangka pendek. Beberapa produk unggulan baru muncul sebagai *low hanging fruits* karena mampu bertahan (resilien) di tengah pandemi COVID-19.

Asesmen dan evaluasi kinerja industri manufaktur masih tetap menggunakan pendekatan *two pronged approach reform strategy*. Pendekatan ini memperhatikan dua aspek penguatan industri, yaitu (1) penguatan industri *med-high tech product* yang dapat mendorong ekspor, dan (2) penguatan industri *low tech product* dan padat karya, serta industri dasar pendukung melalui hilirisasi produk SDA. Kedua strategi tersebut mencerminkan kebijakan penguatan industri manufaktur dilakukan secara *end-to-end*, yakni bersifat inklusif, terintegrasi, dan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, penguatan industri dasar pendukung terus dilakukan melalui hilirisasi produk SDA.

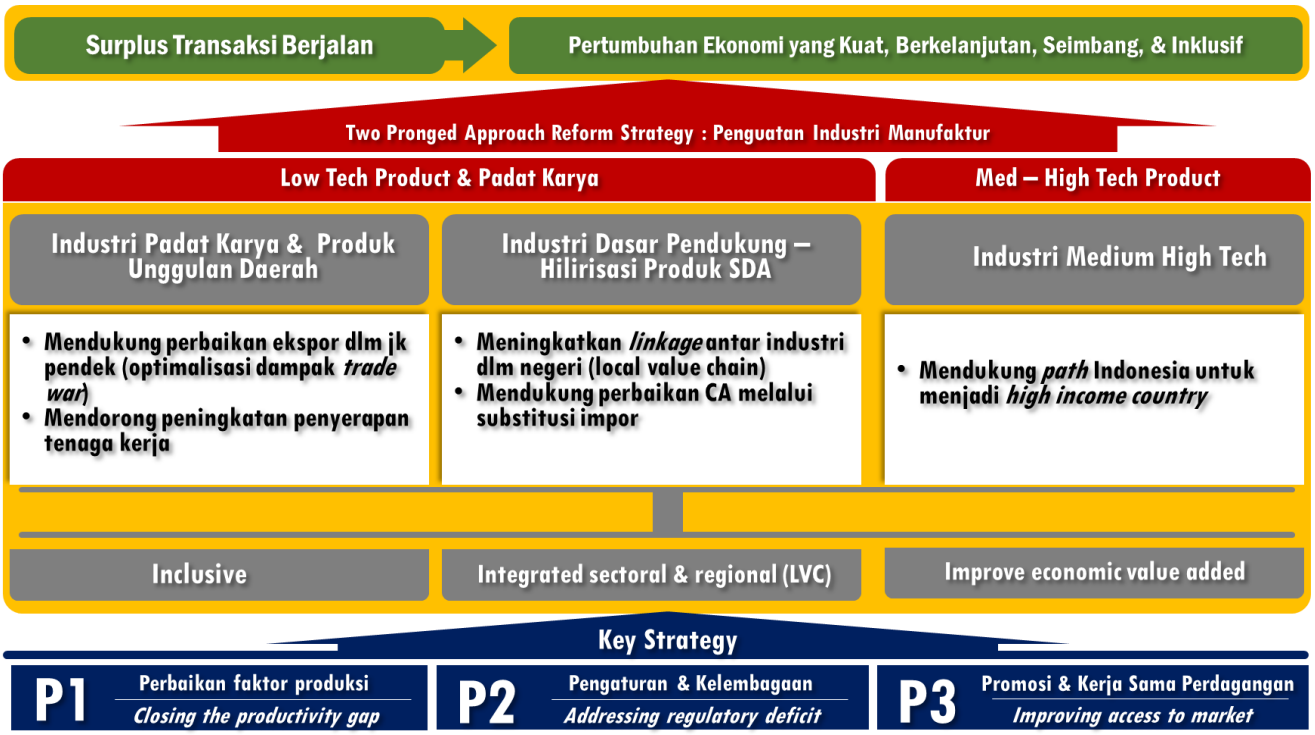

Gambar VII.1. Konsep Two Pronged Approach Reform Strategy Penguatan Industri Manufaktur

Evaluasi Kinerja Manufaktur

Kinerja nilai ekspor industri manufaktur semakin menurun di tengah pelemahan permintaan global akibat pandemi COVID-19, namun produk unggulan ekspor Indonesia tetap berdaya saing. Pelemahan permintaan secara global masih terus terjadi akibat pembatasan wilayah (*lockdown*) di berbagai negara. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor industri manufaktur menurun di hampir semua sub-industri. Meski demikian, terdapat beberapa produk unggulan ekspor Indonesia yang tetap berdaya saing dan memiliki *trade balance* yang positif atau berada dalam kuadran A dalam matriks *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) dan *Trade Balance Index* (TBI).

Kinerja ekspor manufaktur ke depan dibayangi oleh sejumlah tantangan di tengah berbagai peluang yang perlu dikembangkan. Dalam upaya menjaga pertumbuhan manufaktur di tengah masa pandemi dan pasca COVID-19, terdapat sejumlah tantangan antara lain ketegangan geopolitik AS-Tiongkok yang diprakirakan masih berlanjut, sehingga muncul *trend inward looking* yang meningkat. Hal ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia, berusaha mengurangi ketergantungan bahan baku impor yang terkonsentrasi dari beberapa negara untuk mengurangi risiko dan menopang keberlangsungan industri manufaktur domestik. Upaya untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor tersebut dilakukan melalui penguatan *local value chain* yang didukung dengan peningkatan iklim usaha dalam negeri. Di tengah upaya mendorong ekspor produk unggulan sebagai industri prioritas yang dikembangkan, terdapat potensi ekspor produk unggulan baru sebagai *low hanging fruits* yang mampu bertahan (resilien) di tengah pandemi COVID-19. Upaya penguatan potensi tersebut dapat menjadi peluang pengembangan dalam menjaga pertumbuhan manufaktur ke depannya.

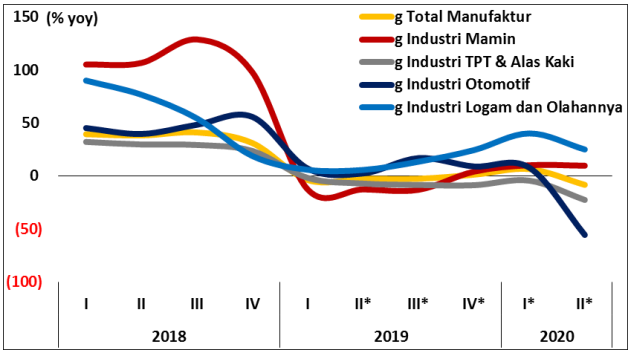

Grafik VII.2. Perkembangan Kinerja Ekspor Manufaktur dan Sub Industri

Strategi penguatan industri manufaktur yang dilakukan secara bertahap, yang disertai dengan penentuan industri prioritas dengan *champion product* untuk didorong pada jangka pendek hingga menengah-panjang perlu dievaluasi. Tiga industri prioritas dengan *champion product* yang telah ditetapkan

sebelumnya untuk didorong, antara lain mobil penumpang di industri otomotif, produk tekstil (garmen) di industri TPT, dan sepatu olahraga di industri alas kaki. Evaluasi pemilihan 3 produk yang dijadikan *champion product* tersebut didasarkan atas pertimbangan telah berdaya saing/unggul (RSCA>0), neraca perdagangan surplus (TBI>0), dengan kapasitas produksi yang masih cukup untuk pengembangan dalam jangka pendek (utilisasi<100%).

Pada industri otomotif, kinerja ekspor masih tetap berdaya saing, namun penjualan dan produksi otomotif terdampak oleh COVID-19. Mobil penumpang tercatat sebagai penyumbang ekspor terbesar kelompok otomotif dengan tetap berdaya saing/unggul (RSCA>0) dan memiliki neraca perdagangan surplus (TBI>0), terutama pada jenis mobil bensin dengan kapasitas 1000-1500cc dan mobil diesel dengan kapasitas 2000cc.

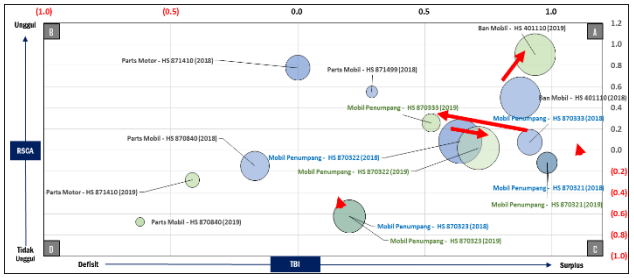

Grafik VII.3. RSCA dan TBI champion product otomotif, mobil penumpang, pada tahun 2018-2019

Namun, upaya mendorong pemulihan industri otomotif yang terdampak COVID-19 diperlukan di tengah realisasi penjualan dan produksi yang menurun. Beberapa tambahan insentif baik untuk industri maupun konsumen diperlukan untuk mempertahankan daya saing industri dan memulihkan permintaan domestik. Selain itu, *car terminal* pelabuhan Patimban yang akan selesai pada September 2020, perlu dipastikan penyelesaian dan operasionalisasinya dapat berjalan sesuai rencana, (P1).

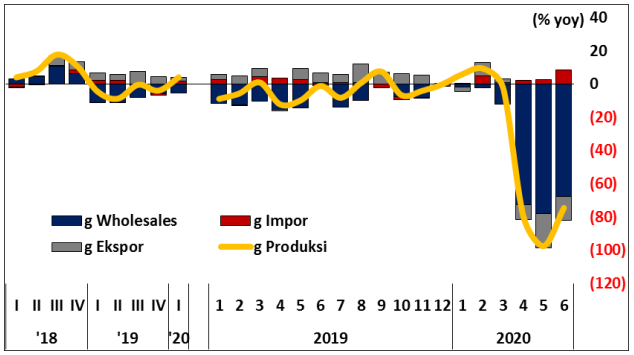

Grafik VII.4. Produksi dan Penjualan Produk Otomotif hingga Juni 2020

Ke depan, industri otomotif diarahkan pada pengembangan kendaraan yang ramah lingkungan. Pada sisi peraturan dan dukungan regulasi, penetapan ketentuan pelaksana terkait PPnBM otomotif yang memberikan insentif kepada kendaraan yang lebih ramah lingkungan sangat penting. Ketentuan tersebut juga akan mendorong pengembangan jenis kendaraan yang berorientasi ekspor, yaitu sedan. Selain itu, perlu peningkatan kegiatan R&D otomotif yang masih rendah dan penetapan ketentuan pelaksana Insentif perpajakan untuk mendorong R&D, (P2). Diharapkan ketentuan tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan kerjasama perdagangan semakin optimal, (P3).

Sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor, penguatan *linkage* industri pendukung otomotif perlu terus diperkuat. Berdasarkan pemantauan terkini, *linkage* beberapa industri pendukung otomotif masih mengalami kendala, antara lain pada industri elektronik dan karet akibat orientasi bisnis yang produknya lebih ditujukan untuk ekspor. Dari industri karet, terdapat permasalahan produk karet sintetis yang masih diekspor, belum diteruskan menjadi produk ban yang membutuhkan campuran karet alam sehingga belum meningkatkan permintaan karet alam domestik, terutama dari Sumatera. Selain itu, terdapat *mismatch* ketersediaan hasil olahan karet dengan kebutuhan dalam negeri serta pengenaan Pajak Perkebunan berupa PPN yang perlu ditinjau kembali guna mendukung integrasi karet alam domestik dengan industri otomotif, khususnya industri ban. Di sisi lain, *linkage* industri aluminium, besi baja, dan *spare part* dalam mendukung industri otomotif sudah berjalan. Pada industri aluminium, telah dilakukan diversifikasi/*upgrade* produk berupa *alloy* dan *billet* yang telah mulai diproduksi. Pada industri besi baja, produk baja telah digunakan oleh industri otomotif domestik, baik dari industri tier 1, tier 2, maupun tier 3 (komponen dan *spare parts*). Sementara, industri *spare parts* juga telah mendukung rantai industri otomotif nasional yang tersebar terutama di wilayah Jawa. Meskipun terjadi penurunan permintaan karena COVID-19 yang menyebabkan *linkage* terhambat, namun penguatan *linkage* industri pendukung ke otomotif sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan industri otomotif sebagai industri unggulan.

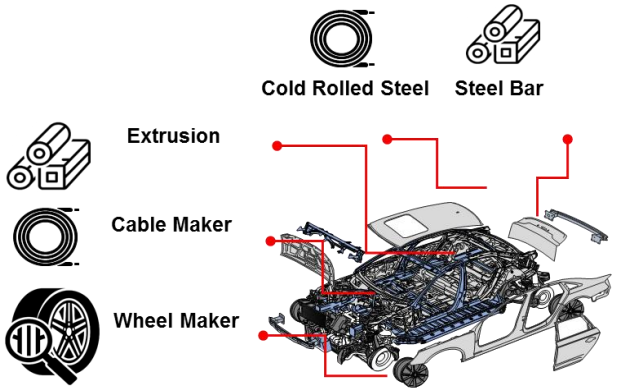

Gambar VII.2. *Linkage* Industri Besi Baja ke Industri Otomotif

Pengembangan industri otomotif juga didukung oleh industri hilirisasi logam. Hilirisasi hasil tambang logam akan mendukung integrasi (*local value chain*) ke industri otomotif. Produk hilirisasi logam berpotensi menjadi komponen industri otomotif, antara lain hasil tambang berupa nikel yang diolah menjadi nikel sulfat sebagai bahan pembuatan baterai EV (*Electric Vehicle*), hasil tambang berupa tembaga yang diolah menjadi kabel, *inverters*, dan mesin sebagai *parts* otomotif, dan hasil tambang berupa aluminium yang diolah menjadi *foundry alloy* untuk membuat velg pada roda otomotif. Selain itu, pengembangan hilirisasi logam berpeluang menopang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah yang dapat meningkatkan nilai ekspor

produk dan dapat memperbaiki postur neraca perdagangan. Ke depan, produk hilirisasi logam, termasuk nikel untuk baterai, juga memiliki prospek permintaan yang positif, didorong oleh prospek industri kendaraan listrik yang diprakirakan meningkat.

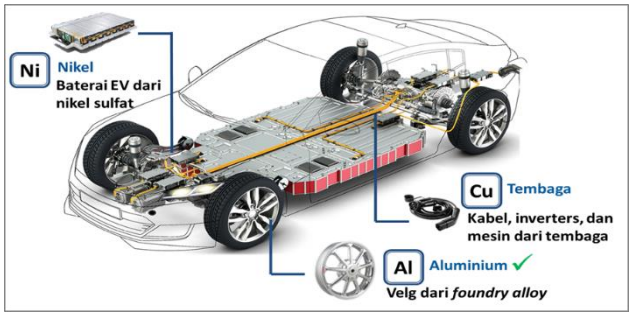

Gambar VII.3. Produk Hilirisasi Logam sebagai Komponen Industri Otomotif

Di antara hilirisasi logam, hilirisasi nikel memiliki prospek paling tinggi. Selain untuk mendukung *local value chain*, prospek hilirisasi nikel sangat didukung oleh potensi permintaan ekspor untuk kebutuhan *stainless steel* dan baterai kendaraan listrik berbasis nikel, dan posisi Indonesia sebagai *key player* tambang nikel global karena merupakan produsen nikel terbesar dunia (pangsa 27%) dan memiliki cadangan terbesar dunia (23,7% cadangan dunia). Jenis nikel di Indonesia memiliki daya saing tinggi terutama pada nikel *high-grade* dapat menurunkan biaya smelter dengan menggunakan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) dan nikel kadar rendah yang cocok untuk bahan baku baterai. Meski demikian, produk hilirisasi nikel (*stainless steel*) menghadapi sejumlah tantangan, yaitu terkait peraturan/regulasi tentang pemanfaatan limbah smelter RKEF dan pengkategoriannya sebagai limbah B3, (P2). Selain itu, terdapat pengenaan tarif *antidumping* kepada *stainless steel* Indonesia oleh sejumlah negara, seperti EU, Tiongkok, dan Inggris, (P3).

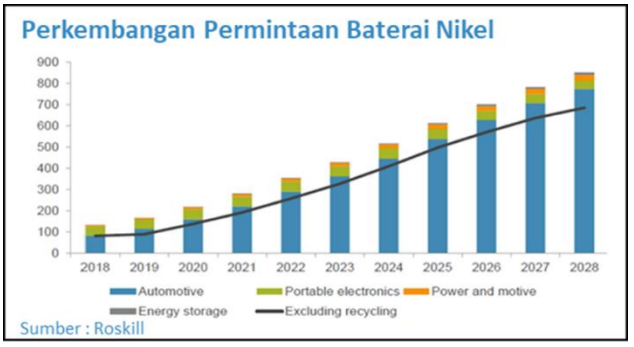

Sumber: Roskill, 2020

Grafik VII.5. Prospek Industri Kendaraan Listrik

Hilirisasi nikel berpotensi dikembangkan hingga produksi baterai EV. Pengolahan nikel laterit menjadi bahan baterai EV memberi nilai tambah sangat besar dan memiliki peluang permintaan yang besar di sepanjang mata rantai produksinya. Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan untuk pengembangan industri baterai EV yaitu *value chain* industri baterai EV belum terisi dan penguasaan teknologi baterai EV masih terbatas, (P1). Selain itu, perlu peninjauan kembali terkait perizinan pengelolaan limbah dalam pembangunan smelter HPAL dan penerbitan peraturan pelaksanaan terkait percepatan pengembangan kendaraan listrik guna memberi kepastian dan menarik investor.

Nikel	Tembaga	Aluminium
HILIRISASI TINGGI	HILIRISASI SEDANG	HILIRISASI SEDANG
Indonesia *key player* • Produsen nikel terbesar dunia (pangsa 27%) • Cadangan terbesar dunia (23,7% cadangan dunia)	**Indonesia T*op-10 player*** • Produsen ke-8 dunia • (pangsa 3,7%) • Cadangan ke-5 dunia (6,1% cadangan dunia)	**Indonesia T*op-10 player*** • Produsen bauksit ke-6 dunia (pangsa 4,3%) • Cadangan bauksit ke-5 dunia (4% cad dunia)
Daya saing tinggi • Nikel High-Grade (>1,7%) Indonesia menurunkan biaya smelter (RKEF) • Nikel kadar rendah (<1,7%) cocok untuk bahan baku baterai	**Daya saing sedang** • Nilai tambah fase smelting kecil dengan by product yang belum termanfaatkan • Industri di tahap forming belum terisi.	**Daya saing rendah** Industri aluminium Indonesia sulit bersaing dengan industri Tiongkok yang mendapat subsidi dan dukungan pemerintah
Potensi demand tinggi • Kebutuhan stainless steel dunia tetap tinggi • Demand tinggi untuk baterai kendaraan listrik berbasis nikel	**Potensi demand sedang** • Hasil produksi smelter akan melebihi kebutuhan domestik • Terdapat potensi demand dari industri kendaraan listrik	**Potensi demand sisi hilir terbatas** • Substitusi impor kebutuhan alumina domestik • Produk hilir sulit bersaing dengan Tiongkok

Gambar VII.4. Perbandingan Profil, Daya Saing, dan Potensi Hilirisasi Nikel, Tembaga, dan Aluminium

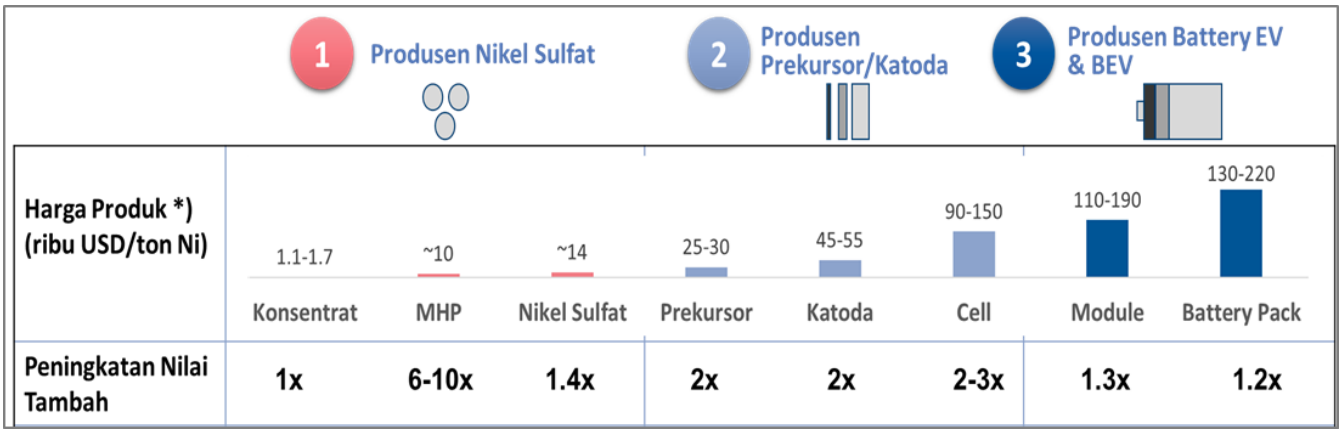

Grafik VII.6. Nilai Tambah dalam Rantai Produksi Baterai EV

Industri prioritas TPT dan Alas Kaki juga masih berdaya saing tinggi, meskipun kinerja menurun akibat dampak eksternal *shock* COVID-19. Garmen dan sepatu olahraga yang merupakan *champion product* masih menjadi unggulan dengan tetap berdaya saing/unggul (RSCA>0) dan memiliki neraca perdagangan surplus (TBI>0).

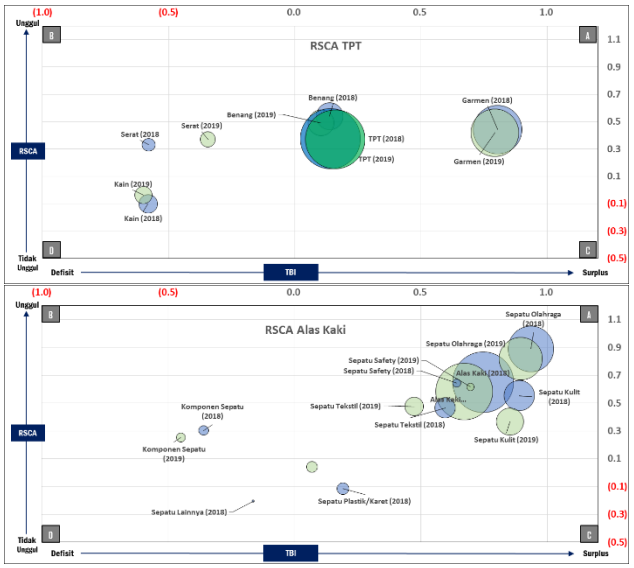

Grafik VII.7. RSCA dan TBI *champion product* TPT (Garmen) dan Alas Kaki (Sepatu Olahraga) pada tahun 2018-2019

Penjualan domestik dan ekspor industri TPT dan alas kaki menurun akibat terdampak oleh COVID-19. Hal ini menyebabkan utilisasi produksi menurun dan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Selain itu, penurunan penjualan juga menyebabkan terganggunya *cashflow* industri. Namun, di tengah COVID-19 sejumlah pelaku industri TPT melakukan inovasi dengan mengalihkan produksinya ke produk APD dan masker dengan permintaan global yang tinggi, didukung tambahan kapasitas yang memadai dan inovasi kebijakan oleh pemerintah, (P1, P2).

Pengembangan industri TPT dan alas kaki perlu diperkuat dengan dukungan ketentuan dan kerjasama perdagangan. Dukungan ketentuan yang perlu dilakukan yaitu melalui penguatan Pemanfaatan PMK *Super Deductible Tax* terkait Vokasi, Padat Karya, dan R&D. Selain itu, dukungan dari sisi ketentuan pengupahan dan *safeguard* kain yang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali, (P2). Dukungan dari sisi kerjasama perdagangan juga diperlukan, antara lain melalui peningkatan pemanfaatan kerjasama perdagangan seperti Indonesia-Chile CEPA, negosiasi Indonesia-EU CEPA yang perlu didorong, dan perluasan kerjasama ke AS maupun pasar non-tradisional yang potensial, (P3).

Lebih lanjut, pengembangan industri prioritas turut didukung oleh pengembangan industri petrokimia sebagai penyedia bahan baku. Integrasi *forward linkage* industri petrokimia terbentuk melalui produk-produk turunannya yang memiliki integrasi yang kuat terhadap industri lainnya terutama ke industri prioritas. Bahan baku pendukung industri otomotif seperti *tyre, parts, dashboard,* dan bagian lainnya serta bahan baku pendukung industri TPT dan alas kaki seperti serat sintetis dan *polyester* diperoleh dari turunan produk olefin dan aromatik. Oleh karena itu, penguatan industri petrokimia sangat penting dalam mendukung penguatan industri prioritas otomotif, TPT, dan alas kaki.

Pengembangan industri petrokimia penting dalam mendorong penguatan *local value chain*. *Trade balance* industri petrokimia saat ini masih defisit, terutama pada produk olefin, aromatik, dan metanol. Selain itu, tren *inward looking policy* akibat ketidakpastian global dan sumber bahan baku impor petrokimia yang masih terkonsentrasi berisiko mengganggu produksi industri manufaktur. Hal tersebut melatarbelakangi pentingnya mendorong pengembangan industri petrokimia, terutama untuk substitusi impor yang dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi di domestik yang saat ini masih memiliki kapasitas produksi yang terbatas dan produksi petrokimia yang ada masih belum memenuhi permintaan. Industri petrokimia merupakan jenis industri yang padat modal, padat teknologi, dan membutuhkan energi yang besar, sehingga untuk mendorong investasi perlu dukungan, baik dari infrastruktur maupun insentif investasi. Berdasarkan PMK No.150/2018, industri petrokimia merupakan salah satu industri dari 18 industri pionir yang telah diberikan insentif berupa *tax holiday*. Meski demikian, masih diperlukan dukungan lain seperti dukungan infrastruktur logistik baik jalan, pelabuhan, kereta api, sumber energi, dan infrastruktur lain, serta implementasi ketentuan yang mendukung iklim investasi, seperti ketentuan penurunan harga gas untuk industri.

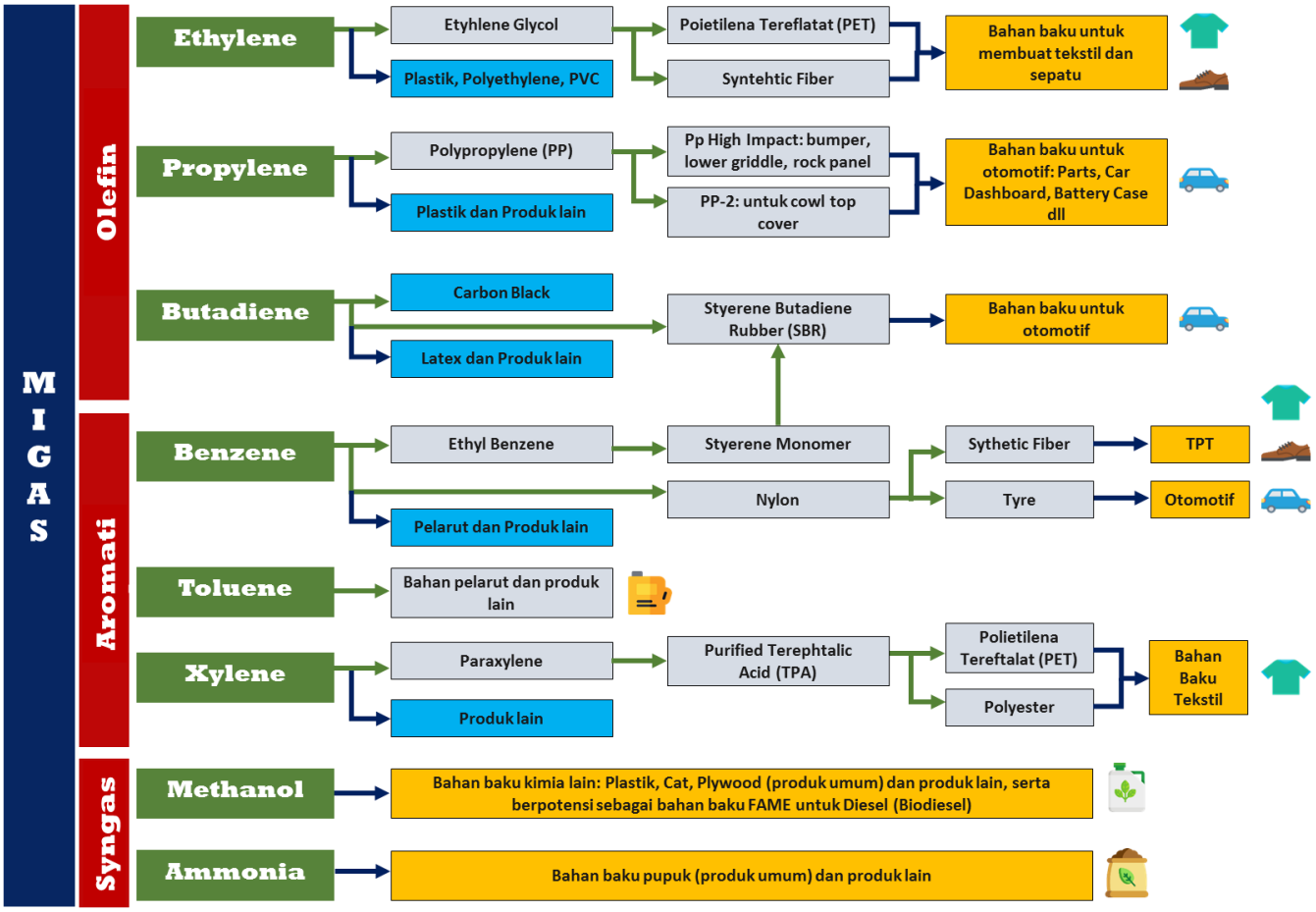

Sumber: Pohon Industri Kementerian Perindustrian, diolah

Gambar VII.5. Integrasi *Forward Linkage* Petrokimia ke Sektor Prioritas

Di masa pandemi COVID-19 terdapat beberapa produk manufaktur yang resilien. Di saat banyak produk mengalami penurunan kinerja, beberapa produk unggulan ekspor masih mencatatkan pertumbuhan positif, bahkan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Produk-produk tersebut menunjukan resiliensi jangka panjang yang baik, terlihat dari rata-rata pertumbuhan yang positif dalam 3 tahun terakhir sehingga dapat dijadikan '*low hanging fruits*' yang dapat dikembangkan.

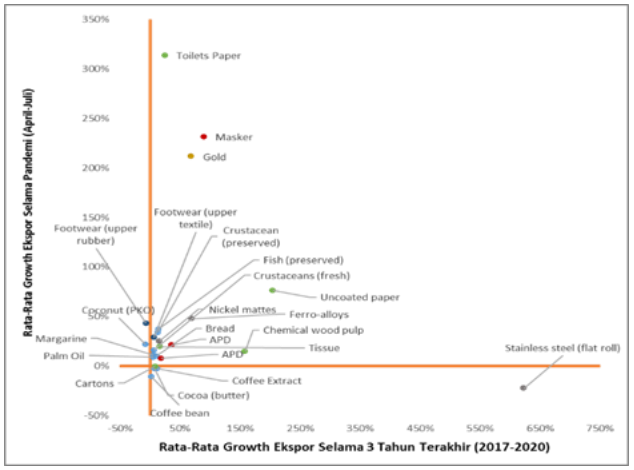

Grafik VII.8. Pemetaan Kinerja Ekspor Selama Pandemi COVID-19 dan Rata-Rata 3 Tahun Terakhir

Salah satu industri yang berpeluang menjadi produk *low hanging fruit* adalah *pulp & paper*. Kinerja *pulp & paper* tetap positif karena memiliki tingkat daya saing yang tinggi, neraca perdagangan surplus, prakiraan kapasitas produksi dan prospek ekspor yang baik didukung *global trend*, dan produk yang mendukung industri prioritas eksisting.

Emas juga berpotensi menjadi komoditas *low hanging fruit*. Emas memiliki tingkat daya saing yang tinggi, neraca perdagangan surplus, dan prospek demand ekspor yang baik di jangka pendek dan menengah, meskipun masih menghadapi kendala terkait pengenaan bea masuk yang tinggi dari India, (P3).

Beberapa produk industri mamin juga telah mampu meningkatkan ekspor. Di satu sisi, mayoritas produk ekspor mamin Indonesia merupakan produk berdaya saing dan memiliki *trade balance* surplus. Selain itu, produk-produk tersebut juga sesuai dengan *demand* mamin global, seperti produk turunan sawit, perikanan, kopi, dan kakao. Ke depan, perlu upaya penguatan di beberapa produk unggulan guna lebih mendorong kinerja ekspor mamin dan meningkatkan nilai tambahnya. Di sisi lain, impor di beberapa komoditas mamin masih dibutuhkan untuk memenuhi bahan baku industri mamin, seperti gula dan garam.

Revisit Two-Pronged Approach Reform Strategy untuk Penguatan Industri Manufaktur

Dari hasil evaluasi, sektor Otomotif, TPT, Alas Kaki dan industri

pendukung lainnya masih relevan untuk menjadi komoditas unggulan nasional. Secara spesifik, pada kelompok industri padat karya dan unggulan daerah yang dapat didorong dalam jangka pendek adalah garmen dan sepatu olahraga. Sementara, komoditas yang dapat didorong dalam jangka menengah panjang adalah makanan minuman (CPO, kakao, dan kopi) dan furnitur.

Pada kelompok industri dasar pendukung dan hilirisasi SDA, selain produk unggulan eksisting seperti Logam *(Cold & Galvanized Rolled* dan *Foundry alloy* untuk otomotif) dan biodiesel, produk lain yang dapat didorong untuk jangka pendek adalah Nikel (*stainless steel*), *Pulp & paper*, dan Emas. Sementara, dalam jangka menengah panjang, komoditas Logam (aluminium, tembaga) dan karet olahan untuk otomotif masih konsisten untuk dikembangkan.

Pada kelompok Industri *medium-high tech*, selain komoditas Otomotif (mobil), hasil asesmen menunjukkan bahwa produk petrokimia khususnya *xylen* dapat didorong sebagai produk unggulan jangka pendek. Sementara, di jangka menengah panjang, komoditas petrokimia lainnya (*ethylene, propylene, methanol*) dan baterai EV menjadi komoditas tambahan selain dua produk eksisting (elektronik untuk otomotif dan *sparepart* otomotif) yang masih layak untuk didorong dalam jangka menengah panjang.

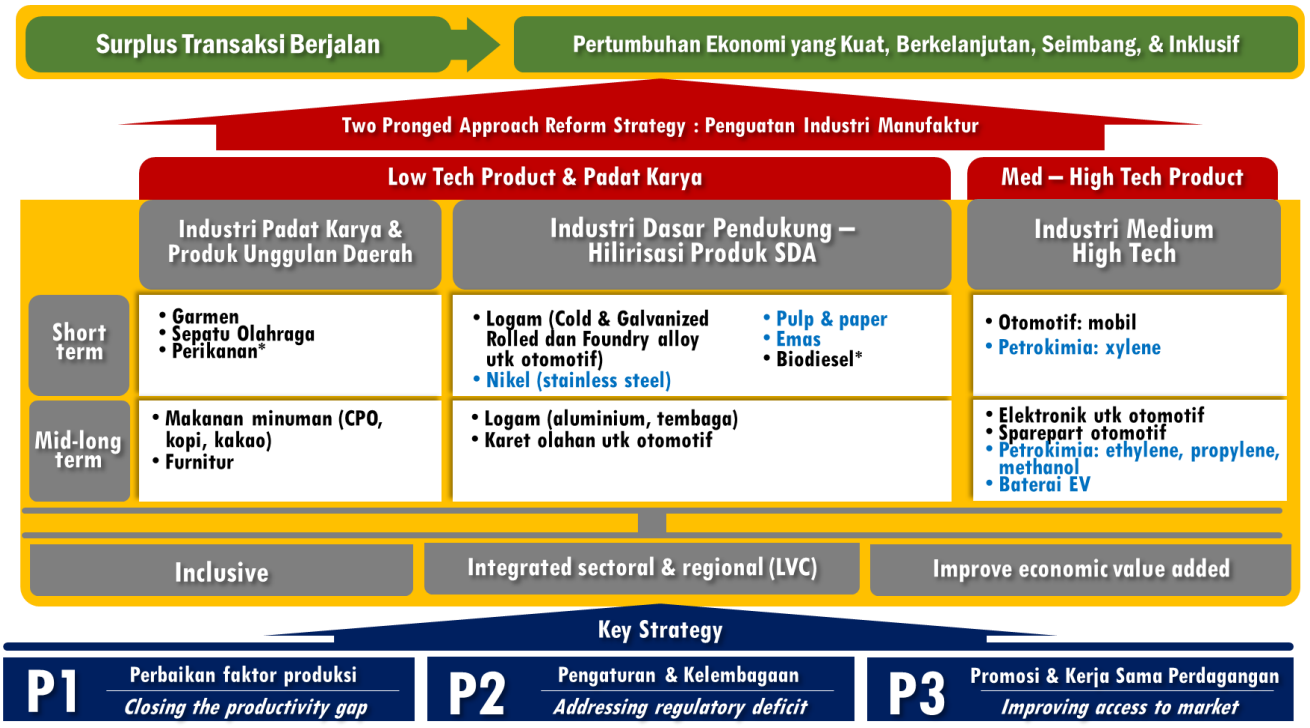

Gambar VII.6. Implementasi Konsep *Two Pronged Approach Reform Strategy* Dalam Penguatan Industri Manufaktur Nasional

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LAMPIRAN

TABEL INDIKATOR EKONOMI MAKRO – PDRB

Indikator Makroekonomi Daerah	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
PDRB (% yoy)												
Sumatera	**4.4**	**4.7**	**4.7**	**4.5**	**4.5**	**4.6**	**4.6**	**4.5**	**4.6**	**4.6**	**3.3**	**(3.0)**
Provinsi Aceh	3.2	5.7	4.1	5.4	4.6	3.9	3.7	3.8	5.2	4.1	3.2	(1.8)
Provinsi Sumatera Utara	4.7	5.3	5.4	5.3	5.2	5.3	5.3	5.1	5.2	5.2	4.7	(2.4)
Provinsi Sumatera Barat	4.7	5.1	5.3	5.5	5.2	4.9	5.0	5.2	5.1	5.1	3.9	(4.9)
Provinsi Riau	2.9	2.4	3.0	1.3	2.4	2.9	2.8	2.7	2.9	2.8	2.2	(3.2)
Provinsi Kepulauan Riau	4.5	4.6	3.7	5.5	4.6	4.8	4.6	4.9	5.2	4.9	2.1	(6.7)
Provinsi Bengkulu	5.1	5.1	5.0	4.8	5.0	5.1	5.0	5.0	4.8	5.0	3.8	(0.5)
Provinsi Jambi	4.6	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.9	4.5	3.6	4.4	1.9	(1.7)
Provinsi Sumatera Selatan	5.9	6.1	6.1	6.1	6.0	5.7	5.8	5.7	5.7	5.7	5.0	(1.4)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.5	4.5	7.1	3.7	4.5	2.8	3.4	3.0	4.0	3.3	1.3	(5.0)
Provinsi Lampung	5.1	5.3	5.2	5.4	5.2	5.2	5.6	5.2	5.1	5.3	1.7	(3.6)
Jawa	**5.7**	**5.7**	**5.7**	**5.8**	**5.7**	**5.7**	**5.6**	**5.5**	**5.3**	**5.5**	**3.4**	**(6.7)**
Provinsi DKI Jakarta	5.9	5.9	6.4	6.4	6.2	6.2	5.5	5.9	6.0	5.9	5.1	(8.2)
Provinsi Jawa Barat	5.8	5.5	5.9	6.0	5.7	5.4	5.7	5.1	4.1	5.1	2.7	(6.0)
Provinsi Banten	5.9	5.6	5.6	5.5	5.8	5.4	5.4	5.4	5.9	5.5	3.2	(7.4)
Provinsi Jawa Tengah	5.4	5.4	5.2	5.3	5.3	5.1	5.5	5.6	5.3	5.4	2.6	(5.9)
Provinsi DI Yogyakarta	5.4	5.9	6.0	7.4	6.2	7.5	6.8	6.0	6.2	6.6	(0.2)	(6.7)
Provinsi Jawa Timur	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	5.5	5.7	5.3	5.5	5.5	3.0	(5.9)
Kalimantan	**3.3**	**3.4**	**3.6**	**5.3**	**3.9**	**5.2**	**5.4**	**5.7**	**3.7**	**5.0**	**2.3**	**(4.4)**
Provinsi Kalimantan Barat	5.0	5.2	4.9	5.1	5.1	5.2	5.1	5.1	4.7	5.0	2.7	(3.4)
Provinsi Kalimantan Tengah	4.5	5.6	6.4	6.1	5.6	6.0	7.5	5.2	6.0	6.2	2.9	(3.2)
Provinsi Kalimantan Selatan	5.0	4.6	5.1	5.8	5.1	4.3	4.2	4.0	3.9	4.1	4.2	(2.6)
Provinsi Kalimantan Timur	1.8	2.0	2.1	4.8	2.7	5.1	5.1	6.3	2.7	4.8	1.3	(5.5)
Provinsi Kalimantan Utara	5.8	5.0	5.6	7.7	6.1	7.2	7.9	6.6	6.0	6.9	5.0	(3.3)
Balinusra	**3.8**	**3.6**	**(0.7)**	**4.4**	**2.7**	**4.6**	**4.8**	**5.3**	**5.5**	**5.1**	**0.9**	**(6.3)**
Provinsi Bali	5.6	6.0	6.1	7.6	6.3	6.0	5.7	5.3	5.5	5.6	(1.1)	(11.0)
Provinsi Nusa Tenggara Barat	0.1	(1.3)	(14.1)	(1.4)	(4.5)	1.7	2.1	6.5	5.7	4.0	3.2	(1.4)
Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.0	5.0	5.1	5.3	5.1	5.3	6.4	3.9	5.3	5.2	2.8	(2.0)
Sulampua	**9.8**	**9.9**	**6.8**	**1.2**	**6.8**	**1.6**	**0.6**	**2.3**	**5.2**	**2.4**	**5.7**	**(1.4)**
Provinsi Sulawesi Selatan	7.3	7.4	7.2	6.4	7.1	6.6	7.4	7.2	6.5	6.9	6.7	(3.9)
Provinsi Sulawesi Barat	5.5	6.8	7.4	5.3	6.2	6.0	5.1	5.2	6.4	5.7	5.7	(0.8)
Provinsi Sulawesi Tenggara	6.1	6.1	7.1	6.2	6.4	6.4	6.3	6.4	6.9	6.5	6.5	(2.4)
Provinsi Sulawesi Tengah	6.6	6.2	7.0	5.3	6.3	6.5	6.3	6.2	9.6	7.2	5.1	(0.1)
Provinsi Gorontalo	6.1	7.4	5.2	7.2	6.5	6.8	6.7	5.7	6.5	6.4	6.3	(0.3)
Provinsi Sulawesi Utara	6.6	5.8	5.6	6.1	6.0	6.6	5.5	5.2	5.5	5.7	6.2	(3.9)
Provinsi Maluku	5.4	5.5	6.4	6.4	5.9	6.3	6.1	5.3	4.7	5.6	5.1	(0.9)
Provinsi Maluku Utara	7.9	7.3	8.2	8.2	7.9	7.7	7.5	4.1	5.4	6.1	5.7	(0.2)
Provinsi Papua	26.7	23.9	6.2	(18.0)	7.4	(18.7)	(23.9)	(15.1)	(3.7)	(15.7)	3.1	4.5
Provinsi Papua Barat	5.9	12.8	6.9	0.1	6.2	(0.2)	(0.5)	2.9	8.3	2.7	4.8	0.5

TABEL INDIKATOR EKONOMI MAKRO – INFLASI

Indikator Makroekonomi Daerah	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Inflasi (% yoy)												
Sumatera	**3.7**	**3.4**	**2.5**	**2.4**	**2.4**	**1.7**	**3.7**	**3.6**	**2.3**	**2.3**	**2.2**	**0.7**
Provinsi Aceh	3.9	3.9	2.3	1.8	1.8	1.8	2.7	2.5	1.7	1.7	3.9	1.4
Provinsi Sumatera Utara	3.9	3.4	1.6	1.2	1.2	1.1	5.9	4.5	2.3	2.3	1.8	(0.1)
Provinsi Sumatera Barat	2.3	3.2	2.7	2.6	2.6	1.9	3.6	3.5	1.7	1.7	2.1	0.2
Provinsi Riau	3.6	3.3	2.5	2.4	2.4	1.3	3.4	4.0	2.4	2.4	2.0	1.1
Provinsi Kepulauan Riau	5.1	4.1	3.2	3.5	3.5	2.7	3.2	2.8	2.0	2.0	1.1	0.2
Provinsi Bengkulu	3.2	3.8	2.9	2.4	2.4	1.6	2.7	3.4	2.9	2.9	2.4	0.9
Provinsi Jambi	4.2	4.2	3.3	3.0	3.0	1.9	2.6	3.1	1.4	1.4	2.6	0.5
Provinsi Sumatera Selatan	3.4	2.9	2.6	2.7	2.7	1.7	2.1	2.7	2.1	2.1	3.2	1.7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.0	2.5	3.5	3.2	3.2	2.7	3.7	4.3	2.6	2.6	1.8	0.2
Provinsi Lampung	3.2	2.8	2.9	2.7	2.7	1.5	2.8	3.6	3.4	3.4	3.2	1.4
Jawa	**3.5**	**3.0**	**3.0**	**3.2**	**3.2**	**2.6**	**3.2**	**3.5**	**3.0**	**3.0**	**3.3**	**2.4**
Provinsi DKI Jakarta	3.2	3.3	2.9	3.3	3.3	3.0	3.5	3.7	3.2	3.2	3.2	2.2
Provinsi Jawa Barat	3.9	3.1	3.2	3.5	3.5	2.4	3.5	3.9	3.2	3.2	3.9	2.8
Provinsi Banten	3.5	3.0	3.4	3.4	3.4	3.0	3.7	3.6	3.3	3.3	2.5	2.5
Provinsi Jawa Tengah	3.4	2.7	2.8	2.8	2.8	1.8	2.5	3.1	2.8	2.8	3.0	2.5
Provinsi DI Yogyakarta	3.3	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	2.0
Provinsi Jawa Timur	3.2	2.7	2.8	2.9	2.9	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.5	2.0
Kalimantan	**2.8**	**2.9**	**3.1**	**3.5**	**3.5**	**3.3**	**3.1**	**2.6**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**1.4**
Provinsi Kalimantan Barat	3.4	3.5	2.9	3.8	3.8	3.5	3.0	3.1	2.4	2.4	2.2	1.9
Provinsi Kalimantan Tengah	2.3	3.1	3.7	4.5	4.5	3.8	2.9	2.3	2.5	2.5	3.2	2.1
Provinsi Kalimantan Selatan	3.0	2.7	2.1	2.6	2.6	3.1	4.0	4.1	4.0	4.0	2.8	1.0
Provinsi Kalimantan Timur	2.6	2.6	3.6	3.2	3.2	3.0	2.7	1.7	1.7	1.7	2.2	1.5
Provinsi Kalimantan Utara	2.2	3.0	2.8	5.0	5.0	4.7	3.1	2.5	1.5	1.5	0.2	(0.3)
Balinusra	**3.0**	**3.2**	**3.2**	**3.1**	**3.1**	**2.1**	**2.4**	**2.4**	**2.0**	**2.0**	**2.5**	**1.4**
Provinsi Bali	3.1	3.5	3.6	3.1	3.1	1.9	2.1	2.5	2.4	2.4	3.0	2.2
Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.3	3.0	3.1	3.2	3.2	2.4	3.4	2.2	1.9	1.9	1.6	(0.2)
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.2	2.9	1.9	3.1	3.1	2.1	1.4	2.1	0.7	0.7	2.2	1.6
Sulampua	**2.8**	**3.1**	**2.9**	**3.6**	**3.6**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**2.3**	**2.3**	**2.2**	**1.5**
Provinsi Sulawesi Selatan	3.7	4.1	3.1	3.5	3.5	3.1	3.0	3.6	2.3	2.3	2.5	2.3
Provinsi Sulawesi Barat	2.6	2.7	2.0	1.8	1.8	1.0	0.5	0.8	1.4	1.4	3.6	3.0
Provinsi Sulawesi Tenggara	2.4	1.8	1.4	2.7	2.7	2.6	3.5	3.7	2.7	2.7	1.0	(0.1)
Provinsi Sulawesi Tengah	2.7	3.6	2.5	6.5	6.5	5.6	5.3	5.7	2.3	2.3	2.8	1.1
Provinsi Gorontalo	2.8	1.9	1.8	2.1	2.1	1.6	3.1	3.4	2.9	2.9	2.7	0.6
Provinsi Sulawesi Utara	1.1	3.5	1.5	3.8	3.8	2.5	5.1	3.6	3.5	3.5	3.0	1.4
Provinsi Maluku	0.9	(0.1)	(0.6)	3.3	3.3	3.7	4.1	5.5	2.1	2.1	1.5	0.6
Provinsi Maluku Utara	3.3	3.9	3.7	4.1	4.1	2.9	1.6	2.6	2.0	2.0	2.1	1.1
Provinsi Papua	3.2	4.1	5.3	6.4	6.4	4.2	2.9	1.9	0.3	0.3	1.2	1.5
Provinsi Papua Barat	1.6	3.4	4.1	5.2	5.2	3.5	2.7	2.7	1.9	1.9	2.4	1.0

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab dan Editor
Aida S. Budiman

Koordinator Penyusun
Endy Dwi Tjahjono
Noor Yudanto

Tim Penulis
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Grup Sektoral dan Regional
Handri Adiwilaga
Nugroho Joko Prastowo
Agung Budilaksono
Tiar Triyana
Maximilian T. Tutuarima
Oki Hermansyah
Nurul Pratiwi A.P.
Ide Mahendra
Bambang Indra Ismaya
Irham Ilmanel Abdinni
Benjamin P. Sitanggang
Siptian Nugrahawan

Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara
Dythia Sendrata
Andree Breitner Makahinda

Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur
Hayatullah Khumeini
Ramdha Dien Azka

Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan
Occhaj Yulid Sriwipadma Raharja
Annisa Elma Nabila

Kantor Perwakilan BI Prov. Bali
Hastomo Ardy
Dea Woro Rinujit

Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan
Arya Jodilistyo
Abu Sufyan

BANK INDONESIA

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

BANK INDONESIA
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Grup Sektoral dan Regional
Ph. 021-2981 8119, 2981 8868
Fax. 021-3452 489, 231 0553

BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 – Indonesia | www.bi.go.id